PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

# RPJMD

Kabupaten Serang



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG

## TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG



# BUPATI SERANG

**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonseia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah provinsi Banten.
3. Daerah adalah Kabupaten Serang.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
6. Gubernur adalah Gubernur Banten.
7. Bupati adalah Bupati Serang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang;
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana . . .

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

(1) Penetapan RPJMD Kabupaten Serang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam Penyusunan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran.
(2) Penetapan RPJMD Kabupaten Serang mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Serang memuat:

a. penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 meliputi:
    a. BAB I PENDAHULUAN

       Memuat uraian tentang latar belakang; dasar hukum; maksud, tujuan dan sasaran; hubungan antar dokumen; serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Serang.

b. BAB II . . .

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat uraian tentang analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Serang dari aspek : geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2021-2026.

d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat uraian permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa mendatang terhadap Kabupaten Serang.

e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Memuat uraian tentang rumusan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan n daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama lima tahun kedepan.

f. BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Memuat uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah, arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu lima tahun.

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat uraian tentang indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Serang selama lima tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

i. BAB IX PENUTUP

Memuat uraian dokumen RPJMD Kabupaten Serang dengan beberapa penjelasan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

(2) Penjelasan . . .

(2) Penjelasan sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang;

(2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :

a. konsistensi antar kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Serang;

b. konsistensi antar RPJMD Kabupaten Serang dengan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;

c. kesesuian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

(3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c. Evaluasi terhadap hasil evaluasi rencana pembangunan daerah.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Serang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Dalam hal perubahan RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD Kabupaten Serang, maka perubahannya ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Kabupaten Serang periode Tahun berikutnya belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 mengacu pada Peraturan daerah ini.

BAB VII .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN : (7, 58/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Serang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Serang untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2021

# KATA PENGANTAR

Bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk dapat bersama sama memberikan kontribusi terbaik, sehingga RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dapat tersusun dengan baik. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 47 disebutkan bahwa RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat; (a) pendahuluan; (b) gambaran umum kondisi Daerah; (c) gambaran keuangan Daerah; (d) permasalahan dan isu srategis Daerah; (e) visi, misi, tujuan dan sasaran; (f) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; (g) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; (h) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan (i) penutup.

Kemudian RPJMD Kabupaten Serang yang telah disusun meliputi dari 9 bab. Dengan penjelasan singkat sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah menguraikan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
3. Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah menguraikan mengenai kinerja keuangan masa lalu (2016-2020), analisis keuangan daerah (2016-2020), dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Kemudian,
4. Bab 4 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah menguraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.
5. Bab 5 VISI, Misi, Tujuan dan Sasaran berisi tentang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih beserta penjabarannya ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

6. Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah menampilkan matriks strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program prioritas pembangunan daerah.
7. Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 dan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Serang.
8. Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah penjabaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terakhir,
9. Bab 9 Penutup.

Kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, terutama kepada Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak. selaku Bupati terpilih periode 2021-2026 dan Bapak Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. selaku Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Semoga kepercayaan yang diberikan dan kerja sama yang sangat baik selama proses penyusunan RPJMD ini dapat tercermin dari semakin lengkapnya dokumen RPJMD ini.

Demikian dokumen RPJMD Kabupaten Serang ini disusun dengan harapan akan menjadi acuan penyusun RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Serang dalam menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 yang nantinya akan diselaraskan sesuai dengan kebijakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

**BUPATI SERANG,**



**Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
DAFTAR TABEL ..... ix
DAFTAR GAMBAR ..... xvii
BAB I PENDAHULUAN ..... I-1
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum ..... I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I-6
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 ..... I-8
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... I-8
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 ..... I-10
1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Serang 2013-2033 ..... I-11
1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Serang 2021-2026 ..... I-12
1.3.6 Ketertarikan Visi & Misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Skala Prioritas Provinsi Banten dan RPJMN 2020-2024 ..... I-15
1.3.7 Keterkaitan Visi & Misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten ..... I-18
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I-22
1.4.1 Maksud ..... I-22
1.4.2 Tujuan ..... I-22
1.5 Sistematika Penulisan ..... I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II-1

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi ..... II-3
2.1.1.3 Kondisi Hidrologi ..... II-4
2.1.1.4 Kondisi Klimatologi ..... II-6
2.1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan ..... II-9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-10
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..... II-12
2.1.4 Posisi Strategis Kabupaten Serang di Wilayah Provinsi Banten ..... II-18
2.1.4.1 Posisi Strategis Kabupaten Serang ..... II-18
2.1.4.2 Arah Pengembangan Kabupaten Serang ..... II-21
2.1.5 Aspek Demografi ..... II-23
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-30
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-30
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... II-30
2.2.1.2 Struktur Ekonomi ..... II-36
2.2.1.3 Inflasi ..... II-39
2.2.1.4 PDRB Per Kapita ..... II-42
2.2.1.5 Indeks Gini ..... II-44
2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin ..... II-45
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-49
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia ..... II-49
2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah ..... II-52
2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah ..... II-54
2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup ..... II-56
2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk ..... II-58
2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... II-59
2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... II-64
2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja ..... II-67
2.2.2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK ..... II-68
2.2.2.10 Persentase PAD terhadap Pendapatan ..... II-69
2.2.2.11 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ..... II-72
2.2.2.12 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif ..... II-73
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II-76

2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II-78
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II-78
2.3.1.1 Pendidikan ..... II-78
2.3.1.2 Kesehatan ..... II-88
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-98
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ..... II-101
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat II-104
2.3.1.6 Sosial ..... II-106
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ..... II-107
2.3.2.1 Tenaga Kerja ..... II-107
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pellindungan Anak ..... II-108
2.3.2.3 Pangan ..... II-109
2.3.2.4 Lingkungan Hidup ..... II-111
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II-113
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II-113
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II-114
2.3.2.8 Perhubungan ..... II-116
2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika ..... II-117
2.3.2.10 Statistik ..... II-118
2.3.2.11 Penanaman Modal ..... II-118
2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... II-122
2.3.2.13 Transmigrasi ..... II-122
2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga ..... II-123
2.3.2.15 Persandian ..... II-124
2.3.2.16 Kebudayaan ..... II-125
2.3.2.17 Perpustakaan ..... II-126
2.3.2.18 Kearsipan ..... II-127
2.3.3 Urusan Pelayanan Pilihan ..... II-128
2.3.3.1 Perikanan ..... II-128
2.3.3.2 Pariwisata ..... II-132
2.3.3.3 Pertanian ..... II-134
2.3.3.4 Kehutanan ..... II-139
2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II-140

2.3.3.6 Perdagangan ..... II-143
2.3.3.7 Perindustrian ..... II-148
2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ..... II-150
2.3.4.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan ..... II-150
2.3.4.2 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan ..... II-152
2.3.4.3 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pembangunan ..... II-156
2.3.4.4 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan ..... II-157
2.3.4.5 Fungsi Penunjang Keuangan ..... II-159
2.3.4.6 Fungsi Penunjang Pengawasan ..... II-160
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II-161
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II-161
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ..... II-161
2.4.1.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan ..... II-165
2.4.1.3 Nilai Tukar Petani ..... II-166
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur ..... II-168
2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ..... II-168
2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum ..... II-173
2.4.2.3 Luas Wilayah Bencana dan Kebanjiran ..... II-173
2.4.2.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran ..... II-174
2.4.2.5 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel ..... II-175
2.4.2.6 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih II-175
2.4.2.7 Rasio Ketersediaan Daya Listrik ..... II-177
2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ..... II-178
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II-178
2.4.3.1 Angka Kriminalitas ..... II-179
2.4.3.2 Lama Proses Perizinan ..... II-182
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ..... II-182
2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja ..... II-183
2.4.4.2 Rasio Ketergantungan ..... II-183
2.4.5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah ..... II-184
2.5 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020 ..... II-190
2.5.1 Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021 ..... II-190

2.5.2 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 ..... II-199
2.5.2.1 SPM Bidang Urusan Pendidikan ..... II-200
2.5.2.2 SPM Bidang Urusan Kesehatan ..... II-200
2.5.2.3 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum ..... II-202
2.5.2.4 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat ..... II-203
2.5.2.5 SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas ..... II-203
2.5.2.6 SPM Bidang Urusan Sosial ..... II-204
2.5.3 Hasil Evaluasi Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020 ..... II-208
BAB III KONDISI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ..... III-1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-2
3.1.1.1 Pendapatan Daerah ..... III-4
3.1.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ..... III-7
3.1.1.3 Belanja Daerah ..... III-8
3.1.1.4 Target dan Realisasi Belanja ..... III-11
3.1.1.5 Pembiayaan Daerah ..... III-13
3.1.2 Neraca Daerah ..... III-15
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III-23
3.2.1 Proporsi Penggunaan Dana ..... III-23
3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... III-24
3.2.2.1 Ruang Fiskal Daerah ..... III-26
3.2.2.2 Kapasitas Fiskal Daerah ..... III-29
3.2.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah ..... III-30
3.3 Kerangka Pendanaan ..... III-32
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah ..... III-32
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2021-2026 ..... III-36
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV-1
4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... IV-23
4.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah ..... IV-65
4.3.1 Isu Strategis Global/Internasional ..... IV-65
4.3.2 Isu Strategis Nasional ..... IV-80
4.3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ..... IV-80

4.3.2.2 Penanganan Pandemi COVID-19 ..... IV-83
4.3.3 Isu Strategis Provinsi Banten ..... IV-86
4.3.4 Penelaahan RPJPD Kabupaten Serang 2005-2025 ..... IV-90
4.3.5 Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 ..... IV-90
4.3.6 Penentuan Isu Strategis ..... IV-94
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... V-1
5.1 VISI ..... V-1
5.2 MISI ..... V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran ..... V-4
5.3.1 Misi 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat ..... V-5
5.3.2 Misi 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional ..... V-7
5.3.3 Misi 3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas ..... V-9
5.3.4 Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan ..... V-12
5.3.5 Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional ..... V-16
5.3.6 Misi 6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara ..... V-19
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VIII-1
BAB IX PENUTUP ..... IX-1

# DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ..... I-16

Tabel 1.2 Keselarasan Visi Misi RPJMD se Provinsi Banten ..... I-19

Tabel 2.1 Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Desa ..... II-2

Tabel 2.2 Luas Wilayah berdasarkan Pembagian Ketinggian Tempat ..... II-3

Tabel 2.3 Daftar DAS dan Sub DAS di Kabupaten Serang ..... II-5

Tabel 2.4 Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan Dengan Menggunakan Cara Mohr (1933) ..... II-6

Tabel 2.5 Rata-Rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-8

Tabel 2.6 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Serang, 2017 ..... II-10

Tabel 2.7 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten, 2015-2019 ..... II-13

Tabel 2.8 Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kecamatan ..... II-18

Tabel 2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 ... II-22

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020 ..... II-25

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Serang, 2020 ..... II-27

Tabel 2.12 Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang (Miliar Rupiah), 2016-2020 ..... II-30

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang ADHK Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020 ..... II-34

Tabel 2.14 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Serang (%), 2016-2020 ..... II-36

Tabel 2.15 Struktur Perekonomian Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%), 2016-2020 ..... II-39

Tabel 2.16 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Serang, 2015-2020 ..... II-46

Tabel 2.17 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-49

Tabel 2.18 Komponen IPM Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2020 .....II-51
Tabel 2.19 Prevalensi Stunting Kabupaten Serang Tahun 2018 sampai 2020 ..II-59
Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Serang, 2017-2020 ..II-61
Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020 ..II-62
Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serang, 2015-2020.II-65
Tabel 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2020 .....II-65
Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serang, 2017-2020.II-66
Tabel 2.25 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Serang, 2017-2020 .....II-67
Tabel 2.26 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2020 .....II-68
Tabel 2.27 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serang, 2016-2020 .....II-68
Tabel 2.28 Opini BPK Kabupaten Serang, 2015-2019.....II-69
Tabel 2.29 Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2015-2020.....II-72
Tabel 2.30 Indikator Capaian Sasaran Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-77
Tabel 2.31 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-81
Tabel 2.32 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang, 2019.....II-82
Tabel 2.33 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020 .....II-84
Tabel 2.34 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-85
Tabel 2.35 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-88
Tabel 2.36 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-90
Tabel 2.37 Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Serang Tahun 2016 sampai 2020 .....II-93
Tabel 2.38 Jumlah Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah tahun 2020 .....II-93
Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang, 2016-2019.....II-96
Tabel 2.40 Jumlah Dokter dan Paramedik di Seluruh Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020 .....II-96

Tabel 2.41 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Berdasarkan Kuartil Pengeluaran, 2019 ..... II-103

Tabel 2.42 Capaian Upaya Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ..... II-105

Tabel 2.43 Peningkatan Kesempatan dan Lapangan Kerja serta Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 ..... II-107

Tabel 2.44 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kcal), 2019 ..... II-110

Tabel 2.45 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (gram), 2019 ..... II-111

Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan Tingkat Pengelolaan RTH, 2016-2020 ..... II-112

Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016-2020 (%) ..... II-113

Tabel 2.48 Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Tahun 2018 ..... II-114

Tabel 2.48a Status Desa di Kabupaten Serang Berdasarkan IDM Tahun 2020 dan 2021 ..... II-114

Tabel 2.49 Jumlah Tempat Pelayanan KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2019 ..... II-115

Tabel 2.50 Capaian Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan ..... II-116

Tabel 2.51 Rasio Ketersediaan Hotspot Internet di Tingkat Kecamatan (%) ..... II-117

Tabel 2.52 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2020 ..... II-122

Tabel 2.53 Capaian Jumlah Calon Transmigran yang siap diberangkatkan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2020 ..... II-122

Tabel 2.54 Capaian Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga dan Prestasi Olahraga ..... II-124

Tabel 2.55 Rata-rata Cakupan SDM, Organisasi, Pelestarian, Kajian, Fasilitasi, Gelar, Misi Dan Tempat Kesenian dan Budaya (%) ..... II-126

Tabel 2.56 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-126

Tabel 2.57 Rasio Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Terhadap Total Jumlah SKPD Yang Ada (%) ..... II-128

Tabel 2.58 Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang 2018 ..... II-129

Tabel 2.59 Produksi dan Nilai Penangkapan Selain Ikan di Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-130

Tabel 2.60 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Serang, 2016-2018 ..... II-133

Tabel 2.61 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-133

Tabel 2.62 Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Utama Padi dan Palawija Padi Ladang di Kabupaten Serang, 2014-2018 ..... II-135

Tabel 2.63 Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, serta Ketahanan Pangan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-137

Tabel 2.64 Jumlah Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Serang, 2017-2018 ..... II-138

Tabel 2.65 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Serang, 2020 ..... II-138

Tabel 2.66 Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Serang, 2019 ..... II-139

Tabel 2.67 Kawasan Hutan yang Ada di Kabupaten Serang, 2019 ..... II-140

Tabel 2.68 Status Kritis Hutan yang Ada di Kabupaten Serang, 2019 ..... II-140

Tabel 2.69 Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Serang, 2014-2017 .. II-141

Tabel 2.70 Jumlah Daya Listrik Terpasang PLN di Kabupaten Serang, 2014-2017 ... II-142

Tabel 2.71 Jumlah Pemakaian Listrik di Kabupaten Serang, 2014-2017 ..... II-142

Tabel 2.72 Jumlah Produksi Bahan Galian pada Perusahaan di Kabupaten Serang, 2014 ..... II-143

Tabel 2.73 Jumlah Ekspor Barang Non Migas menurut Negara Tujuan di Kabupaten Serang, 2014-2015 ..... II-144

Tabel 2.74 Jumlah Ekspor Barang Non Migas menurut Pelabuhan Muat di Kabupaten Serang, 2014-2015 ..... II-147

Tabel 2.75 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pelayanan Pilihan Perdagangan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-148

Tabel 2.76 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Serang, 2014-2018 ..... II-148

Tabel 2.77 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pelayanan Pilihan Perindustrian di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-149

Tabel 2.78 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-152

Tabel 2.79 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-154

Tabel 2.80 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-156

Tabel 2.81 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Serang, 2018 ..... II-157

Tabel 2.82 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-158

Tabel 2.83 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-160

Tabel 2.84 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-161

Tabel 2.85 Rata-rata Konsumsi per Kapita Sehari di Kabupaten Serang, 2015-2019 ..... II-162

Tabel 2.86 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Serang, 2015-2017 ..... II-163

Tabel 2.87 Rata-rata Pengeluaran Non-Makanan per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran ..... II-163

Tabel 2.88 Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Golongan Pengeluaran ..... II-164

Tabel 2.89 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan ..... II-165

Tabel 2.90 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Tahun 2016-2020 ..... II-166

Tabel 2.91 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-169

Tabel 2.92 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-171

Tabel 2.93 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-173

Tabel 2.94 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-174

Tabel 2.95 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Jumlah Restoran di Kabupaten Serang, 2015-2020 ..... II-175

Tabel 2.96 Jumlah Perusahaan Akomodasi menurut Kelas Hotel di Kabupaten Serang, 2015-2018 ..... II-175

Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Serang, 2015-2017 ..... II-176

Tabel 2.98 Jumlah Air yang Disalurkan PDAM Serang, 2015-2017 ..... II-177

Tabel 2.99 Jumlah Daya Listrik PLN Terpasang dan Jumlah Pemakaian Listrik di Kabupaten Serang, 2015-2017 ..... II-178

Tabel 2.100 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Serang, 2015-2017 ..... II-178

Tabel 2.101 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang menurut Kelompok Usia di Kabupaten Serang, 2014-2016 ..... II-179

Tabel 2.102 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang menurut Lama Hukuman di Kabupaten Serang, 2014-2016 ..... II-180

Tabel 2.103 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi terkait Angka Kriminalitas di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-181

Tabel 2.104 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi terkait Demonstrasi di Kabupaten Serang, 2016-2019 ..... II-181

Tabel 2.105 Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2018 ..... II-182

Tabel 2.106 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 ..... II-183

Tabel 2.107 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Serang, 2014-2018 ..... II-184

Tabel 2.108 Evaluasi RPJMD Tahun 2020 ..... II-191

Tabel 2.109 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2020 ..... II-200

Tabel 2.110 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang Tahun 2020 ..... II-201

Tabel 2.111 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Serang Tahun 2020 ..... II-202

Tabel 2.112 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Serang Tahun 2020 ..... II-203

Tabel 2.113 Capaian SPM Bidang Trantibum Linmas di Kabupaten Serang Tahun 2020 ..... II-204

Tabel 2.114 Capaian SPM Bidang urusan Sosial di Kabupaten Serang Tahun 2020 ..... II-205

Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Serang Tahun 2016-2020 (Rp Juta) ..... III-3

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta) ..... III-5

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... III-7

Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah & Transfer/Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta) ..... III-10

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020 .. III-12

Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta) ..... III-14

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020 ..... III-17

Tabel 3.8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Serang 2016-2020 ..... III-21

Tabel 3.9 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Serang 2016-2020 ..... III-24

Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Serang 2016-2020 (Rp juta) ..... III-25

Tabel 3.11 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Serang 2016-2020 (Rp juta) ..... III-25

Tabel 3.12 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020 (Rp juta) ..... III-28

Tabel 3.13 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020 ..... III-31

Tabel 3.14 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang 2021-2026 (Rupiah, juta) ..... III-34

Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ..... III-38

Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Serang pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2020-2026 ..... III-40

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang ..... IV-3

Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Serang ..... IV-28

Tabel 4.3 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* ..... IV-68

Tabel 4.4 Perbandingan Isu Strategis di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota ..... IV-86

Tabel 4.5 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Serang ..... IV-95

Tabel 4.6 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ..... IV-102

Tabel 4.7 Rata-Rata Skor Isu Strategis ..... IV-104

Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 1 ..... V-5

Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 2 ..... V-7

Tabel 5.3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 3 ..... V-9

Tabel 5.4. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 4 ..... V-12

Tabel 5.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 5 ..... V-16

Tabel 5.6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 6 ..... V-19

Tabel 5.7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator dan Target Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ..... V-21

Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ..... VI-2

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ..... VI-25

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 ..... VII-2

Tabel 7.2. Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serang ..... VII-3

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Serang ..... VIII-2

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... VIII-6

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya ..... I-7

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Serang ..... II-1

Gambar 2.2 Jumlah Hari dan Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Serang Periode 2016-2020 ..... II-9

Gambar 2.3 Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten ..... II-14

Gambar 2.4 Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Serang ..... II-15

Gambar 2.5 Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor Kabupaten Serang ..... II-16

Gambar 2.6 Tingkat Kerawanan Tsunami Kabupaten Serang..... ..... II-17

Gambar 2.7 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Serang 2011-2031... ..... II-20

Gambar 2.8 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang 2015-2019..... ..... II-24

Gambar 2.9 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Serang..... ..... II-26

Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Menurut Kelompok Umur (Persen), 2020..... ..... II-29

Gambar 2.11 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang..... ..... II-31

Gambar 2.12 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2016-2020..... ..... II-32

Gambar 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang ADHK dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020..... ..... II-33

Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020..... ..... II-35

Gambar 2.15 Laju Inflasi Kota Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2015-2019..... II-41

Gambar 2.16 Laju Inflasi Bulanan Kota Serang (%), 2016-2020 .....II-42

Gambar 2.17 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang (Ribu Rupiah), 2016-2020..... .....II-43

Gambar 2.18 Indeks Gini Provinsi Banten, 2016-2020.. .....II-45

Gambar 2.19 Perbandingan Garis Miskin Kabupaten Serang dengan Garis Kemiskinan Provinsi Banten (Rp), 2015-2019…… ……..II-47

Gambar 2.20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020…… .....II-48

Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Serang, 2015-2020..... .....II-51

Gambar 2.22 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020.....II-52

Gambar 2.23 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang, 2015-2020.....II-53

Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020..... .....II-54

Gambar 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Serang, 2015-2020..... .....II-55

Gambar 2.26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020..... .....II-56

Gambar 2.27 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Serang, 2015-2020.....II-57

Gambar 2.28 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020.....II-58

Gambar 2.29 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan..... .....II-60

Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di ProvinsiBanten (%), 2020..... .....II-63

Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2016-2020..... .....II-64

Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (%), 2020 ..... II-66

Gambar 2.33 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Serang, 2016-2019 ..... II-70

Gambar 2.34 Struktur PAD Kabupaten Serang dalam Juta Rupiah, 2016-2019 ..... II-71

Gambar 2.35 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-73

Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang, 2015-2019 ..... II-74

Gambar 2.37 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Banten, 2019 ..... II-75

Gambar 2.38 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang Per Pilar, 2015-2019 ..... II-76

Gambar 2.39 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-79

Gambar 2.40 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-80

Gambar 2.41 Rasio Murid per Guru di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-86

Gambar 2.42 Rasio Murid per Sekolah di Kabupaten Serang, 2016-2020 ..... II-87

Gambar 2.43 Perbandingan Regional Capaian Angka Kematian Bayi Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2019 ..... II-89

Gambar 2.44 Perbandingan Regional Capaian Angka Kematian Ibu, Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2019 ..... II-91

Gambar 2.45 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Tingkat Provinsi Banten, 2019 ..... II-92

Gambar 2.46 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk di Provinsi Banten, 2019 ..... II-94

Gambar 2.47 Rasio Puskesmas per Penduduk di Provinsi Banten, 2019.....II-95

Gambar 2.48 Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Serang, 2016- 2020.....II-99

Gambar 2.49 Perkembangan Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Jumlah Kabupaten di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-100

Gambar 2.50 Perkembangan Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Panjang Drainase di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-101

Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/dll, 2019.....II-102

Gambar 2.52 Perkembangan Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan (% Rumah Tangga), 2016-2020.....II-104

Gambar 2.53 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rasio Jumlah PMKS yang Tertangani Terhadap Jumlah PMKS yang Ada (%), 2016-2020.....II-106

Gambar 2.54 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2016-2020.....II-108

Gambar 2.55 Perbandingan Regional Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2018.....II-109

Gambar 2.56 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-112

Gambar 2.57 Nilai Investasi PMA dan Laju Pertumbuhan Investasi PMA, 2016-2020.....II-119

Gambar 2.58 Nilai Investasi PMDN dan Laju Pertumbuhan Investasi PMDN, 2016-2020.....II-120

Gambar 2.59 Indeks Daya Beli, 2016-2019..... .....II-121

Gambar 2.60 Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Serang, 2016-2020.....II-123

Gambar 2.61 Tingkat Konsumsi Ikan, Jumlah Produksi Perikanan, dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Serang, 2016-2019..... .....II-132

Gambar 2.62 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Tahun 2016-2020 .....II-167

Gambar 2.63 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Serang 2016-2020..... .....II-170

Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020..... ....III-8

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020..... .....III-10

Gambar 3.3 Komposisi Belanja Kabupaten Serang, 2016-2020..... .....III-14

Gambar 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020..... .....III-15

Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020..... .....III-34

Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Kabupaten Serang 2016-2020..... .....III-36

Gambar 5.1 Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-1..... .....V-6

Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-1 .....V-6

Gambar 5.3 Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-2 .....V-8

Gambar 5.4 Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-2 .....V-8

Gambar 5.5 Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-3.....V-10

Gambar 5.6 Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-3.....V-11

Gambar 5.7 Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-4 .....V-14

Gambar 5.8 Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-4.....V-15

Gambar 5.9 Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-5.....V-18

Gambar 5.10 Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-5..... V-18

Gambar 5.11 Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-6 ..... V-19

Gambar 5.12 Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi-6 .. V-20

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Euforia pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi telah selesai dan menghasilkan keputusan tetap tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di 270 wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Serang, yang secara resmi telah menetapkan pasangan 'Tatu-Pandji' sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan suara sah sebanyak 429.054 suara[1].

**"Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis**", demikian visi yang diusung oleh pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. Visi ini kemudian dijabarkan dalam enam turunan misi yang menjadi janji politik saat masa kampanye pilkada.

Dalam praktik pemerintahan, program-program yang diusung kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan dituangkan ke berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen inilah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijanjikan kepada masyarakat yang akan dijalankan oleh sistem birokrasi selama dipimpin oleh pasangan terpilih.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

[1] Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Terpilih oleh KPU Kabupaten Serang dapat diakses melalui https://kab-serang.kpu.go.id/komisi-pemilihan-umum-kabupaten-serang-menetapkan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-serang-terpilih-pada-pilkada-tahun-2020/

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Pada Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berikutnya, pada Pasal 263 Undang-Undang tersebut secara jelas mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan KLHS.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Serang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan selama periode 2021-2026. Pelantikan keduanya telah diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Banten Wahidin Halim yang menetapkan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. sebagai Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang Tahun 2021-2026. Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36-264 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Banten.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dokumen RPJMD ini juga disusun dengan berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
b. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. **Pendekatan Politis**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. **Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)* dan Bawah-Atas *(bottom-up)***, pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 meliputi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan RPJMD, Pembahasan

Ranperda RPJMD, Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD dan Penetapan RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Serang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum daerah, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi RPJMD tersebut. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka visi dan misi dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, serta kerangka pendanaan pembangunan dan kaidah pelaksanaannya.

## 1.2 Dasar Hukum

RPJMD Kabupaten Serang periode 2021-2026 disusun berdasarkan berbagai aturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akbibat Penyakit;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya**

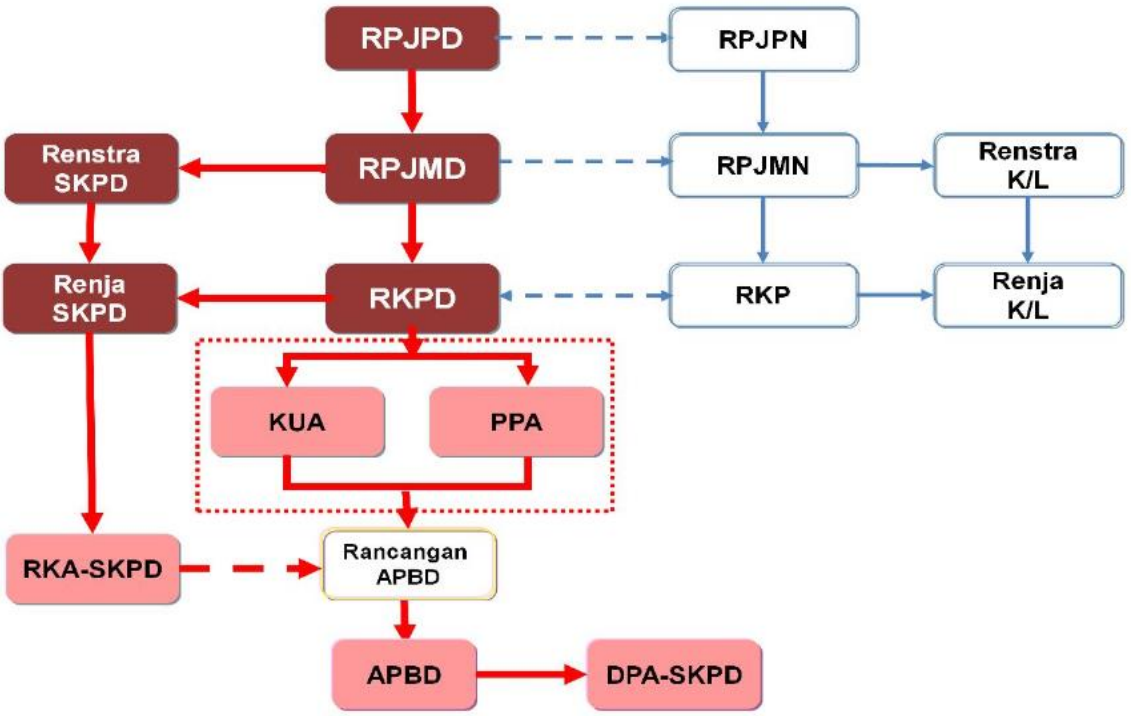


Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
c. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan instrumen yang terpadu dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

### 1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu dua puluh tahun dengan memperhatikan RPJMN, memuat gambaran kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD dan lintas OPD serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Serang.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. dalam RPJPD tersebut, ditetapkan visi "mewujudkan Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis" yang akan dicapai dalam periode dua puluh tahun (2006-2026). Sedangkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Serang pada periode akhir RPJPD ini meliputi:

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.
6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam.
7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal.
8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

### 1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Pemerintah pusat telah merumuskan tujuh agenda pembangunan 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Jawa-Bali di dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan *Gini ratio* mencapai 0,370-0,374. Selanjutnya Provinsi Banten ditargetkan mengalami laju pertumbuhan

ekonomi 5,40–5,80 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,80–3,48 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 8-7 persen.

Selama periode 2020-2024, pembangunan wilayah Jawa-Bali akan mencakup beberapa kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Sesuai RPJMN, pada tahun 2020-2024 pengembangan sektor unggulan proyek prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten antara lain kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Selanjutnya, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3 RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Serang masuk dalam koridor pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali. Selain itu, Kabupaten Serang juga diprioritaskan untuk program perluasan kepemilikan akta kelahiran bersama dua kabupaten lainnya di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

### 1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, hal itu dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022**,** skala prioritas pembangunan Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun (2017-2022) adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

### 1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Serang 2013-2033

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dilakukan penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW diharapkan akan menciptakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Serang.

Sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, struktur ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

a. Rencana sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan dan pusat kegiatan lokal promosi.
b. Rencana sistem perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, pengembangan sistem transportasi pedesaan, pengembangan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
c. Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sumberdaya air, rencana pengelolaan air limbah, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

a. Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi.
b. Rencana Kawasan Budi Daya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan

perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

### 1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Serang 2021-2026

Sesuai dengan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Serang yang telah disusun, beberapa hal yang menjadi simpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 222 indikator, maka kondisi pelaksanaan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:
   a. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebesar sebanyak 43 indikator;
   b. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar sebanyak 32 indikator;
   c. Indikator yang belum tersedia data sebesar sebanyak 147 Indikator.
2. Kabupaten Serang memiliki beberapa catatan terkait Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kerentanan Daerah yaitu:
   a. DDLB Kabupaten Serang secara keseluruhan sebesar 5,59 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman baik. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Serang memiliki daya tampung bangunan yang relatif cukup untuk pengembangan wilayah. Namun dalam pengembangannya, perlu diperhatikan dan dipertimbangan terlebih pada karakteristik wilayahnya seperti pada Kawasan Rawan Bencana maupun Kawasan Konservasi.
   b. Perlu usaha lebih kuat agar indeks daya dukung lahan untuk pangan DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan semakin meningkat.
   c. Berdasarkan perhitungan nilai daya dukung air, Kabupaten Serang berada pada kisaran nilai baik. Namun perhitungan tersebut hanya didasarkan pada kebutuhan air terhadap jumlah penduduk, lahan basah dan lahan kering. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kebutuhan yang belum masuk ke dalam perhitungan.

d. Hasil perhitungan koefisien Daya Dukung Lindung (DDL) Kabupaten Serang termasuk dalam kategori sedang sebesar 0,44.
e. Jasa ekosistem pemurnian air di Kabupaten Serang Sebagian besar berada pada kelas sedang dan rendah.
f. Jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Serang Sebagian besar berada pada kelas sedang dan tinggi.

3. Terdapat 126 isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang yang menjadi sorotan dalam dokumen KLHS. Isu-isu tersebut kemudian disaring dalam pengelompokan isu yang terdiri atas empat pilar utama yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan kelembagaan. Berikut ini 27 isu strategis hasil pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan Kabupaten Serang:
   a. Pilar sosial
      1) Keterbatasan anggaran pembangunan kesehatan, terutama dalam hal penanganan penduduk miskin, promosi kesehatan, penanggulangan gizi buruk, pelayanan kesehatan daerah terpencil dan perbatasan serta pendayagunaan tenaga kesehatan,
      2) Masih tingginya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berisiko terhadap kerentanan sosial dalam menjalani kelangsungan hidup,
      3) Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor di jalan yang berdampak pada bertambahnya titik kepadatan dan kemacetan lalu lintas,
      4) Rehabilitasi, operasi pemeliharaan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan belum optimal.
      5) Akses Masyarakat terhadap Perumahan yang Layak dan Terjangkau
      6) Masih banyak sekolah yang belum mempunyai ruang penunjang lainnya (laboratorium, perpustakaan, dll).
      7) Sarana dan Prasarana Kesenian belum memadai
      8) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan

b. Pilar ekonomi
    1) Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan Penanaman Modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri
    2) Pengembangan infrastruktur kabupaten yang berbasis lingkungan masih minim
    3) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi ASDP dengan rencana pengembangan wilayah
    4) Kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dalam rangka menumbuhkan koperasi-koperasi baru dan menghidupkan koperasi yang tidak aktif agar diperbanyak
    5) Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
    6) Masih tingginya tingkat pengangguran
    7) Belum melaksanakan sistem *Smart Card* dan stiker RFID
    8) Belum optimalnya pelayanan jasa pelabuhan dan penyeberangan antar pulau
    9) Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Serang masih banyak yang rusak berat.
c. Pilar lingkungan
    1) Daya dukung pertanian lahan basah dan kering menurun akibat dampak perubahan iklim dan rusaknya jaringan irigasi
    2) Pencemaran air, udara dan tanah yang diakibatkan oleh pelaku jasa/usaha industri dan Masyarakat
    3) Manajemen bencana termasuk pemetaan dan pendataan daerah rawan bencana serta kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana masih rendah
    4) Revitalisasi sumber daya air di Kabupaten Serang belum optimal
    5) Belum adanya masterplan kebencanaan dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
    6) Ketersediaan dan Kualitas Sanitasi Dasar Lingkungan Permukiman masih rendah
    7) Banyaknya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ANDAL-Lalin

d. Pilar Kelembagaan

1) Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kabupaten Serang yang unggul, nyaman dan sejahtera
2) Belum berfungsinya sistem informasi manajemen pengujian sehingga belum optimalnya pelayanan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan terintegrasi
3) Peningkatan implementasi *e-government* Pemerintah Daerah

### 1.3.6 Keterkaitan Visi & misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Skala Prioritas Provinsi Banten dan RPJMN 2020-2024

Disamping beberapa keterkaitan diatas, perlu juga melihat keterkaitan Visi & Misi RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 dengan Skala Prioritas Provinsi Banten dan RPJMN 2020-2024 sebagai bukti bahwa hubungan antar Visi dan Misi lebih terstruktur dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

| NO | RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Serang 2006-2026) | Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2021- 2026 | Skala Prioritas RPJMD Prov Banten | Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|---|
| *VISI* | *Mewujudkan Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis* | *Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis* | ***Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah*** | *Terwujudnya Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong* |
| 1 | Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional | Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja |
| 2 | Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan | Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas | Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah<br>Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis | Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar |
| 3 | Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional | Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja |
| 4 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat | Peningkatan daya saing sumber daya manusia<br>Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah | Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, |

| NO | RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Serang 2006-2026) | Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2021- 2026 | Skala Prioritas RPJMD Prov Banten | Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional | | memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk |
| 5 | Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan | Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas | Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim |
| 6 | Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam | Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara | Peningkatan daya saing sumber daya manusia | Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik |
| 7 | Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal | Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan | Peningkatan daya saing perekonomian<br>Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi<br>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah |
| 8 | Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat | Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara | Peningkatan daya saing sumber daya manusia | Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik |

### 1.3.7 Keterkaitan Visi & misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Dokumen RPJMD Kabupaten Serang telah menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi banten, untuk mewujudkan keselarasan antar daerah berikut dapat dilihat keterkaitan Visi dan Misi antar Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten sebagai berikut :

**Tabel 1.2**
**Keselarasan Visi Misi RPJMD se Provinsi Banten**

| Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kota Serang | Kabupaten Tangerang | Kabupaten Lebak |
|---|---|---|---|---|
| **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH** | | **TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA** | **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera** | **Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal** |
| 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) | Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional | MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. | 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. |
| 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; | Misi 3: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas | MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN | Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah | 3.Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah; |
| | | | | 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan |

| Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kota Serang | Kabupaten Tangerang | Kabupaten Lebak |
|---|---|---|---|---|
| 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas; | Misi 1: Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat | MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN | Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. | 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; |
| | Misi 6 :Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara | | MIsi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius | |
| 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; | Misi 2: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional | MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN | Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. | 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; |

| Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kota Serang | Kabupaten Tangerang | Kabupaten Lebak |
|---|---|---|---|---|
| 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. | Misi 4: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan | MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING | Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan | 2. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata; |
| | | | MIsi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya | |

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) untuk membuat kebijakan pembangunan selama lima tahun yang dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam waktu lima tahun ke depan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dan perencanaan penganggarannya.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.
5. Memberikan tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2021-2026.

**BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa mendatang terhadap Kabupaten Serang.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama lima tahun kedepan.

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu lima tahun.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menguraikan indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Serang selama lima tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

**BAB IX PENUTUP**

Bab ini menutup dokumen RPJMD Kabupaten Serang dengan beberapa penjelasan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

# BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### *2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi*

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Lokasi Kabupaten Serang cukup strategis karena dilalui jalan tol Jakarta - Merak yang merupakan akses utama menuju pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan Merak. Selain sebagai transit pelabuhan perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pelabuhan Merak juga merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara. Secara geografis Kabupaten Serang terletak pada koordinat $5^0$ 50' - $6^0$ 21' Lintang Selatan dan $105^0$ 0' - $106^0$ 22' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Serang yaitu seluas 1,467,35 $km^2$.

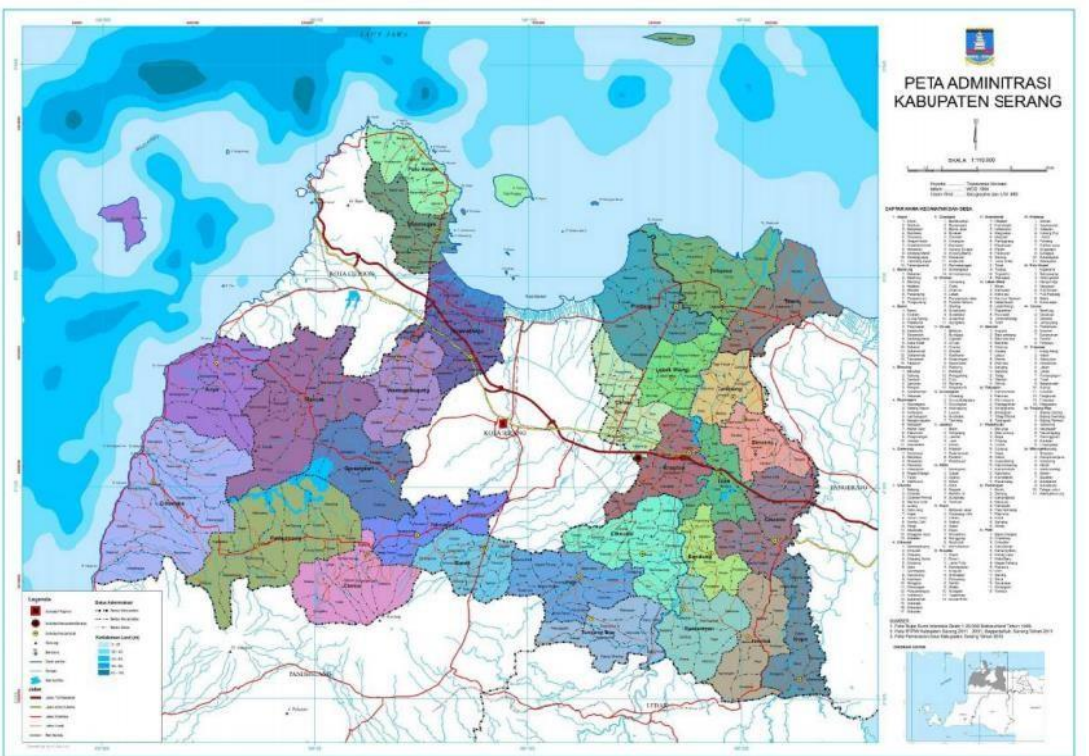


**Gambar 2.1 Wilayah Administasi Kabupaten Serang**
*Sumber: LPPD Kabupaten Serang, 2011-2031*

Sedangkan secara administratif Kabupaten Serang berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Kota Cilegon dan Kota Serang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda.

**Tabel 2.1 Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Desa**

| No | Kecamatan | Ibukota | Luas | | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Km² | % | |
| 1. | Anyar | Anyar | 56,81 | 3,87 | 12 |
| 2. | Bandung | Bandung | 25,18 | 1,72 | 8 |
| 3. | Baros | Baros | 44,07 | 3,00 | 14 |
| 4. | Binuang | Binuang | 26,17 | 1,78 | 7 |
| 5. | Bojonegara | Bojonegara | 30,30 | 2,06 | 11 |
| 6. | Carenang | Panenjoan | 32,80 | 2,24 | 8 |
| 7. | Cikande | Cikande | 50,53 | 3,44 | 13 |
| 8. | Cikeusal | Cikeusal | 88,25 | 6,01 | 17 |
| 9. | Cinangka | Cinangka | 111,47 | 7,60 | 14 |
| 10. | Ciomas | Sukadana | 48,53 | 3,31 | 11 |
| 11. | Ciruas | Citerep | 34,49 | 2,35 | 15 |
| 12. | Gunungsari | Gunungsari | 48,60 | 3,31 | 7 |
| 13. | Jawilan | Majasari | 38,95 | 2,65 | 9 |
| 14. | Kibin | Ciagel | 33,51 | 2,28 | 9 |
| 15. | Kragilan | Kragilan | 36,33 | 2,48 | 12 |
| 16. | Kramatwatu | Kramatwatu | 48,59 | 3,31 | 15 |
| 17. | Kopo | Kopo | 44,69 | 3,05 | 10 |
| 18. | Lebak Wangi | Lebak Wangi | 31,71 | 2,16 | 10 |
| 19. | Mancak | Labuan | 74,03 | 5,05 | 14 |
| 20. | Pabuaran | Pasanggrahan | 79,14 | 5,39 | 8 |
| 21. | Padarincang | Padarincang | 99,12 | 6,76 | 14 |
| 22. | Pamarayan | Pamarayan | 41,92 | 2,86 | 10 |
| 23. | Petir | Mekar Baru | 46,94 | 3,20 | 15 |
| 24. | Pontang | Pontang | 58,09 | 3,96 | 11 |
| 25. | Pulo Ampel | Sumuranja | 32,56 | 2,22 | 9 |
| 26. | Tanara | Cerucuk | 49,30 | 3,36 | 9 |
| 27. | Tirtayasa | Tirtayasa | 64,46 | 4,39 | 14 |
| 28. | Tunjung Teja | Tunjung Teja | 39,52 | 2,69 | 9 |
| 29. | Waringinkurung | Waringinkurung | 51,29 | 3,50 | 11 |
| **KABUPATEN SERANG** | | | 1.467,35 | 100,00 | 326 |

*Sumber: BPS Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020*

Kabupaten Serang membawahi 29 Kecamatan yang terdiri dari 326 Desa. Kecamatan Cinangka merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 111,47 $km^2$ atau sebesar 7,60 persen dari total wilayah Kabupaten Serang. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bandung dengan luas 25,18 $km^3$ atau sebesar 1,72 persen dari total wilayah Kabupaten Serang. Jika dilihat dari jumlah desanya, Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Cikeusal yang membawahi 17 desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecatam Binuang dan Kecamatan Gunungsari yaitu masing-masing membawahi 7 desa. Selain itu, di Kabupaten Serang juga terdapat beberapa pulau yang terletak di wilayah perairan, yakni tercatat sebanyak 17 pulau,

### *2.1.1.2 Kondisi Topografi*

Wilayah Kabupaten Serang secara topografi meliputi dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl, sementara dataran tinggi berupa rangkaian pegunungan yang terdapat di perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Secara umum lebih dari 97,5 persen wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian rata-rata 25,66 mdpl. Ketinggian 0 mdpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat Selat Sunda, sedangkan ketinggian 1778 mdpl terdapat di kaki Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Berikut tabel luas wilayah berdasarkan pembagian ketinggian tempat yang terbagi menjadi 6 (enam) kelompok:

**Tabel 2.2 Luas Wilayah berdasarkan Pembagian Ketinggian Tempat**

| Ketinggian Tempat (mdpl) | Luas | |
|---|---|---|
| | Ha | % |
| 0 - 3 | 14.437 | 9,56 |
| 3 - 25 | 51.692 | 34,22 |
| 25 - 100 | 51.101 | 33,83 |
| 100 - 500 | 31.191 | 20,65 |
| 500 - 1000 | 2.060 | 1,36 |
| >1000 | 590 | 0,39 |

*Sumber: RKPD Kabupaten Serang, 2019*

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Serang tahun 2019, satuan dataran rendah di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

#### *2.1.1.3 Kondisi Hidrologi*

Kondisi Hidrologi di Kabupaten Serang dapat digambarkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dimiliki. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang berada di Kabupaten Serang relatif sempit yaitu lebar sungai kurang dari 50 m dan panjangnya kurang dari 100 Km. Selain DAS dan SWS, terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai) yang merupakan pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Serang tahun 2019, SWS yang terdapat di Kabupaten Serang yaitu Ciujung-Ciliman, terdiri atas DAS Cidurian, Ciujung, Cibanten, dan Cidanau. DAS tersebut terdiri dari subsub DAS. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat Selat Sunda. Sebelah selatan terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yang pada umumnya mengalir ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.

Jika ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35 perssen) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Sekitar 25 persen dari 35 persen hilir tata air permukaan tersebut, merupakan daerah perbukitan

sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (peneplainisasi), dan 10 persen berupa dataran pesisir. Sekitar 50 persen dari aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung, merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14 persen merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1 persen).

**Tabel 2.3 Daftar DAS dan Sub DAS di Kabupaten Serang**

| No. | Nama DAS | Sub DAS | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1. | **Cidurian** | | **184.658,00** |
| | | Cidurian Hulu | 37.194,00 |
| | | Cibeureum | 28.391,00 |
| | | Cidurian Hilir | 35.542,00 |
| | | Cimanceuri Hulu | 40.501,00 |
| | | Cirarab | 33.795,00 |
| | | Cimanceuri Hilir | 9.235,00 |
| 2. | **Ciujung** | | **279.839,00** |
| | | Ciujung Hulu (a) | 21.247,00 |
| | | Ciujung Hulu (b) | 136.879,20 |
| | | Ciujung Tengah | 23.444,80 |
| | | Ciujung Hilir | 40.221,00 |
| | | Ciujung Kulon (Cikeuruh) | 58.047,00 |
| 3. | **Cibanten** | | **80.170,00** |
| | | Cibanten Atas | 21.580,00 |
| 4. | **Cidanau** | | **22.620,00** |
| | | Cikakalumpay | 7.831,00 |
| | | Cisaat | 4.900,00 |
| | | Cisawarna | 4.579,00 |
| | | Cibojong | 2.960,00 |
| | | Cihoreang | 1.040,00 |
| | | Cicangkadan | 1.310,00 |

*Sumber: RKPD Kabupaten Serang, 2019*

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk

keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang. Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Steel sebagai sumber air baku yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung. Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk *spring belt* pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering. Selain itu, Kabupaten Serang juga memilki rawa, situ, dan waduk. Waduk terluas dengan volume air terbesar adalah Waduk Ciujung Lama yaitu dengan luas 60 Ha, dengan volume air 1,3 juta $m^3$. Sedangkan luas waduk, rawa dan situ lainnya kurang dari 30 Ha.

#### *2.1.1.4 Kondisi Klimatologi*

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan wilayah Indonesia, Kabupaten Serang termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

**Tabel 2.4 Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan Dengan Menggunakan Cara Mohr (1933)**

| Tipe Iklim | Daerah Penyebaran (Kecamatan) |
|---|---|
| B1 | Padarincang |
| C2 | Cinangka, Kopo |
| C3 | Cikeusal |
| D1 | Ciomas |
| D2 | Pabuaran, Pamarayan |
| D3 | Kragilan, Petir, Anyer |

| Tipe Iklim | Daerah Penyebaran (Kecamatan) |
|---|---|
| E2 | Waringin Kurung, Mancak |
| E3 | Baros, Ciruas, Tirtayasa |

*Sumber: RKPD Kabupaten Serang, 2019*

Sedangkan menurut klasifikasi Koppen di dalam dokumen RKPD tahun 2019, iklim Kabupaten Serang terdiri dari beberapa klasifikasi, belahan utara Serang beriklim Monsun Tropis (Ama), belahan selatan Serang umumnya beriklim Hutan Hujan Tropis (Afa) dan sebagian beriklim Subtropis (Cfa). Dengan demikian belahan utara Serang mempunyai bulan kering selama satu bulan atau lebih dalam setahun. Bagian selatan Serang umumnya tidak mempunyai bulan yang dapat dipastikan sebagai bulan kering. Pada bagian yang beriklim Cfa mempunyai karakteristik hujan yang serupa dengan daerah bagian selatan Serang. Suhu terendah di Kabupaten Serang pada tahun 2014 terjadi pada bulan Agustus, dimana suhunya sebesar 22,2 ˚C dan suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober dimana suhunya tertingginya adalah sebesar 34,1. Dengan kisara suhu antara 23,6˚C – 32,2˚C dan kelembapan relatif sebesar 81 persen.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Serang, selama tahun 2014-2018 jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2016 yaitu sebanyak 242 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit di tahun 2015 yaitu 147 hari. Jika dilihat dari rata-rata curah hujannya selama tahun 2014-2018, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di tahun 2017, sedangkan terendah di tahun 2016. Pada tahun 2018 terdapat 185 hari hujan dengan volume curah hujan sebesar 7,56 mm. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu 17.90 mm dengan hari hujan sebanyak 11 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan September sebesar 3,00 mm dengan hari hujan sebanyak 1 hari dan 10 hari. Rata-rata curah hujan tahun 2018 mencapai 7.56 mm/bulan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan hari dan curah hujan yaitu untuk jumlah hari hujan sebesar 125 hari dan rerata curah hujan mencapai 3,44 mm/bulan. Sempat terjadi penurunan curah hujan pada tahun 2019, tahun 2020 untuk jumlah hari hujan meningkat menjadi 159 hari dan rerata curah hujan mencapai 3,45 mm/bulan.

**Tabel 2.5 Rata-Rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun/Bulan | Jumlah Hari Hujan | Rata-rata Curah Hujan (mm) |
|---|---|---|
| Tahun | | |
| **2016** | 242 | 7,38 |
| **2017** | 202 | 8,19 |
| **2018** | 185 | 7,56 |
| **2019** | 125 | 3,44 |
| Bulan (tahun 2020) | | |
| **Januari** | 25 | 13,30 |
| **Februari** | 22 | 8,20 |
| **Maret** | 25 | 8,17 |
| **April** | 22 | 6,85 |
| **Mei** | 15 | 6,83 |
| **Juni** | 6 | 1,70 |
| **Juli** | 4 | 14,40 |
| **Agustus** | 4 | 0,25 |
| **September** | 0 | - |
| **Oktober** | 3 | 3,67 |
| **November** | 11 | 6,85 |
| **Desember** | 19 | 9,48 |

*Sumber: BMKG dalam BPS Kabupaten Serang, 2017-2021*

Gambar 2.2 Menjelaskan grafik jumlah hari dan rata-rata curah hujan yang ada di Kabupaten Serang pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah hari hujan dalam kurun waktu tersebut mengalami rerata penurunan yaitu sebesar -9,97 persen per tahun. Sama halnya dengan rerata curah hujan yang mengalami rerata penurunan pertumbuhan sebesar -17,31 persen per tahun, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020, namun tidak signifikan.

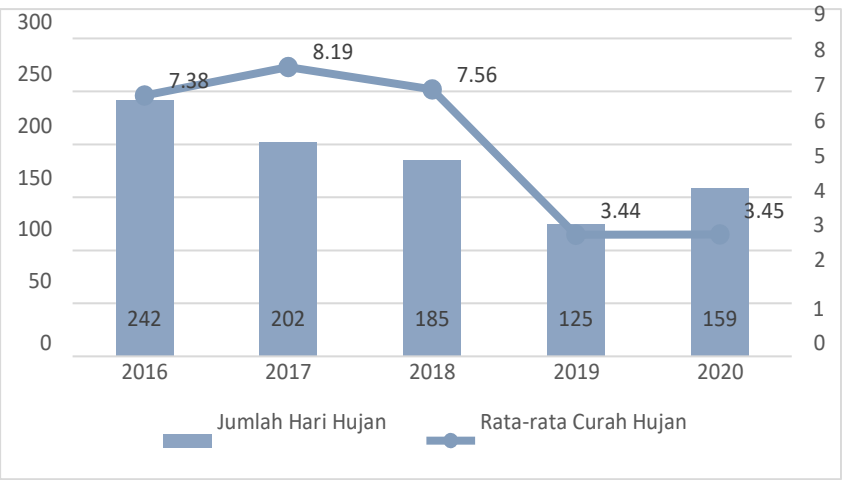


Gambar 2.2 Jumlah Hari dan Rata-rata Curah Hujan Kabupaten Serang Periode 2016-2020
*Sumber: BMKG dalam BPS Kabupaten Serang, Hasil Olahan 2021*

### *2.1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan*

Secara umum penggunaan lahan Kabupaten Serang pada tahun 2017 didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, dan perikanan dimana penggunaan lahannya hampir mencapai tiga perempat dari luas wiayah keseluruhan Kabupaten Serang. Berdasarkan data Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2019. persentase penggunaan lahan terbesar didominasi oleh areal persawahan yaitu mencapai 40,28 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015 persentase luas lahan menurun sebesar 0,86 persen dari semula mencapai 41,14 persen. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya yaitu lahan kebun campuran yaitu *mixed use* antara hutan dan kebun yang mencapai 22, 64 persen. Berbeda dengan lahan persawahan yang luas lahannya menurun, areal lahan kebun campuran mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu naik sebesar 0,14 persen dari sebelumnya mencapai 22,50 persen. Penggunaan lahan terbesar ketiga yaitu lahan yang digunakan untuk perkampungan. Luas lahan yang digunakan sebesar 8,49 persen atau sebesar 12.441,06 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 lahan perkampungan sedikit mengalami penurunan yakni sebesar 0,04 persen. Sedangkan penggunaan lahan lainnya dibawah tujuh persen.

**Tabel 2.6 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Serang, 2017**

| Penggunaan | Luas Lahan (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| **Bandar Udara** | 38,10 | 0,03 |
| **Emplasemen** | 0 | 0 |
| **Hutan Belukar** | 9.190,43 | 6,27 |
| **Hutan Rawa** | 375,49 | 0,26 |
| **Industri** | 2.277,33 | 1,55 |
| **Kebun Campuran** | 33.154,26 | 22,64 |
| **Ladang/Tegalan** | 7.599,74 | 5,19 |
| **Padang Rumput** | 2.796,93 | 1,91 |
| **Perkampungan** | 12.441,06 | 8,49 |
| **Perkebunan Besar** | 397,92 | 0,27 |
| **Perumahan** | 569,46 | 0,39 |
| **Rawa** | 1.477,52 | 1,01 |
| **Sawah** | 59.001,02 | 40,28 |
| **Semak Belukar** | 6.615,07 | 4,52 |
| **Sungai/Danau/Telaga** | 1.254,13 | 0,86 |
| **Tambak** | 7.331,71 | 5,01 |
| **Tanah Kosong** | 1.937,76 | 1,32 |
| Jumlah | **146.457,94** | **100,00** |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2019*

Selain lahan kebun campuran, terdapat beberapa penggunaan lahan yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan penggunaan lahan yakni pada lahan industri sebesar 395,94 ha, padang rumput sebesar 825,69 ha, semak belukar 219,55 ha, sungai/danau/telaga sebesar 93,53 ha, dan tanah kosong seluas 1.226,29 ha. Walaupun penggunaan lahan industri meningkat namun peningkatan semak belukar, padang rumput, dan tanah kosong yang lebih tinggi mengindikasikan semakin tingginya lahan yang tidak produktif di Kabupaten Serang.

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PKL dan pusat- pusat lainnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabuoaten Serang meliputi:

a. Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;

b. Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros;
c. Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan; dan
d. Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.

Sedangkan pusat-pusat lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang tersebar diseluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Serang.

Selain itu Kabupaten Serang juga melakukan perencanaan mengenai sistem jaringan transportasi kereta api yang meliputi: (a) pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan (b) pengembangan stasiun kereta api berupa stasiun yang melayani angkutan penumpang dan/atau barang. Rencana pengembangan stasiun penumpang terdiri dari:

a. Stasiun Catang di Kecamatan Tunjungteja;
b. Stasiun Jambu Baru di Kecamatan Tunjungteja;
c. Stasiun Anyar Kidul di Kecamatan Anyar; dan
d. Stasiun Tonjong Baru di Kecamatan Kramatwatu.

Secara umum pentaan ruang wilayah Kabupaten Serang sebagai berikut:

a. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global;
b. Pengembangan pertanian pendukung yang berkelanjutan sebagai pengembangan perekonomian kabupaten;
c. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal;
d. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
e. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;

f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
h. Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
i. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
j. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan; dan
k. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2015-2019 yang disusun oleh BNPB, Kabupaten Serang masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ditinjau dari konteks regional Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada pada peringkat 3 (tiga) dari 8 (delapan) kabupaten/kota dengan adanya potensi bencana yang ada. Walaupun demikian, seluruh kab/kota di Provinsi Banten masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Serang meliputi:

a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi;
b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
c. Bencana Tsunami dengan tingkat risiko tinggi,
d. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi,
e. Benana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang,
f. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat risiko tinggi, dan

g. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi; dan

h. Bencana cuaca ekstrim dengan tingkat risiko tinggi.

**Tabel 2.7 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten 2015-2019**

| No | Kab/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kelas Risiko 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandenglang | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | Tinggi |
| 2 | Lebak | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | Tinggi |
| 3 | Serang | 203,20 | 203,30 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | Tinggi |
| 4 | Tangerang | 200,80 | 200,80 | 185,63 | 185,63 | 163,31 | Tinggi |
| 5 | Kota Serang | 184,80 | 184,80 | 184.80 | 168,56 | 168,55 | Tinggi |
| 6 | Kota Cilegon | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 164,32 | 147,74 | Tinggi |
| 7 | Kota Tangerang | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | Tinggi |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | Tinggi |

*Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2015-2019*

Jika dihimpun berdasarkan indeks risiko bencana yang ada di Provinsi Banten, terlihat bahwa seluruh kabupaten memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Tingginya indeks risiko bencan tersebut menyebabkan diperlukan adanya penananganan khusus mengenai kebencanaan dan juga khususnya tentang mitigasi bencana. Berikut merupakan gambar 2.3, Yang menunjukkan risio bencana di tingkat provinsi.

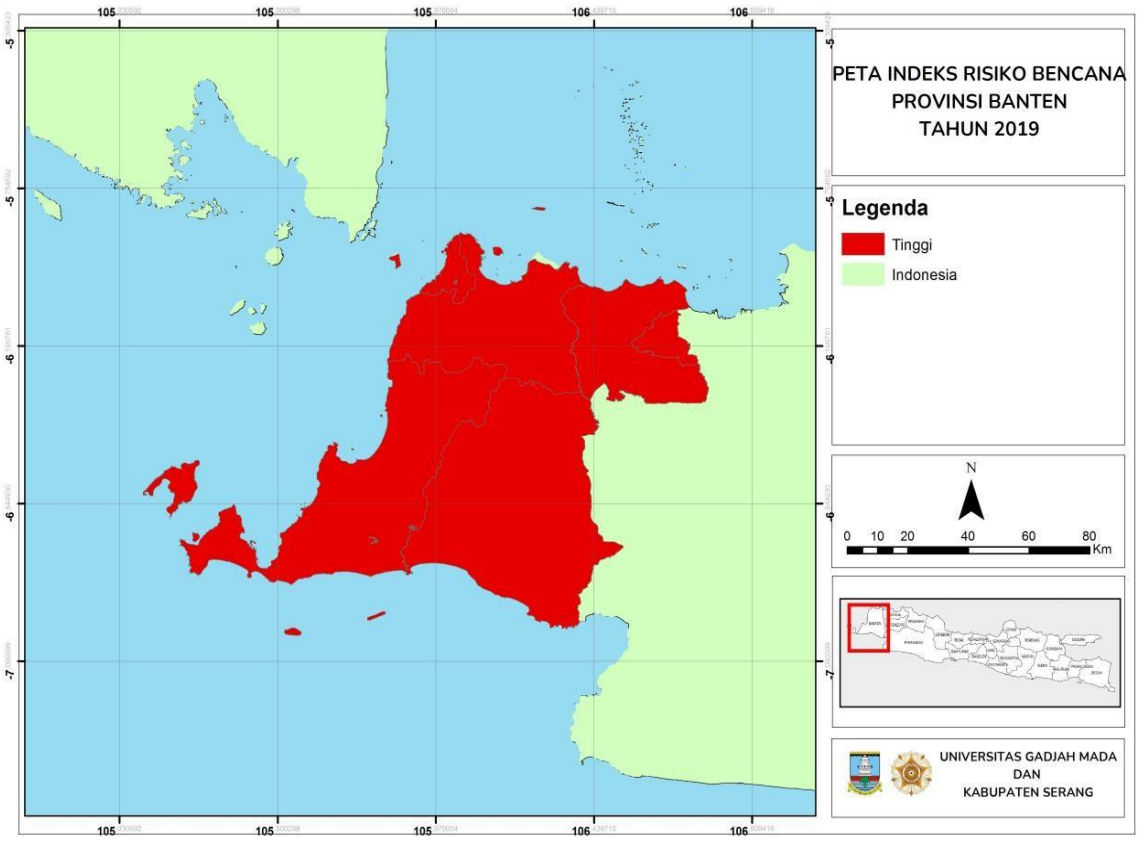


Gambar 2.3 Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten

*Sumber: BNPB Indonesia, Hasil Olahan 2021*

Sedangkan kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah dikategorikan mempunyai potensi terjadinya bencana. Beberapa wilayah di Kabupaten Serang berdasarkan RKPD 2019 yang berpotensi terkena bencana yaitu sebagai berikut:

a. Banjir

   Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang, Beberapa kecamatan yang juga terkena banjir antara lain: Kecamatan Cikande, Kecamatan Carenang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Pamarayan dan Kecamatan Petir. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan sungai

sehingga menyebabkan sumbatan yang terjadi di wilayah muara Sungai Ciujung. Sedangkan berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Serang, kecamatan yang ada pada daftar tertinggi memiliki potensi kerawanan terhadap banjir atau genangan adalah Kecamatan Tirtayasa (94,66 persen), Kecamatan Tanara (93,78 persen), Kecamatan Lebak Wangi (61,14 persen), dan Kecamatan Pamaarayan (58,23 persen).

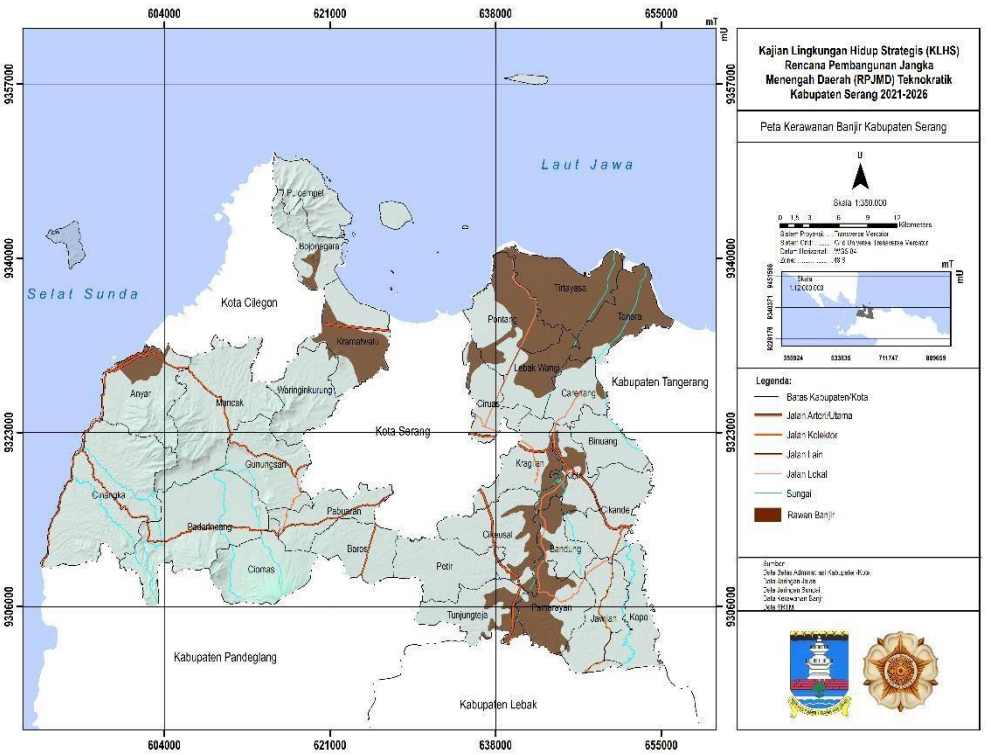


Gambar 2.4 Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Serang

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2020*

Berdasarkan peta tingkat kerawanan banjir pada gambar 2.4 Di atas, terlihat bahwa daerah yang berada di hilir atau dataran rendah merupakan daerah yang rawan banjir (berwarna coklat), karena adanya aliran air dari bagian hulu saat terjadi hujan dan juga hujan yang ada pada daerah rawan banjir tersebut. Hasil tersebut merupakan kajian dari KLHS RPJMD dengan cara *overlay* data mengenai curah hujan dan ketinggian daerah. Perlunya penanganan mengenai manajemen air pada daerah tersebut agar mengurangi genangan yang bertahan lebih dari 2 jam.

b. Gunung Api

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada diwilayah pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka. Selain itu terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar Gunung Karang di wilayah Serang bagian Selatan. Walaupun pada dasarnya Gunung Karang sudah tidak aktif namun kawasan disekitar lereng gunung tersebut tetap merupakan kawasan yang rawan bencana.

c. Tanah Longsor

Kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Serang yang sangat bervariatif dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah perbukitan memiliki potensi adanya bencana tanah longsor. Wilayah yang rawan terkena bencana tanah longsor ini biasanya dikawasan perbukitan atau lereng perbukitan. Beberapa kawasan yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan Gunung Karang yang meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. Selain itu juga dibeberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Waringin Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel.

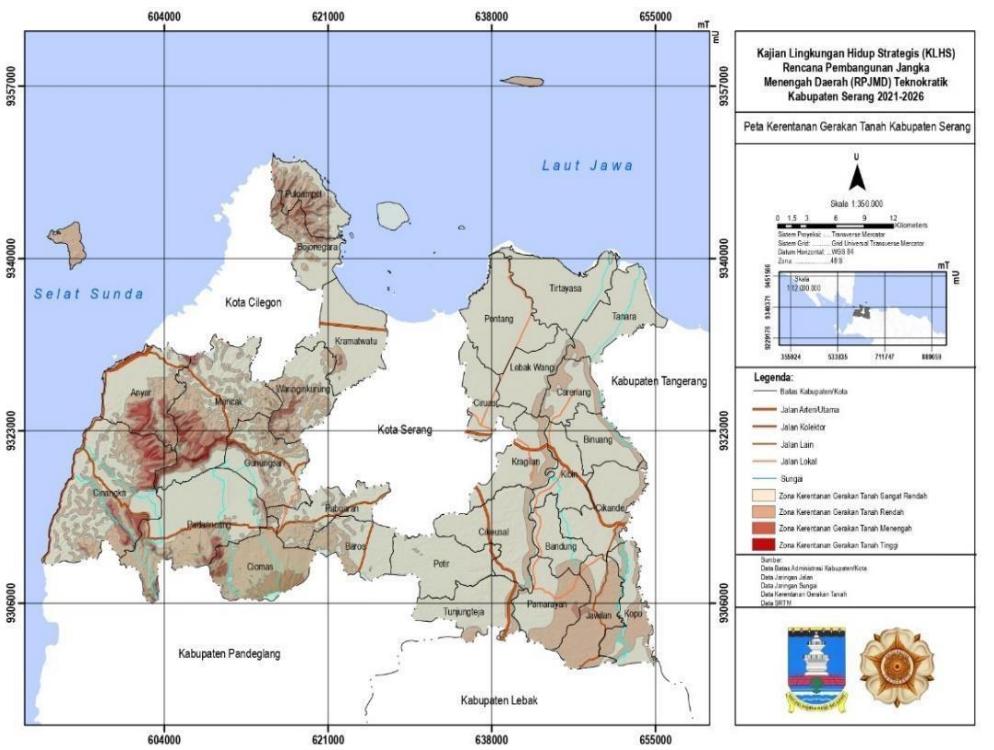


Gambar 2.5 Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor Kabupaten Serang

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2020*

Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan gerakan tanah/longsor tertinggi berdasarkan hasil klasifikasi KLHS RPJMD yaitu pada Kecamatan Puloampel, Mancak, Baros, dan Ciomas. Persebaran tersebut dapat dilihat pada gambar peta 2.5 Di atas. Warna merah tua menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kerawanan gerakan tanah/longsor yang tinggi.

d. Gempa Bumi

Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gunung Anak Krakatau) maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama adalah wilayah Pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan Pesisir Selat Sunda).

e. Tsunami

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah di kawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi karena terletak pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung Anak Krakatau. Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat kerawanannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

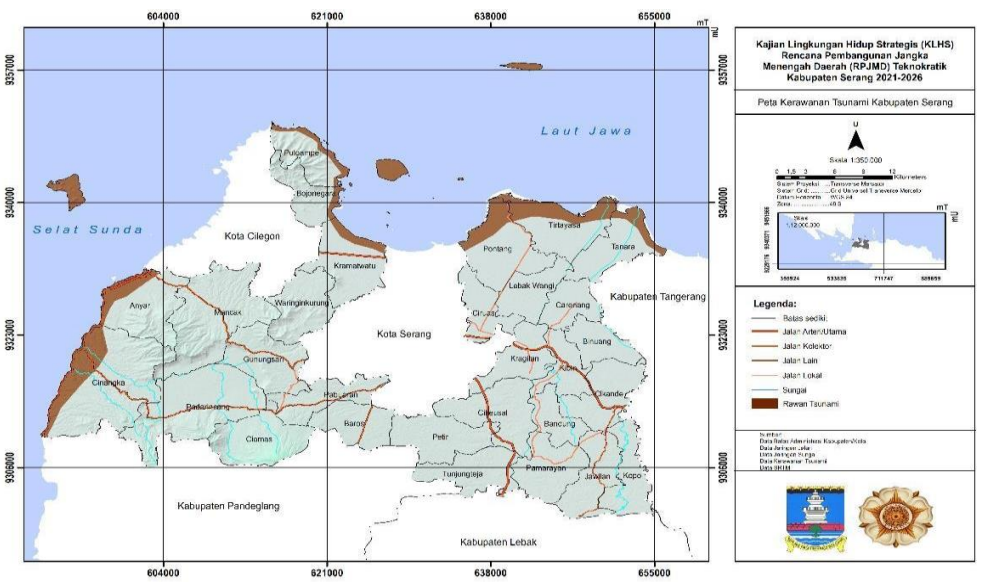


Gambar 2.6 Tingkat Kerawanan Tsunami Kabupaten Serang

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2020*

Gambar 2.6 Memperlihatkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Serang terhadap tingkat kerawanan bencana tsunami ditunjukkan pada gambar berwarna coklat. Daerah dengan tingkat kerawanan tsunami paling tinggi yaitu Kecamatan Tirtayasa. Penanggulangan bencana dengan cara mitigasi diperlukan pada daerah yang dianggap rawan tersebut.

**Tabel 2.8 Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kecamatan**

| Banjir | Kekeringan | Longsor/ Pergerakan Tanah | Cuaca Ekstrim | Tsunami | Musibah Umum | Gempa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27 Kec, Yaitu :** Kramatwatu, Waringinkurung, Bojonegara, Pulo Ampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikeusal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Gunungsari, Bandung, Lebak Wangi | **19 Kec, Yaitu:** Kramatwatu, Kekeringan, Bojonegara, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Petir, Tunjung Teja, Ciomas, Padarincang, Anyar, Cinangka, Bandung, Lebak Wangi | **10 Kec, Yaitu :** Bojonegara, Kragilan, Petir, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Mancak, Gunungsari, Bandung, Lebak Wangi | **29 Kec, Yaitu :** Pulo Ampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikeusal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Gunungsari, Bandung, Lebak Wangi | **5 Kec, Yaitu:** Bojonegara, Tirtayasa, Tanara, Anyar, Cinangka, Pulo Ampel | **10 Kec, Yaitu:** Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Cikeusal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Bandung, Lebak Wangi | **2 Kec, Yaitu :** Anyar, Cinangka |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Tahun 2020*

## 2.1.4 Posisi Strategis Kabupaten Serang di Wilayah Provinsi Banten

### *2.1.4.1 Posisi Strategis Kabupaten Serang*

Kabupaten Serang dalam peraturan perubahan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 menyatakan dalam pasal 4 bahwa pemerintah daerah menyusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan industri berbasis komoditas lokal, pengembangan pertanian kabupaten, pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal, pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan prasarana dan sarana transportasi terkoneksi dengan transportasi nasional hingga perluasan jaringan dan peningkatan kualitas prasarana. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan penetapan pusat kegiatan lokal dan pusat lainnya berdasarkan kebijakan tersebut.

Wilayah strategis di Kabupaten Serang berkaitan dengan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi ada pada Kawasan Stategis Nasional di Selat Sunda. Sedangkan yang masuk dalam kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi adalah: a) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah; b) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri; dan c) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Kawasan Strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi kabupaten meliputi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Ciruas dan Kragilan, Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringin Kurung, Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa, serta Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Cinangka.

Posisi Kabupaten Serang yang strategis dengan adanya jalur bebas hambatan nasional, pelabuhan, serta kawasan yang memiliki konektivitas dengan ibukota negara merupakan kesempatan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Banten untuk memperkuat kedudukan Kabupaten Serang sebagai bagian dalam perencanaan struktur ruang yang ada di dalam wilayah tersebut, meliputi:

a. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer, jalan kolektor primer (JKP-1), dan jalan bebas hambatan meliputi pengembangan jalan Tol Tangerang-Serang-Merak, pembangunan Tol Cilegon, pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, modifikasi simpang susun Km. 87 Jalan Tol Tangerang-Merak, serta pembangunan *interchange* Jalan Tol Serang-Panimbang. Pembangunan dan peningkatan jalan berjenjang provinsi, kabupaten, dan desa.
b. Pembangunan terminal penumpang tipe A,B, dan C, terminal barang, serta jembatan timbang.
c. Pembangunan jaringan prasarana jalur kereta api serta stasiun pendukungnya baik yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan simpul-simpul transportasi berhubungan dengan ruas Serang-Balaraja-Jakarta-Cikarang, yang terhubung dengan ibukota negara.
d. Pengembangan pelabuhan, baik untuk penyebrangan, pengumpul, pengumpul regional, serta alur pelayaran laut.

e. Selain hal di atas, pengembangan dan penambahan jaringan maupun kapasitas ada pada sumber daya energi seperti batu bara dan litrik, telekomunikasi, penyediaan air minum serta jalur evakuasi bencana. Berikut gambaran mengenai rencana struktur ruang yang ada di Kabupaten Serang sebagai berikut.

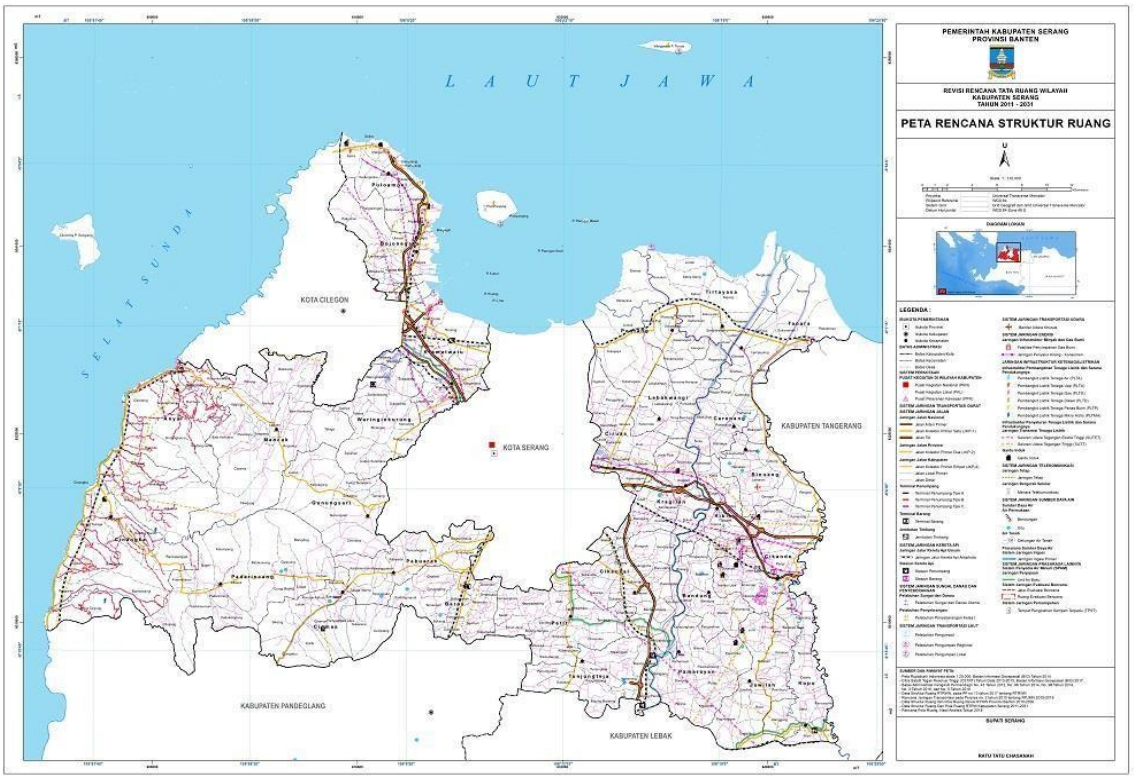


**Gambar 2.7 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Serang 2011-2031**
*Sumber: RTRW Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

Selain konteks pada pengembangan struktur ruang, Kabupaten Serang juga memberikan arahan pada pengembangan kawasan budi daya kurang lebih sebesar 134.324 hektar yang ada di RTRW Kabupaten Serang dengan rincian pengembangan yaitu :

a. Kawasan hutan produkksi seluas 5.684 hektar meliputi kawasan hutan produksi terbatas sebanyak 4.396 hektar dan tetap sebanyak 1.288 hektar;
b. Kawasan hutan rakyat seluas 5.540 hektar;
c. Kawasan pertanian sebesar 57.194 hektar, meliputi kawasan tanaman pangan seluas 32.299,36 Ha, Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 28.084,29 hektar serta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 4.145,06 hektar, dan kawasan perkebunan seluas 24.965 hektar;
d. Kawasan perikanan sebesar kurang lebih 224 hektar;
e. Kawasan peruntukan industri sebesar 26.309 hektar;

f. Kawasan industri sebesar 3.287 hektar;
g. Kawasan permukiman perkotaan sebesar 32.128 hektar dan permukiman perdesaan sebesar 3.957 hektar.

#### *2.1.4.2 Arah Pengembangan Kabupaten Serang*

Pengembangan Kabupaten Serang salah satunya adalah mengenai konektivitas dan juga peningkatan fungsi-fungsi pertumbuhan agar saling medukung. Keterhubungan antara wilayah perlu penegasan dalam pembagian fungsi kawasan dalam sistem perkotaan kabupaten. Dalam pengembangan wilayah, perencanaan sistem perkotaan di kabupaten sebagai pusat dari wilayah pengembangan didiukung oleh wilayah penyangga. Klasifikasi sistem perkotaan yang ada dikatogorikan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di wilayah Kabupaten Serang adalah wilayah perkotaan Anyar, perkotaan Baros, perkotaan Ciruas yang ada di Kecamatan Ciruas dan Kragilan, serta perkotaan Pontang.
2. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Kabupaten Serang adalah wilayah-wilayah yang strategis, berbatasan dengan Kota atau Kabupaten Lain dan cenderung cepat berkembang meliputi 24 PPK.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL Kabupaten Serang merupakan kawasan yang berkembang dan berpotensi berkembang terdiri dari 21 desa.

Pengembangan sistem perkotaan yang ada di Kabupaten Serang dapat dikategorikan sebagai PKL, PPK, dan PPL, tertuang dalam penjelasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 pada tabel 2.9 sebagai berikut.

**Tabel 2.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031**

| No | Arah Pengembangan Kawasan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|
| **1** | Pusat Kegiatan Lokal | Perkotaan Anyar, Perkotan Baros, Perkotaan Ciruas, dan Perkotaan Pontang | - Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air<br>- Perdagangan dan jasa<br>- Industri, industri pertanian dan perikanan<br>- Pendidikan tinggi |
| **2.** | Pusat Pelayanan Kawasan | Kecamatan Petir, Pabuaran, Pamarayan, Kramatwatu, Mancak, Cinangka, Kibin, Pulo ampel, Tirtayasa, Padarincang, Ciomas, Tunjungteja, Cikeusal, Waringinkurung, Tanara, Carenang, Binuang, Kopo, Jawilan, Bandung, Gunungsari, Lebak Wangi, Bojonegara, Cikande | - Pertanian dan perkebunan<br>- Permukiman<br>- Perdagangan dan jasa<br>- Industri pengolahan<br>- Kawasan wisata<br>- Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air<br>- pendidikan |
| **3.** | Pusat Pelayanan Lingkungan | Desa Banjarsari, Rancasanggal, Sangiang, Kaduagung, Sindangmandi, Batukuwung, Sukarena, Tanjungsari, Padasuka, Kemuning, Blokang, Teras Bendung, Gandayasa, Bantarpanjang, Kampungbaru, Sukamampir, Domas, Sukanegara, Sujung, Lontar, Siremen, Ragasmasigit, Pangarengan, Sasahan dan Binangun | - Pertanian, peternakan dan perkebunan<br>- Permukiman perdesaan<br>- Kawasan wisata<br>- Kawasan lindung<br>- Kawasan hutan |

*Sumber: RTRW Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

### 2.1.5 Aspek Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Serang. Penduduk dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun demikian, pertambahan penduduk yang berlebihan bisa juga menjadi permasalahan dalam pembangunan. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai masalah diantaranya: (1) tekanan penduduk dan lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang sangat padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan, (2) kemiskinan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, (3) pengangguran, yang terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk, (4) rawan pangan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kebutuhan pangan sangat meningkat dengan adanya penduduk, sedang luas pertanian akan berkurang sehingga produksi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

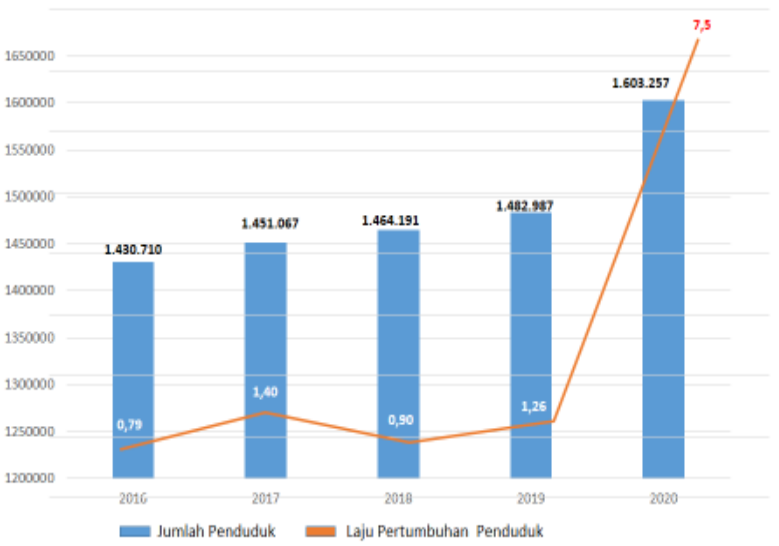


*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang*

**Gambar 2.8 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang, 2015-2019**

Berdasarkan gambar 2.8 jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.430.710 jiwa terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 1.603.257 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 mengalami fluktuatif pertumbuhan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,37 persen, selama periode 2016-2020 laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,5 persen.

Persebaran penduduk tertinggi di Kabupaten Serang pada tahun 2020 berada di Kecamatan Cikande yaitu sebanyak 108.791 jiwa (6,79 persen), disusul Kecamatn Kramatwatu sebanyak 98.202 jiwa (6,13 persen) dan Kecamatan Ciruas sebanyak 82.393 jiwa (5,14 persen). Sedangkan persebaran penduduk terendah di Kecamatan Gunungsari sebanyak 23.711 jiwa (1,48 persen), Kecamatan Binuang sebanyak 31.539 jiwa (1,97 persen) dan Kecamatan Bandung sebanyak 37.279 jiwa (2,33 persen).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Serang pada tahun 2020 adalag sebesar 1.092,62 $km^2$ . Jika dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas yaitu sebesar 2.388,90 jiwa per $km^2$, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Gunungsari yaitu sebanyak 487,88 jiwa per $km^2$.

**Tabel 2.10 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km² |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anyar | 57.453 | 3,58 | 1.011 |
| 2. | Bandung | 37.279 | 2,33 | 1.481 |
| 3. | Baros | 58.256 | 3,63 | 1.322 |
| 4. | Binuang | 31.539 | 1,97 | 1.205 |
| 5. | Bojonegara | 48.790 | 3,04 | 1.610 |
| 6. | Carenang | 39.233 | 2,45 | 1.196 |
| 7. | Cikande | 108.791 | 6,79 | 2.153 |
| 8. | Cikeusal | 77.207 | 4,82 | 875 |
| 9. | Cinangka | 58.762 | 3,67 | 527 |
| 10. | Ciomas | 42.137 | 2,63 | 868 |
| 11. | Ciruas | 82.393 | 5,14 | 2.3889 |
| 12. | Gunungsari | 23.711 | 1,48 | 488 |
| 13. | Jawilan | 60.211 | 3,76 | 1.546 |
| 14. | Kibin | 56.358 | 3,52 | 1.682 |
| 15. | Kragilan | 79.501 | 4,96 | 2.188 |
| 16. | Kramatwatu | 98.202 | 6,13 | 2.021 |
| 17. | Kopo | 52.766 | 3,29 | 1.181 |
| 18. | Lebak Wangi | 38.388 | 2,39 | 1.211 |
| 19. | Mancak | 48.616 | 3,03 | 657 |
| 20. | Pabuaran | 43.641 | 2,72 | 551 |
| 21. | Padarincang | 68.788 | 4,29 | 694 |
| 22. | Pamarayan | 59.229 | 3,69 | 1.413 |
| 23. | Petir | 61.395 | 3,83 | 1.308 |
| 24. | Pontang | 46.996 | 2,93 | 809 |
| 25. | Pulo Ampel | 39.512 | 2,46 | 1.214 |
| 26. | Tanara | 42.019 | 2,62 | 852 |
| 27. | Tirtayasa | 47.223 | 2,95 | 733 |
| 28. | Tunjung Teja | 46.900 | 2,93 | 1.187 |
| 29. | Waringinkurung | 47.961 | 2,99 | 935 |
| **KABUPATEN SERANG** | | 1.603.257 | 100 | 1.093 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2021*

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Pada tabel 2.10 dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Serang pada tahun 2020 adalah sebanyak 817.116 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 786.141 jiwa. Kecamatan dengan penduduk laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Cikande yaitu sebanyak 55.059 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki tersedikit berada di Kecamatan Gunungsari yakni sebanyak 12.194 jiwa. Demikian pula kecamatan dengan penduduk perempuan terbanyak berada di Kecamatan di Kecamatan Cikande yaitu sebanyak 53.732 jiwa, dan penduduk perempuan tersedikit berada di Kecamatan Gunungsari yakni zzsebanyak 11.517 jiwa.

Rasio jenis kelamin menurut BPS adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kabupaten Serang pada tahun 2020 adalah sebesar 104 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Serang terdapat 104 penduduk laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Mancak dan yaitu sebesar 109, sedangkan rasio terkecil berada di Kecamatan Carenang dengan rasio sebesar 99.

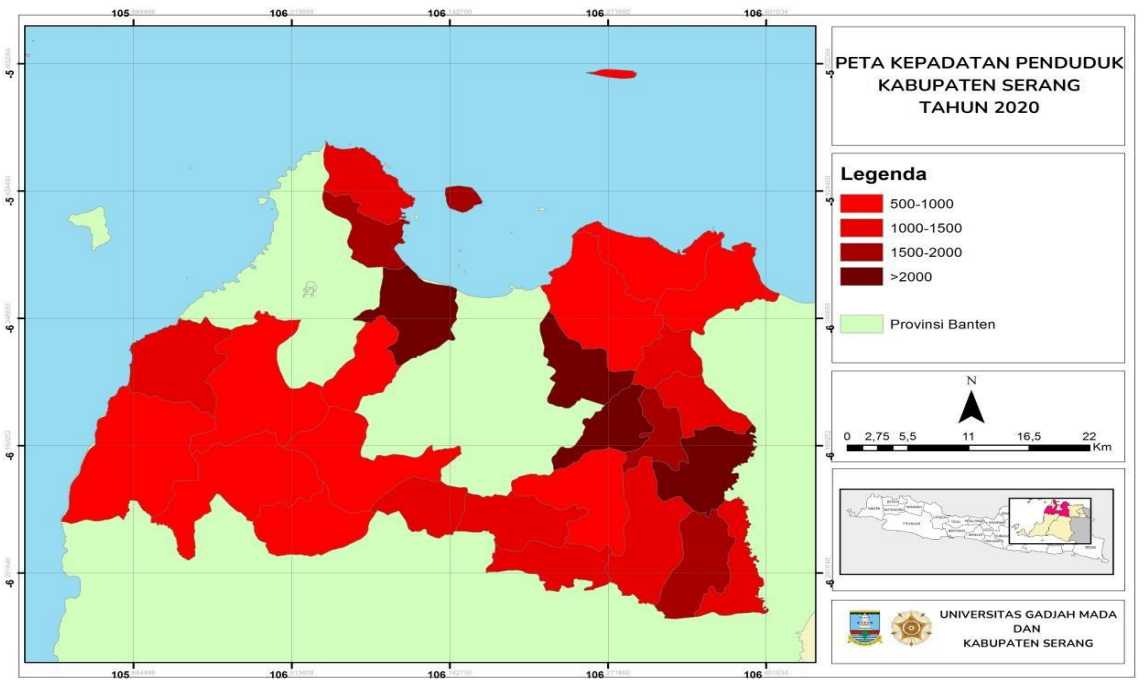


**Gambar 2.9 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Serang**

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

Rasio jenis kelamin menurut BPS adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk lakilaki untuk 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kabupaten Serang pada tahun 2018 adalah sebesar 103 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Serang terdapat 103 penduduk laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Carenang dan Baros yaitu sebesar 109, sedangkan rasio terkecil berada di Kecamatan Kibin dengan rasio sebesar 69. Pada tahun 2019 rasio jenis kelamin Kabupaten Serang sebesar 104.

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Serang, 2020**

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah (jiwa) | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cinangka | 30.196 | 28.566 | 58.762 | 106 |
| 2. | Padarincang | 35.162 | 33.626 | 68.788 | 105 |
| 3. | Ciomas | 21.829 | 20.308 | 42.137 | 107 |
| 4. | Pabuaran | 22.440 | 21.201 | 43.641 | 106 |
| 5. | Gunungsari | 12.194 | 11.51 | 23.711 | 106 |
| 6. | Baros | 30.301 | 27.955 | 58.256 | 108 |
| 7. | Petir | 31.406 | 29.989 | 61.395 | 105 |
| 8. | Tunjung Teja | 23.953 | 22.947 | 46.900 | 104 |
| 9. | Cikeusal | 39.031 | 38.176 | 77.207 | 102 |
| 10. | Pamarayan | 30.462 | 28.767 | 59.229 | 106 |
| 11. | Bandung | 18.892 | 18.387 | 37.279 | 103 |
| 12. | Jawilan | 30.980 | 29.231 | 60.211 | 106 |
| 13. | Kopo | 27.166 | 25.600 | 52.766 | 106 |
| 14. | Cikande | 55.059 | 53.732 | 108.79 | 102 |
| 15. | Kibin | 28.317 | 28.041 | 56.358 | 101 |
| 16. | Kragilan | 40.234 | 39.267 | 79.501 | 102 |
| 17. | Waringinkurung | 24.527 | 23.434 | 47.961 | 105 |
| 18. | Mancak | 25.360 | 23.256 | 48.616 | 109 |
| 19. | Anyar | 29.211 | 28.242 | 57.453 | 103 |
| 20. | Bojonegara | 24.956 | 23.834 | 48.790 | 105 |
| 21. | Pulo Ampel | 20.035 | 19.477 | 39.512 | 103 |
| 22. | Kramatwatu | 50.271 | 47.931 | 98.202 | 105 |

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah (jiwa) | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Ciruas | 41.613 | 40.780 | 82.393 | 102 |
| 24. | Pontang | 23.767 | 23.229 | 46.996 | 102 |
| 25. | Lebak Wangi | 19.287 | 19.101 | 38.388 | 101 |
| 26. | Carenang | 19.581 | 19.652 | 39.233 | 99 |
| 27. | Binuang | 15.867 | 15.672 | 31.539 | 101 |
| 28. | Tirtayasa | 23.860 | 23.358 | 47.223 | 102 |
| 29. | Tanara | 21.154 | 20.865 | 42.019 | 101 |
| **KABUPATEN SERANG** | | 817.116 | 786.141 | 1.603.257 | 104 |

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2020*

Data mengenai rasio jenis kelamin sangat berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dengan menggunakan angka rasio jenis kelamin bisa dilihat dinamika kependudukan di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dengan mengetahui sebab-sebab perubahan nilai rasio jenis kelamin dapat dicari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya sangat rendah, maka usaha-usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Serang didominasi penduduk usia muda (*expansive pyramid*) yang menunjukkan tingkat kelahiran cukup tinggi. Kelompok umur paling banyak berada pada kelompok umur 0-9 tahun yaitu sebanyak 19,23 persen, diikuti kelompok umur 10-19 tahun sebanyak 18,49 persen.. Terkait dengan struktur penduduk, dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kabupaten Serang memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

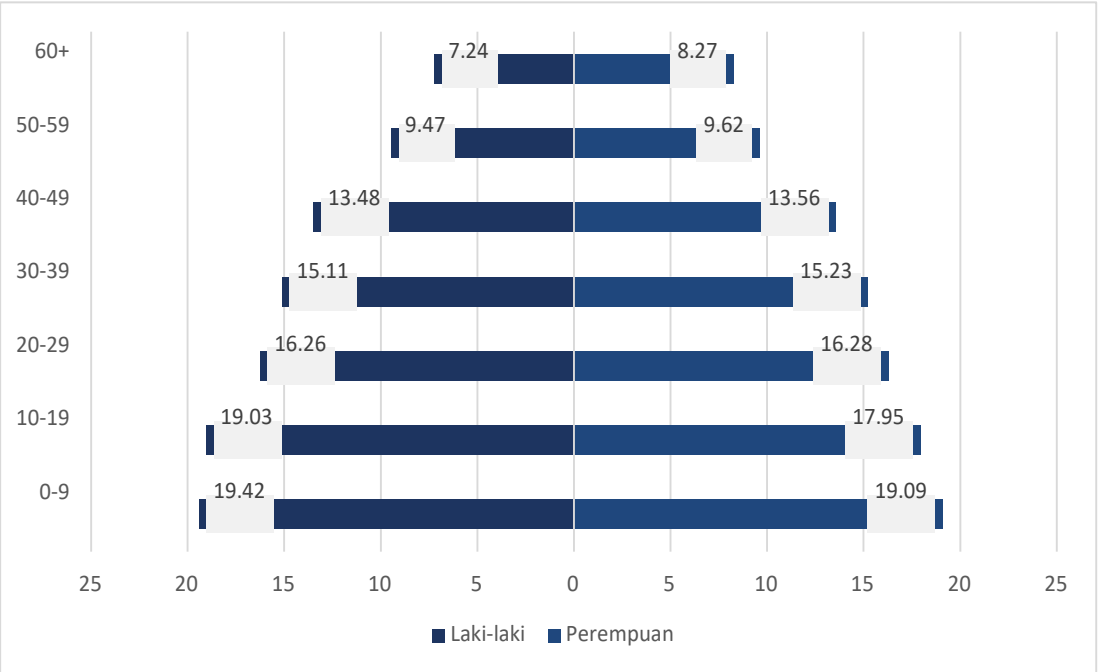


**Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Menurut Kelompok Umur (Persen), 2020**

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2020 (diolah)*

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (economically active population) dan besarnya rasio ketergantungan (dependency ratio). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (unemployment). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### *2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonmi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel 2.12 Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang (Miliar Rupiah), 2016-2020**

| PDRB | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 60.870,17 | 65.925,80 | 71.634,14 | 76.943,59 | 76.601,09 |
| PDRB Atas Dasar Harga Konstan | 46.715,18 | 49.164,76 | 51.784,88 | 54.404,47 | 53.286,83 |

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021*

Berdasarkan data Kabupaten Serang periode 2016-2020, menunjukkan bahwa baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung meningkat. Pada awal periode PDRB ADHB menunjukkan nilai sebesar 60.870,17 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 76.943,59 miliar rupiah. Namun demikian, akibat dari dampak pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian Nasional tidak terkecuali Kabupaten Serang, sehingga pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar 76.601,09 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2016 mencapai 46.715,18 miliar rupiah hingga tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 54.404,47 miliar rupiah dan menunjukkan penurunan sehingga menjadi sebesar 53.286,83 miliar rupiah di tahun 2020.

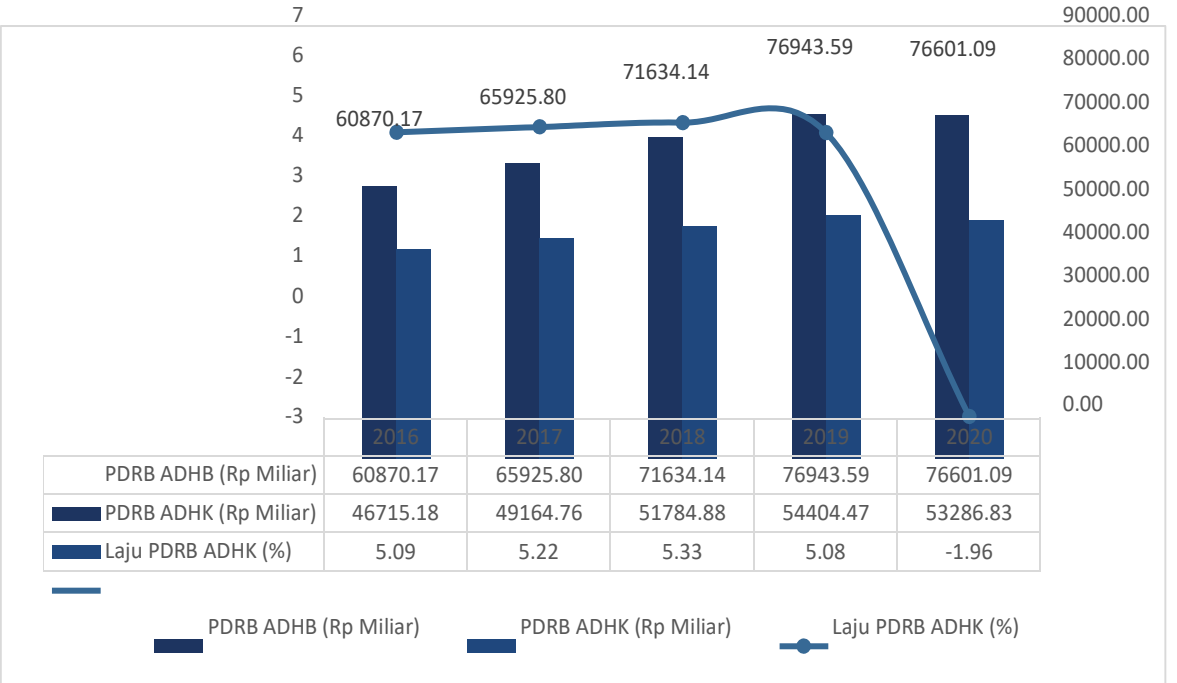


**Gambar 2.11 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang**

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

Jika dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang atas dasar harga berlaku periode 2015-2019 mencapai 5,17 persen per tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari laju PDRB ADHK mencapai 5,09 persen. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2017, 2018, dan 2019 masing-masing sebesar 5,22 persen, 5,33 persen, dan 5,08 persen. Namun demikian, dikarenakan penurun PDRB ADHK pada tahun 2020, maka laju pertumbuhan

pada tahun tersebut turun tajam menjadi -1,96 persen. Selama periode 2016-2020, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 5,33 persen, dan pertumbuhan terendah di tahun 2020 yakni sebesar -1,96 persen.

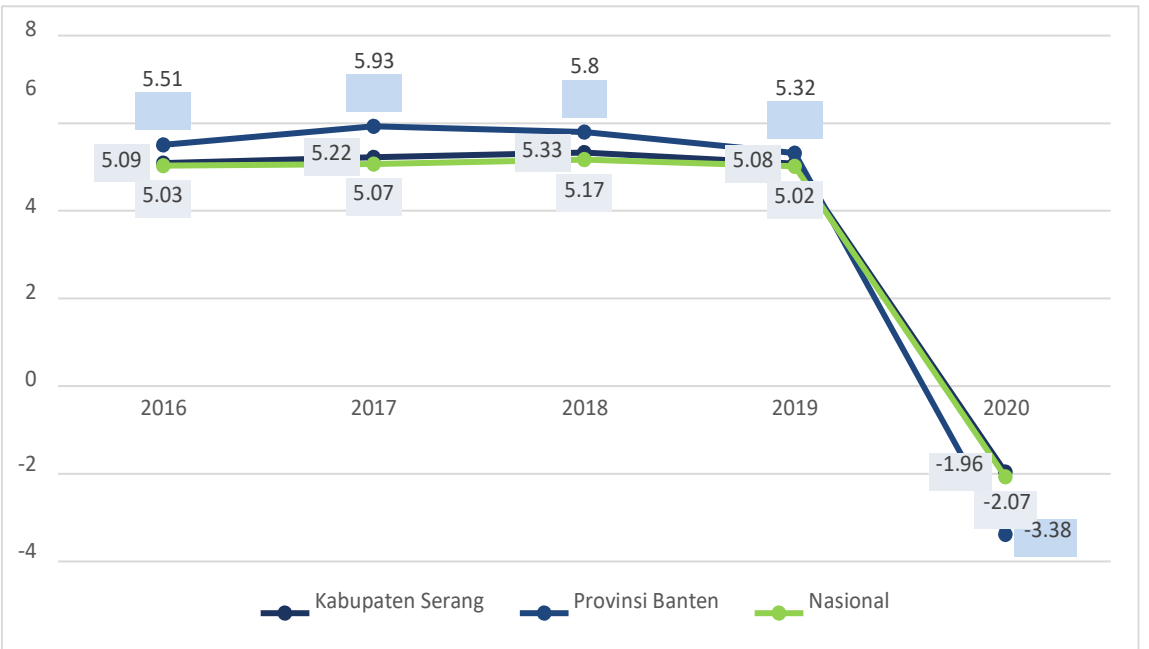


**Gambar 2.12 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2016-2020**

*Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka dan BPS, 2021*

Berdasarkan gambar 2.12 terlihat bahwa periode 2016-2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang selalu di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Sedangkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang selalu lebih tinggi di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, dengan selisih sebesar 1,42 persen.

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2020 mencapai -3,08 persen, begitu pula seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Banten juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang sebesar -0,54 persen merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi jika dibandingkan wilayah lainnya. Kemudiandisusul oleh Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,88 persen, sedangkan posisi

terakhir diduduki oleh Kota Tangerang yang mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar -6,92 persen. Kabupaten Serang berada di posisi keenam dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, dan termasuk ke dalam tiga kabupaten/kota yang mencapai pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

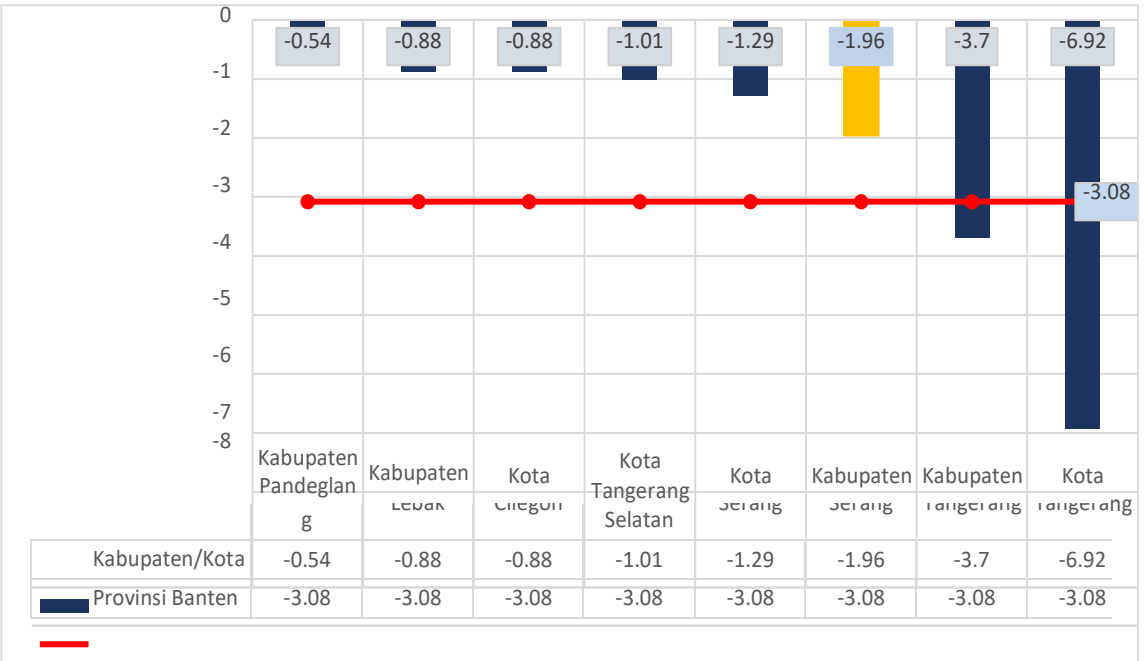


**Gambar 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang ADHK dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

Jika dianalisis berdasarkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor yang ada selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya. Walaupun secara umum seluruh sektor yang ada mengalami perlambatan pertumbuhan terutama pada tahun 2020. Berdasarkan tabel 2.12, tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata pertumbuhan 7,42 persen per tahun, sektor pengadaan air yang mencapai 6,56 persen per tahun, dan sektor real estate sebesar 6,38 persen per tahun. Walaupun demikian, baik sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial maupun sektor real estate tingkat pertumbuhannya menurun di tahun 2020. Berbeda halnya dengan sektor pengadaan air yang pertumbuhannya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,67 persen dari tahun sebelumnya menjadi 3,72 persen, namun mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut hingga pada tahin 2020

mencapai 8,57 persen. Sementara itu sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 2,56 persen per tahun. Data pertumbuhan sektoral tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Serang dalam pergerakan ekonominya lebih ditopang sektor tersier yang mana perkembangan sector perekonomiannya mulai fokus pada sektor perdagangan dan jasa-jasa.

**Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang ADHK Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | 6,52 | 4,07 | 3,24 | 2,19 | 4,02 | 4,01 |
| **Pertambangan dan Penggalian** | 4,92 | 4,17 | 5,13 | 5,54 | -2,16 | 3,52 |
| **Industri Pengolahan** | 4,15 | 4,61 | 4,54 | 3,78 | -4,28 | 2,56 |
| **Pengadaan Listrik, Gas** | 9,51 | 10,00 | 3,48 | 1,21 | -5,73 | 3,69 |
| **Pengadaan Air** | 6,66 | 8,39 | 3,72 | 5,48 | 8,57 | 6,56 |
| **Konstruksi** | 6,20 | 6,11 | 8,11 | 8,05 | -0,39 | 5,62 |
| **Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** | 3,50 | 5,67 | 4,22 | 8,29 | -1,56 | 4,02 |
| **Transportasi dan Pergudangan** | 8,71 | 8,70 | 8,59 | 5,90 | -2,39 | 5,90 |
| **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 5,91 | 7,29 | 7,69 | 7,29 | -4,65 | 4,71 |
| **Informasi dan Komunikasi** | 2,07 | 6,01 | 6,66 | 7,99 | 8,98 | 6,34 |
| **Jasa Keuangan** | 17,21 | 3,12 | 5,23 | 0,50 | 0,51 | 5,31 |
| **Real Estate** | 5,26 | 7,65 | 9,16 | 7,88 | 1,94 | 6,38 |
| **Jasa Perusahaan** | 3,62 | 5,21 | 4,63 | 7,10 | -1,91 | 3,73 |
| **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan** | 4,75 | 4,52 | 5,45 | 8,95 | -0,14 | 4,71 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **Jaminan Sosial Wajib** | | | | | | |
| **Jasa Pendidikan** | 4,02 | 6,19 | 6,54 | 7,57 | 0,87 | 5,04 |
| **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** | 8,28 | 7,89 | 6,11 | 9,25 | 5,57 | 7,42 |
| **Jasa lainnya** | 4,18 | 7,03 | 6,79 | 7,72 | -3,84 | 4,38 |
| PDRB | **5,09** | **5,24** | **5,33** | **5,08** | **-1,96** | **4,94** |

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

Meskipun demikian, jika dilihat pada tahun 2020, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 8,98 persen, disusul sektor pengadaan air sebesar 8,57, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan indikasi bahwa sektor tersier di Kabupaten Serang memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan tiga terendah yakni sektor pengadaan listrik dan gas sebesar -5,73 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -4,65 persen, serta industri pengolahan sebesar -4,28 persen.

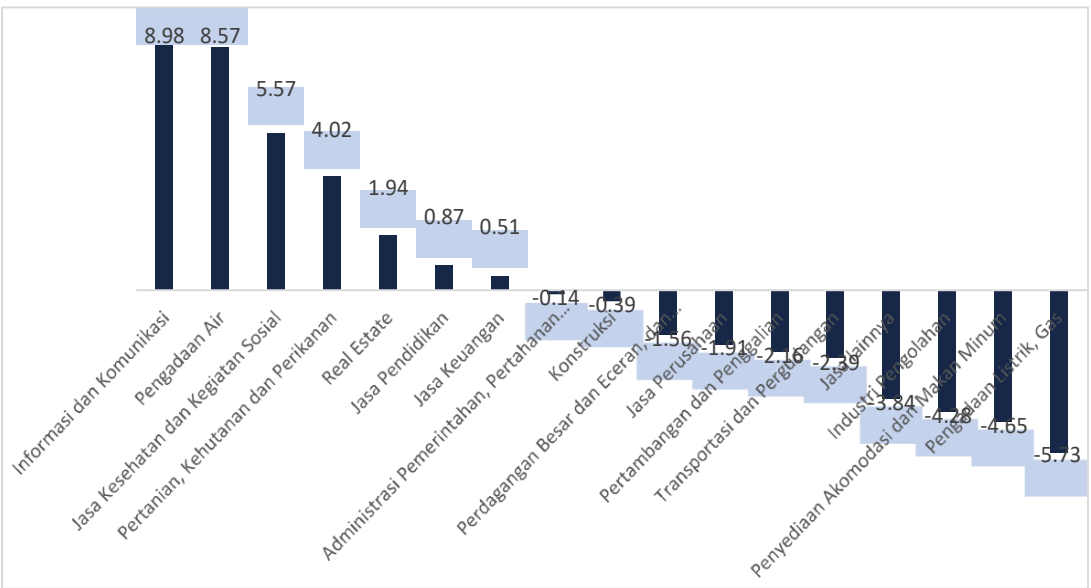


**Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020**

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021*

### *2.2.1.2 Struktur Ekonomi*

Struktur perekenomian suatu wilayah dipengaruhi oleh beragam kegiatan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi struktur perekonomian. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral, yakni dilihat dari distribusi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor. Berdasarkan analisis data tersebut akan terlihat sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor andalan di suatu wilayah. Persentase kontribusi PDRB menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

**Tabel 2.14 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Serang (%), 2016-2020**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | 10,19 | 9,99 | 9,87 | 9,50 | 10,01 | 9,91 |
| **Pertambangan dan Penggalian** | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| **Industri Pengolahan** | 49,01 | 48,48 | 47,93 | 47,24 | 46,06 | 47,74 |
| **Pengadaan Listrik, Gas** | 0,31 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,35 |
| **Pengadaan Air** | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **Konstruksi** | 10,27 | 10,33 | 10,67 | 11,08 | 11,20 | 10,71 |
| **Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil** | 8,62 | 8,82 | 8,72 | 9,10 | 9,14 | 8,88 |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **dan Sepeda Motor** | | | | | | |
| **Transportasi dan Pergudangan** | 3,61 | 3,71 | 3,81 | 3,85 | 3,89 | 3,77 |
| **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | 2,34 | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,29 | 2,35 |
| **Informasi dan Komunikasi** | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,80 |
| **Jasa Keuangan** | 2,87 | 2,86 | 2,88 | 2,73 | 2,75 | 2,82 |
| **Real Estate** | 4,34 | 4,48 | 4,72 | 4,82 | 5,01 | 4,67 |
| **Jasa Perusahaan** | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib** | 2,21 | 2,21 | 2,19 | 2,27 | 2,40 | 2,26 |
| **Jasa Pendidikan** | 3,52 | 3,58 | 3,69 | 3,86 | 3,97 | 3,72 |
| **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,54 |
| **Jasa lainnya** | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 |
| PDRB | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

Berdasarkan tabel 2.14, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2016-2020 sektor yang paling dominan dalam perekonomiman Kabupaten Serang adalah sektor industri pengolahan. Walaupun kontribusinya cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun, namun rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencapai 48,91 persen per tahun. Kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesat 49,01 persen. Akan tetapi terus mengalami penurunan setiap tahun. Disamping itu, sektor konstruksi juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Serang yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,71 persen per tahun. Kontribusi sektor tersebut sempat mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2020 mencapai 11,20 persen.

Tidak hanya itu saja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor juga mencapai rata-rata kontribusi di atas lima persen, yakni masing-masing sebesar 9,91 persen dan 8,88 persen. Kontribusi kedua sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Serang dalam menghadapi krisis di masa pandemi covid-19. Sedangkan peranan lapangan usaha lainnya cenderung kecil yaitu dengan capaian kontribusi di bawah lima persen (5%) per tahun. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Serang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan jika dilihat dari tingginya kontribusi pada perekonomian dan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata PDRB.

Selain dengan melihat persentase kontribusi dari masing-masing sektor dalam perekonomian, ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan tujuh belas lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Lapangan Usaha Primer

   Lapangan usaha primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber daya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

b. Lapangan Usaha Sekunder

   Lapangan usaha sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi.

c. Lapangan Usaha Tersier

   Lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

**Tabel 2.15 Struktur Perekonomian Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%), 2016-2020**

| Sektor PDRB | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Primer** | 10,30 | 10,10 | 9,98 | 9,61 | 10,12 |
| **Sekunder** | 59,62 | 59,23 | 59,01 | 58,70 | 57,62 |
| **Tersier** | 30,09 | 30,65 | 31,00 | 31,69 | 32,24 |

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2021 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.15 tampak bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Serang selama periode 2016-2020. Sektor yang mendominasi perekonomian adalah sektor sekunder yang mencapai kontribusi di atas 50 persen tiap tahun, walaupun trennya cenderung sedikit menurun. Kontribusi tertinggi sektor sekunder terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 59,62 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 57,62 persen. Berbeda halnya dengan sektor tersier yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai 32,24 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Serang cenderung menurun, pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya dari semula 10,3 persen menjadi 9,61 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 10,12. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi pandemi, sebagian kontribusi sekunder berpindah ke sektor primer dan tersier yang pertumbuhannya tetap positif.

#### *2.2.1.3 Inflasi*

Terdapat keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, maka akan menekan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan (BPS Provinsi Banten, 2019). Oleh sebab itu inflasi menjadi salah satu indikator makro yang diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), timbulnya inflasi disebabkan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), permintaan (*demand pull inflation*), dan ekspektasi inflasi. Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*.

Tingkat keparahan inflasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun, inflasi sedang saat laju inflasi antara 10-30 persen per tahun, inflasi berat yakni pada kisaran 30-100 persen per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi saat laju inflasi lebih dari 100 persen per tahun. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia, dan salah satunnya Kota Serang. Oleh karena itu, dalam analisis ini Kota Serang dijadikan rujukan untuk analisis inflasi Kabupaten Serang.

Gambar 2.15, menunjukkan inflasi di Kota Serang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 laju inflasi Kota Serang mencapai 3,26 persen. Namun demikian, pada tahun 2017 terjadi peningkatan laju inflasi yang cukup pesat menjadi 5,17 persen, dan merupakan laju inflasi tertinggi selama periode 2015-2019. Setelah itu, pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan laju inflasi menjadi 1,91 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Banten, selama periode 2016-2020 inflasi di Kota Serang selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi di Provinsi Banten, kecuali pada tahun 2019 inflasi Kota Serang di bawah Provinsi Banten sebesar 0,24 persen. Walaupun demikian, selama periode 2016-2020 inflasi Kota Serang selalu lebih tinggi dari Inflasi secara nasional. Berdasarkan data tersebut, inflasi di Kota Serang berada pada kisaran

satu digit sehingga masih dapat dikendalikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kota Serang secara umum belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

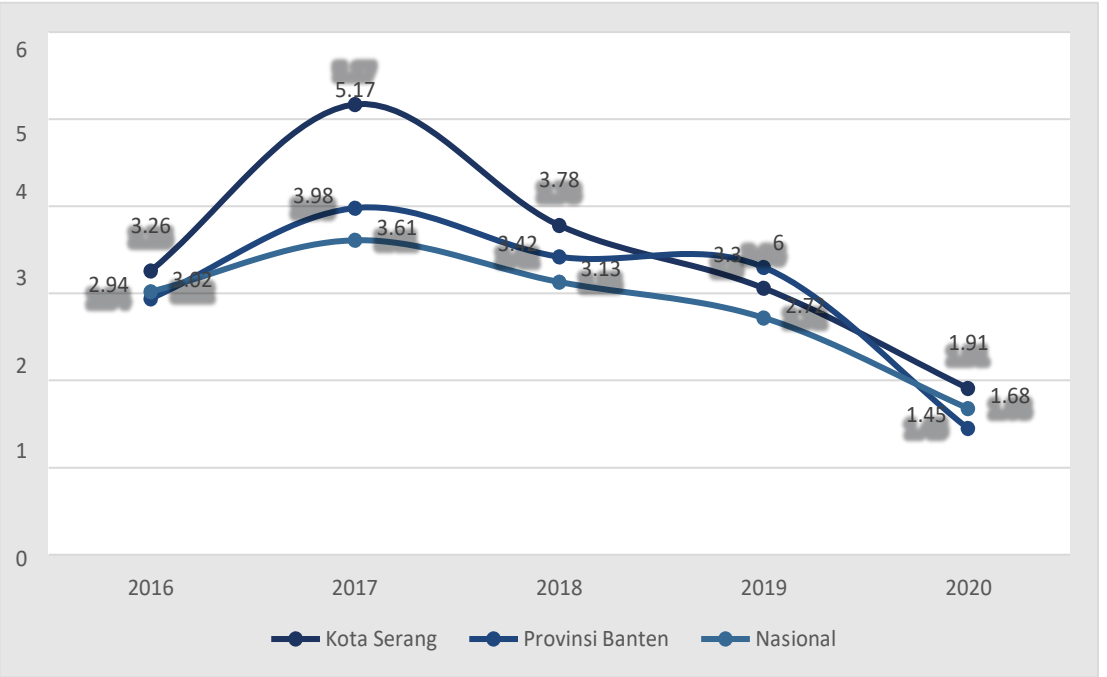


**Gambar 2.15 Laju Inflasi Kota Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2015-2019**

*Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Banten, 2015-2019, Provinsi Banten Dalam Angka 2021, dan Kota Serang Dalam Angka 2021 (diolah)*

Sama seperti laju inflasi tahunan, jika dilihat dari gambar 2.15 menunjukkan bahwa laju inflasi bulanan Kota Serang pada tahun 2016-2020 juga cenderung berfluktuatif. Inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi di tahun 2018 yaitu pada Bulan Januari yang mencapai 0,91 persen, Bulan Januari 2016 sebesar 0,90 persen, dan Bulan Mei 2016 sebesar 0,88 persen. Sedangkan tingkat Inflasi yang cenderung lebih tinggi di beberapa bulan lainnya mungkin disebabkan oleh *seasonal effect* akibat Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun tahun baru yang mengarah pada peningkatan rata-rata harga barang dan jasa. Namun demikian, fluktuasi inflasi bulanan tahun 2020 cenderung lebih rendah dari

tahun-tahun sebelumnya, inflasi tertinggi pada tahun tersebut terjadi di Bulan Desember yaitu sebesar 0,26 persen. Hal ini searah dengan laju inflasi tahun yang juga mengalami penurunan.

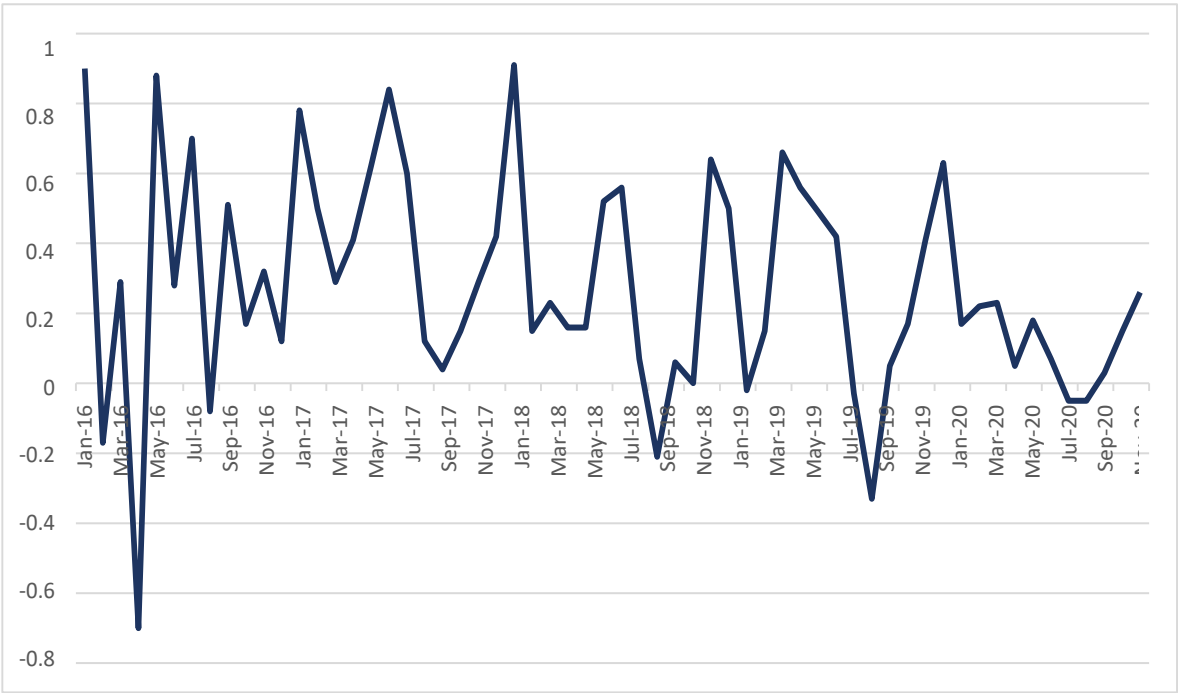


**Gambar 2.16 Laju Inflasi Bulanan Kota Serang (%), 2016-2020**

*Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Banten, 2015-2019 dan Kota Serang Dalam Angka 2021 (diolah)*

### *2.2.1.4 PDRB Per Kapita*

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Berdasarkan gambar 2.17, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Serang mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik itu dengan perhitungan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita ADHB mencapai 41.003,77 rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 50.595,31 rupiah. Demikian pula dengan PDRB ADHK yang mencapai 31.468,59 rupiah pada tahun 2016, terus mengalami peningkatan mencapai 36.031,49 rupiah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 35.196,15 rupiah. Seperti penjelasan sebelumnya, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Serang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun demikian, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (transfer out) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

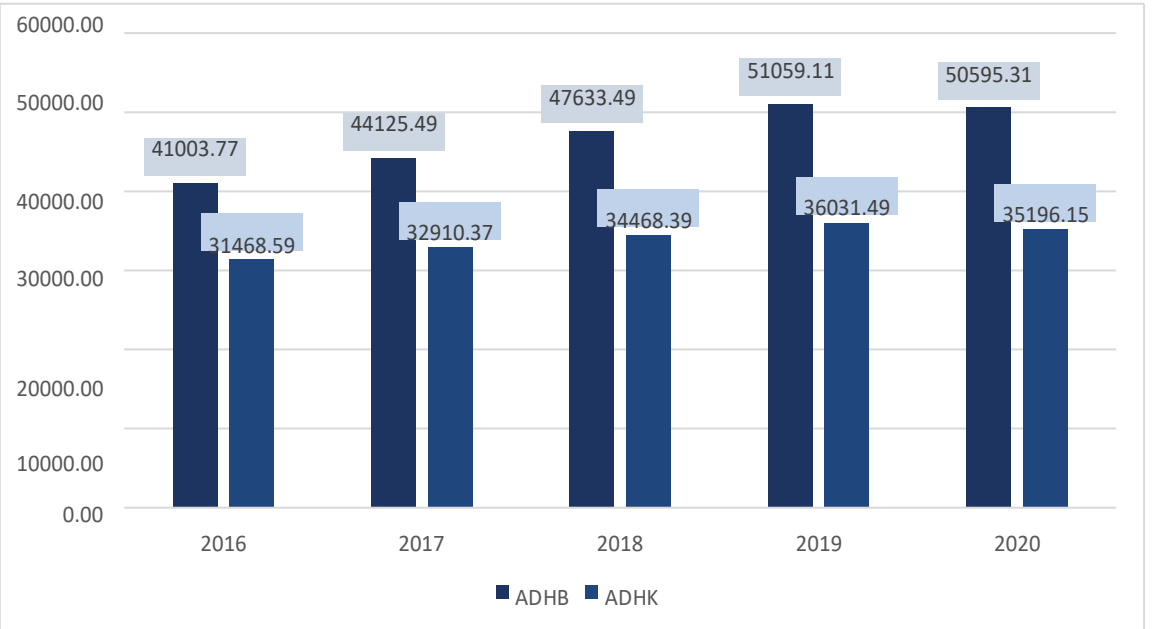


**Gambar 2.17 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serang (Ribu Rupiah), 2016-2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

### *2.2.1.5 Indeks Gini*

Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis mengunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmeratan rendah.

Dikarenakan data indeks gini Kabupaten Serang tidak tersedia, maka sebagai proksi digunakan indeks gini Provinsi Banten untuk analisis indeks gini Kabupaten Serang. Secara umum indeks gini Provinsi Banten selama 2016-2020 cenderung menurun, dan masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,3 – 0,5. Pada tahun 2016 indeks gini mencapai 0,394, namun pada tahun 2017 turun menjadi 0,382. Akan tetapi, pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan indeks gini menjadi sebesar 0,385. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2019 yang turun sebesar 0,020 menjadi 0,365, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 0,362. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Provinsi Banten mengarah pada ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin mengecil.

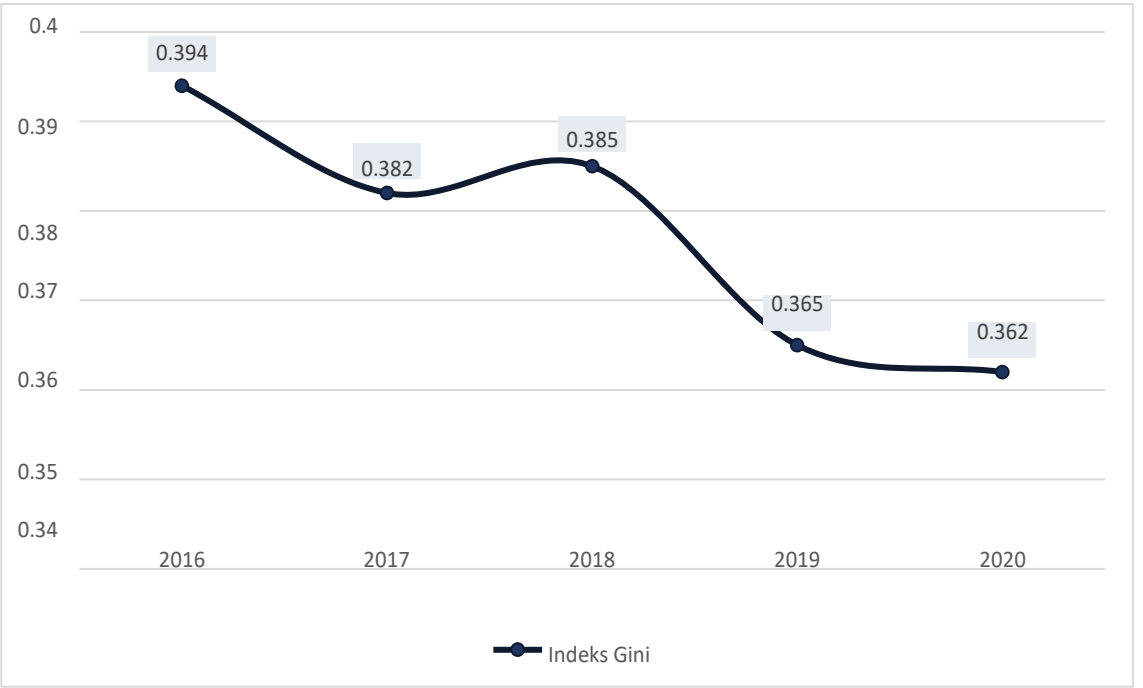


**Gambar 2.18 Indeks Gini Provinsi Banten, 2016-2020**
*Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2021 (diolah)*

### *2.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin*

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaranm sehingga penduduk miskin dapat definisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (bps.go.id).

Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut. Berdasarkan tabel 2.16 selama periode 2015-2020, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 21,644 per tahun. Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 232.856 per kapita per bulan, dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 341.074 per kapita per bulan pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut pun terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 74,85 ribu jiwa atau sebesar 5,09 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 61,54 ribu jiwa atau sebesar 4,08 persen. Akan tetapi, mengalami peningkatan menjadi 74,80 ribu jiwa atau sebesar 4,94 persen.

**Tabel 2.16 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Serang, 2015-2020**

| Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/Bulan) | Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 232.856 | 74,85 | 5,09 |
| 2016 | 256.660 | 67,92 | 4,58 |
| 2017 | 269.652 | 69,10 | 4,63 |
| 2018 | 294.829 | 64,46 | 4,30 |
| 2019 | 309.036 | 61,54 | 4,08 |
| 2020 | 341.074 | 74,80 | 4,94 |

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Berdasarkan gambar 2.19 jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Banten terlihat bahwa selama periode 2015-2019 garis kemiskinan Kabupaten Serang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Terlihat pula jika trend garis kemiskinan di Kabupaten Serang terus meningkat, walaupun lebih landai jika dibanding dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Pada tahun 2015, garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai 232.856 rupiah sedangkan garis kemiskinan Provinsi Banten telah mencapai 336.483 rupiah. Demikian pula pada tahun 2019, garis kemiskinan Kabupaten Serang masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten bahkan dengan selisih yang semakin besar yaitu sebesar 153.690 rupiah dari sebelumnya 103,627 rupiah.

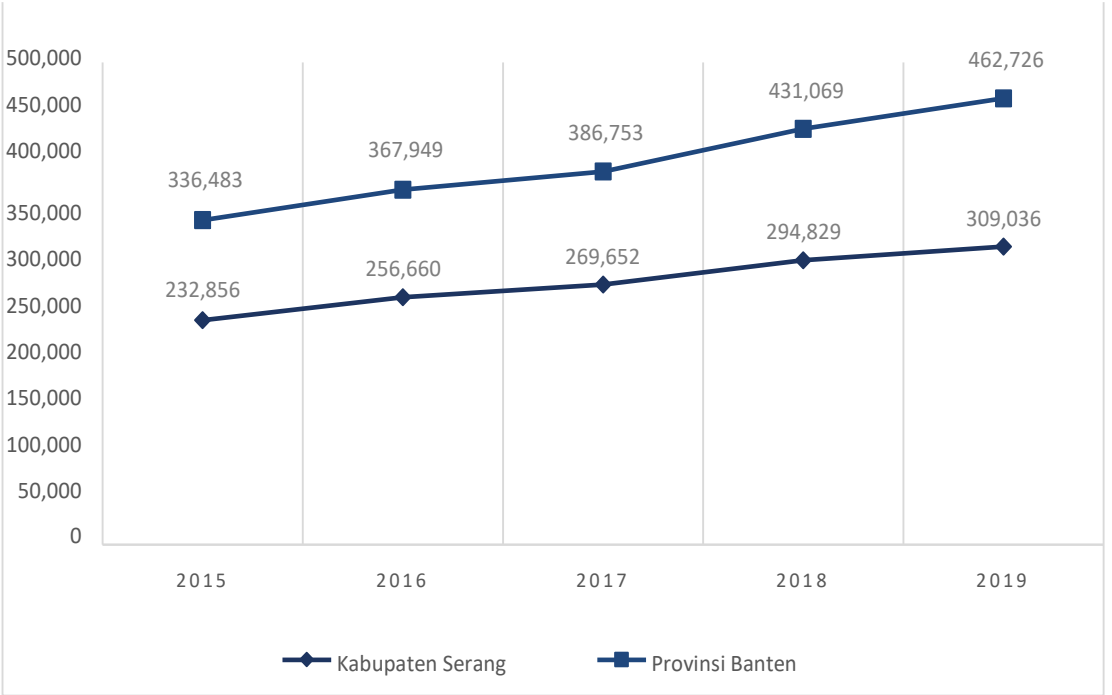


**Gambar 2.19 Perbandingan Garis Miskin Kabupaten Serang dengan Garis Kemiskinan Provinsi Banten (Rp), 2015-2019**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020*

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Serang lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Banten yang mencapai 5,92 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada diposisi kelima dari delapan kabupaten/kota. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 242,02 ribu jiwa, disusul Kabupaten Lebak sebanyak 120,83 ribu jiwa, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 120,44 ribu jiwa. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon masing-masing sebanyak 42,24 ribu jiwa, 40,99 ribu jiwa, dan 16,31 ribu jiwa. Sementara itu jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, posisi tertinggi ditempati Kabupaten Lebak yaitu sebesar 9,94 persen, disusul Kabupaten Pandeglang sebesar 9,92 persen, dan Kabupaten Tangerang sebesar 6,23 persen. Sedangkan posisi

Kabupaten Serang termasuk tiga wilayah dengan persentase penduduk miskin terkecil sebesar 4,94 bersama Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan, dengan persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 3,69 persen dan 2,29 persen.

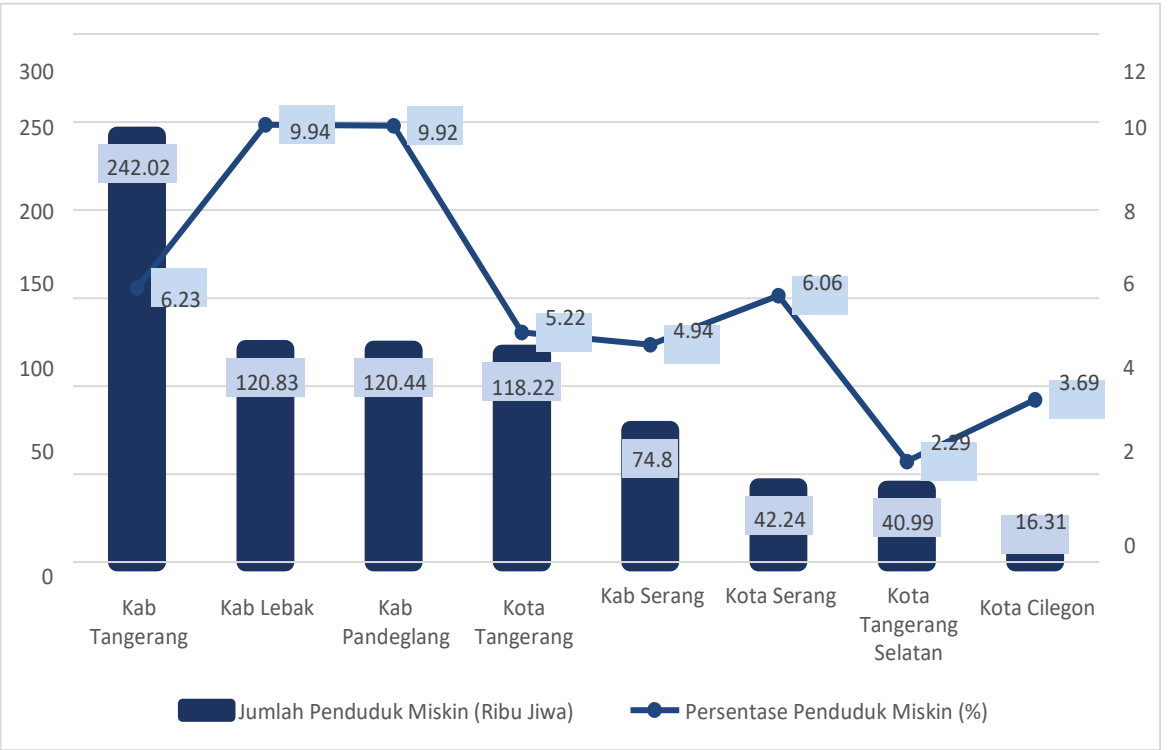


**Gambar 2.20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Serang sebesar 0,43, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan masing-masing menjadi 0,79 dan 0,80. Nilai indeks pada tahun 2018 yang meningkat menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2019 dan 2020, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,65 dan 0,4.

**Tabel 2.17 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)** | 0,43 | 0,79 | 0,80 | 0,65 | 0,4 |
| **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)** | 0,05 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,05 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021*

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Serang periode tahun 2016-2020 juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, nilai indeks mencapai 0,05. Namun demikian, pada tahun 2017 nilai indeks meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 0,19, dan kembali meningkat sebesar 0.03 menjadi 0,22 pada tahun 2018. Terakhir pada tahun 2019 nilai indeks menurun menjadi sebesar 0,16 hingga menjadi sebesar 0,05 pada tahun 2020. Penurun indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Serang semakin menurun.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### *2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia*

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Dalam hal ini, manusia atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran akhir (*the ultimated end*), sedang upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan yang dapat dirasakan oleh penduduk dengan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, IPM juga merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Menurut UNDP, perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan dihitung dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Menurut UNDP, IPM suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori sangat tinggi didapatkan apabila IPM ≥80, kategori tinggi apabila IPM berada diantara ≤70 – <80, termasuk dalam kategori sedang apabila IPM antara ≤60 – <70, dan masuk kategori rendah jika IPM <60. Selama periode 2015-2019, perkembangan IPM Kabupaten Serang menunjukkan tren yang positif terlihat dari peningkatan setiap tahun, walaupun masih berada di kategori sedang. Sehingga, masih dimungkinkan adanya peningkatan IPM ke depannya. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Serang sebesar 64,61 dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 mencapai 66,70, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,42 per tahun.

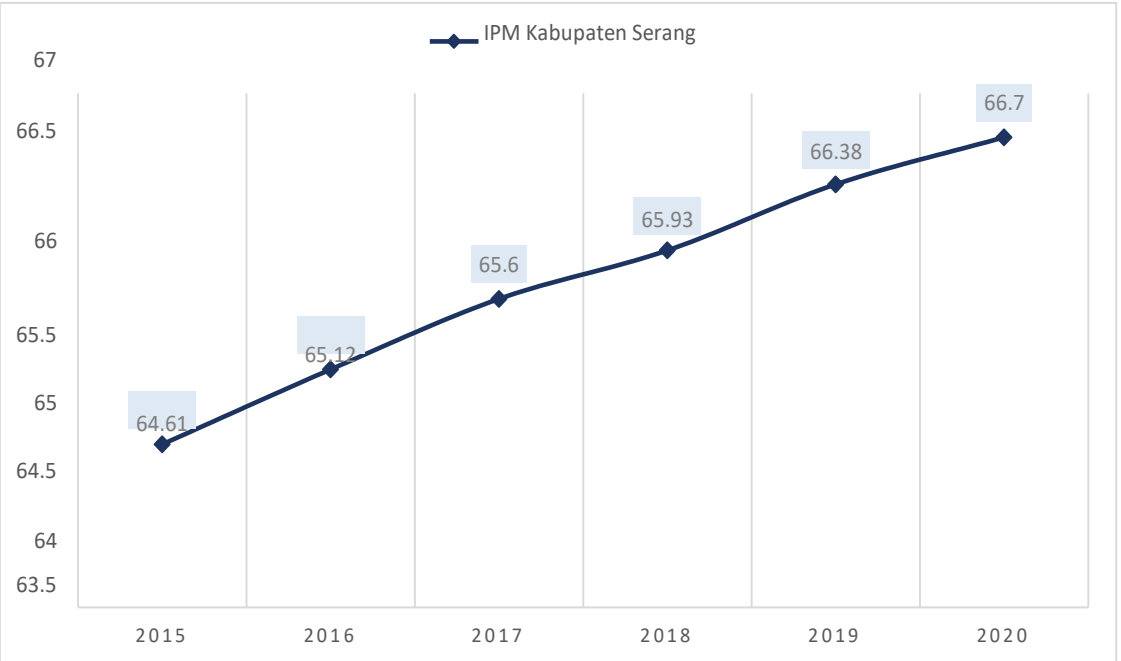


**Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Serang, 2015-2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Banten, pada tahun 2020 IPM Kabupaten Serang sebesar 66.70 lebih kecil dari IPM Provinsi Banten yang mencapai 72,45. Berdasarkan komponen penyusunnya angka harapan hidup di Kabupaten Serang sebesar 64,64 tahun, harapan lama sekolah sebesar 12,57 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,50 tahun dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 10,66 juta rupiah. Dari seluruh komponen tersebut nilai Kabupaten Serang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai dari masing-masing komponen penyusun IPM Provinsi Banten. Namun demikian, jika dibandingkan tahun sebelumnya IPM Kabupaten Serang mengalami peningkatan sedangkan IPM Provinsi Banten justru menurun.

**Tabel 2.18 Komponen IPM Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2020**

| Komponen IPM | Kabupaten Serang | Provinsi Banten |
|---|---|---|
| **Usia harapan hidup (tahun)** | 64,64 | 69,96 |
| **Harapan lama sekolah (tahun)** | 12,57 | 12,89 |
| **Rata-rata lama sekolah (tahun)** | 7,50 | 8,89 |
| **Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)** | 10665 | 11.986 |
| IPM | **66,70** | **72,45** |

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 81,36 dengan kategori sangat tinggi, selanjutnya Kota Tangerang sebesar 78,25, dan Kota Cilegon sebesar 73,05 dengan kategori tinggi. Sementara itu lima wilayah lainnya memiliki IPM dibawah IPM Provinsi Banten, dengan IPM terendah diduduki oleh Kabupaten Lebak dengan nilai IPM sebesar 63,91 dan termasuk dalam kategori IPM sedang. Sama seperti tahun sebelumnya IPM Kabupaten Serang tahun 2020 berada di posisi keenam dari delapan kabupaten/kota yang ada. Walaupun demikian peningkatan IPM Kabupaten Serang dari tahun 2019 ke tahun 2020 merupakan yang tertinggi dibanding kab/kota lainnya di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah kondisi pandemi.

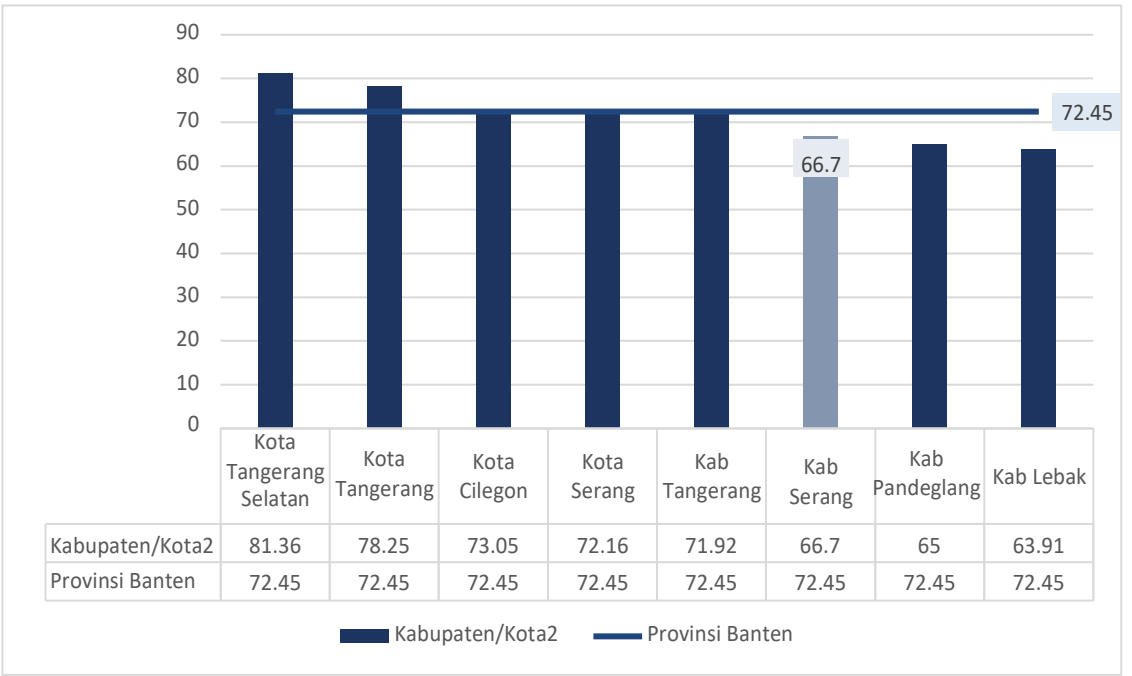


| | Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang | Kota Cilegon | Kota Serang | Kab Tangerang | Kab Serang | Kab Pandeglang | Kab Lebak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota2 | 81.36 | 78.25 | 73.05 | 72.16 | 71.92 | 66.7 | 65 | 63.91 |
| Provinsi Banten | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.45 |

**Gambar 2.22 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

### *2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah*

Salah satu indikator aspek pendidikan yang digunakan untuk merepresentasikan pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk

usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2015-2020, RLS Kabupaten Serang mengalami tren positif yaitu dengan adanya peningkatan setiap tahun walaupun relatif rendah. RLS Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah sebesar 6,9 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 7,50 tahun tahun pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2017, yaitu naik sebesar 0,19 tahun dari 6,98 tahun pada tahun 2016 menjadi 7,17 tahun. RLS Kabupaten Serang sebesar 7,50 tahun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di Kabupaten Serang baru mampu mencapai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Jika dibandingkan angka RLS Kabupaten Serang pada tahun 2020 lebih rendah daripada Provinsi Banten yang mencapai 8,89 tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang berkewajiban untuk terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya agar wajib belajar 9 tahun yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II dapat tercapai.

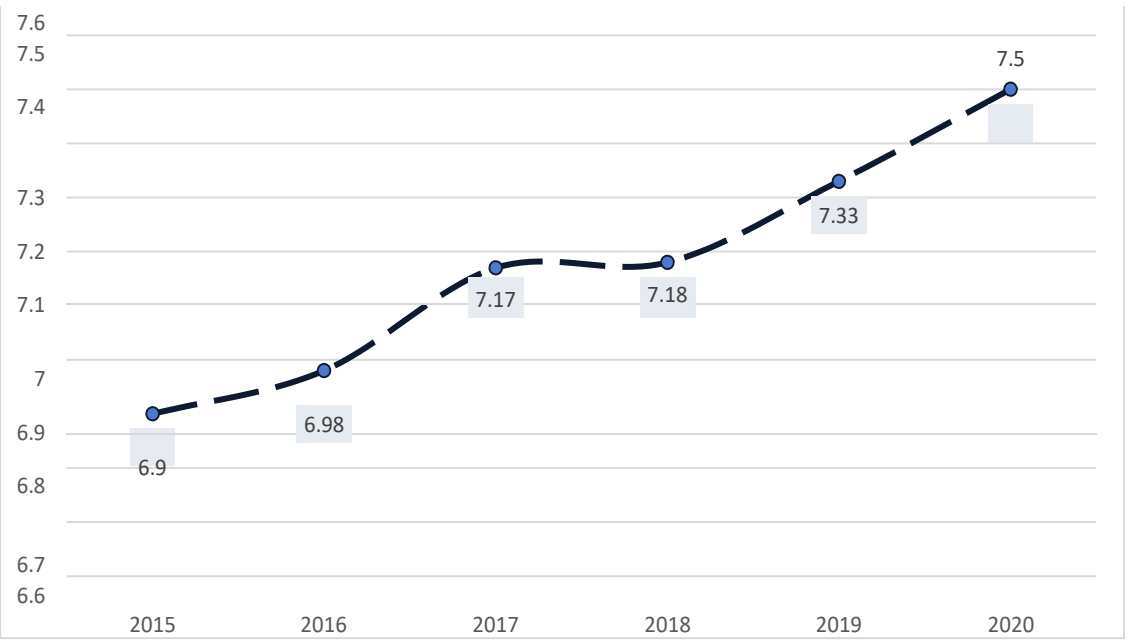


**Gambar 2.23 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang, 2015-2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Pada tahun 2020, Kabupaten Serang berada pada posisi tiga terbawah dengan RLS terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Posisi RLS tertinggi diduduki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 11,81 tahun, selanjutnya Kota

Tangerang sebesar 10,69 tahun, dan Kota Cilegon sebesar 9,87 tahun. Ketiga kota tersebut mampu mencapai RLS di atas ketentuan wajib belajar 9 tahun, sedangkan lima wilayah lainnya masih di bawah RLS Provinsi Banten yang mencapai 8,89 tahun. Posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Lebak dengan angka RLS sebesar 6,40 tahun.

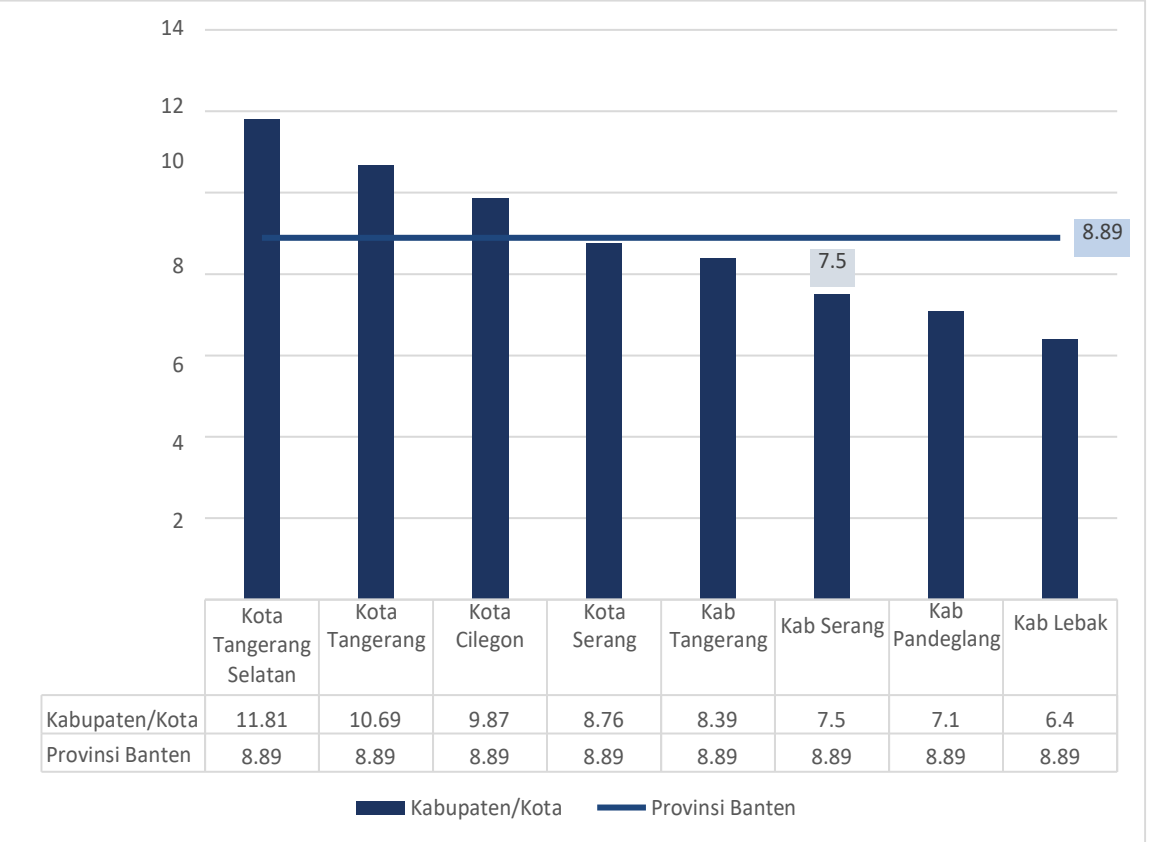


| | Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang | Kota Cilegon | Kota Serang | Kab Tangerang | Kab Serang | Kab Pandeglang | Kab Lebak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | 11.81 | 10.69 | 9.87 | 8.76 | 8.39 | 7.5 | 7.1 | 6.4 |
| Provinsi Banten | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |

**Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

### *2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah*

Selain angka rata-rata lama sekolah, indikator yang juga merupakan representasi pembangunan manusia dalam aspek pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS). HLS dapat diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Penghitungan HLS bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

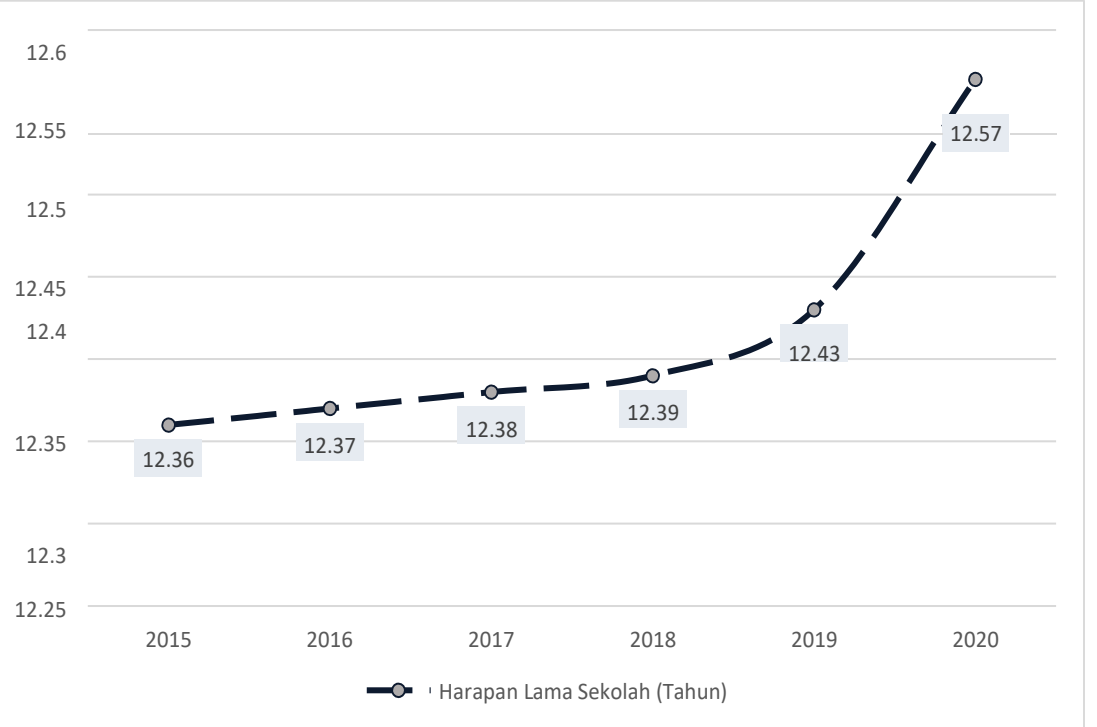


**Gambar 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Serang, 2015-2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Sama seperti angka RLS, angka HLS Kabupaten Serang selama periode 2015-2020 juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dengan peningkata terbesar terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2015, angka HLS Kabupaten Serang hanya sebesar 12,36 tahun, kemudian meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2020 menjadi 12,57 tahun. Angka HLS Kabupaten Serang pada tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah selama 12,57 tahun atau telah lulus pendidikan SMA. Namun demikian, HLS di Kabupaten Serang cenderung masih jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Serang harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Serang.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, HLS Kabupaten Serang berada pada posisi kedua terbawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi

Banten yaitu sebesar 12,57 tahun. Posisi HLS tertinggi pertama diduduki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 14,47 tahun, selanjutnya Kota Tangerang sebesar 13,85 tahun, dan Kota Pandeglang sebesar 13,47 tahun. Terdapat empat wilayah dengan HLS di atas HLS Provinsi Banten, dan terdapat 4 wilayah pula yang memiliki angka HLS di bawah HLS Provinsi Banten. Posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Lebak dengan angka HLS sebesar 11,97 tahun.

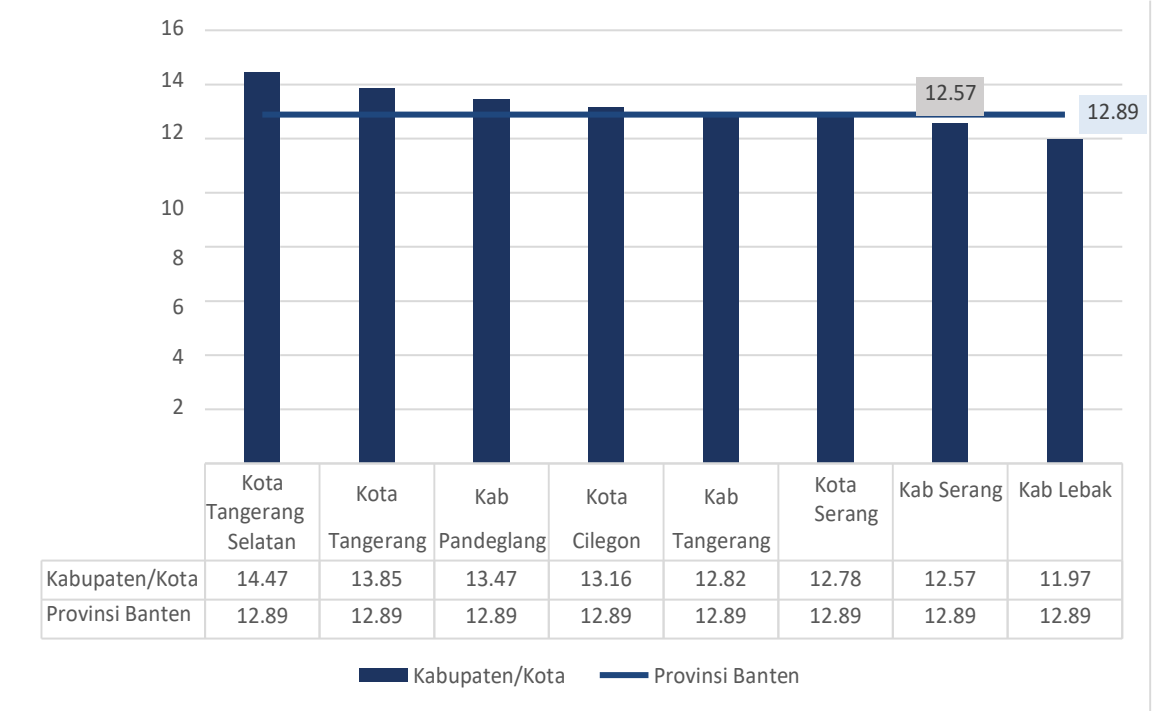


| | Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang | Kab Pandeglang | Kota Cilegon | Kab Tangerang | Kota Serang | Kab Serang | Kab Lebak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | 14.47 | 13.85 | 13.47 | 13.16 | 12.82 | 12.78 | 12.57 | 11.97 |
| Provinsi Banten | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |

**Gambar 2.26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

### *2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup*

Aspek kesehatan juga termasuk dalam salah satu indikator perhitungan IPM yang dicerminkan oleh angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup didefinisikan sebagai perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Perhitungan indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Sama seperti indikator aspek pendidikan, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Serang selama periode 2015-2020 juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun

2015, AHH di Kabupaten Serang adalah sebesar 63,59 tahun, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 64,64 tahun pada tahun 2020, dengan rata-rata peningkatan AHH per tahun sebesar 0,21 tahun. AHH sebesar 64,64 tahun menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Serang dapat menjalani hidup selama 64 tahun. Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Serang tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun.

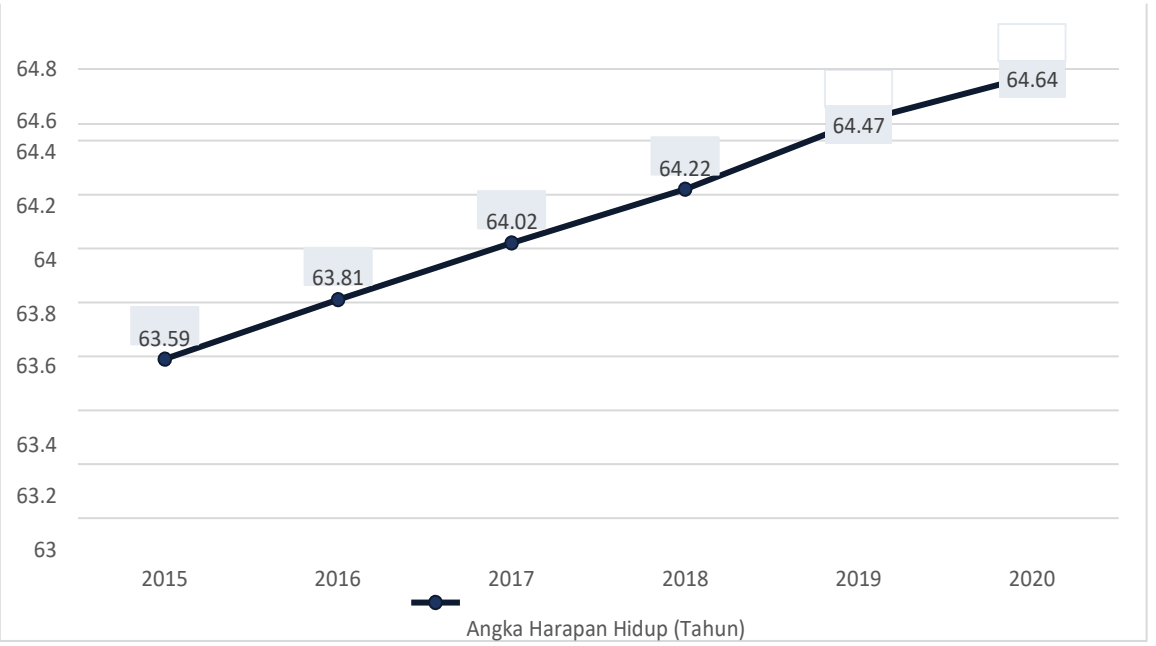


**Gambar 2.27 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Serang, 2015-2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021*

Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Serang menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Sedangkan HLS tertinggi diduduki oleh Kota Tangerang Selatan yaitu mencapai 72,47 tahun, disusul Kota Tangerang dengan AHH sebesar 71,60 tahun, dan Kota Tangerang sebesar 69,89 tahun. Walaupun demikian, enam dari delapan kabupaten/kota memiliki AHH di bawah AHH Provinsi Banten yang mencapai 69,96 tahun. Posisi terendah kedua setelah Kabupaten Serang adalah Kabupaten Pandeglang dengan AHH sebesar 64,66 tahun.

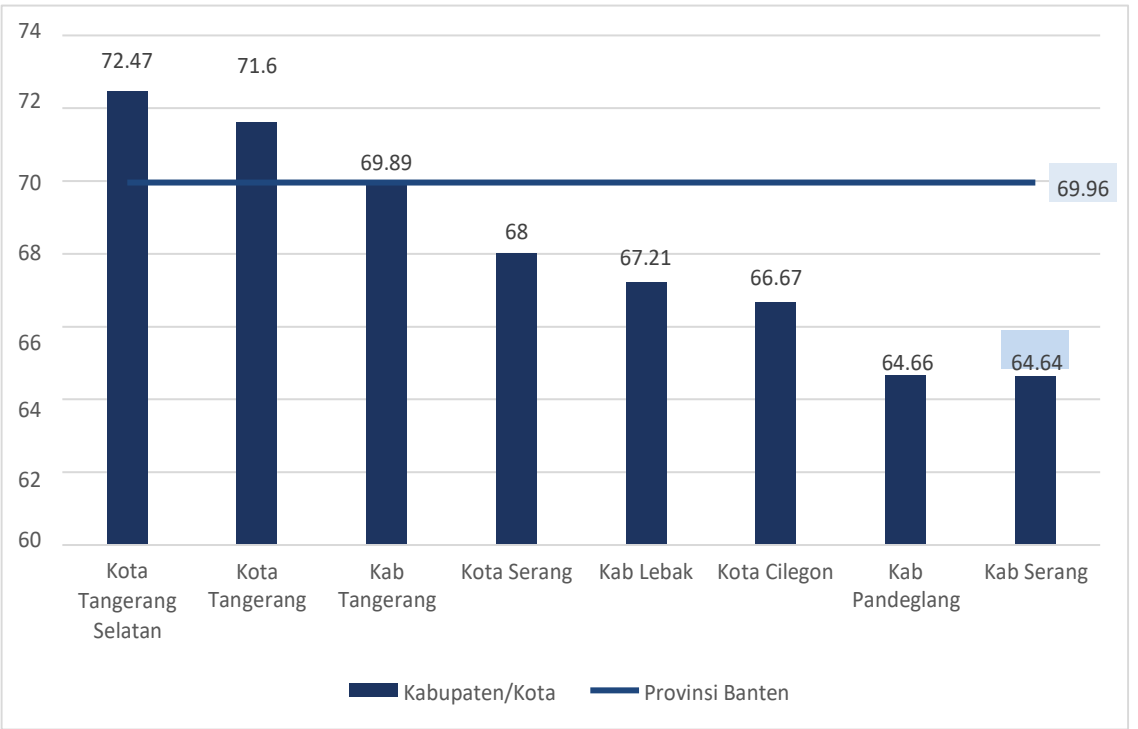


**Gambar 2.28 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

### *2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk*

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana kondisi kurang gizi diketahui berdasarkan antropometri seperti pertambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Balita dikatakan terkena gizi buruk dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal.

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Banten, pendataan gizi buruk di Provinsi Banten didasarkan pada 2 kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata balita tersebut

merupakan kasus gizi buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di posyandu dan puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Serang Provinsi Banten tahun 2019 ditemukan 223 kasus gizi buruk di Kabupaten Serang. Kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 207 kasus.

Gizi buruk berdampak pada tumbuh kembang anak yang tidak sempurna, tubuh anak akan terhambat pertumbuhannya bahkan bisa menyebabkan terhentinya pertumbuhan sebelum waktunya. Tubuh anak bisa menjadi pendeh (Stunting) dan kurus (Wasting). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

**Tabel 2.19 Prevalensi Stunting Kabupaten Serang**
**Tahun 2018 sampai 2020**

| Tahun | Jumlah Sasaran Balita 0-59 bulan yg diukur (tb/u) | Balita dengan status “Pendek” dan "Sangat Pendek" | % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 57456 | 13840 | 24,09 |
| 2019 | 11437 | 2331 | 20,38 |
| 2020 | 107837 | 13652 | 12,66 |

### *2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat digambarkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja maupun distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Selain itu, dapat pula dilihat apakah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya peningkatan pendapatan penduduk akan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

BPS mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, maupun yang mencari pekerjaan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Serang (2021), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Serang pada tahun 2020 berjumlah 699.858 orang, terdiri dari 455.162 orang laki-laki dan 244.696 orang perempuan. Menurut tingkat pendidikannya, pada tahun yang sama persentase angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Serang adalah tidak tamat atau lulusan SD yaitu sebesar 39,70 persen. Kemudian angkatan kerja lulusan SMA/SMK/MA sebesar 30,75 persen, disusul pendidikan SMP/MTs sebesar 24,41 persen, dan persentase terendah pendidikan diploma/sarjana sebesar 5,13 persen. Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Serang berjumlah 614.320 orang terdiri atas 392.626 laki-laki dan 221.694 perempuan. Sedangkan pengangguran terbuka di Kabupaten Serang mencapi 85.538 orang, terdiri atas 62.536 laki-laki dan 23.002 perempuan.

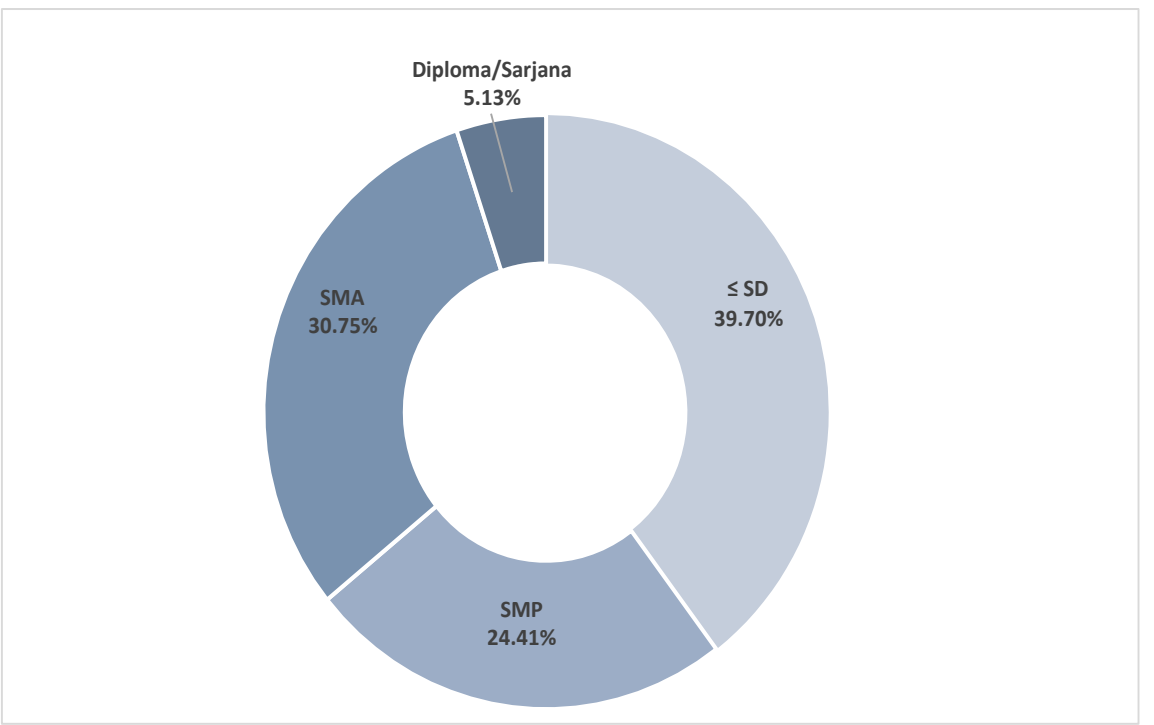


**Gambar 2.29 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2020**

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021 (diolah)*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sepanjang tahun 2017-2020, TPAK Kabupaten Serang cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Serang mencapai 59,95 persen. Mengalami peningkatan TPAK pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 62,42 persen dan 64,06 persen. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,61 menjadi 63,45. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Serang pada tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar 63,45 persen dapat diinterpretasikan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 63 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase TPAK yang cukup tinggi akan mendukung dari sisi produktivitas tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tersebut akan mengarah pada produktivitas yang tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Serang. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

**Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Serang, 2017-2020**

| Tahun | Angkatan Kerja (orang) | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (orang) | TPAK (%) |
|---|---|---|---|
| **2017** | 628.101 | 1.047.648 | 59,95 |
| **2018** | 659.042 | 1.055.834 | 62,42 |
| **2019** | 681.450 | 1.063.849 | 64,06 |
| **2020** | 699.858 | 1.102.850 | 63,45 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2018-2020 (diolah)*

Lebih dari itu, jika dilihat menurut gender terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2020 mencapai 41,27 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 22,18 persen. Selisih yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dan perempuan memperlihatkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Serang adalah kaum laki-laki. Alasan utama rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Serang dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga yakni sebesar 229.454 orang dari total penduduk berumur 15 tahun keatas berjenis kelamin perempuan sebesar 546.416 orang.

**Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020**

| Uraian | TPAK (%) |
|---|---|
| **Laki-laki** | 41,27 |
| **Perempuan** | 22,18 |
| **TPAK (%)** | 63,45 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2020* (diolah)

Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, TPAK Kabupaten Serang masih berada dibawah TPAK Provinsi Banten yang mencapai 64,52 persen, dan berada pada posisi keempat dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten. TPAK tertinggi di Provinsi Banten ditempati oleh Kabupaten Tangerang dengan TPAK sebesar 66,69 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak dengan TPAK masing-masing sebesar 65,7 dan 64,81 persen. Sedangkan lima daerah lainnya masih dibawah TPAK Provinsi Banten. Sedangkan TPAK terendah yakni Kota Tangerang Selatan dengan persentase sebesar 61,37 persen.

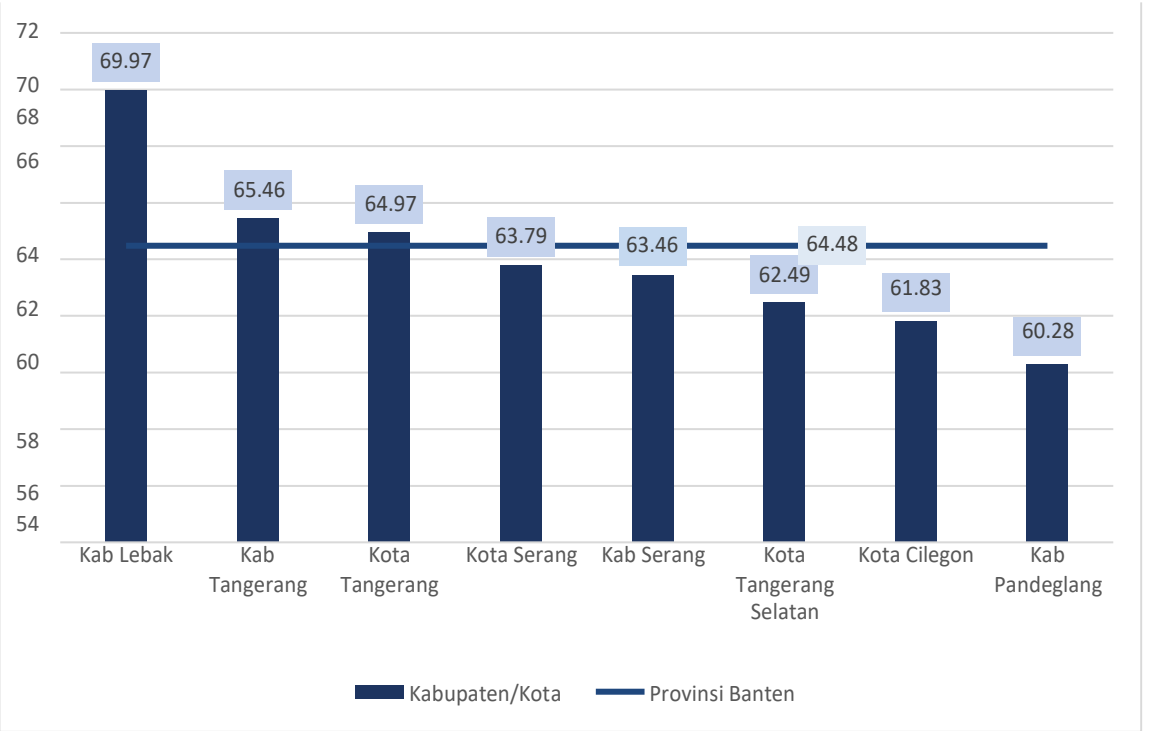


**Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (%), 2020**

*Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 (diolah)*

Jika dibandingkan dengan TPAK di Provinsi Banten dan Nasional, selama periode 2016-2020 TPAK Kabupaten Serang masih berada di bawah TPAK Provinsi maupun Nasional. Walaupun demikian selisih TPAK dari tahun ke tahun semakin mengecil. Pada tahun 2016 selisih TPAK Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten mencapai 3,27 persen, sedangkan selisih dengan TPAK Nasional mencapai 5,37 persen. Sementara pada tahun 2020 selisih TPAK Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten hanya sebesar 1,03 persen, sedangkan selisih dengan TPAK Nasional mencapai 4,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang terjun untuk bejerha dan mencari pekerjaan, sehingga perlu pula menyediakan lesempatan kerja yang memadai.

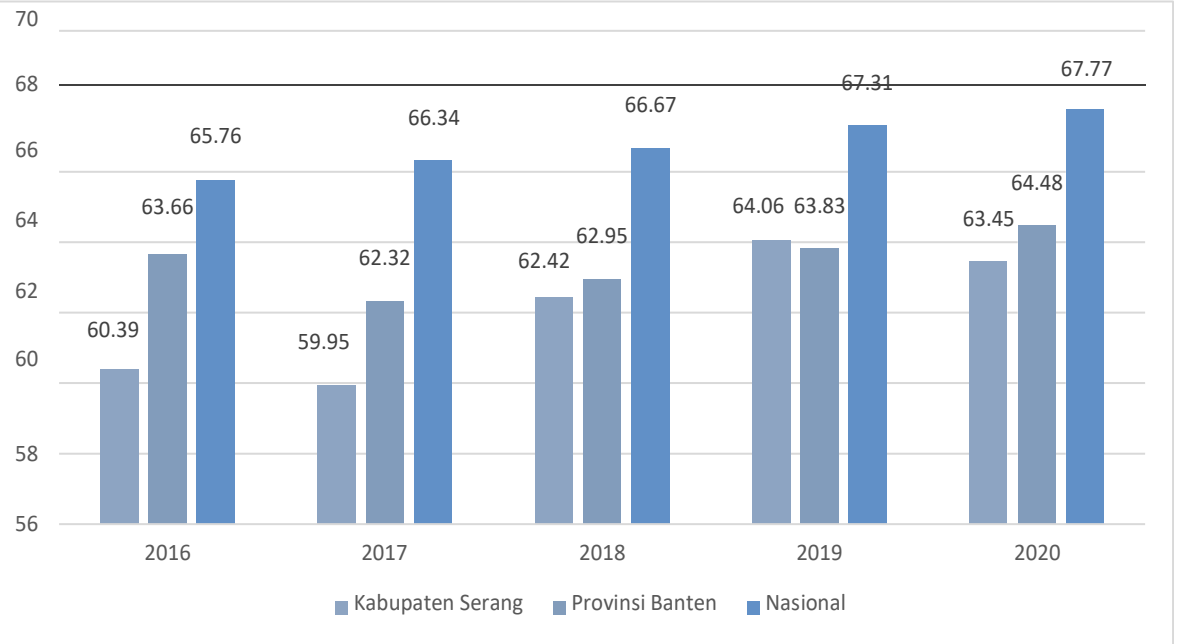


**Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), 2016-2020**

*Sumber: BPS dan Provinsi Banten Dalam Angka, 2021 (diolah)*

### *2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka*

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (bps.go.id). Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017, angka TPT di Kabupaten Serang mencapai angka 13,00 persen. TPT di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan dua tahun berturut-turut yakni menjadi 12,78 persen di tahun 2018 dan 10,65 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,57 menjadi 12,22 persen.

**Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun | TPT (%) |
|---|---|
| **2016** | n.a |
| **2017** | 13,00 |
| **2018** | 12,78 |
| **2019** | 10,65 |
| **2020** | 12,22 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021*

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 8,94 persen dan 3,29 persen Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

**Tabel 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2020**

| Uraian | TPT (%) |
|---|---|
| **Laki-laki** | 8,94 |
| **Perempuan** | 3,29 |
| TPT (%) | **12,22** |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021 (diolah)*

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, TPT Kabupaten Serang masih berada diatas TPT Provinsi Banten sebesar 10,64 persen, dan merupakan 3 daerah dengan TPT tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten. Selain Kabupaten Serang, Kabupaten/Kota yang juga mencapai persentase TPT di atas TPT Provinsi Banten adalah Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang dengan masing-masing TPT sebesar 12,69 dan 13,06. Sedangkan daerah yang memiliki TPT terendah yakni Kota Tangerang Selatan dengan persentase sebesar 8,48 persen.

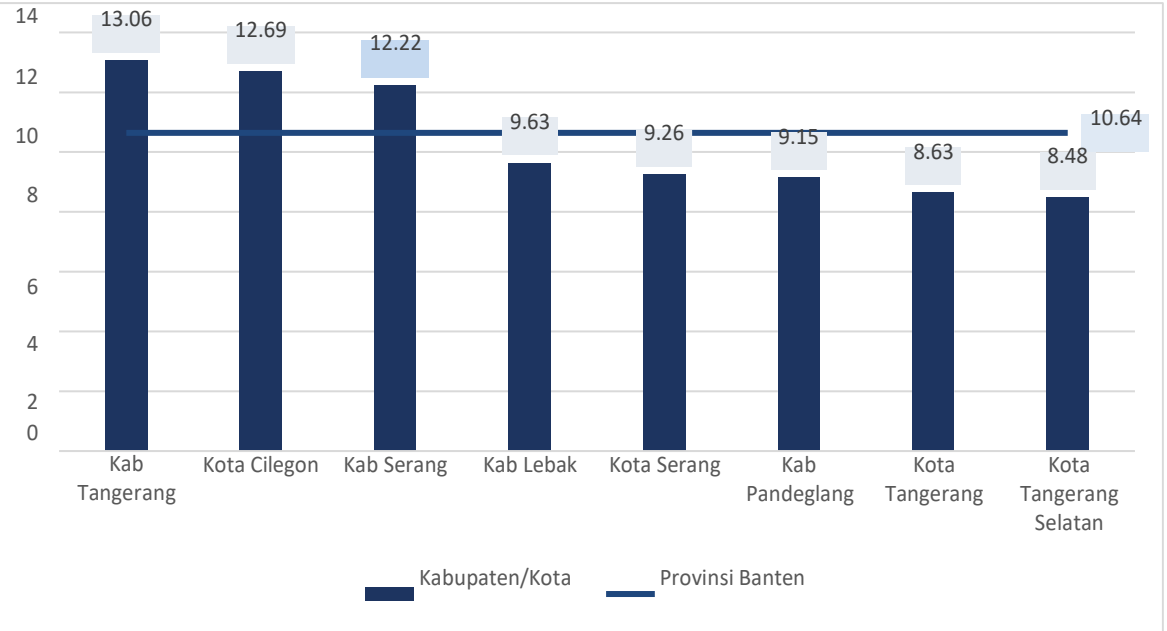


**Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (%), 2020**

*Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2021 (diolah)*

Selama tahun 2017-2020, TPT di Kabupaten Serang berada di atas TPT di Provinsi Banten dan Nasional. Rata-rata TPT Kabupaten Serang setiap tahunnya mencapai 12,11 persen, sedangkan TPT Provinsi Banten mencapai rata-rata 9,08 persen, sementara TPT Nasional hanya mencapai 5,72 persen setiap tahunnya. Walaupun demikian selisih TPT dari tahun ke tahun semakin mengecil. Pada tahun 2017 selisih TPT Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten mencapai 3,72 persen, sedangkan selisih dengan TPT Nasional mencapai 7,5 persen. Sementara pada tahun 2020 selisih TPT Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten hanya sebesar 1,58 persen. sedangkan selisih dengan TPT Nasional sebesar 5,15 persen. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya pengangguran di Kabupaten Serang sehingga diperlukan upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

**Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Serang, 2017-2020**

| Tahun | TPT (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Kabupaten Serang | Provinsi Banten | Nasional |
| **2017** | 13,00 | 9,28 | 5,50 |
| **2018** | 12,63 | 8,47 | 5,30 |

| Tahun | TPT (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Kabupaten Serang | Provinsi Banten | Nasional |
| **2019** | 10,58 | 8,11 | 5,23 |
| **2020** | 12,22 | 10,64 | 7.07 |

*Sumber: BPS dan Provinsi Banten Dalam Angka, 2021*

### *2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Sementara rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 2,24 menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 rasio penduduk bekerja di Kabupaten serang semakin meningkat, diperkuat dengan nilai rasio yang terus naik tiap tahun. Walaupun jumlah angkatan kerja meningkat, namun angkatan kerja yang bekerja pun juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, rasio penduduk bekerja mencapai 87,00 persen, dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 89,35 persen. Kemudian mengalami penurunan menjadi 87,78 pada tahun 2020.

**Tabel 2.25 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Serang, 2017-2020**

| Tahun | Angkatan Kerja Bekerja (orang) | Jumlah Angkatan Kerja (orang) | Rasio Penduduk Bekerja (%) |
|---|---|---|---|
| **2017** | 546.473 | 628.101 | 87,00 |
| **2018** | 574.879 | 659.042 | 87,23 |
| **2019** | 608.866 | 681.450 | 89,35 |
| **2020** | 614.320 | 699.858 | 87,78 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2018-2021 (diolah)*

Demikian pula jika dilihat menurut jenis kelaminnya, pada tahun 2020 perbandingan rasio penduduk bekerja laki-laki dan perempuan hampir sama, masing-masing mencapai 86,26 persen dan 90,6 persen, Hal ini mencerminkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama. Namun demikian, pada kenyataannya pertambahan persediaan lapangan pekerjaan tidak secepat pertambahan jumlah angkatan kerja, sehingga jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi rebutan sekian banyak para pencari kerja yang yang terdapat di pasar

kerja. Mereka yang kalah bersaing harus tersingkir dari lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

**Tabel 2.26 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2020**

| Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| **Bekerja (orang)** | 392.626 | 221.694 | 614.320 |
| **Pengangguran Terbuka (orang)** | 62.536 | 23.002 | 85.538 |
| **Angkatan Kerja (orang)** | 455.162 | 244.696 | 699.858 |
| **Rasio penduduk yang bekerja (%)** | 86,26 | 90.60 | 87,78 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021 (diolah)*

### *2.2.2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK*

Salah satu cara perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan mengupayakan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dapat dinilai dari beberapa indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 nilai IKM Kabupaten Serang selalu memperoleh nilai B.

**Tabel 2.27 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serang, 2016-2020**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | IKM | B | B | B | B | B |

*Sumber: LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020*

Sedangkan opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan

keuangan ini didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil Opini BPK selama tahun 2015-2018 selalu memperoleh penilaian WTP. Pada tahun 2018 hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sebesar 80,27% dengan predikat Baik.

**Tabel 2.28 Opini BPK Kabupaten Serang, 2015-2019**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

*Sumber: LKPJ Kabupaten Serang, 2015-2019*

### *2.2.2.10 Persentase PAD terhadap Pendapatan*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (www.djpk.kemenkeu.go.id). PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Selama periode 2016-2020, persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Serang relatif menurun, walaupun sempat mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada tahun 2016, kontribusi PAD mencapai 23,94 persen. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusi yang cukup signifikan yakni sebesar 5,07 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kontribusi PAD mengalami penurunan berturut-turut masing-masing menjadi sebesar 23,88 persen dan 23,39 persen.

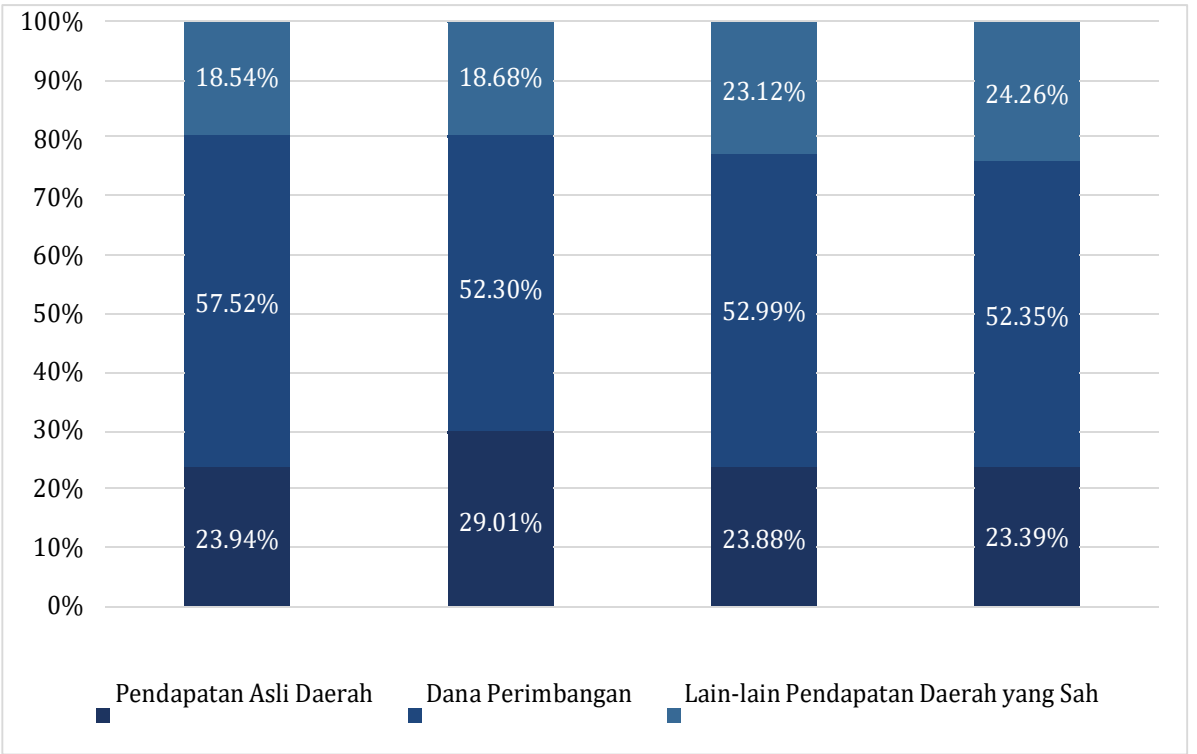


**Gambar 2.33 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Serang, 2016-2019**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang 2016-2019 (diolah)*

Sedangkan jika berdasarkan nominalnya PAD Kabupaten Serang selama periode 2016-2019 sencerung fluktuatif. Pada tahun 2016 PAD mencapai 590.865 juta rupiah. Kemudian naik cukup tajam pada tahun 2017 menjadi 815.399 juta rupiah. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Serang turun menjadi 697.085 juta rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 10.780 juta rupiah menjadi 707.865 juta rupiah.

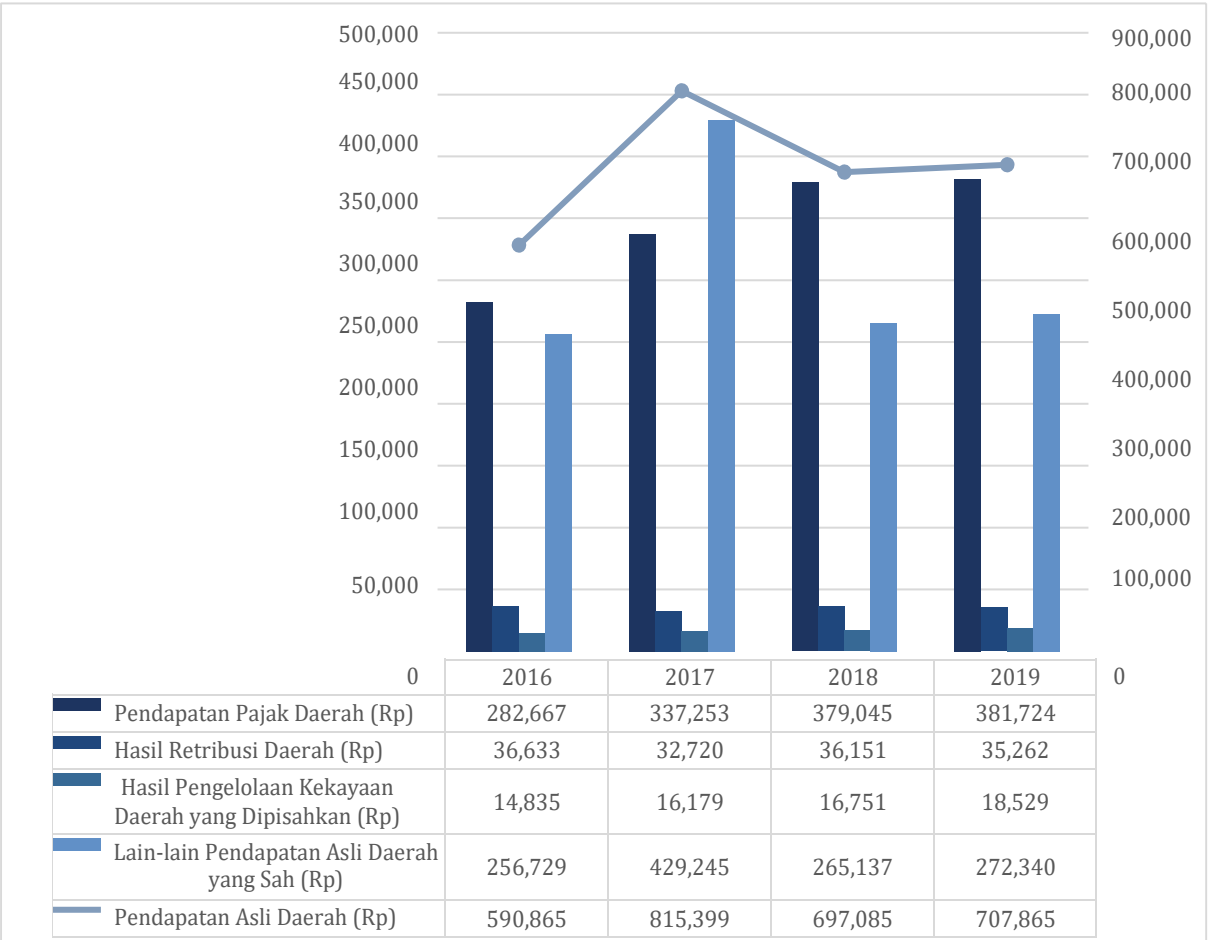


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Pajak Daerah (Rp) | 282,667 | 337,253 | 379,045 | 381,724 |
| Hasil Retribusi Daerah (Rp) | 36,633 | 32,720 | 36,151 | 35,262 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp) | 14,835 | 16,179 | 16,751 | 18,529 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp) | 256,729 | 429,245 | 265,137 | 272,340 |
| Pendapatan Asli Daerah (Rp) | 590,865 | 815,399 | 697,085 | 707,865 |

**Gambar 2.34 Struktur PAD Kabupaten Serang dalam Juta Rupiah, 2016-2019**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2019 (diolah)*

Namun jika dilihat berdasarkan komponennya, selama periode 2016-2019 pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah cenderung fluktuatif. Pendapatan pajak daerah pada tahun 2016 sebesar 282.667 juta rupiah, kemudian terus meningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 381.724. Demikian pula hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada tahun 2016 mencapai 14.835 juta rupiah, kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 18.529 juta rupiah. Namun demikian sama seperti penerimaan PAD secara keseluruhan, hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sempat mengalami penurunan di tahun 2018, tetapi meningkat pada tahun 2017 dan 2019. Walaupun demikian, dampak Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini dapat berpengaruh pada penerimaan PAD hingga satu atau dua tahun ke depan.

### *2.2.2.11 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Salah satu perwujudan ketersediaan pangan tersebut, merujuk pada undang-undang, adalah dengan menilai kecukupan gizi, baik kecukupan gizi dalam bentuk energi dan protein maupun keberagaman ketersediaan gizi. Keanekaragaman ketersediaan konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang yang secara kuantitatif diimplementasikan dalam indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH digunakan untuk bahan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan suatu pangan wilayah. Perhitungan PPH terbentuk dari beberapa komponen yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

**Tabel 2.29 Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2015-2020**

| Perhitungan Skor PPH | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Konsumsi kalori** | 1825,1 | 2095,2 | 2101,0 | 2079,2 | 2094,5 | 2570,2 |
| **Persentase AKE** | 84,9 | 97,5 | 97,7 | 96,7 | 97,4 | 119,5 |
| **Skor Aktual** | 101,5 | 99,5 | 99,8 | 94,5 | 101,7 | 116,5 |
| **Skor AKE** | 86,2 | 96,9 | 97,5 | 91,4 | 99,1 | 139,2 |
| Skor PPH | **84,3** | **86,1** | **86,5** | **87,4** | **88,6** | **88,9** |

*Sumber: Analisis Konsumsi dan Perencanaan Pangan Kabupaten Serang, 2015-2020*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa konsumsi kalori per kapita selama periode 2015-2020 cenderung meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2018. Pada tahun 2015 konsumsi kalori per kapita mencapai 1825,1, kemudian meningkat dua tahun bertururt-turut yakni sebesar 2095,2 tahun 2016, dan 2101,0 pada tahun 2017. Namun demikian, pada tahun 2018 turun hingga mencapai 2079,2, tetapi kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 2094,5. Sedangkan tahun 2020 meningkat signifikan hingga mencapai 2570,2 atau naik sebesar 475,7. Demikian pula dengan persentase AKE, skor aktual, dan skor AKE yang mengalami penurunan pada tahun 2018, anmun kembali

meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan skor PPH Kabupaten Serang selama periode 2015-2020 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 mencapai 84,3, dan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2020 mencapai 88,9.

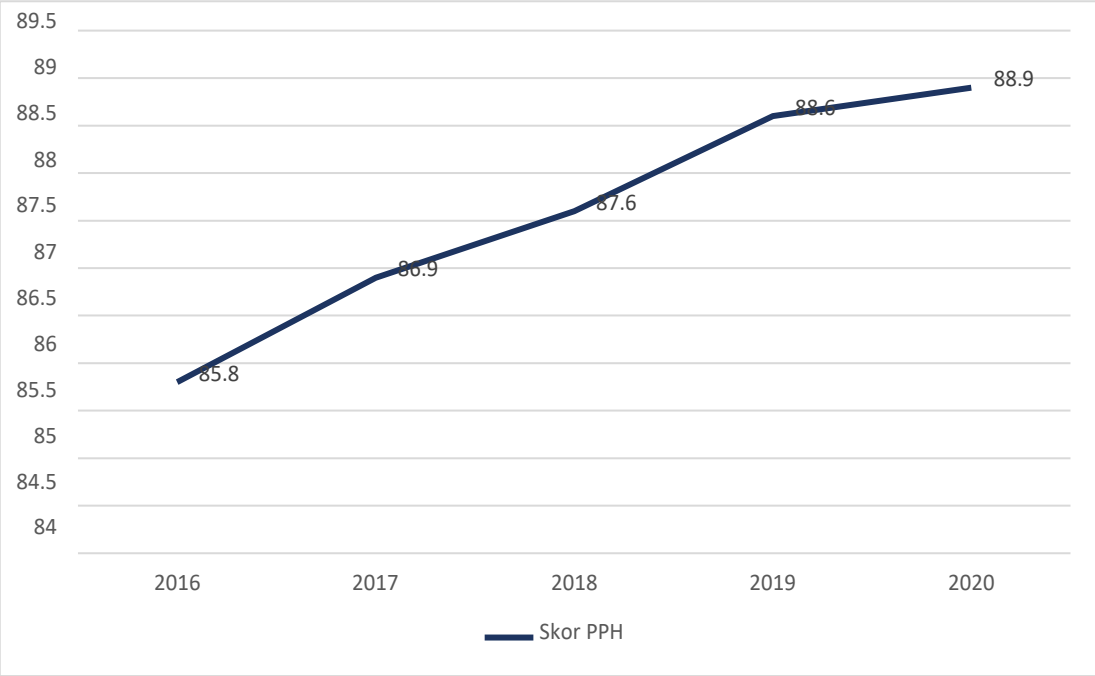


**Gambar 2.35 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Serang, 2016-2020**
*Sumber : LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020*

Skor PPH Kabupaten Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Kabupaten Serang memperoleh skor PPH 85,8, kemudian di Tahun 2017 meningkat sebesar 1,1 menjadi 86,9. Skor PPH tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 88,9.

#### *2.2.2.12 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*

Indeks Pembangunan Inklusif dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks ini terdiri atas 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar I yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pilar II yaitu tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Pilar III yaitu tentang perluasan akses dan kesempatan. Nilai indeks berkisar antara 0-10, dengan nilai 1-3 adalah kurang memuaskan, nilai 4-7 adalah memuaskan, dan nilai 8-10 adalah sangat memuaskan.

Analisis mengenai indeks pembangunan ekonomi inklusif bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan yang inklusif menunjukkan proses pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Perkembangan angka indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Serang ditunjukkan oleh gambar berikut.

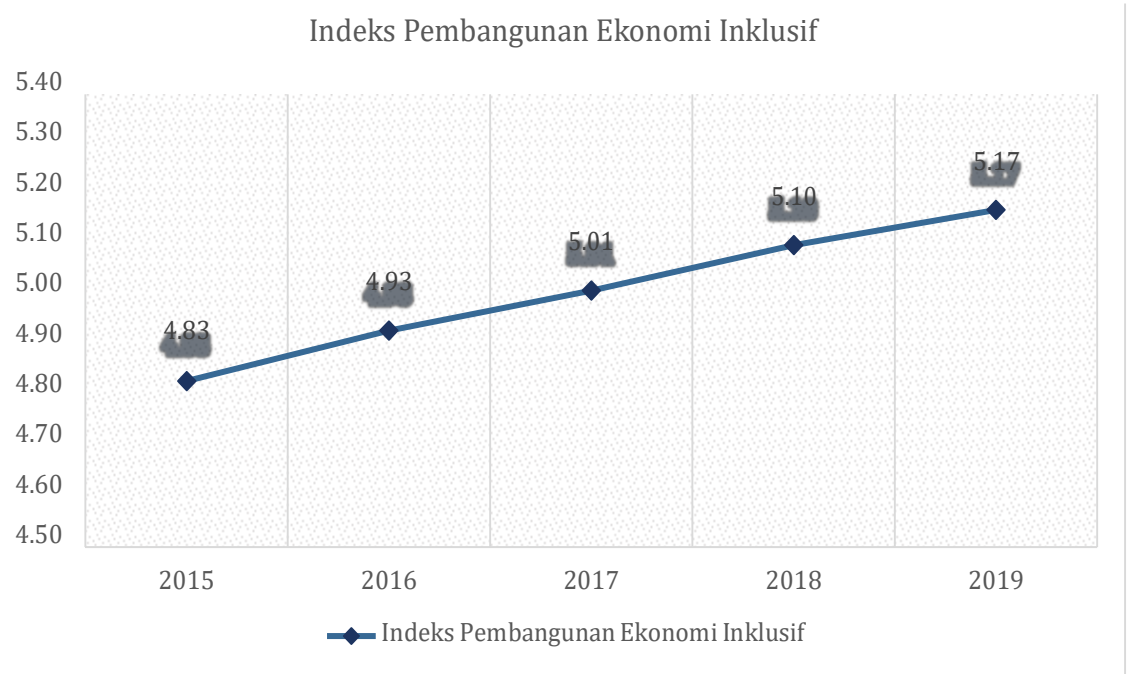


**Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang, 2015-2019**

*Sumber: Bappenas, 2020*

Selama periode 2015-2019, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari bernilai 4,83 pada tahun 2015 menjadi 5,17 pada tahun 2019. Selama lima tahun tersebut nilai rata-rata indeks sebesar 5,01 dan rata-rata pertumbuhan pertahun indeks sebesar 1,72 persen per tahun. Dengan nilai tersebut maka perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang masuk ke dalam kategori memuaskan.

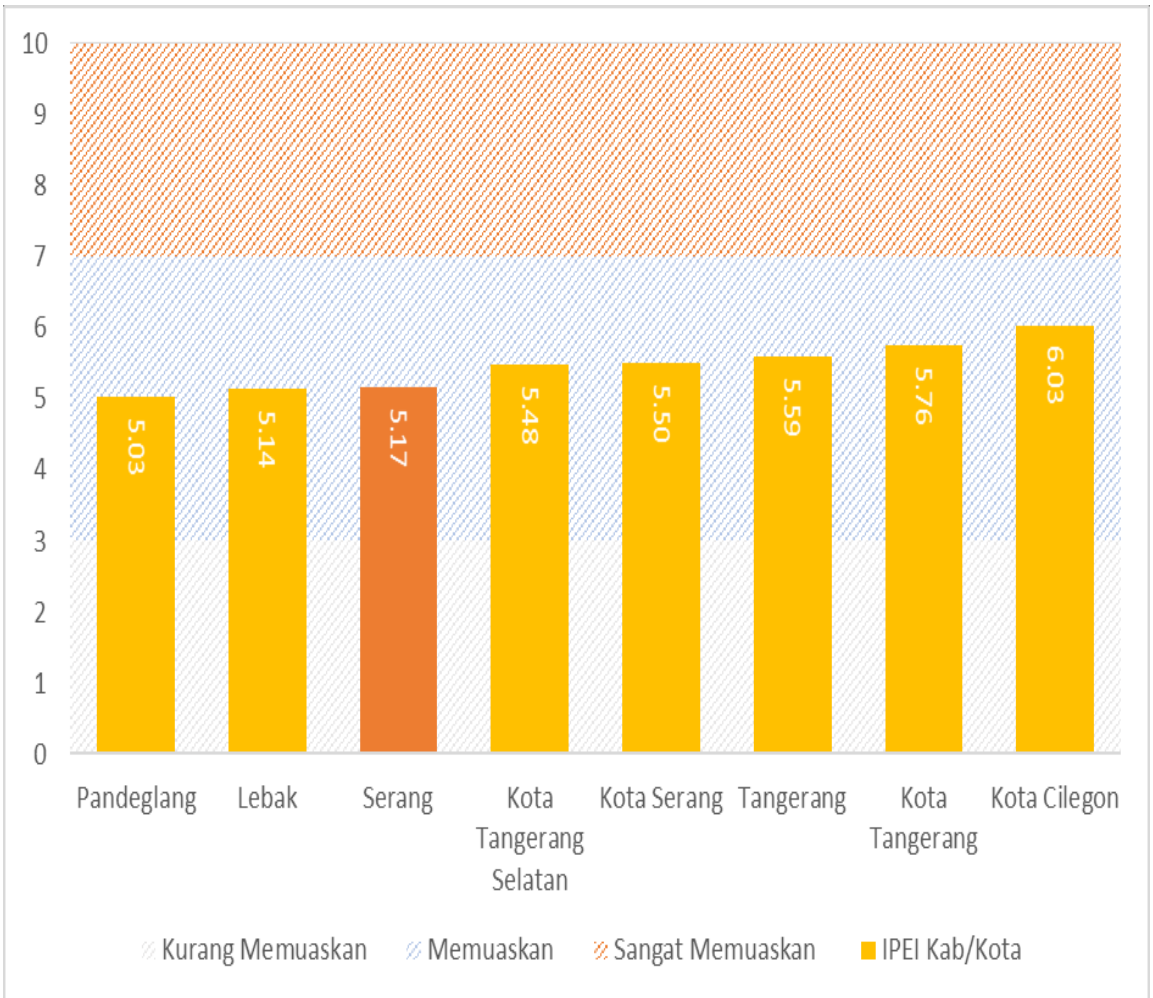


**Gambar 2.37 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Banten, 2019**

*Sumber: Bappenas, 2020*

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2019, maka nilai indeks Kabupaten Serang berada di peringkat 6 dari 8 kabupaten/kota dengan nilai indeks sebesar 5,17. Pada tahun 2019, capaian indeks seluruh daerah di Provinsi Banten berada pada kategori memuaskan dengan nilai indeks tertinggi dicapai oleh Kota Cilegon dengan nilai sebesar 6,03 dan nilai indeks terendah dicapai oleh Kabupaten Pandeglang dengan nilai sebesar 5,03. Sementara itu, capaian nilai indeks nasional sebesar 5,89 dan capaian Provinsi Banten yakni sebesar 5,87. Dengan demikian, capaian indeks Kabupaten Serang masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Banten.

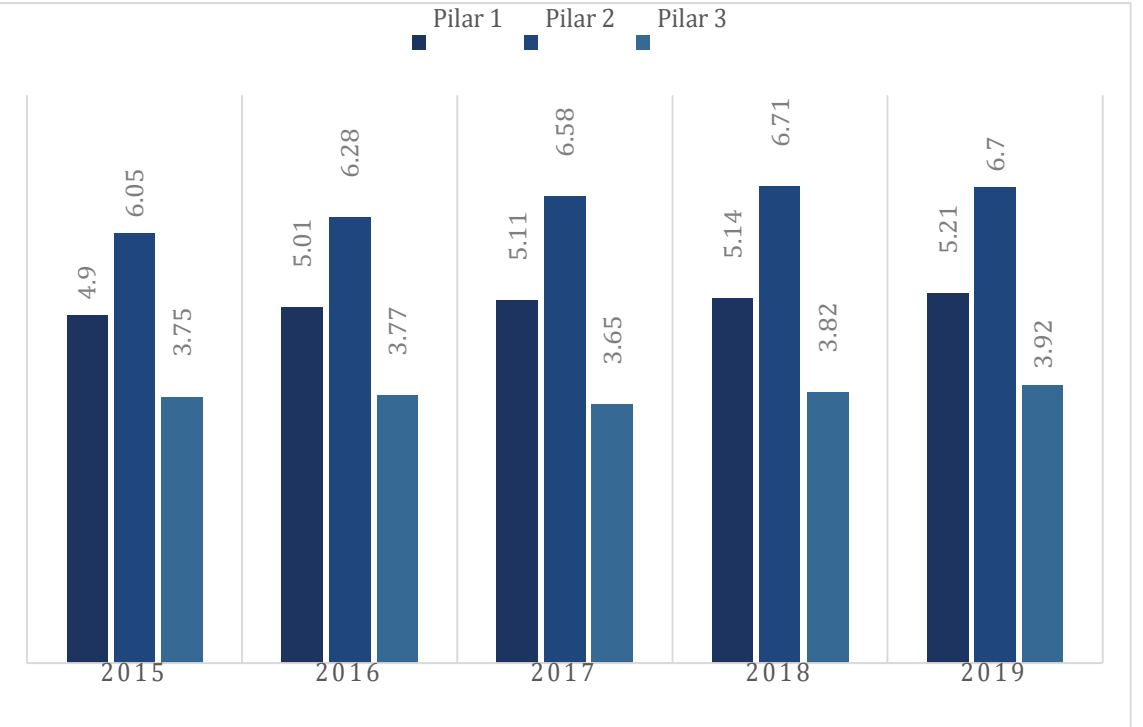


**Gambar 2.38 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang Per Pilar, 2015-2019**

*Sumber: Bappenas, 2020*

Selama periode tahun 2015-2019, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Serang berdasarkan Pilar I, Pilar II, maupun Pilar III cenderung meningkat. Selama periode tersebut capaian Pilar II tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan selalu yang tertinggi dengan rata-rata nilai indeks sebesar 6,46. Capaian tersebut karena selama lima tahun terakhir usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan hasil yang baik dengan terus menurunnya angka kemiskinan dan garis kemiskinan yang terus meningkat. Setelah capaian Pilar II, capaian Pilar yang juga mencapai kategori memuaskan adalah Pilar I tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sedangkan Pilar III tentang perluasan akses dan kesempatan masih berada dalam kategori kurang memuaskan. Walaupun demikian, indeks Pilar III menunjukkan nilai yang semakin menigkat tiap tahunnya.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu

daerah. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan seni dan kebudayaan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal Pemerintah Kabupaten Serang perlu menyediakan fasilitas sarana prasana penunjang seperti gedung kesenian. Sedangkan dalam aspek olahraga pemerintah Kabupaten Serang berupaya mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat dan pelajar. Hal ini merupakan tindak lanjuti dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi dewasa ini.

**Tabel 2.30 Indikator Capaian Sasaran Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan (%) | 9,09 | 51,51 | 51,51 | 93,33 | 85,71 |
| 2. | Cakupan Atlit berprestasi(%) | 41,48 | 58 | 46 | 17,64 | 0 |
| 3. | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) (%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya (%) | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86 |

*Sumber: LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 tiap indikator memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan cenderung meningkat, pada tahun 2016 hanya mencapai 9,09 persen, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 51,51 persen, di tahun 2018 memperoleh hasil cakupan yang sama, sedangkan tahun 2019 kembali meningkat hingga mencapai 93,33 persen namun

terjadi penurunan sebesar 7,62 persen menjadi 85,71 persen. Berbeda dengan cakupan atlit berprestasi yang sempat mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 58 persen yang pada tahun 2016 sebesar 41,48 persen. Akan tetapi, di tahun 2018, 2019, dan 2020 terus mengalami penurunan dengan masing-masing sebesar 46 persen, 17,64 persen, dan 0 persen. Sedangkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) dari tahun 2016 hingga 2018 masih nol persen, namun meningkat di tahun 2019 menjadi 4 persen dan kembali menjadi nol persen di tahun 2020. Indikator rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya pada tahun 2017-2019 cenderung stabil yakni mencapai capaian 100 persen namun pada tahun 2020 cakupan tersebut menurun menjadi 86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peran aktif dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dan masyarakat untuk mendukung pengembangan bidang seni budaya dan olahraga.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini meliputi enam bidang urusan yang seluruhnya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosiali, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentaraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

#### *2.3.1.1 Pendidikan*

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang, pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan utama yang ingin dicapai.

## 1. Partisipasi Sekolah

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sementara APM menunjukkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APM berkisar antara 0-100, sedangkan nilai APK dapat lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

**Gambar 2.39 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Serang, 2016-2020**

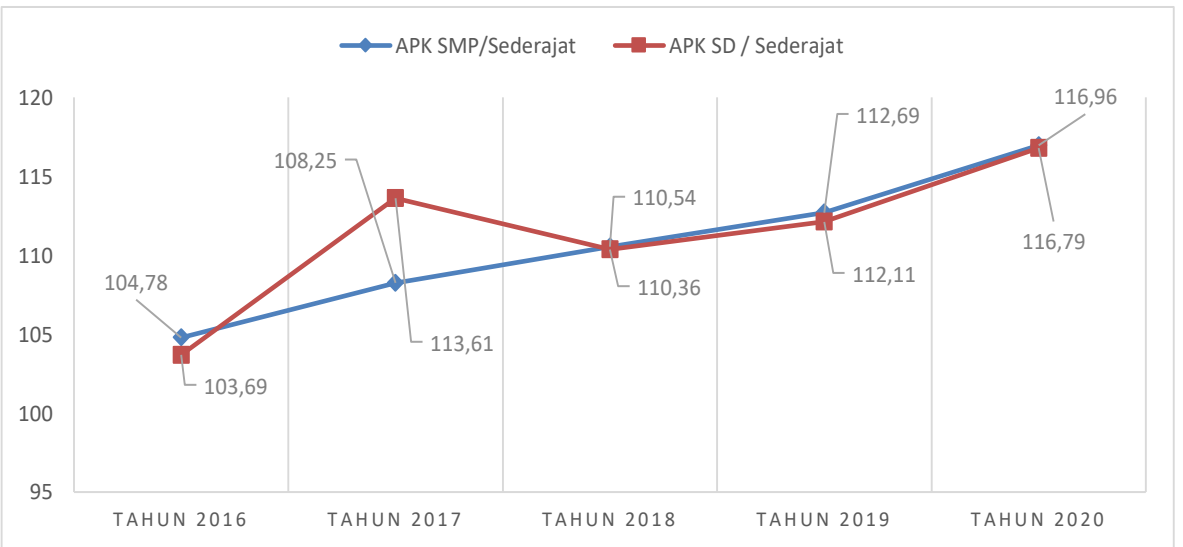

Berdasarkan Gambar 2.39 selama periode 2016-2020, APK Kabupaten Serang pada jenjang SMP mengalami kenaikan, sedangkan APK pada jenjang SD mengalami fluktuasi. APK pada jenjang SD di tahun 2016 sebesar 103,69 persen, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 113,61 persen yang merupakan capaian tertinggi selama empat tahun terakhir. Pada tahun selanjutnya, APK pada jenjang SD mengalami penurunan menjadi 110.36 persen kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 112,11. Selanjutnya, di tahun 2020 APK Jenjang SD meningkat menajdi 116,79. APK pada jenjang SMP mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2016 APK jenjang SMP sebesar 104,78 persen meningkat menjadi 116,96 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan data APK Provinsi Banten tahun 2020, baik APK pada jenjang SD dan SMP, keduanya memiliki nilai lebih tinggi dari pada capaian Provinsi Banten.

**Gambar 2.40 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Serang, 2016-2020**

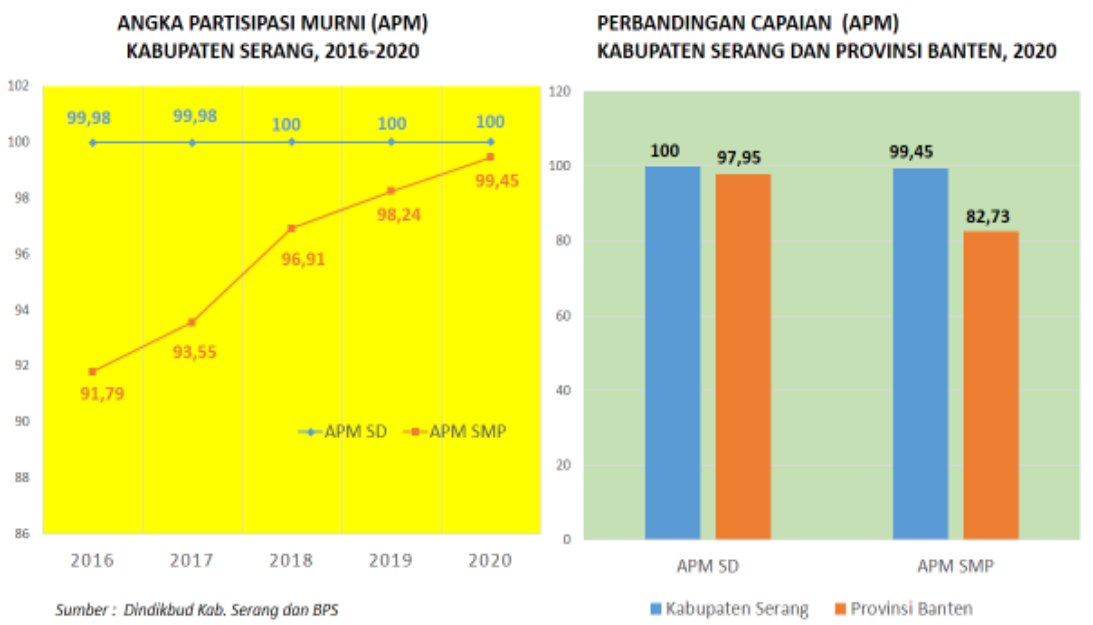


*Sumber : Dindikbud Kab. Serang dan BPS*

Nilai APM Kabupaten Serang menunjukkan tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, APM jenjang SD sebesar 99,98 persen mengalami peningkatan hingga sebesar 100 persen pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 semua penduduk usia SD atau bersesuaian sedang menempuh pendidikan SD. Nilai APM jenjang SMP pada tahun 2016 sebesar 91,78 persen meningkat 99,45 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan data

APM Provinsi Banten, APM Kabupaten Serang pada jenjang SD dan SMP, keduanya memiliki nilai lebih tinggi dari pada capaian Provinsi Banten.

## 2. Fasilitas Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai penting untuk menjamin kegiatan belajar mengajar yang berkualitas bagi murid serta mendukung upaya pemerataan pendidikan. Selain fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pengajar merupakan elemen penting yang secara langsung berperan dalam meningkatkan kualitas murid. Sekolah, sarana dan prasarana, guru, serat murid merupakan elemen yang saling terkait. Murid akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Di sisi lain, bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana.

Perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Serang pada tahun 2016 - 2020 cukup baik dengan tersedianya unit sekolah untuk hampir semua jenjang pendidikan di tiap kecamatan. Akan tetapi, indikator rasio murid per guru dan rasio murid per sekolah perlu ada peningkatan karena perkembangannya yang cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Data mengenai ketersedian sekolah di Kabupaten Serang ditunjukkan oleh Tabel 2.31 berikut.

**Tabel 2.31 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Jenjang | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 730 | 730 | 729 | 731 | 730 |
| **SMP** | 187 | 188 | 192 | 197 | 203 |
| **SMA** | 75 | 77 | 77 | 80 | 80 |
| **SMK** | 83 | 85 | 84 | 85 | 94 |
| **MI** | 121 | 123 | 126 | 131 | 128 |
| **MTs** | 187 | 185 | 189 | 199 | 193 |
| **MA** | 78 | 80 | 81 | 94 | 80 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2021*

Secara keseluruhan maupun jenjang, jumlah sekolah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah sekolah yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenjang Madrasah Aliyah. Pada tahun 2016 Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Serang sebanyak 78 unit sekolah meningkat 2 unit menjadi 80 unit sekolah pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2020 secara total terdapat 1.504 unit sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA. Jumlah unit sekolah yang semakin bertambah menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, sebaran jumlah sekolah di Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditunjukkan oleh Tabel 2.32 berikut.

**Tabel 2.32 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang, 2019**

| Kecamatan | SD | SMP | SMA | SMK* | MI | MTS | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cinangka** | 36 | 11 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| **Padarincang** | 38 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| **Ciomas** | 28 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | - |
| **Pabuaran** | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| **Gunungsari** | 13 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
| **Baros** | 25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| **Petir** | 24 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 |
| **Tunjung Teja** | 23 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| **Cikeusal** | 44 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| **Pamarayan** | 25 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| **Bandung** | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| **Jawilan** | 17 | 13 | 2 | 4 | 16 | 10 | 5 |
| **Kopo** | 22 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12 | 4 |
| **Cikande** | 34 | 12 | 5 | 5 | 13 | 12 | 6 |
| **Kibin** | 23 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| **Kragilan** | 32 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| **Waringinkurung** | 24 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | 2 |
| **Mancak** | 28 | 6 | 2 | - | 4 | 7 | - |
| **Anyar** | 27 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| **Bojonegara** | 22 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| **Pulo Ampel** | 20 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 1 |
| **Kramatwatu** | 32 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| **Ciruas** | 33 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| **Pontang** | 26 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| **Lebak Wangi** | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| **Carenang** | 17 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |

| Kecamatan | SD | SMP | SMA | SMK* | MI | MTS | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binuang** | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| **Tirtayasa** | 26 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| **Tanara** | 21 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| *Jumlah* | ***731*** | ***197*** | ***80*** | ***84*** | ***131*** | ***199*** | ***94*** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2020*

Persebaran jumlah sekolah di Kabupaten Serang bervariasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah kecamatan. Berdasarkan Tabel 2.30 distribusi sekolah pada jenjang sekolah dasar paling banyak berada di Kecamatan Cikeusal sebanyak 44 unit. Sedangkan pada jenjang SMP paling banyak berada di Kecamatan Jawilan sebanyak 13 unit. Sementara pada jenjang SMA, terdapat SMA di semua kecamatan dengan jumlah cukup merata di beberapa kecamatan. Kecamatan dengan SMA paling banyak berada di Kecamatan Cinangka, Petir, Cikande, dan Ciruas masing-masing sebanyak 5 unit. Pada jenjang SMK, terdapat dua kecamatan yang tidak terdapat SMK yaitu Kecamatan Ciomas dan Waringinkurung, sementara kecamatan dengan SMK terbanyak adalah Kecamatan Cikande, Kragilan, dan Ciruas masing-masing sebanyak 5 unit. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, jumlah MI paling banyak berada di Kecamatan Jawilan sebanyak 16 unit. Pada jenjang Madrasah Tsanawiyah, pada semua kecamatan terdapat MTs dengan jumlah paling banyak terdapat di Kecamatan Petir sebanyak 13 unit. Pada jenjang Madrasah Aliyah terdapat dua kecamatan yang tidak terdapat MA yaitu kecamatan Ciomas dan Mancak, sementara kecamatan dengan jumlah MA terbanyak adalah Kecamatan Kramatwatu dengan jumlah sebanyak 7 unit. Kecamatan dengan unit sekolah terbanyak adalah Kecamatan Cikande dengan total 87 unit sekolah yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 34 unit, SMP sebanyak 12 unit, SMA sebanyak 5 unit, SMK sebanyak 5 unit, MI sebanyak 13 unit, MTs sebanyak 12 unit, dan MA sebanyak 6 unit. Kecamatan Cikande merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbanyak di Kabupaten Serang pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 100.979 sehingga banyaknya jumlah sekolah di kecamatan tersebut sebanding dengan jumlah populasi penduduk.

Meskipun jumlah unit sekolah di semua jenjang pendidikan bertambah, namun tidak diikuti penambahan jumlah guru pada beberapa jenjang sekolah. Berdasarkan

Tabel 2.33 pada periode 2016-2019, jumlah guru pada jenjang MI, MTs, dan MA mengalami peningkatan sementara pada periode 2015-2019 jumlah guru pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mengalami tren penurunan.

**Tabel 2.33 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Jenjang | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 7.348 | 5.590 | 6.264 | 6.568 | 6.382 |
| **SMP** | 3.488 | 2.575 | 2.720 | 2.706 | 2.658 |
| **SMA** | 1.319 | 1.274 | 1.360 | 1.460 | 1.549 |
| **SMK** | 1.228 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.462 |
| **MI** | 1.185 | 1.156 | 1.222 | 1.291 | *1.298* |
| **MTS** | 2.387 | 3.723 | 2.488 | 2.690 | *2.732* |
| **MA** | 849 | 803 | 935 | 1.398 | *1.149* |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2021*

Jumlah guru pada jenjang MI, MTS, dan MA mengalami peningkatan pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah guru MI sebanyak 1.185 orang meningkat menjadi sebanyak 1.298 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah guru pada jenjang MTs pada tahun 2016 sebanyak 2.387 orang meningkat menjadi sebanyak 2.732 orang pada tahun 2020, sementara jumlah guru MA mengalami peningkatan paling besar dari sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 849 orang menjadi 1.149 orang pada tahun 2020.

Pada tahun 2016 hingga 2020 jumlah guru SD, SMP, SMA, SMK, dan MTS di Kabupaten Serang mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2016 jumlah guru SD sebanyak 7.348 orang terus mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6.382. Jumlah guru pada jenjang SMP pada tahun 2016 sebanyak 3.488 orang turun menjadi sebanyak 2.658 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah guru SMA pada tahun 2016 sebanyak 1.319 orang mengalami fluktuasi menjadi sebanyak 1.549 orang pada tahun 2020. sementara jumlah guru SMK meningkat dari sebanyak 1.228 orang pada tahun 2016 menjadi 1.462 orang pada tahun 2020.

**Tabel 2.34 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Jenjang | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 165.484 | 161.959 | 161.598 | 162.786 | 163.570 |
| **SMP** | 52.549 | 51.612 | 51.660 | 52.022 | 52.022 |
| **SMA** | 20.884 | 23.312 | 23.312 | 26.297 | 27.931 |
| **SMK** | 24.114 | 25.637 | 25.637 | *25.637* | 28.062 |
| **MI** | 21.006 | 21.587 | 21.901 | 22.168 | 21.427 |
| **MTS** | 32.881 | 32.570 | 28.064 | 31.742 | 31.987 |
| **MA** | 14.552 | 14.542 | 13.891 | 28.272 | 21.427 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2021*

Tabel 2.34 di atas menunjukkan jumlah murid pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Serang. Selama periode 2016-2020 jumlah murid pada jenjang SMA, SMK, MI, dan MA mengalami tren peningkatan sedangkan jumlah murid pada jenjang SD, SMP, dan MTs mengalami tren penurunan. Jumlah murid pada jenjang SMA mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 20.884 siswa di tahun 2016 menjadi sebanyak 27.931 siswa di tahun 2020. Sementara itu, jumlah murid SMK meningkat dari sebanyak 24.114 siswa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 28.062 siswa pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah murid pada jenjang MI meningkat dari sebanyak 21.006 siswa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 21.427 siswa pada tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah murid MA sebanyak 14.553 siswa, lalu meningkat tajam menjadi sebanyak 28.272 siswa pada tahun 2020.

Jumlah murid pada jenjang MTs mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah murid MTs sebanyak 32.881 siswa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 31.987 siswa pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah murid SD mengalami penurunan tertinggi secara jumlah. Pada tahun 2016 jumlah murid SD sebanyak 165.484 siswa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 163.570 siswa pada tahun 2020.

Pada tahun 2016 jumlah murid SMP sebanyak 52.549 siswa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 52.022 siswa pada tahun 2020.

Ketersediaan sekolah, guru, dan murid dapat diukur dengan dua rasio, yaitu rasio murid per guru dan rasio murid per sekolah. Rasio murid per guru menunjukkan beban kerja seorang guru. Semakin rendah rasio murid per guru menunjukkan semakin sedikit jumlah murid yang harus diajar oleh seorang guru sehingga mutu pengajaran cenderung tinggi, begitu pula sebaliknya. Rasio murid per sekolah menunjukkan rata-rata daya tampung per sekolah. Semakin rendah rasio murid per sekolah maka semakin banyak sekolah yang tersedia untuk menampung siswa yang belajar, begitu pula sebaliknya.

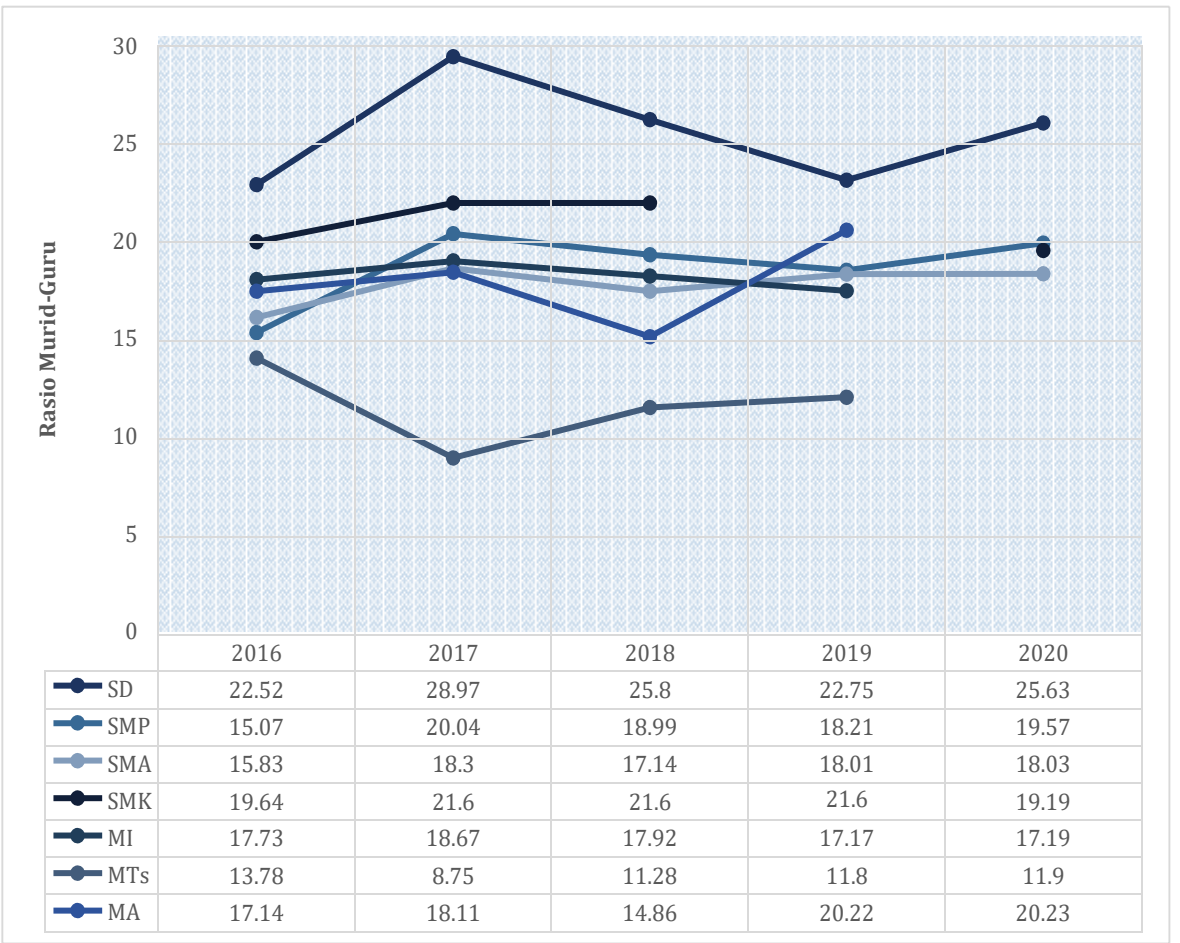


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 22.52 | 28.97 | 25.8 | 22.75 | 25.63 |
| SMP | 15.07 | 20.04 | 18.99 | 18.21 | 19.57 |
| SMA | 15.83 | 18.3 | 17.14 | 18.01 | 18.03 |
| SMK | 19.64 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.19 |
| MI | 17.73 | 18.67 | 17.92 | 17.17 | 17.19 |
| MTs | 13.78 | 8.75 | 11.28 | 11.8 | 11.9 |
| MA | 17.14 | 18.11 | 14.86 | 20.22 | 20.23 |

**Gambar 2.41 Rasio Murid per Guru di Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang*

Berdasarkan Gambar 2.41 selama periode 2016-2020, untuk semua jenjang pendidikan, rasio murid per guru mengalami fluktuasi. Jenjang pendidikan dengan rasio murid per guru paling rendah adalah jenjang MTs dengan rasio murid per guru pada tahun 2019 sebesar 11,8 meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, jenjang pendidikan dengan rasio murid per guru paling tinggi adalah jenjang SD dengan rasio murid per guru pada tahun 2020 sebesar 25,63. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan rasio murid per guru pada jenjang MTs sudah cukup baik, sedangkan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, dan MA masih perlu ditingkatkan.

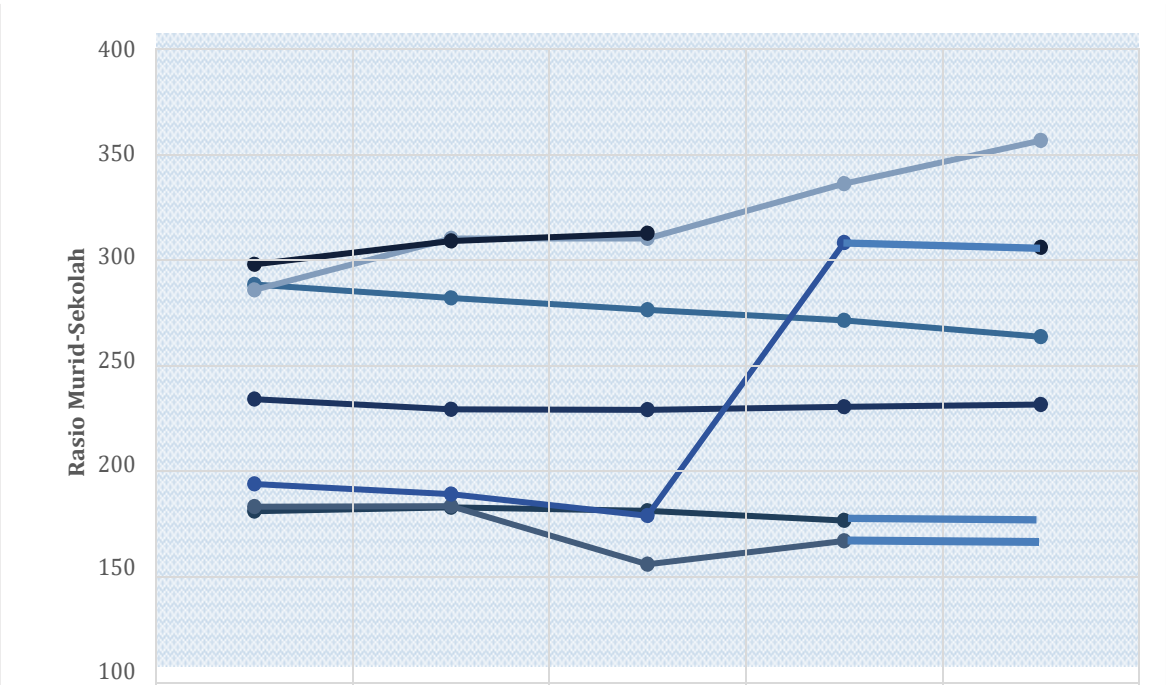


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 226.69 | 221.86 | 221.67 | 223.00 | 224.07 |
| SMP | 281.01 | 274.53 | 269.06 | 264.07 | 256.27 |
| SMA | 278.45 | 302.75 | 302.75 | 328.71 | 349.14 |
| SMK | 290.53 | 301.61 | 305.20 | 305.00 | 298.53 |
| MI | 173.60 | 175.50 | 173.82 | 169.22 | 169.40 |
| MTs | 175.83 | 176.05 | 148.49 | 159.51 | 159.60 |
| MA | 186.56 | 181.78 | 171.49 | 300.77 | 300.80 |

**Gambar 2.42 Rasio Murid per Sekolah di Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang*

Rata-rata rasio murid per sekolah di Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Namun pada jenjang SMA, SMK, dan MA selama periode tersebut mengalami tren peningkatan. Khusus pada jenjang MA mengalami peningkatan

rasio murid per sekolah yang paling tinggi pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2020, rasio murid per sekolah pada jenjang SMK sebesar 299 siswa per sekolah. Sedangkan pada jenjang SMA dan MA pada tahun yang sama, rasionya berturut-turut sebesar 350 dan 299 siswa per sekolah. Rasio murid per sekolah pada jenjang SD, SMP, MI, dan MTS mengalami tren penurunan selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, rasio murid per sekolah pada jenjang SD sebesar 225 siswa per sekolah dan jenjang SMP sebesar 257 siswa per sekolah. Sedangkan pada jenjang MI dan MTs pada tahun 2019, rasionya berturut-turut sebesar 169 dan 160 siswa per sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan daya tampung sekolah yang ditunjukkan pada Gambar 2.37 maka pada jenjang SD, SMP, MI, dan MTs semakin baik sedangakan untuk jenjang SMA, SMK, dan MA perlu ada peningkatan ketersedian sekolah.

#### *2.3.1.2 Kesehatan*

Salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah sektor kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, maka kualitas sumberdaya manusia diharapkan juga semakin baik.

**1. Angka Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Nilai AKB tinggi menunjukkan status kesehatan diwilayah tersebut rendah. Tabel 2.35 berikut menunjukkan AKB di Kabupaten Serang pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2.35 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun | Angka Kematian Bayi |
|---|---|
| **2016** | 6,64 |
| **2017** | 8,26 |
| **2018** | 8,49 |
| **2019** | 9,17 |
| **2020** | 8,29 |

*Sumber: LKPJ Kabupaten Serang*

Berdasarkan Tabel 2.35 capaian AKB Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian AKB sebesar 6,64 kematian per 1.000 kelahiran hidup kemudian meningkat selama tiga tahun berikutnya hingga sebesar 9,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian AKB Kabupaten Serang menurun menjadi sebesar 8,29 kematian per 1000 kelahiran hidup.

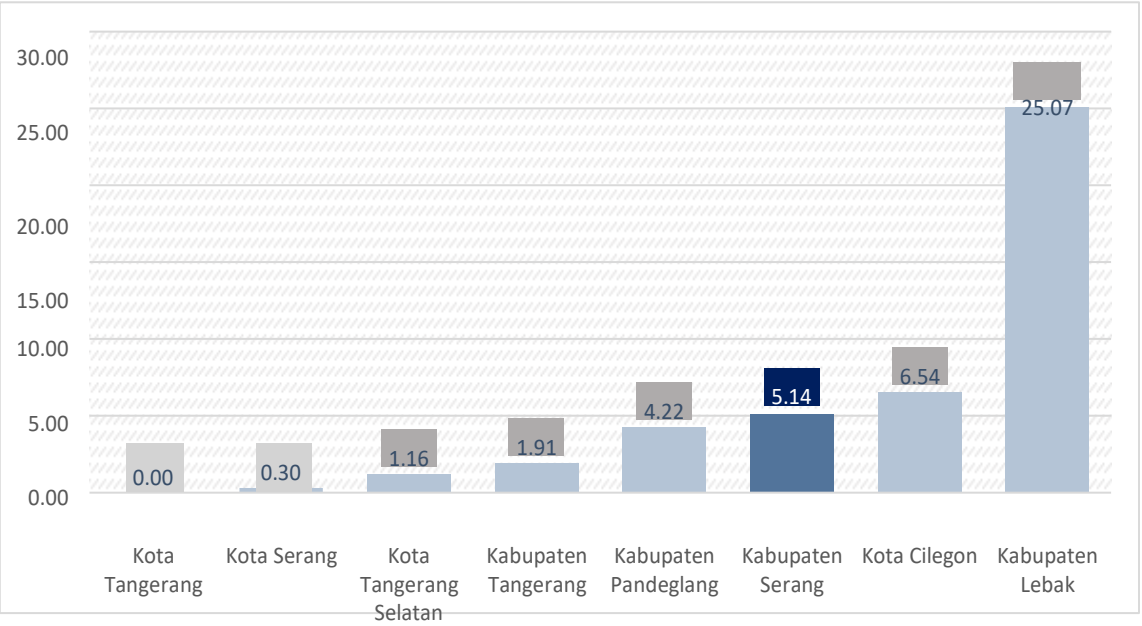


**Gambar 2.43 Perbandingan Regional Capaian Angka Kematian Bayi Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2019**

*Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten (diolah)*

Jika dibandingkan dengan capaian AKB wilayah lain dalam lingkup Provinsi Banten, maka capaian AKB Kabupaten Serang tergolong tinggi. Pada tahun 2019, AKB Kabupaten Serang sebesar 9,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup merupakan tertinggi ketiga dalam wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya, nilai tersebut juga lebih tinggi daripada AKB Provinsi Banten pada tahun 2019 yang besaran nilainya 4,47 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Data tahun 2020, telah menunjukkan adanya penurunan pada AKB Kabupaten Serang, namun Pemerintah Kabupaten Serang tetap perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKB dengan melakukan upaya-upaya preventif di masa mendatang.

## 2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang dimaksud dengan Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi AKI diantaranya keadaaan sosial ekonomi, kehamilan yang tidak sehat, komplikasi kehamilan, stautus gizi ibu dan janin, serta ketersedian fasilitas pendukung kesehatan ibu dan persalinan. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah pula.

Sebagian besar kasus kematian ibu biasa terjadi karena tidak tersedianya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai khususnya saat menghadapi kejadian kegawat daruratan. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan. Sulitnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan membuat ibu terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah usia Ibu melahirkan. Terdapat dua kategori usia yang memiliki risiko tinggi kematian saat melahirkan yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun) dan terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun).

**Tabel 2.36 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun | Angka Kematian Ibu |
|---|---|
| **2016** | 206,00 |
| **2017** | 194,70 |
| **2018** | 215,00 |
| **2019** | 221,00 |
| **2020** | 204,00 |

*Sumber: LKPJ Kabupaten Serang*

Capaian AKI Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 fluktuatif (lihat Tabel 2.36). Pada tahun 2016 capaian AKI sebesar 206 kematian per 100.000 kelahiran hidup kemudian meningkat hingga sebesar 221 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2019. Pada tahun 2020, AKI Kabupaten Serang turun menjadi 204 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

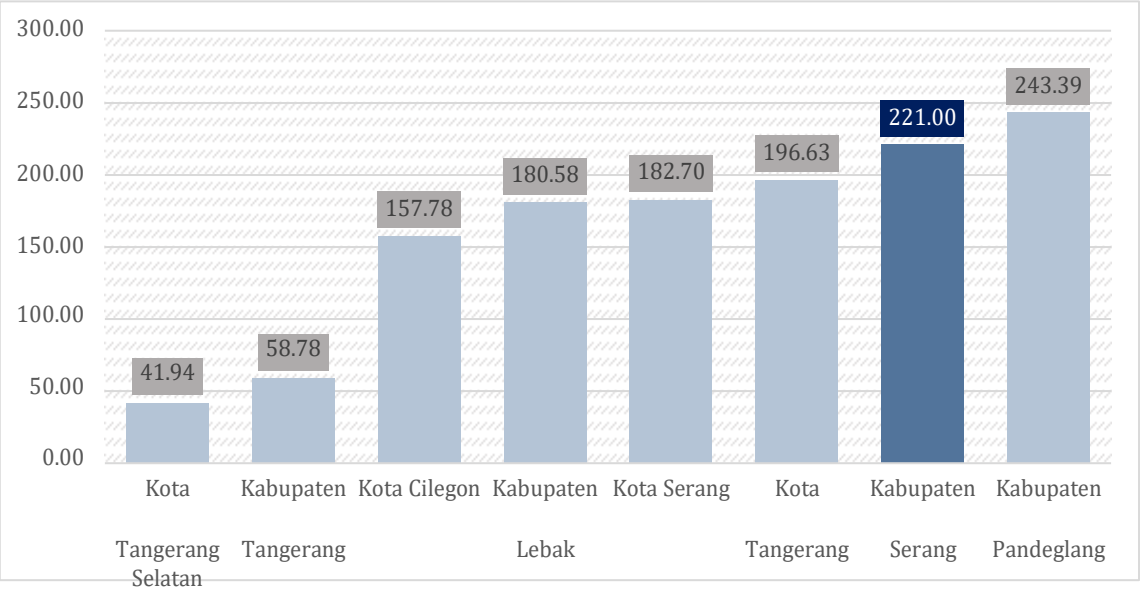


**Gambar 2.44 Perbandingan Regional Capaian Angka Kematian Ibu Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2019**

*Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten (diolah)*

Gambar 2.44 menunjukkan perbandingan capaian AKI di wilayah Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan capaian AKI wilayah lain dalam lingkup Provinsi Banten, maka capaian AKI Kabupaten Serang tergolong tinggi. Pada tahun 2019, AKI Kabupaten Serang sebesar 221 kematian per 100.000 kelahiran hidup merupakan tertinggi kedua dalam wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya, nilai tersebut jauh lebih tinggi daripada AKI Provinsi Banten pada tahun 2019 yang besaran nilainya 135,20 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Data tahun 2020, telah menunjukkan adanya penurunan pada AKI Kabupaten Serang, namun Pemerintah Kabupaten Serang tetap perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKI.

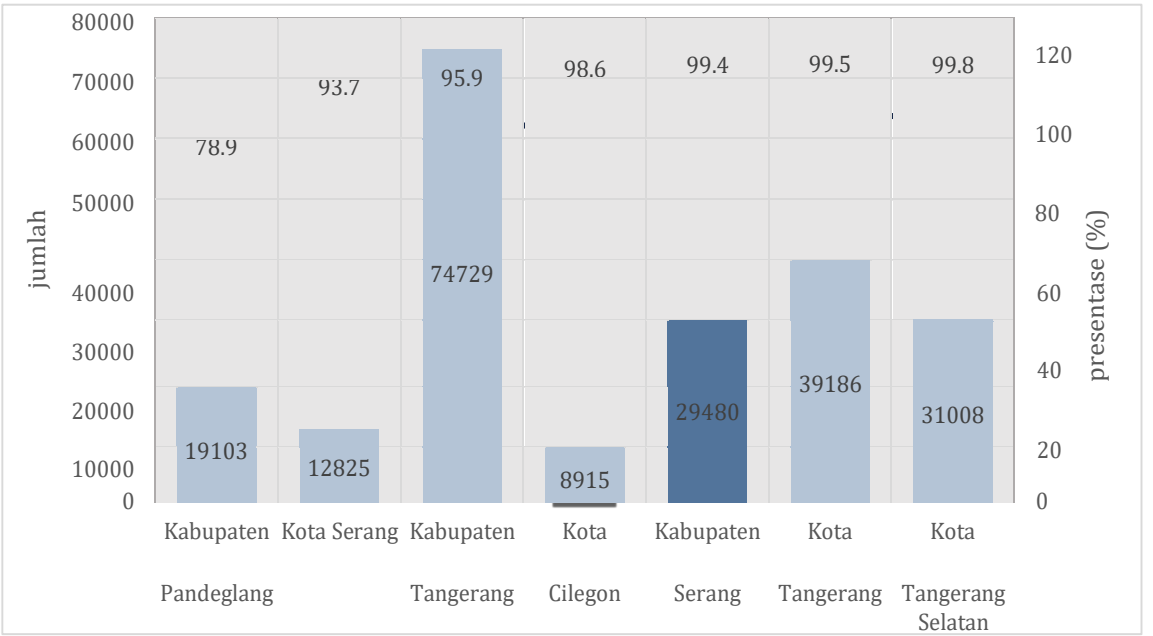


**Gambar 2.45 Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Tingkat Provinsi Banten, 2019**

*Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten*

Jika dianalisis berdasarkan cara persalinan, maka di Kabupaten Serang pada tahun 2019 terdapat 29.480 persalinan atau 99,4 persen dari total persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Angka ini cukup baik jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Di sisi lain, turunnya nilai AKI selama lima tahun terakhir cukup menunjukkan implikasi positif dari kebijakan selama ini, namun dengan tingginya AKI maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan AKI dengan melakukan upaya-upaya preventif.

### 3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.37 Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Serang Tahun 2016 sampai 2020**

| Tahun | Cakupan PHBS |
|---|---|
| 2016 | 62,50 |
| 2017 | 55,53 |
| 2018 | 40,62 |
| 2019 | 85,5 |
| 2020 | 49,35 |

Berdasarkan Tabel 2.37 cakupan PHBS Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan PHBS sebesar 62,50 % kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 55,53 %, dan menurun kembali di tahun 2018 menjadi 40,62 % sedangkan di tahun 2019 meningkat jauh menjadi 85,5 % dan di tahun 2020 menurun jauh menjadi 49,35 %.

### 4. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

**Tabel 2.38 Jumlah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah tahun 2020**

| Jenis Fasilitas Kesehatan | 2020 |
|---|---|
| Rumah sakit | 1 |
| Puskesmas Rawat Inap | 15 |
| Puskesmas non Rawat Inap | 16 |
| Puskesmas Pembantu | 42 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang*

Berdasarkan Tabel 2.38 jumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Serang terbatas, baru tersedia 1 (satu) Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Dr. Dradjat Prawiranegara yang menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Banten, dan 31 Puskesmas yang tersebar di 29 Kecamatan. Kabupaten Serang juga terdapat 3 RS Swasta yaitu RS Hermina Ciruas, RS. Kurnia Serang dan RS. Permata Serdang.

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai kecukupan fasilitas kesehatan di suatu daerah dapat digunakan rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk. Berikut adalah data rasio jumlah rumah sakit dan puskesmas terjadap jumlah penduduk di Kabupaten Serang serta wilayah lain di Provinsi Banten sebagai pembanding.

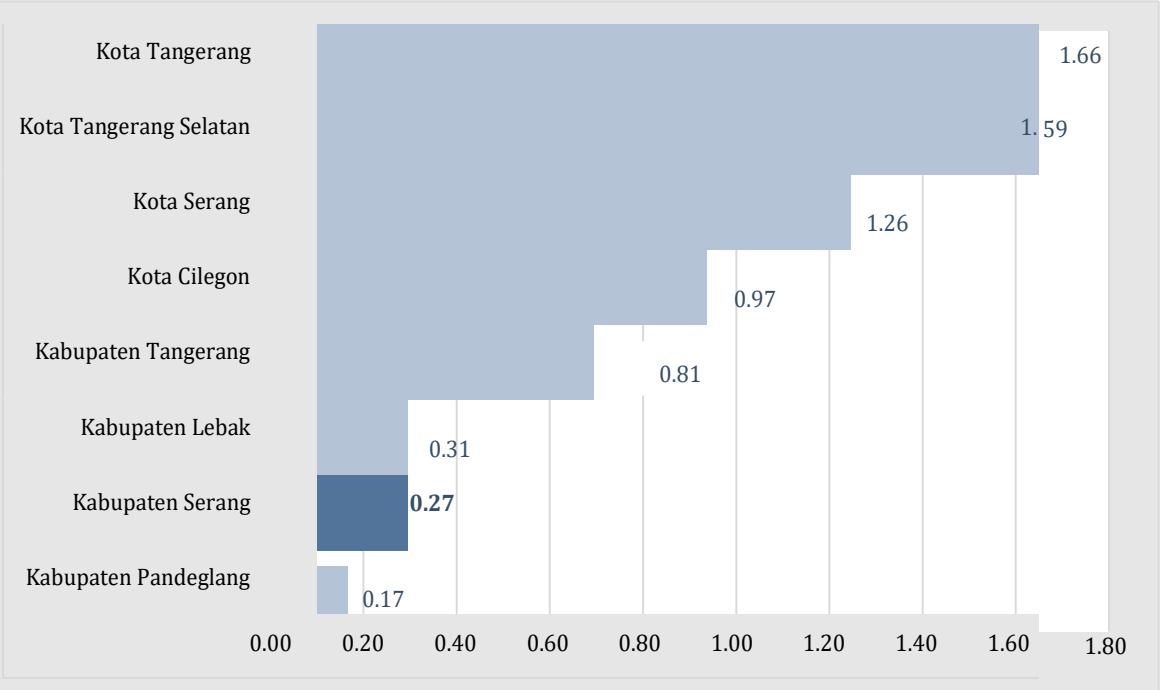


**Gambar 2.46 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk di Provinsi Banten, 2019**

*Sumber: Informasi SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2020 (diolah)*

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2019 termasuk rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Kabupaten Serang berada di urutan dua terbawah dengan nilai sebesar 0,31 per 100.000 penduduk yang berarti 1 rumah sakit melayani 323.953 penduduk. Dengan kondisi ideal 1 unit rumah sakit melayani 100.000 penduduk maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu meningkatkan ketersedian rumah sakit.

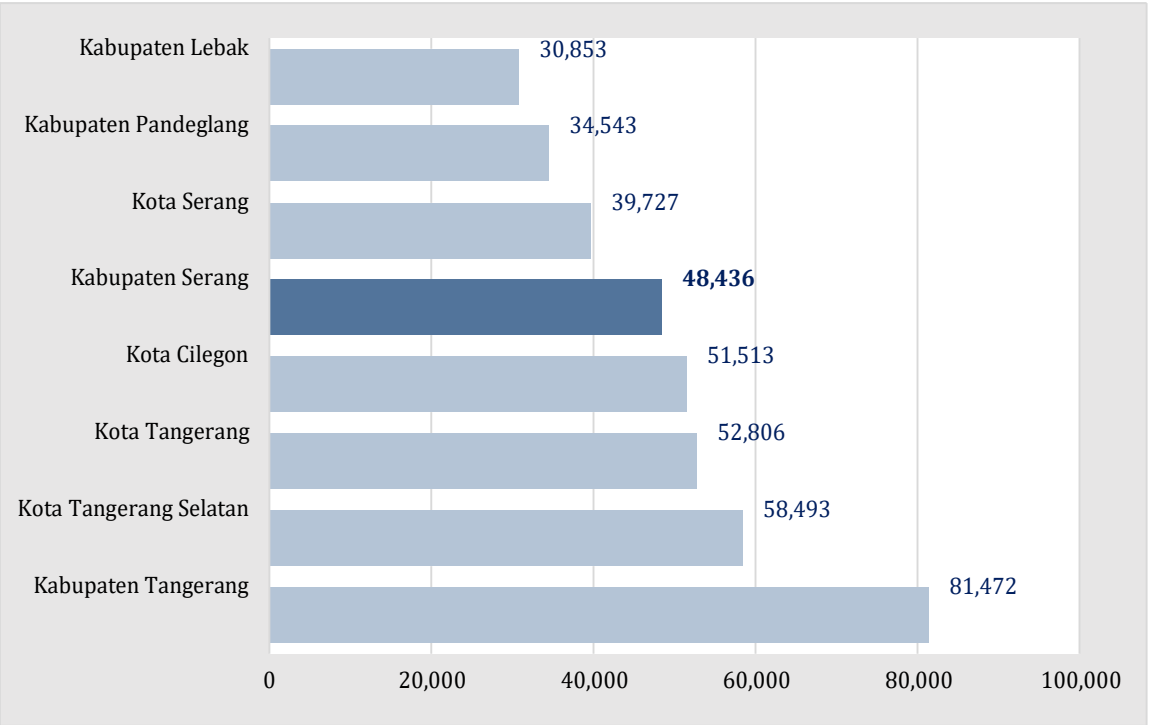


**Gambar 2.47 Rasio Puskesmas per Penduduk di Provinsi Banten, 2019**

*Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten (diolah)*

Berdasarkan Gambar 2.47, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Serang mencapai 48.436 yang mana merupakan peringkat empat di wilayah Provinsi Banten. Namun, nilai tersebuh masih jauh dari nilai ideal. Nilai ideal rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adala 1:30.000 atau 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi ideal Pemerintah Kabupaten Serang perlu menambah jumlah puskesmas. Dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2019, kondisi ideal jumlah puskesmas di Kabupaten Serang adalah 50 unit puskesmas.

### 5. Tenaga Kesehatan

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tenaga kesehatan

meliputi: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga ahli teknik laboratorium medik, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis.

**Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Serang, 2016-2019**

| Tenaga Kesehatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dokter Umum | 110 | 142 | 144 | 135 | 127 |
| Dokter Spesialis | 112 | 113 | 122 | 129 | 94 |
| Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis | 59 | 41 | 42 | 33 | 38 |
| Bidan | 644 | 669 | 754 | 593 | 733 |
| Perawat | 903 | 949 | 1.039 | 930 | 883 |
| Tenaga Kefarmasian | 93 | 125 | 130 | 113 | 120 |
| Tenaga Sanitasi | 23 | 38 | 33 | 29 | 42 |
| Tenaga Gizi | 26 | 34 | 33 | 24 | 54 |
| Jumlah | 1.970 | 2.111 | 2.297 | 1.986 | 2.091 |

*Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Serang*

Tabel 2.39 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Serang yang meliputi dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka perkembangan jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2016 jumlah total tenaga kesehatan di Kabupaten Serang adalah 1.970 orang, dan terus bertambah sampai tahun 2018 sebanyak 2.297. sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 1.986 dan bertambah kembali pada tahun 2020 menjadi 2.091 orang.

**Tabel 2.40 Jumlah Dokter dan Paramedik di Seluruh Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020**

| Kecamatan | Dokter Umum | Dokter Ahli | Dokter Gigi | Perawat |
|---|---|---|---|---|
| Cinangka | 2 | - | 1 | 9 |
| Padarincang | 2 | - | 1 | 10 |
| Ciomas | 3 | - | 1 | 12 |
| Pabuaran | 2 | - | 1 | 8 |
| Gunungsari | 2 | - | - | 6 |
| Baros | 3 | - | 1 | 10 |
| Petir | 3 | - | 1 | 15 |
| Tunjung Teja | 2 | - | 1 | 8 |
| Cikeusal | 2 | - | 1 | 15 |

| Kecamatan | Dokter Umum | Dokter Ahli | Dokter Gigi | Perawat |
|---|---|---|---|---|
| Pamarayan | 3 | - | 1 | 16 |
| Bandung | 2 | - | - | 8 |
| Jawilan | 2 | - | - | 13 |
| Kopo | 5 | - | 1 | 18 |
| Cikande | 3 | - | 1 | 17 |
| Kibin | 2 | - | 1 | 7 |
| Kragilan | 5 | - | 2 | 16 |
| Waringinkurung | 3 | - | 1 | 9 |
| Mancak | 3 | - | 1 | 7 |
| Anyar | 5 | - | 1 | 16 |
| Bojonegara | 3 | - | 2 | 11 |
| Pulo Ampel | 2 | - | 1 | 8 |
| Kramatwatu | 4 | - | 1 | 13 |
| Ciruas | 3 | - | 1 | 15 |
| Pontang | 4 | - | - | 17 |
| Lebak Wangi | 2 | - | 1 | 7 |
| Carenang | 3 | - | 1 | 15 |
| Binuang | 2 | - | - | 9 |
| Tirtayasa | 2 | - | 1 | 16 |
| Tanara | 3 | - | 1 | 19 |
| ***Jumlah*** | ***82*** | ***-*** | ***26*** | ***350*** |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, BPS Kabupaten Serang, 2021*

Berdasarkan kecamatan, persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Serang pada tahun 2018 sudah cukup merata (lihat Tabel 2.40). Dokter umum tersedia di seluruh puskemas umum. Beberapa kecamatan terdapat lebih dari satu dokter umum sesuai dengan volume dan jumlah puskesmas. Selanjutnya, dokter gigi telah tersedia di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Cinangka, Gunungsari, Bandung, Mancak, Lebak Wangi, dan Binuang.

#### *2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis eco-city. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain perkembangan persentase jalan kabupaten, jembatan, dan drainase dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten, jembata, dan drainase.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorang roda perekonomian. Jalan meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 6,26 persen. Pada tahun 2016, jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sebesar 74,13 persen meningkat menjadi sebanyak 92,05 persen pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan jalan kabupaten.

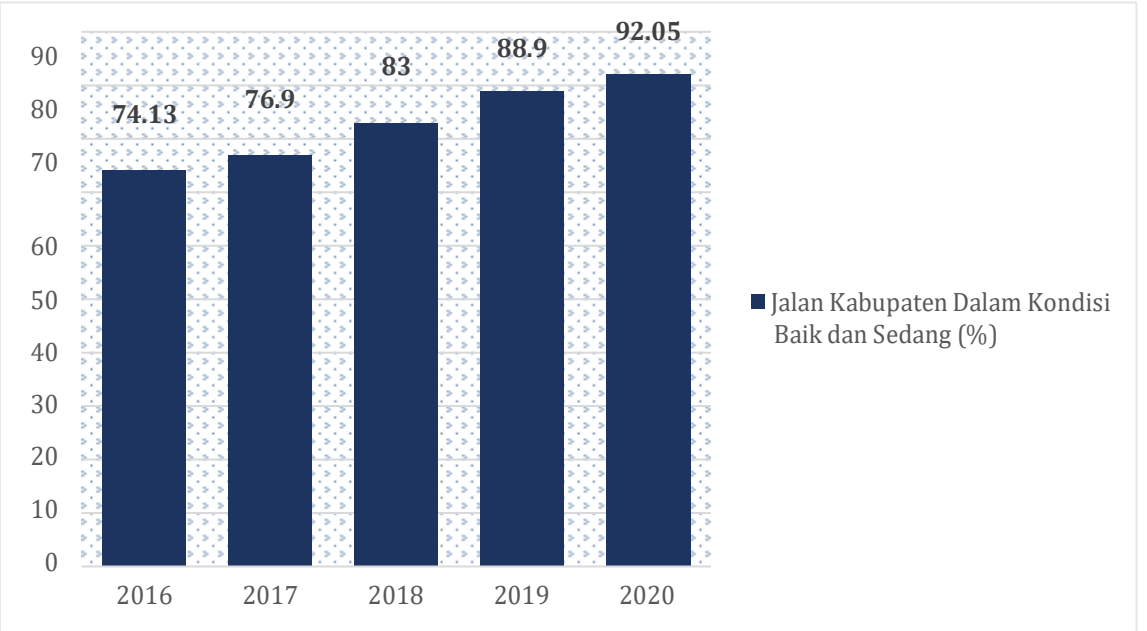


**Gambar 2.48 Perkembangan Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Serang, 2016- 2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Perkembangan persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total jembatan kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 9,68 persen. Pada tahun 2016, jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sebesar 65,12 persen meningkat menjadi sebanyak 93,30 persen pada tahun 2020. Peningkatan yang signifikan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan jembatan kabupaten selama empat tahun terakhir.

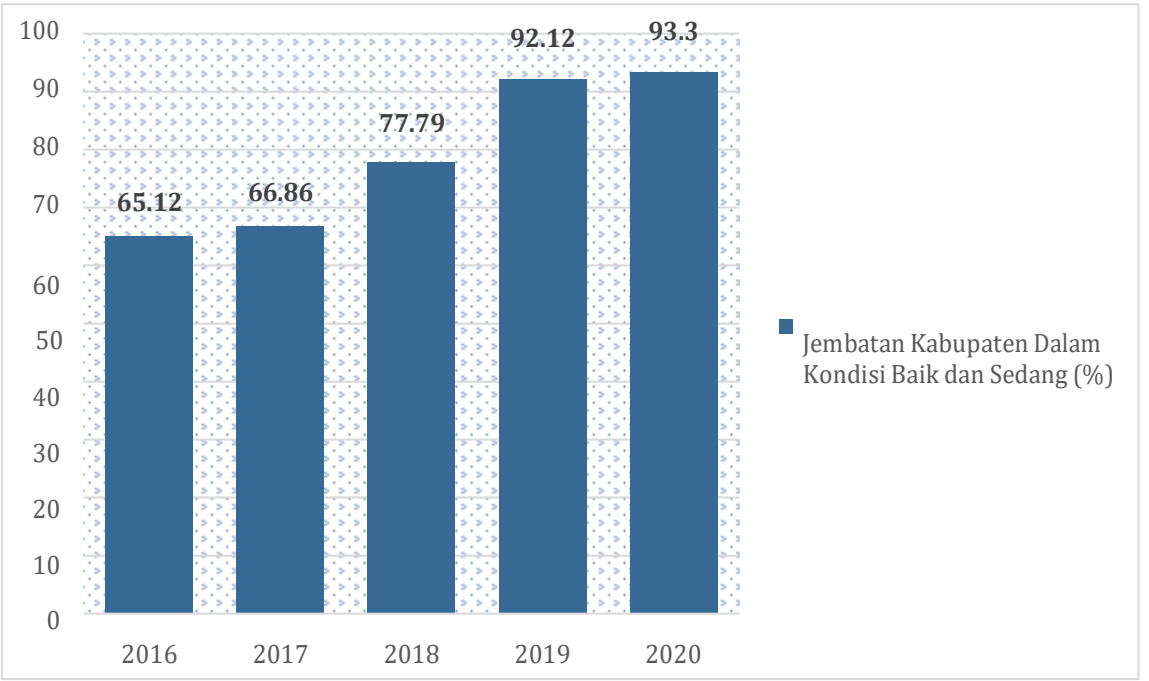


**Gambar 2.49 Perkembangan Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Jumlah Kabupaten di Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Perkembangan persentase panjang drainase dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 3,81 persen. Pada tahun 2016, persentase panjang drainase dalam kondisi baik dan sedang sebesar 66,60 persen meningkat menjadi sebanyak 74,50 persen pada tahun 2020. Peningkatan yang signifikan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan drainase selama periode tahun tersebut.

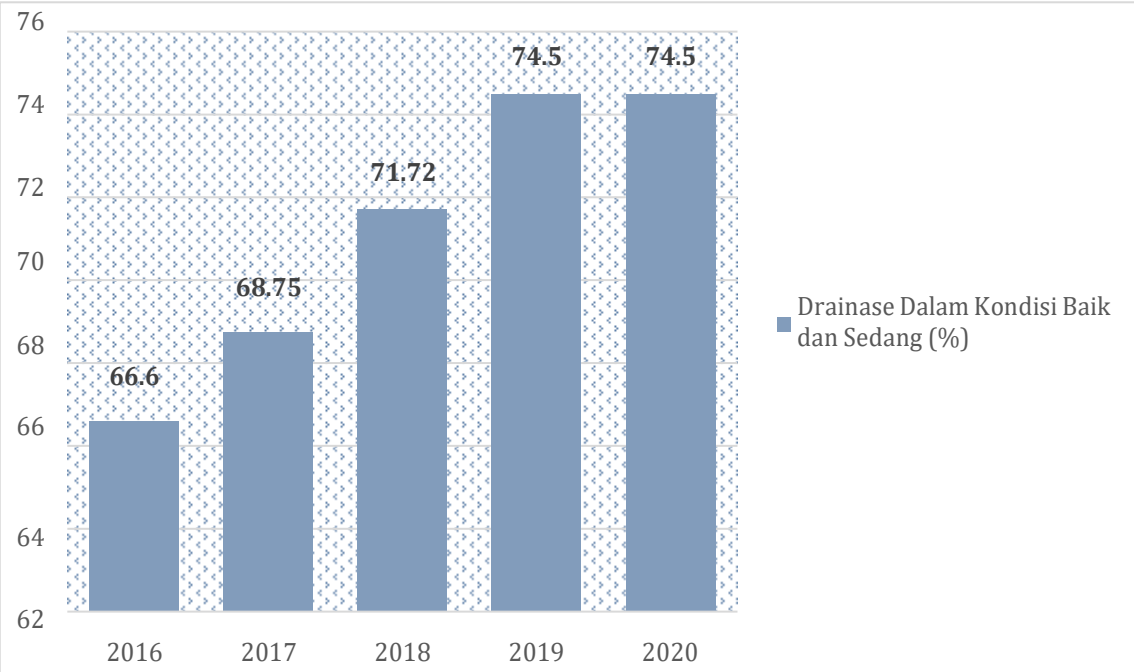


**Gambar 2.50 Perkembangan Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik dan Sedang Terhadap Total Panjang Drainase di Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

### *2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

Salah satu kriteria rumah layak huni adalah akses air minum layak. Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain seperti untuk memasak dan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Akses air minum dianggap layak jika sumber air minum utama rumah tangga termasuk dalam sumberair terlindungi, yaitu diantaranya:

1. ledeng meteran
2. ledeng eceran
3. keran umum
4. hidran umum
5. terminal air
6. penampungan air hujan
7. sumur bor/pompa
8. sumur terlindung, dan

9. mata air terlindung.

Apabila sumber air minum utama rumah berasal dari air kemasan dan/atau air isi ulang, maka kelayakan dapat dilihat dari sumber air yang digunakan untuk kegiatan domestik lainnya seperti memasak dan kegiatan mck. Jika sumber air untuk masak dan kegiatan MCK berasal dari salah satu dari 9 jenis sumber air terlindungi, maka rumah dianggap layak dari segi akses air minum. Berikut merupakan persentase rumah tangga menurut sumber air utama di Kabupaten Serang tahun 2019.

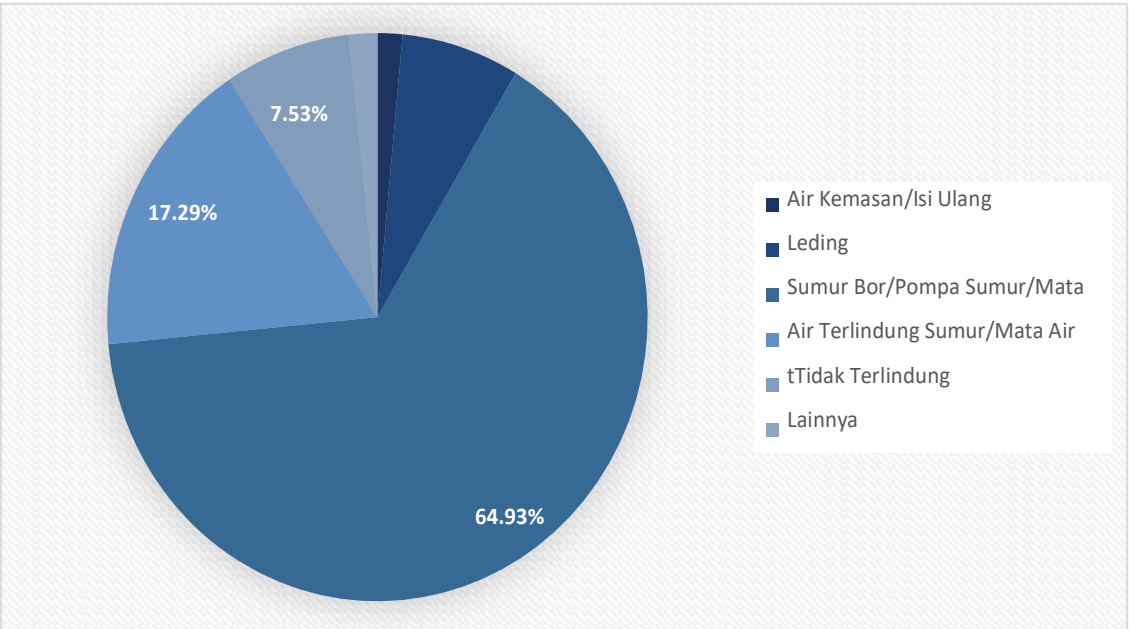


**Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/dll, 2019**

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2019*

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2019 rumah tangga dengan sumber air utama sumur bom/pompa mencapai 64,93 persen. Selanjutnya sumber air terbanyak kedua adalah sumur atau mata air terlindung sebanyak 17,29 persen. Sumber air utama terbanyak ketiga adalah sumur atau mata air tidak terlindung sebanyak 7,53 persen.

**Tabel 2.41 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Berdasarkan Kuartil Pengeluaran, 2019**

| Karakteristik | Air Kemasan /Isi Ulang | Leding | Sumur Bor/Pompa | Sumur/ Mata Airl Terlindung | Sumur/ Mata Air Tidak Terlindung | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% Terbawah | 0,78 | 2,57 | 59,53 | 20,44 | 12,65 | 4,03 |
| 40% Tengah | 1,43 | 7,66 | 64,59 | 19,26 | 6,29 | 0,78 |
| 20% Teratas | 2,56 | 12,27 | 72,96 | 9,27 | 2,49 | 0,00 |

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2019*

Sementara itu berdasarkan kuartil pengeluaran, persentase rumah tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/dll, untuk penduduk dalam semua kuartil pendapata terbawah didominasi oleh sumber bor/pompa. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah penduduk dengan pendapatan 40 persen terbawah maih sedikit yang menggunakan leding yaitu sebanyak 2,57 persen. Selanjutnya penduduk pada kuartil pendapatan tersebut sebanyak 20,44 persen menggunakan sumber sumur/mata air terlindung dan sebanyak 12,65 persen menggunakan sumber sumur/mata air tidak terlindung. Di sisi lain, penduduk dengan pendapatan 20 persen teratas sebanyak 12,27 persen sudah menggunakan leding dan 9,27 persen menggunakan sumber sumur/mata air terlindung serta sebanyak 2,49 persen menggunakan sumber sumur/mata air tidak terlindung.

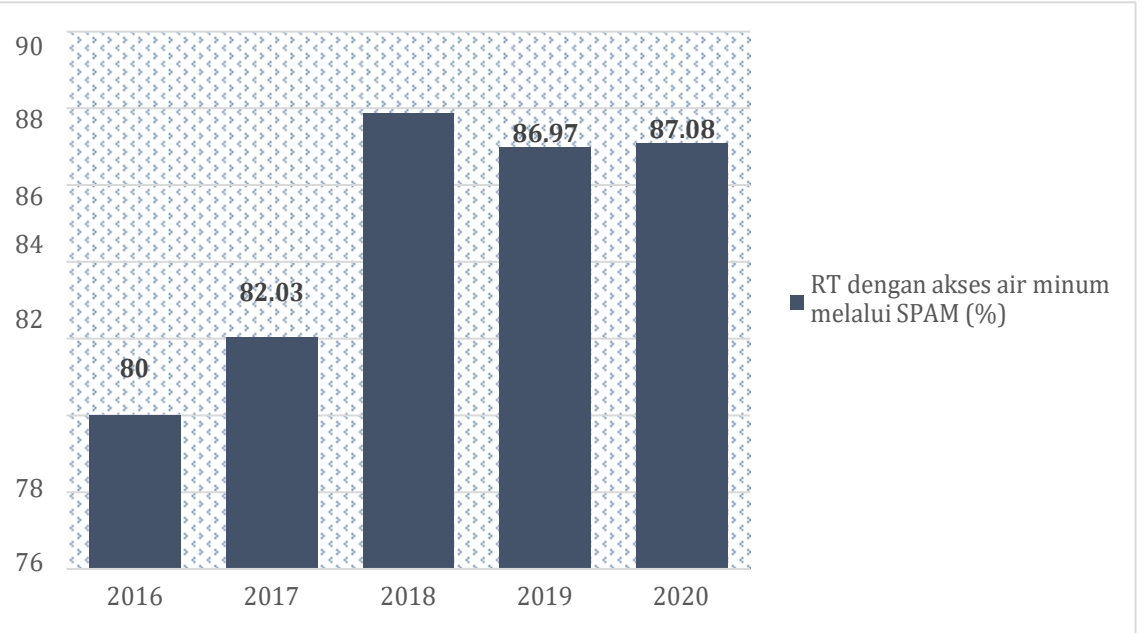


**Gambar 2.52 Perkembangan Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan (% Rumah Tangga), 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Selama elima tahun terakhir perkembangan tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, capaiannya mencapai 80,00 persen rumah tangga lalu meningkat menjadi 87,86 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 86,97 persen. Selanjutnya, di tahun 2020 capaiannya mencapai 87,08 persen rumah tangga.

#### *2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel di bawah menunjukkan capaian dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan selama empat tahun terakhir di Kabupaten Serang. Pada tahun 2017-2020, rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak

kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi serta cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencapai 100 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020, persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap perda sebesar 22,86 persen. Persentase penurunan wilayah rawan trantibum mencapai 33,33 persen dan persentase gangguan terhadap masyarakat yang dapat diselesaikn telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan untuk beberapa indikator.

**Tabel 2.42 Capaian Upaya Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

| | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran terhadap Perda | % | 60,00 | 23,73 | 22,00 | 22,86 |
| Prosentase Penurunan Wilayah Rawan Trantibum | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 33,33 |
| Prosentase Gangguan Terhadap Masyarakat Yang Dapat Diselesaikan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2017 s/d 2019*

### *2.3.1.6 Sosial*

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan.

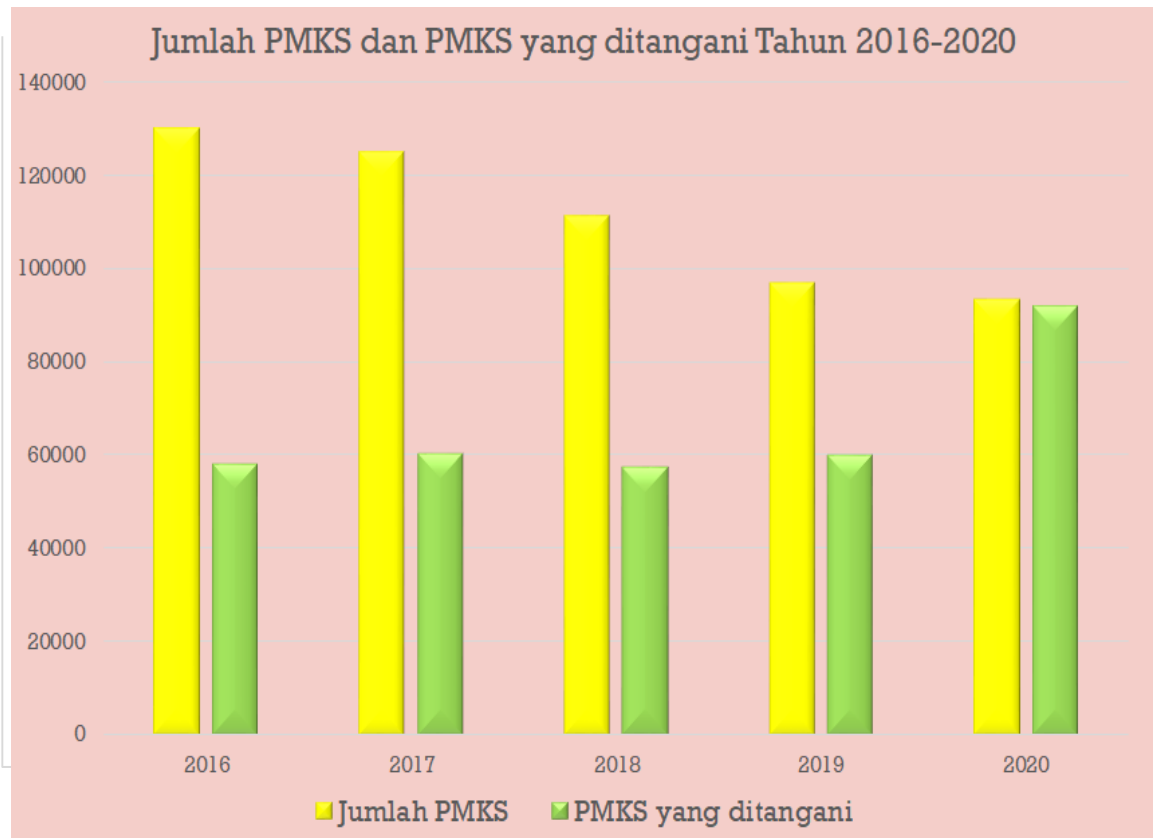


**Gambar 2.53 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rasio Jumlah PMKS yang Tertangani Terhadap Jumlah PMKS yang Ada (%), 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Selama lima tahun terakhir, jumlah PMKS mengalami penurunan setiap tahunnya ini disebabkan karena jumlah PMKS yang tertangani terhadap total jumlah PMKS yang ada cenderung meningkat. Pada tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 130.070 jiwa menurun menjadi sebanyak 93.338 jiwa pada tahun 2020. Sementara itu PMKS yang tertangani pada tahun 2016 sebanyak 58.127 jiwa atau sebesar 44,69 persen, lalu meningkat signifikan lima tahun terakhir sehingga pada Tahun 2020 PMKS yang

tertangani menjadi sebanyak 91.695 Jiwa atau sebesar 98,24 persen. Berdasarkan data tersebut, terdapat tren yang menurunt pada jumlah PMKS, sehingga menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan PMKS.

## 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### *2.3.2.1 Tenaga Kerja*

Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Beberapa masalah muncul di sektor ketenagakerjaan, seperti jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja serta jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terkait ketenagakerjaan bagi para penduduk. Menghadapi masalah dan tantangan tersebut memerlukan kebijakan pemerintah sebagai bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Capaian indikator untuk peningkatan kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020. Realisasi jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja sebanyak 614 perusahaan dari 820. Selanjutnya, relaisasi jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi sebesar 100,00 persen sementara target RPJMD sebesar 100,00 persen. Capaian yang masih di bawah target ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatakan kinerja dalam urusan

**Tabel 2.43 Peningkatan Kesempatan dan Lapangan Kerja serta Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020**

| | Satuan | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|
| Jumlah Perusahaan yang telah melakukan syarat kerja | perusahaan | 820 | 614 |
| Jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Mediasi | % | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2020*

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Pembangunan manusia Kabupaten Serang menurut kesetaraan gender menunjukkan tren fluktuasi pada periode 2016-2020. Akan tetapi, capaian IPG kabupaten Serang selama periode tersebut selalu lebih tinggi dari capaian Provinsi Banten.

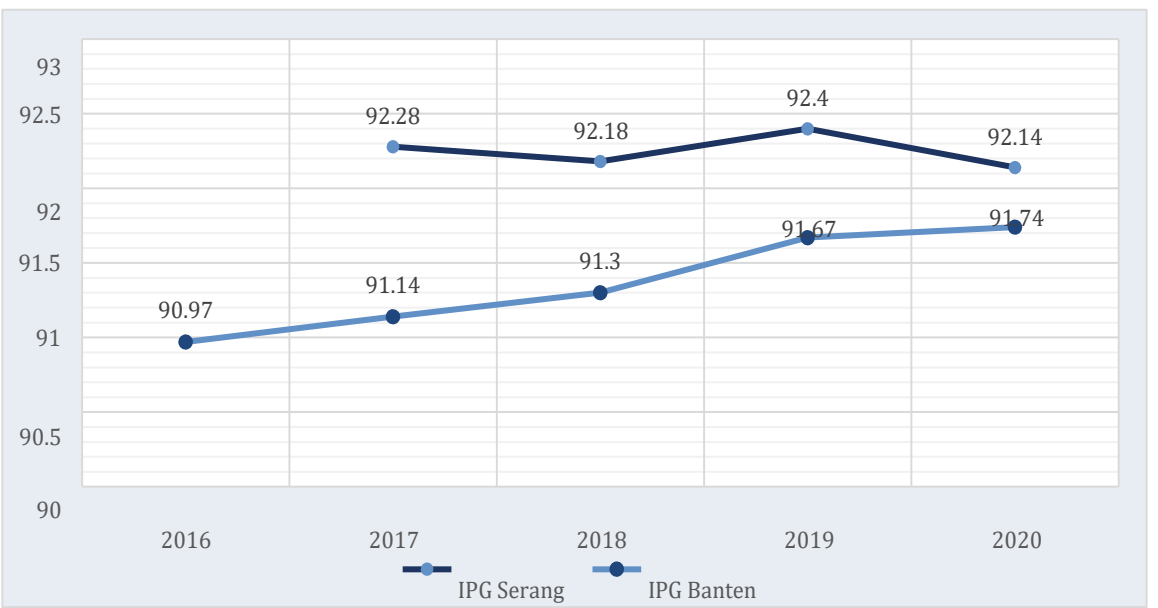


**Gambar 2.54 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2016-2020**

*Sumber: BPS Kabupaten Serang*

Sementara itu, berdasarkan capaian regional IPG di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020, maka Kabupaten Serang berada di peringkat tiga, dengan rata-rata IPG di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 89,66. Capaian IPG tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang dengan nilai 94,89. Sementara daerah dengan capaian paling rendah adalah Kabupaten Lebak dengan capaian sebesar 79,63.

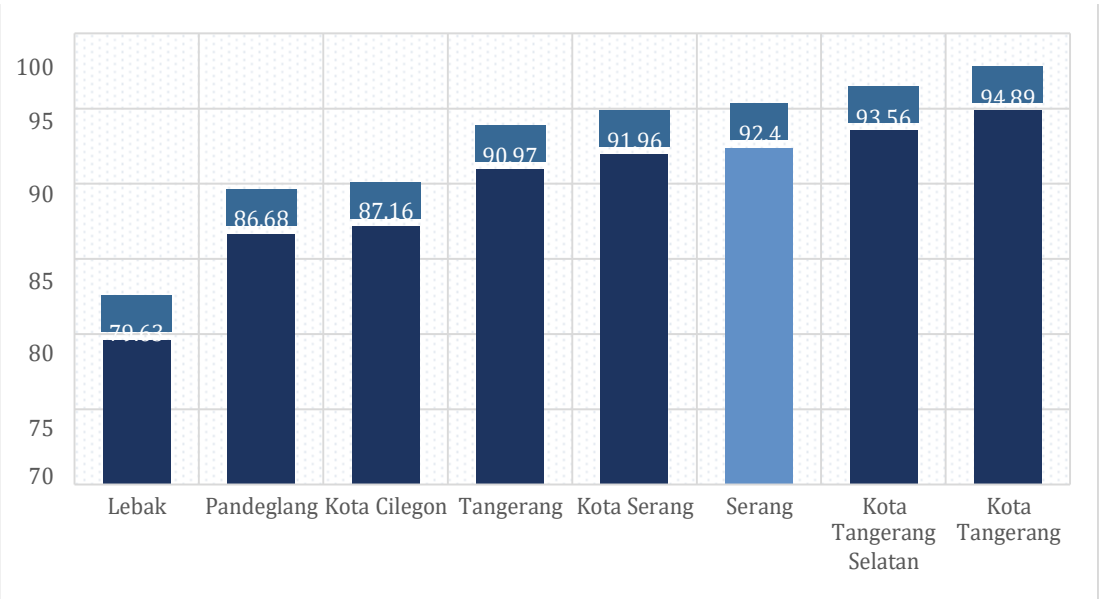


**Gambar 2.55 Perbandingan Regional Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang di Tingkat Provinsi Banten, 2018**

*Sumber: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang Tahun 2019*

### *2.3.2.3 Pangan*

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan hidup yang tidak dapat digantikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan data 42 rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran jumlah konsumsi kalori Kabupaten Serang sebesar 1.374 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah, 2.202 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen tengah, serta 2.726 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan berdasarkan komoditasnya, untuk semua kelompok pengeluaran didominasi oleh padi-padian. Berdasarkan data pada tabel 2.41 di bawah juga dapat dilihat bahwa ada kesenjangan yang cukup tinggi pada konsumsi komoditas 20 persen teratas.

**Tabel 2.44 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kcal), 2019**

| Kelompok Komoditas Makanan | Kelompok Pengeluaran | | |
|---|---|---|---|
| | 40% Terbawah | 40% Tengah | 20% Teratas |
| Padi-padian | 714,42 | 871,91 | 879,59 |
| Umbi-umbian | 37,03 | 29,3 | 21,59 |
| Ikan/udang/cumi/ kerang | 26,52 | 51,19 | 76,26 |
| Daging | 12,56 | 49,69 | 91,72 |
| Telur dan susu | 13,03 | 51,32 | 90,66 |
| Sayur-sayuran | 17,06 | 38,79 | 50,6 |
| Kacang-kacangan | 30,02 | 56,68 | 67,79 |
| Buah-buahan | 17,1 | 39,61 | 84,05 |
| Minyak dan kelapa | 151,5 | 275 | 297,28 |
| Bahan minuman | 44,39 | 77,16 | 94,54 |
| Bumbu-bumbuan | 7,4 | 19,08 | 22,11 |
| Konsumsi lainnya | 16,45 | 56,11 | 81,67 |
| Makanan dan minuman jadi | 286,61 | 586,56 | 868,14 |
| Rokok dan tembakau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Konsumsi Kalori Kabupaten Serang** | **1.374,08** | **2.202,41** | **2.726,01** |

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang Tahun 2019*

Selanjutnya, rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran menunjukkan data yang hampir sama dengan tabel sebelumnya bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi mengenai konsumsi protein diantara kelompok pengeluaran pengeluaran 40 persen terbawah dan 20 persen teratas. Jumlah konsumsi protin per kapita sehari untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah adalah sebesar 34,59 gram, kemudian sebesar 61,04 gram untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen tengah, serta 84,21 gram untuk penduduk dengan pengeluaran 20 persen tertinggi.

Adanya kesenjangan tersebut, maka perlu adanya perhatian bagi pemerintah khususnya dalam pemberian bantuan pada penduduk miskin.

**Tabel 2.45 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (gram), 2019**

| Kelompok Komoditas Makanan | Kelompok Pengeluaran | | |
|---|---|---|---|
| | 40% Terbawah | 40% Tengah | 20% Teratas |
| Padi-padian | 16,75 | 20,49 | 20.72 |
| Umbi-umbian | 0,27 | 0,24 | 0.21 |
| Ikan/udang/cumi/ kerang | 4,51 | 8,98 | 13.32 |
| Daging | 0,76 | 3,1 | 5.89 |
| Telur dan susu | 0,84 | 2,73 | 4.55 |
| Sayur-sayuran | 0,91 | 1,96 | 2.57 |
| Kacang-kacangan | 2,78 | 5,5 | 6.73 |
| Buah-buahan | 0,19 | 0,45 | 0.94 |
| Minyak dan kelapa | 0,01 | 0,04 | 0.10 |
| Bahan minuman | 0,51 | 1,17 | 1.32 |
| Bumbu-bumbuan | 0,35 | 0,75 | 0.88 |
| Konsumsi lainnya | 0,35 | 1,2 | 1.74 |
| Makanan dan minuman jadi | 6,37 | 14,43 | 25.24 |
| Rokok dan tembakau | 0 | 0 | 0.00 |
| **Jumlah Konsumsi Protein Kabupaten Serang** | **34,59** | **61,04** | **84,21** |

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang, 2019*

### *2.3.2.4 Lingkungan Hidup*

Isu mengenai kualitas hidup berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai indeks berkisar antara 0-100, dengan kategori nilai:

1. Sangat Baik : IKLH > 80
2. Baik : 70 < IKLH ≤ 80
3. Cukup Baik : 60 < IKLH ≤ 70
4. Kurang Baik : 50 < IKLH ≤ 60
5. Sangat Kurang Baik : 40 < IKLH ≤ 50

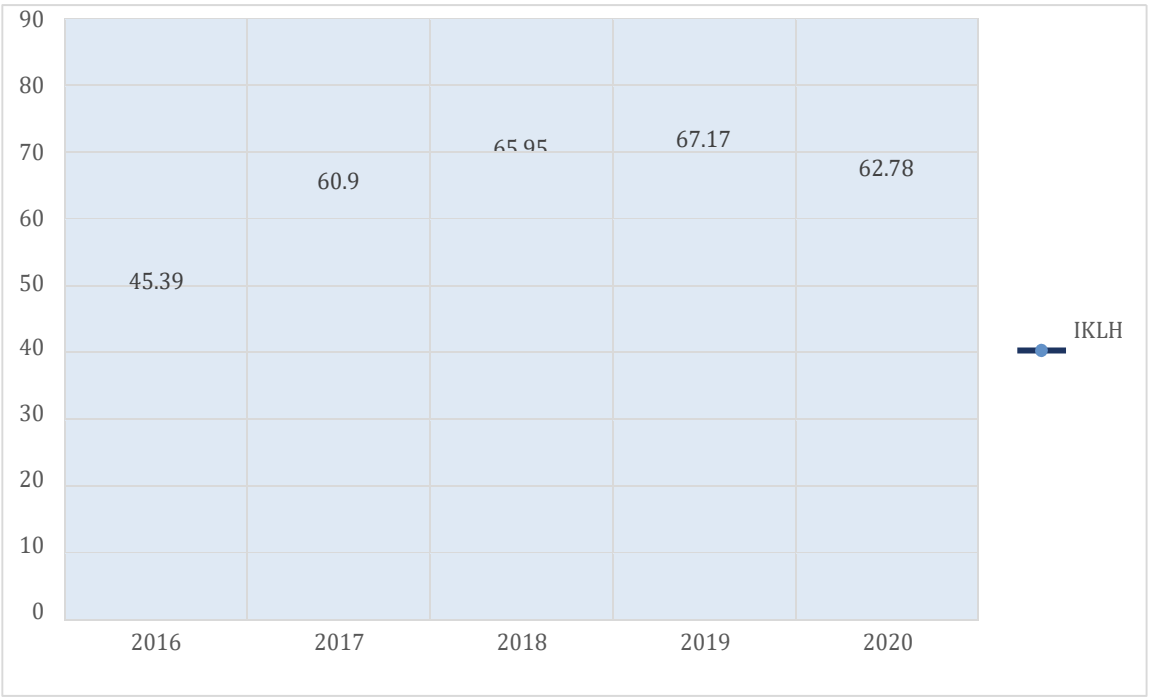


**Gambar 2.56 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Selama tahun 2016-2020, IKLH Kabupaten Serang terus mengalami fluktuasi Pada tahun 2016, IKLH mencapai 45,39 meningkat menjadi 67,17 pada tahun 2019. Peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan adanya peningkata nilain IKLH dari kategori sangat kurang baik menjadi cukup baik. Namun, pada tahun 2020, nilai IKLH Kabupaten Serang mengalami penurunan signifikan menjadi 62,78. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain indikator IKLH, urusan lingkungan hidup yang ditangani Pemerintah Kabupaten Serang di antaranya adalah penanganan dan pengelolaan sampah serta peneglolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sejauh ini, pada periode tahun 2016-2019 penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten Serang sudah relatif cukup baik. Berikut adalah data mengenai capaian pengelolaan sampah dan RTH di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan Tingkat Pengelolaan RTH, 2016-2020**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R | % | 11,84 | 17,15 | 17,51 | 22,5 | 21,25 |
| Tingkat pengelolaan RTH | % | 97 | 100 | 90 | 90 | 90 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 cakupannya mencapai 21,25 persen. Sementara itu, tingkat pengelolaan RTH pada periode yang sama mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, tingkat cakupannya mencapai 97 persen, namun pada tahun 2020 cakupannya mencapai 90 persen.

#### *2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi rujukan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti politik, sosial, dan ekonomi agar tepat sasaran. Pelayanan dokumen kependudukan yang dimaksud diantaranya meliputi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.47 Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016-2020 (%)**

| Tahun | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| 2016 | 100,00 | 65,27 |
| 2017 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 | 100,00 | 100,00 |
| 2019 | 100,00 | 100,00 |
| 2020 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Realisasi cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil selama periode 2016-2020 jika dibandingkan dengan target RPJMD mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, realisasinya mencapai 65,27 persen sementara target sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sama dengan target yang akan dicapai dimana cakupannya telah mencapai 100 persen.

#### *2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Serang dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah desa yang mengalami peningkatan. Beberapa indikator pemberdayaan desa diantaranya prosentase desa memiliki bumdes aktif, jumlah TTG yang dimanfaatkan, jumlah desa dengan kategori minimal berkembang, jumlah sarana prasarana desa yang dibangun mandiri, prosentase desa dengan tertib administrasi, serta prosentase desa dengan efektivitas anggaran.

**Tabel 2.48 Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Tahun 2020**

| | Satuan | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|
| Prosentase Desa Memiliki BUMDes Aktif | % | 2,00 | 2,00 |
| Jumlah TTG yang dimanfaatkan | Point | 1,00 | 1,00 |
| Jumlah Desa dengan Kategori Minimal Berkembang | Point | 4,00 | 22,00 |
| Jumlah Sarana Prasarana Desa Yang Dibangun Mandiri | Point | 1,00 | 1,00 |
| Prosentase Desa dengan Tertib Administrasi | % | 29,00 | 29,00 |
| Prosentase Desa dengan Efektivitas Anggaran | % | 29,00 | 29,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2020*

Secara umum, kinerja program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Serang pada tahun 2020 relatif baik. Hampir semua realisasi capaian indikator sama dengan target yang direncanakan.

**Tabel 2.48a Status Desa di Kabupaten Serang Berdasarkan IDM Tahun 2020 dan 2021**

| Status Desa | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Mandiri | 3 | 3 |
| Maju | 46 | 50 |
| Berkembang | 255 | 254 |
| Teringgal | 22 | 19 |
| Sangat Tertinggal | 0 | 0 |
| Jumlah Desa | 326 | 326 |

### *2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) diukur dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan capaian peserta KB aktif.

## Tabel 2.49 Jumlah Tempat Pelayanan KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2020

| No | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | No Faskes | Nama Klinik | Alamat Klinik | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360405 | Kramatwatu | 3604001 | KRAMATWATU | KRAMATWATU | 1 | |
| 2 | 360406 | Waringinkurung | 3604002 | WARINGIN KURUNG | WARINGIN KURUNG | 1 | |
| 3 | 360407 | Bojonegara | 3604003 | BOJONEGARA | BOJONEGARA | 1 | |
| 4 | 360408 | Pulo Ampel | 3604004 | PULOAMPEL | PULO AMPEL | 1 | |
| 5 | 360409 | Ciruas | 3604005 | CIRUAS | CIRUAS | 1 | |
| 6 | 360411 | Kragilan | 3604006 | KRAGILAN | KRAGILAN | 1 | |
| 7 | 360408 | Pulo Ampel | 3604007 | KELUARGA PL AMPEL | PULO AMPEL | | 1 |
| 8 | 360415 | Cikande | 3604008 | CIKANDE | CIKANDE | 1 | |
| 9 | 360416 | Kibin | 3604009 | PKM KIBIN | Kibin Km. 18,5 | 1 | |
| 10 | 360417 | Carenang | 3604010 | CARENANG | CARENANG | 1 | |
| 11 | 360418 | Binuang | 3604012 | BINUANG | BINUANG | 1 | |
| 12 | 360412 | Pontang | 3604013 | PONTANG | PONTANG | 1 | |
| 13 | 360413 | Tirtayasa | 3604014 | TIRTAYASA | TIRTAYASA | 1 | |
| 14 | 360414 | Tanara | 3604015 | TANARA JAYA | Kp. Tersaba Desa. Tanara | 1 | |
| 15 | 360424 | Pamarayan | 3604016 | PAMARAYAN | PAMARAYAN | 1 | |
| 16 | 360425 | Kopo | 3604018 | KOPO I | KOPO | 1 | |
| 17 | 360426 | Jawilan | 3604019 | JAWILAN | JAWILAN | 1 | |
| 18 | 360423 | Cikeusal | 3604021 | CIKEUSAL | CIKEUSAL | 1 | |
| 19 | 360419 | Petir | 3604025 | PETIR | PETIR | 1 | |
| 20 | 360420 | Tunjung Teja | 3604026 | PKM TUNJUNG TEJA | TUNJUNG TEJA | 1 | |
| 21 | 360422 | Baros | 3604029 | BAROS | BAROS | 1 | |
| 22 | 360430 | Anyar | 3604030 | PKM ANYER | ANYAR | 1 | |
| 23 | 360430 | Anyar | 3604031 | AFINA ANYER | ANYER | | 1 |
| 24 | 360405 | Kramatwatu | 3604032 | BUNDA LESTARI KR WATU | KRAMAT WATU | | 1 |
| 25 | 360431 | Cinangka | 3604033 | PKM CINANGKA | CINANGKA | 1 | |
| 26 | 360432 | Mancak | 3604035 | MANCAK | MANCAK | 1 | |
| 27 | 360427 | Ciomas | 3604036 | CIOMAS | CIOMAS | 1 | |
| 28 | 360428 | Pabuaran | 3604037 | PKM PABUARAN | PABUARAN | 1 | |
| 29 | 360429 | Padarincang | 3604038 | PADARINCANG | JL. PALKA PADARINCANG KM.32 | 1 | |
| 30 | 360433 | Gunung Sari | 3604039 | GUNUNG SARI | GUNUNG SARI | 1 | |
| 31 | 360434 | Bandung | 3604040 | BANDUNG | BANDUNG | 1 | |
| 32 | 360425 | Kopo | 3604045 | KOPO II | Nyompok | 1 | |
| 33 | 360411 | Kragilan | 3604048 | PEMATANG | Pematang | 1 | |
| 34 | 360422 | Baros | 3604050 | PKBRS Kab. Serang | RSUD KAB.SERANG | 1 | |
| 35 | 360411 | Kragilan | 3604051 | INDAH KIAT KRAGILAN | KRAGILAN | | 1 |
| 36 | 360406 | Waringinkurung | 3604055 | KUSUMA MEDIKA WR KRG | WR. KURUNG | | 1 |

*Sumber: DKBP3A Kabupaten Serang, 2020*

Kegiatan Pelayanan KB dilaksanakan disejumlah tempat pelayanan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 64 unit yang terdiri atas 32 unit Faskes Pemerintah dan 32 Unit Faskes Swasta pada 29 kecamatan, jumlah tempat pelayanan KB paling banyak berada di Kecamatan Kragilan sebanyak 7 unit, kemudian di Kecamatan Kibin sebanyak 7 unit dan 6 unit di kecamatan kramatwatu.

### *2.3.2.8 Perhubungan*

Dalam hal target penyelenggaraan aspek pelayanan publik bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, maka teradapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, diantaranya rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, serta tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

**Tabel 2.50 Capaian Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat | % | 14,19 | 14,32 | 12,41 | 12,36 | 12,73 |
| Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten | % | 46,67 | 47,09 | 22,13 | 22,54 | 22,54 |
| Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | Unit | 3 | 3,00 | 4 | 4 | 4 |
| Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran | % | 75 | 75,00 | 75 | 75 | 75 |

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase angkutan umum yang memiliki standar kelayakan (KIR) | % | 83,40 | 85,20 | 89,83 | 90,10 | 90,20 |
| Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas | % | 3,45 | 4,00 | 5,74 | 5,90 | 6,00 |
| Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/ operasional | % | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
| Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Secara umum, seluruh sasaran telah berhasil untuk dilaksanakan selatif sudah cukup baik. Namun demikan, beberapa catatan muncul terutama berkaitan dengan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten. Cakupan yang dicapai indikator tersebut selama empat tahun terakhir terus menurun. Cakupan jaringan angkutan umum penting untuk mempermudah akses masyrakat dalam mencapai daerah lain guna membantu aktivitas baik ekonomi maupun non-ekonomi.

#### *2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika*

Keberadaan hotspot internet di tingkat kecamatan diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi. Selama tahun 2016 dan hingga tahun 2020 peningkatan ketersedian hotspot internet cukup baik dan melebih target yang ditetapkan. Rasio ketersedian hotspot internet tingkat kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut. Pada tahun 2016 rasio internet sebesar 25,00 persen meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2020.

**Tabel 2.51 Rasio Ketersediaan Hotspot Internet di Tingkat Kecamatan (%)**

| Tahun | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 25,00 |
| 2017 | 20,00 | 95,00 |
| 2018 | 40,00 | 51,72 |
| 2019 | 60,00 | 100,00 |
| 2020 | 80,00 | 100,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

### *2.3.2.10 Statistik*

Penyelenggaraan urusan statistik memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam mendukung kegiatan perencanaan sectoral/mikro, perencanaan makro serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Data statistic dapat memberikan gambaran atau informasi terkait hasil-hasil pelaksanaan pembangunan maupun fenomena lainnya yang terjadi selama periode waktu tertentu.

Urusan statistik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang saat ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Sasaran utama dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan urusan statistic adalah penyediaan data statistic yang cepat, akurat dan akuntabel, tersedianya manajemen data statistic sectoral, meningkatkan kapasitas SDM Statisitk seta meningkatknya pengelolaan sarana prasarana data dan informasi elektronik.

Beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan statistic adalah : masih belum adanya keterpaduan data antar lembaga/OPD, belum adanya metadata statistic, masih minimnya jumlah dan kapasitas SDM statistik serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan urusan statistik.

### *2.3.2.11 Penanaman Modal*

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang.

Penanaman modal sendiri dapat dibedakan menjadi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PDMN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwapemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

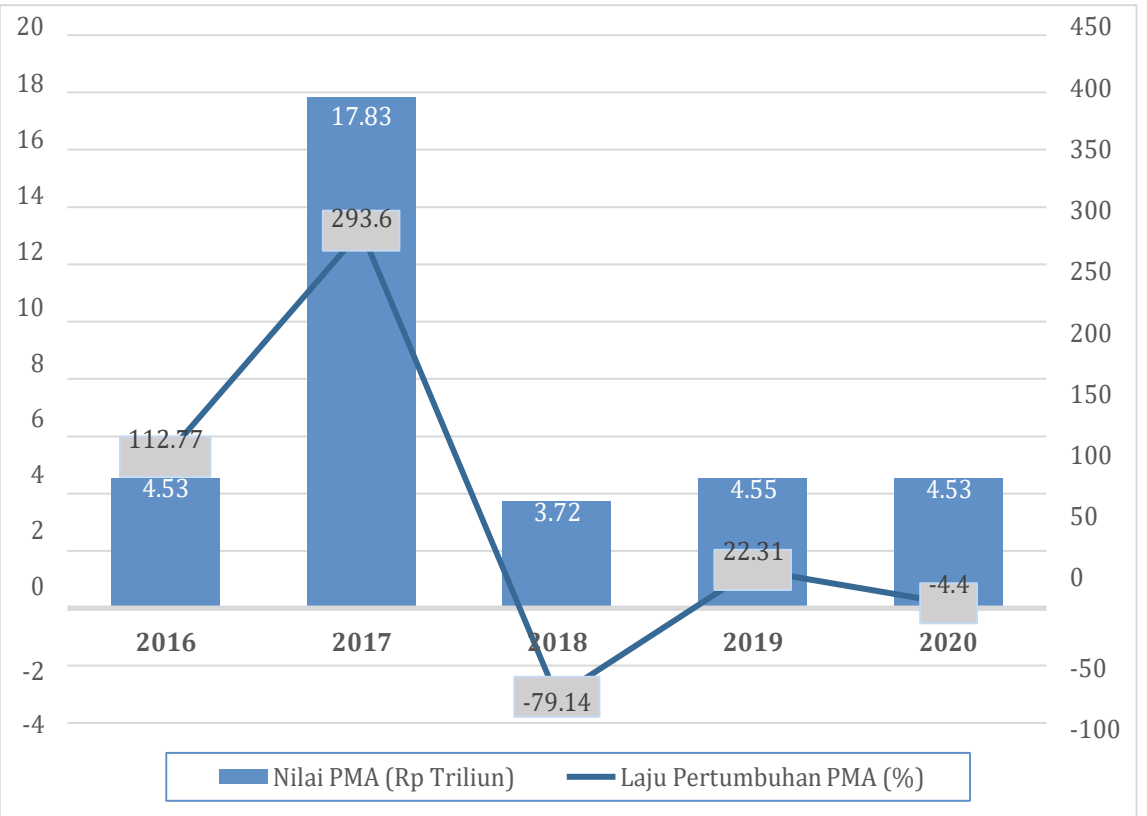


**Gambar 2.57 Nilai Investasi PMA dan Laju Pertumbuhan Investasi PMA, 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Nilai investasi PMA selama lima tahun terakhir di Kabupaten Serang berfluktuasi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 7,03 triliun rupiah. Pada tahun 2017, nilai PMA tahunan mencapai angka tertinggi selama periode tersebut dengan nilai sebesar 17,83 triliun rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan investasi berfluktuasi. Pada tahun 2016, 2017, dan 2019 investasi PMA mengalami laju pertumbuhan positif sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan PMA sebesar 69,03 persen. Laju pertumbuhan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan sebesar 293,60 persen.

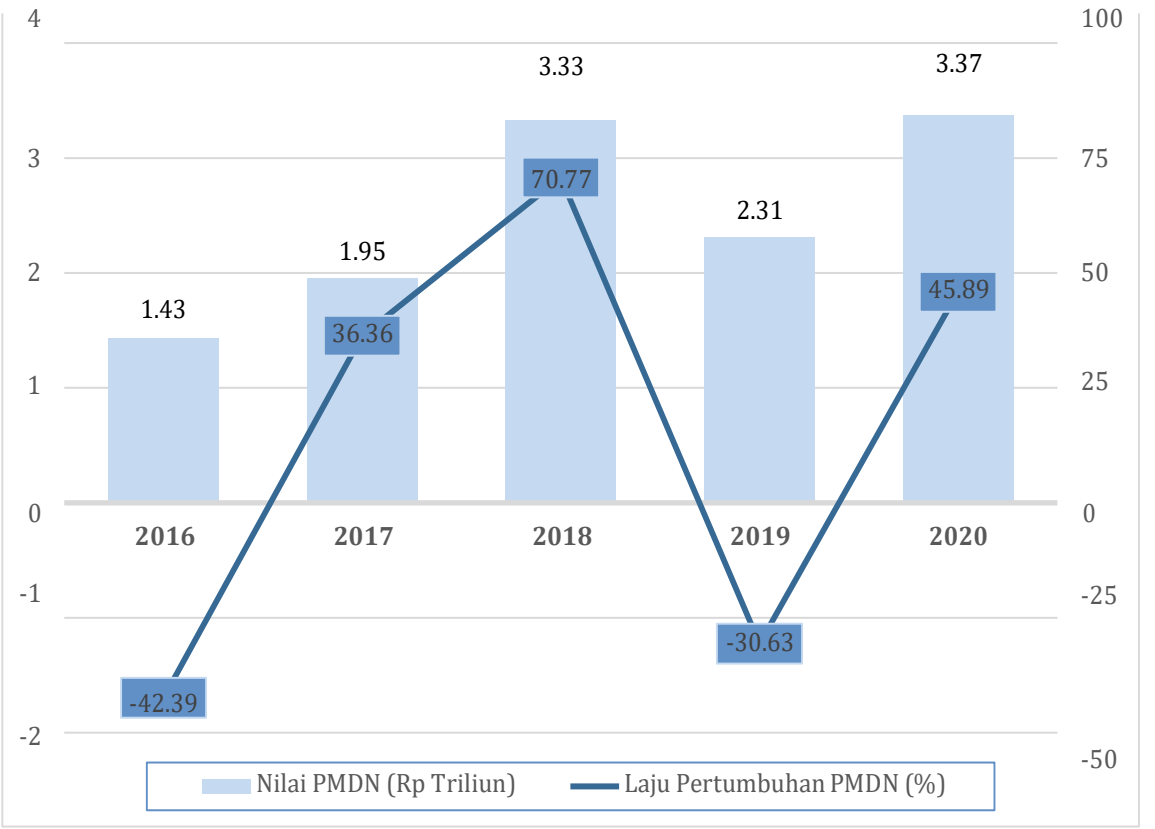


**Gambar 2.58 Nilai Investasi PMDN dan Laju Pertumbuhan Investasi PMDN, 2016- 2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Nilai investasi PMDN selama empat tahun terakhir di Kabupaten Serang berfluktuasi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 2,486 triliun rupiah. Pada tahun 2018, nilai PMDN tahunan mencapai angka tertinggi selama periode tersebut dengan nilai sebesar 3,33 triliun rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan investasi berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 investasi PMDN mengalami laju pertumbuhan positif sedangkan pada tahun 2016 dan 2019 mengalami pertumbuhan negatif. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan PMDN sebesar 16 persen. Laju pertumbuhan PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 70,77 persen.

Indeks daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang maupun jasa. Dapat dikatakan bahwa indeks daya beli adalah cerminan dari standar hidup layak diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (dalam hal ini konsumsi riil per kapita). Oleh karena itu, dalam indeks daya beli, pendapatan riil merupakan indikator yang penting. Gambar 2.59 berikut menunjukkan perkembangan target dan realisasi indeks daya beli di Kabupaten Serang.

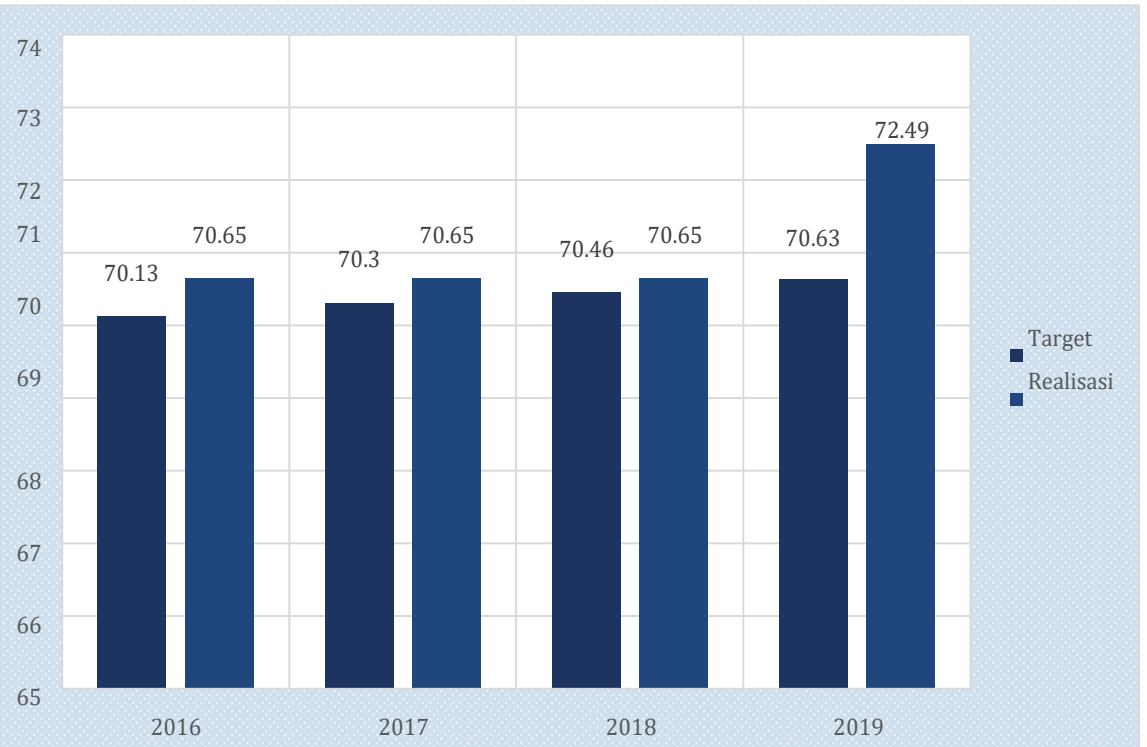


**Gambar 2.59 Indeks Daya Beli, 2016-2019**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2019*

Selama empat tahun terakhir, capaian indeks daya beli Kabupaten Serang cukup baik, dengan realisasi indeks selalu lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 indeks daya beli sebesar 70,65 meningkat menjadi 72,49 pada tahun 2019, dengan rata-rata indeks daya beli selama periode tersebut sebesar 71,11.

### 2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rasio proporsi aktif yaitu jumlah koperasi aktif dibandingkan jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Serang selama tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan, dari 31,78% pada tahun 2016 menjadi 74,72% pada tahun 2020. Begitu juga dengan rasio Usaha Mikro dan Kecil, dimana jumlah usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM di Kabupaten Serang mengalami peningkatan selama periode tahun 2016 – 2020, yaitu sebesar 98,87% pada tahun 2016 dan meningkat sebesar 99,28% pada tahun 2020. Rasio Koperasi Aktif dan Rasio Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut.

**Tabel 2.52 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2020**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Koperasi Aktif | % | 31,78 | 69,24 | 71,58 | 73,75 | 74,72 |
| Rasio Usaha Mikro dan Kecil | % | 98,87 | 98,68 | 99,94 | 99,24 | 99,28 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

### 2.3.2.13 Transmigrasi

Jumlah calon transmigrasi yang siap diberangkatkan di Kabupaten Serang berdasarkan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada Tahun 2016 – 2018 mendapat kuota masing-masing 5 KK per tahun, sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan kuota 9 KK dan pada tahun 2020 tidak ada transmigran yang diberangkatan karena adanya pandemi virus corona-19. Jumlah calon transmigrasi yang siap diberangkatkan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut.

**Tabel 2.53 Capaian Jumlah Calon Transmigran yang siap diberangkatkan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2020**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Calon Transmigran yang siap diberangkatkan | KK | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

### *2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga*

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, cakupan pembinaan organisasi kepemudaan, cakupan atlit berprestasi, dan tingkat ketersedian sarana dan prasarana olahraga masyarakat. Data tentang cakupan pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Serang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi | 9.09 | 51.51 | 51.51 | 93.33 | 85.71 |
| Target | 33.33 | 45.45 | 61 | 75.76 | 87.88 |

**Gambar 2.60 Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Selama lima tahun terakhir, realisasi cakupan pembinaan organisasi kepemudaan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, 2018, dan 2020 realisasi capaian tersebut masih di bawah target. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam upaya peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.

**Tabel 2.54 Capaian Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga dan Prestasi Olahraga**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Atlit berprestasi | % | 41,48 | 58 | 46 | 17,64 | 0 |
| Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) | % | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator capaian urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Serang tahun 2016-2020 cenderung kurang baik. Cakupan atlit berprestasi mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 17,64 persen dan tahun 2020 menjadi 0 dikarenakan tidak ada event olahraga akibat Pandemi Covid-19. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) selama tahun 2016-2018 masih sebesar 0, namun meningkat menjadi 4 pada tahun 2019 dan 2020.

### *2.3.2.15 Persandian*

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Serang.

#### *2.3.2.16 Kebudayaan*

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Serang dapat diukur dengan indikator cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya. Selama empat tahun terakhir,

hanya pada tahun 2016 cakupan indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017-2019, realisasi capaian indikator tersebut sama dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100,00 persen. Selanjutnya, di tahun 2020, realisasi capaian indikator tersebut jauh dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 26 persen.

**Tabel 2.55 Rata-rata Cakupan SDM, Organisasi, Pelestarian, Kajian, Fasilitasi, Gelar, Misi Dan Tempat Kesenian dan Budaya (%)**

| Tahun | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| 2016 | 100,00 | 0,00 |
| 2017 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 | 100,00 | 100,00 |
| 2019 | 100,00 | 100,00 |
| 2020 | 100,00 | 26,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

### *2.3.2.17 Perpustakaan*

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator: koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) serta jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.56 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Serang, 2016-2020**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul | % | 22,41 | 51,00 | 100 | 100 | 100 |

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) | | | | | | |
| Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah | % | 48,00 | 86,11 | 83 | 100,00 | 83 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Secara umum, capaian kedua indikator tersebut cukup baik. Selama lima tahun terakhir, capaian kedua indikator mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian kedua indikator telah mencapai 100 persen. Akan tetapi, di tahun 2020 capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah turun menjadi 83 persen dan berada di bawah target RPJMD.

#### *2.3.2.18 Kearsipan*

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

**Tabel 2.57 Rasio Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Terhadap Total Jumlah SKPD Yang Ada (%)**

| Tahun | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| 2016 | 41,00 | 100,00 |
| 2017 | 41,00 | 100,00 |
| 2018 | 5,00 | 29,00 |
| 2019 | 51,00 | 100,00 |
| 2020 | 60,00 | 100,00 |

*Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020*

Tabel di atas menunjukkan rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada. Berdasrkan data di atas realisasi indikator tersebut cukup baik dengan capaian selalu berada di atas target RPJMD.

## 2.3.3 Urusan Pelayanan Pilihan

Pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun sasaran pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Serang adalah untuk meningkatkan produksi dan mutu perikanan. Hal tersebut berkaitan dengan seberapa tinggi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang. Hal ini tentu ditujukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

### *2.3.3.1 Perikanan*

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Serang, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Di Kabupaten Serang, empat indikator yang digunakan adalah: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan.

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Serang mencapai angka 1,19 persen pada tahun 2016. Angka tersebut berhasil naik menjadi 9,50 persen pada tahun 2019. Data tersebut diambil dari LKPJ Bupati Kabupaten Serang 2016-2019. Meski tidak ada data mengenai persentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Serang pada tahun 2017-2018, namun diharapkan jika terdapat tren kenaikan pada kurun waktu tersebut.

Produksi nilai penangkapan ikan yang dihasilkan oleh Kabupaten Serang berasal dari perikanan laut dan perikanan tawar. Jenis ikan yang ditangkap dari laut lebih banyak daripada jenis ikan yang diproduksi selain di laut. Terdapat lebih dari 20 jenis ikan di laut yang ditangkap. Ikan teri merupakan ikan yang paling banyak ditangkap dengan total mencapai 1.279,2 kilogram pada tahun 2018 setelah penangkapan ikan jenis lainnya pada tahun yang sama. Selama tahun 2018, penangkapan ikan di laut mengalami kecenderungan meningkat. Total penangkapan ikan di laut mencapai 9.837,7 kilogram pada tahun 2018, meningkat dari tahun 2014-2016 yang masing- masing sebesar 7.553,1 kilogram (2014), 4.243,2 kilogram (2015), dan 3.342,8 kilogram (2016). Informasi tersebut terangkum dalam 2.58 sebagai berikut.

**Tabel 2.58 Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang 2018**

| Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan | 2018 |
|---|---|
| Manyung | 111,91 |
| Ikan sebelah | 25,46 |
| Selar | 397,01 |
| Kuwe | 175,16 |
| Layang | 193,54 |
| Tetengkek | 37,47 |
| Bawal hitam | 43,26 |

| Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut menurut Jenis Ikan | 2018 |
|---|---|
| Bentong | 62,41 |
| Kakap | 167,14 |
| Tembang | 320,54 |
| Lemuru | 25,41 |
| Teri | 1.279,16 |
| Peperek | 185,84 |
| Kurisi | 415,93 |
| Tongkol | 115,73 |
| Kembung | 1.066,47 |
| Tenggiri | 61,26 |
| Kerapu | 52,66 |
| Baronang | 25,79 |
| Pari burung | 57,93 |
| Ikan lainnya | 5.017,64 |
| **Total (kg)** | **9.837,71** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2018*

Selain ikan di laut, Kabupaten Serang juga memproduksi ikan selain ikan di laut. Terdapat tiga jenis penangkapan ikan selain ikan di laut yang terangkum dalam Tabel 2.59: budidaya laut, tambak dan kolam. Budidaya ikan di tambak menyumbang paling besar bagi Kabupaten Serang, mencapai 26.014,32 kilogram pada tahun 2020, menurun dari tahun 2016 sebesar 47.429 kilogram. Angka produksi tersebut diikuti oleh budidaya laut sebesar 13.756,34 kilogram (2020) dan ikan kolam sebesar 1.471,37 kilogram (2020).

**Tabel 2.59 Produksi dan Nilai Penangkapan Selain Ikan di Laut menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang, 2015-2018**

| Produksi dan Nilai Penangkapan Selain Ikan di Laut menurut Jenis Ikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya laut | 21.217,00 | 21.235,032 | 21.277,96 | 17.350,80 | 13.756,34 |
| Budidaya payau (Tambak) | 47.429,07 | 47.544,29 | 48.084,33 | - | 26.014,32 |
| Budidaya air tawar (Kolam) | 1.688,34 | 1.701,72 | 1.734,88 | 1.767,51 | 1.471,37 |
| **Total (Kg)** | **70.334,41** | **70.481,04** | **71.297,17** | **19.118,31** | **41.242,03** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2020 (data Diolah)*

Potensi perikanan budidaya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk mengembangkan sub sektor perikanannya. Kondisi makro perekonomian yang dapat dilihat dari sub sektor perikanan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan saja, namun juga perlu melihat tingkat konsumsi ikan dan nilai produksi perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Total produksi perikanan di Kabupaten Serang mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2016-2019. Angka yang dicapai di tahun 2016 adalah 77.929,4 kilogram dan turun menjadi 63.490,8 kilogram pada tahun 2019.

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang bisa menjadi alternatif selain daging. Organisasi Kesehatan Dunia *(World Health Organization)* menetapkan standar konsumsi ikan sebesar 36 kilogram per kapita per tahun. Meski konsumsi ikan di Kabupaten Serang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh WHO, namun tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Serang mengalami peningkatan, dari 23,36 kilogram per kapita per tahun (2016) menjadi 33,02 kilogram per kapita per tahun (2019).

Peningkatan pun juga terjadi pada nilai produksi perikanan**,** di mana diperoleh 209,4 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 384,2 miliar rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan jika kemampuan pemerintah Kabupaten Serang dalam menyediakan ikan sebagai salah satu sumber protein bagi konsumsi masyarakat pun meningkat. Hal tersebut tentu akan mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat Kabupaten Serang yang diharapkan dapat sesuai, atau bahkan melebihi, standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

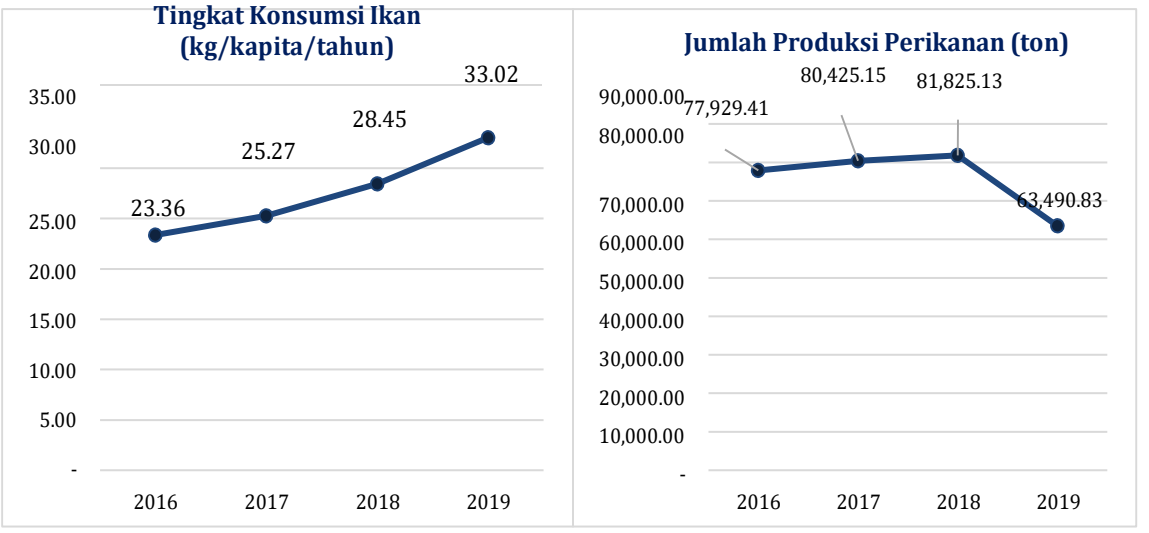


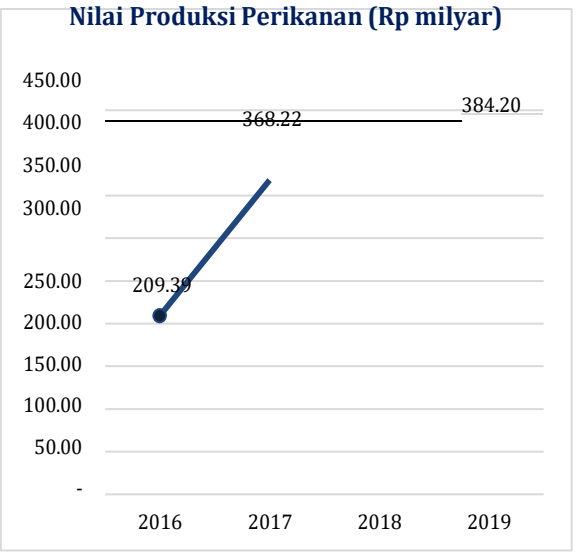


**Gambar 2.61 Tingkat Konsumsi Ikan, Jumlah Produksi Perikanan, dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Serang, 2016-2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2019*

### *2.3.3.2 Pariwisata*

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Serang diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sendiri, seperti terdapat pada Tabel 2.60, terdiri dari jenis objek wisata alam dan objek wisata buatan. Terdapat 68 objek wisata alam pada tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi

wisata buatan, mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2018, yaitu 43 buah (2016) menjadi 31 buah (2018). Hingga tahun 2018, total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebanyak 99 buah.

**Tabel 2.60 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Serang, 2016-2018**

| Jenis objek wisata | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Alam | 52 | 47 | 68 |
| Buatan | 43 | 10 | 31 |
| **Jumlah objek wisata** | **95** | **57** | **99** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018*

Secara keseluruhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat dalam Tabel 2.61. Pada tahun 2016, terdapat 11.587.088 wisatawan di Kabupaten Serang, kemudian terus mengalami penurun hingga menjadi 658.160 wisatawan pada thun 2019. Namun, jumlah tersebut mengalami meningkat menjadi 1.374.043 pengunjung pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi pandemi, namun tidak menyurutkan wisatawan nusantara untuk berkunjung di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.61 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jumlah wisatawan nusantara** | 11.857.088 | 9.245.374 | 8.392.828 | 649.489 | 1.369.074 |
| **Jumlah wisatawan mancanegara** | 3.860 | 2.425 | 1.470 | 8.671 | 4.969 |
| **Jumlah wisatawan** | 11.860.948 | 9.247.799 | 8.394.298 | 658.160 | 1.374.043 |

*Sumber : LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020, dan Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021*

Sedangkan jka dibandingkan dengan wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara terlihat mendominasi setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020. Jumlah wisatawan nusantara, sebanding dengan jumlah wisatawan keseluruhan yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2019, namun meningkat sebesar 719.585 wisatawan pada tahun 2020. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara, terus mengalami penurunan dari sebesar 3.860 wisatawan pada tahun 2016 menjadi 1.470

wisatawan pada tahun 2018. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tajam mencapai empat kali lipat menjadi sebanyak 8.671 wisatawan. Akan tetapi, pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi sehingga kembali menurun hampir setengahnya menjadi 4.969 wisatawan.

#### *2.3.3.3 Pertanian*

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator kontribusi sub sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan terhadap PDRB serta tingkat pembangunan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupataen Serang. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang ketersediaan energi dan protein serta pencapapian skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Luas lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan lahan agar pertanian dan perkebunan dapat optimal. Sebagai komoditas utama, padi memiliki luas lahan panen 79.459 hektar pada tahun 2018, diikuti dengan jagung (1.582 hektar), kacang tanah (842 hektar), kacang kedelai (665 hektar), ubi kayu (620 hektar), dan ubi jalar (192 hektar). Luas panen tersebut tampak mengalami penurunan dari tahun 2014 seperti tertera pada Tabel 2.17.

Dalam tabel yang sama, produksi pada juga mengalami penurunan dari tahun 2014-2018, yaitu 86.922 ton (2014) yang turun menjadi 419.228 ton (2018). Penurunan juga terjadi pada produksi ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Hal berbeda terjadi pada jagung, di mana produksi pada tahun 2014 sebanyak 2.279 ton meningkat menjadi 8.456 ton pada tahun 2018.

Dari data tersebut, dapat dihitung produktivitas komoditas padi dan palawija di Kabupaten Serang. Produktivitas padi selama kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan, meski tidak signifikan, dan berada pada angka 5,3. Penurunan produktivitas juga terjadi pada komoditas kacang tanah dan kacang kedelai. Namun, komoditas jagung, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami kenaikan produktivitas pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2014.

**Tabel 2.62 Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Utama Padi dan Palawija Padi Ladang di Kabupaten Serang, 2014-2018**

| Luas lahan, produksi, dan produktivitas komoditas utama padi dan palawija padi ladang | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas panen (ha) | | | | | | |
| | Padi | 86.922 | 88.611 | | | 79.459 |
| | Jagung | 724 | 287 | | | 1.582 |
| | Ubi kayu | 1.551 | 891 | | | 620 |
| | Ubi jalar | 516 | 293 | | | 192 |
| | Kacang tanah | 3.126 | 2.436 | | | 842 |
| | Kacang kedelai | 1.509 | 467 | | | 665 |
| Produksi (ton) | | | | | | |
| | Padi sawah | 465.858 | 510.748 | | | 419.228 |
| | Jagung | 2.279 | 965 | | | 8.456 |
| | Ubi kayu | 23.707 | 15.901 | | | 16.038 |
| | Ubi jalar | 7.008 | 3.901 | | | 2.842 |
| | Kacang tanah | 4.123 | 3.413 | | | 987 |
| | Kacang kedelai | 2.010 | 693 | | | 601 |
| Produktivitas (ton/ha) | | | | | | |
| | Padi sawah | 5,359 | 5,764 | | | 5,276 |
| | Jagung | 3,148 | 3,362 | | | 5,345 |
| | Ubi kayu | 15,285 | 17,846 | | | 25,868 |
| | Ubi jalar | 13,581 | 13,314 | | | 14,802 |
| | Kacang tanah | 1,319 | 1,401 | | | 1,172 |
| | Kacang kedelai | 1,332 | 1,484 | | | 0,904 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2019*

Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tentu saja memberikan sumbangsih terhadap PDRB. Adapun kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Serang selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 kontribusi dari sektor pertanian dan perkebunan mencapai 7,3 persen, kemudian naik cukup signifikan pada pada tahun 2017 menjadi 9,99 persen. Namun demikian, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan berturut-turut. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian dan perkebunan masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu mencapai 9,50 persen. sama seperti pertanian dan perkebunan, kontribusi peternakan terhadap PDRB juga fluktuatif. Pada tahun 2016, kontribusi sektor peternakan mencapai 1,9 persen, kemudian dari tahun 2017 hingga 2020 besaran kontribusi sektor peternakan sama dengan pertanian dan perkebunan. Merujuk pada Tabel 2.63, tingkat pembangunan kawasan pertanian dan perkebunan selama periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2019 tingkat pembangunan kawasan pertanian turun sebesar 27,36 persen, sedangakan tingkat pembangunan kawasan perkebunan justru turun pada tahun 2020 sebesar 7,62 persen. Tingkat pembangunan kawasan peternakan selama periode tersebut juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tingkat pembangunan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan masing-masing mencapai 151 persen, 70,08 persen, dan 77,78 persen.

Masih dalam tabel yang sama, terlihat bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Serang selama periode 2016-2019 terus mengalami penurunan, dari semula sebesar 10,19 persen menjadi 9,50 persen pada tahun 2019, sedangkan mulai tahun 2020 kontribusi perikanan tidak lagi dihitung. Adapun tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Serang terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2016-2020, dari 23,36 kilogram per kapita per tahun (2016) menjadi 33,02 kilogram per kapita per tahun. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2016-2018 terus mengalami peeningkatan, namun menurun dua tahun berturut-turut hingga pada tahun 2020 hanya mencapai 41.630,42 ton. Nilai produksi perikanan juga terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016-2019, namun turun cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 188,23 miliar rupiah.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Serang mampu menyediakan energi sebanyak 2.316 kilo kalori per kapita per hari bagi setiap penduduknya pada tahun 2019, meningkat dari 2.273 kilo kalori per kapita per hari pada tahun 2016. Demikian pula dengan ketersediaan protein yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai angka 115,2 gram per kapita per hari dari tahun 2016 sebesar 59,66 gram per kapita per hari. Atas dasar nilai tersebut diperoleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Serang yaitu sebesar 88,6 persen, naik sekitar 3 persen dari tahun 2016 yang mencapai 85,80 persen. Sedangkan pada tahun 2020 skor PPH Kabupaten Serang kembali meningkat menjadi 88,9 persen.

**Tabel 2.63 Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, serta Ketahanan Pangan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian dan perkebunan | | | | | | |
| Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB | % | 7,3 | 9,99 | 9,87 | 9,50 | 9,50 |
| Tingkat pembangunan kawasan pertanian | % | 15 | 30 | 114,41 | 87,05 | 151 |
| Tingkat pembangunan kawasan perkebunan | % | 15 | 30 | 74,1 | 77,70 | 70,08 |
| Peternakan | | | | | | |
| Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB | % | 1,9 | 9,99 | 9,87 | 9,50 | 9,50 |
| Tingkat pembangunan kawasan peternakan | % | 15 | 33,33 | 44,44 | 55,56 | 77,78 |
| Perikanan | | | | | | |
| Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB | % | 10,19 | 9,99 | 9,87 | 9,50 | - |
| Tingkat Konsumsi Ikan | kg/kapita/ tahun | 23,36 | 25,27 | 28,45 | 33,02 | 33,02 |
| Jumlah Produksi Perikanan | Ton | 77.929,41 | 80.425,15 | 81.825,13 | 63.490, 83 | 41.630, 42 |
| Nilai Produksi Perikanan | Rp milyar | 209,39 | 368,22 | 383,57 | 384,20 | 188,23 |
| Ketahanan pangan | | | | | | |
| Ketersediaan energi | kkal/kap/ hari | 2273 | 2571 | 2400 | 2316 | - |
| Ketersediaan protein | gr/kap/hari | 59,66 | 76 | 63 | 115,2 | - |
| Skor PPH | % | 85,80 | 86,90 | 87,60 | 88,6 | 88,9 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020*

Tabel 2.59 merangkum informasi mengenai jumlah produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Serang pada tahun 2016-2020. Jumlah produksi pertanian dan perkebunan, menurut tabel tersebut, relatif mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai 2020. Adapun untuk produksi daging juga mengalami peningkatan pada tahun tersebut.

**Tabel 2.64 Jumlah Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Padi | Ton | 513.105 | 520.077 | 524.228 | 496.064 | 558.974 |
| - Jagung | Ton | 1,255 | 6.031 | 6.395 | 7.836 | 6.208 |
| - Kedelai | Ton | 714 | 409 | 719 | 466 | 123 |
| - Cabai Merah | Ton | 2.091 | 2.798 | 1.942 | 3.117 | 1.351 |
| - Bawang Merah | Ton | 669 | 742 | 1.937 | 1.107 | 1.162 |
| - Durian | Ton | 15.038 | 20.915 | 86.335 | 19.042 | 19.033 |
| - Sedap Malam | Tangkai | 53.915 | 70.000 | 102.650 | 117.480 | 312.867 |
| - Kelapa | Ton | 8.623 | 7.198 | 8.798 | 8.727 | 8.744 |
| - Kakao | Ton | 352 | 439 | 469 | 401 | 370 |
| - Cengkeh | Ton | 279 | 410 | 491 | 293 | 302 |
| - Lada | Ton | 124 | 54 | 94 | 144 | 129 |
| Peningkatan Produksi Daging | | | | | | |
| - Daging Itik | Kg | 774.987 | 791.136 | 809.344 | 829.495 | 854.574 |
| - Daging Kerbau | Kg | 878.414 | 898.281 | 914.695 | 936.197 | 906.150 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020*

Tabel 2.65 menunjukkan luas panen dan produksi tanaman sayuran pada tahun 2020. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa luas panen dan produksi tertinggi diperoleh dari tanaman jamur yaitu mencapai 27.200 ha, dan memproduksi sebanyak 155.875 kuintal jamur. Luas panen dan produksi terbesar setelah jamur yaitu kangkung dan ketimun. Sedangkan tanaman sayur dengan luas panen dan produksi terendah diperoleh dari daun bawang dengan luas panen sebesar 5 ha, dan produksi sebesar 503 kuintal.

**Tabel 2.65 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Serang, 2020**

| Jenis Tanaman | Luas Panen (ha) | Produksi (kuintal) |
|---|---|---|
| Bawang Daun | 5 | 503 |
| Bawang Merah | 192 | 8.909 |
| Bayam | 292 | 19.934 |
| Cabe Besar | 222 | 15.268 |
| Cabe Rawit | 222 | 10.031 |
| Jamur | 27.200 | 155.875 |
| Kacang Panjang | 289 | 21.273 |
| Kangkung | 371 | 39.686 |
| Ketimun | 363 | 32.966 |
| Melon | 12 | 1.330 |
| Sawi | 326 | 27.295 |
| Semangka | 49 | 10.200 |
| Terong | 146 | 10.925 |
| Tomat | 50 | 4.900 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

### 2.3.3.4 Kehutanan

Hutan merupakan kawasan yang berperan strategis bagi keadaan tanah dan sekitarnya. Pemanfaatan sektor hutan pun perlu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi penebangan liar, kebakaran hutan, maupun kejadian lainnya yang dapat merusak ekosistem hutan. Kabupaten Serang, pada tahun 2019, memiliki lahan kritis di luar kawasan hutang lindung seluas 23.819,95 hektar, seperti terlihat pada Tabel 2.66 Hal tersebut dapat diasumsikan jika Kabupaten Serang tidak memiliki lahan hutan potensial, namun terdapat lahan yang kurang dimanfaatkan sehingga dikategorikan sebagai lahan kritis, seperti misalnya pekarangan. Terkait hal tersebut, masyarakat di Kabupaten Serang sebagian memanfaatkan lahan yang mereka miliki (yang berbentuk hutan) untuk menanam aneka sayuran dan cabai, terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Pemanfaatan pekaran yang dimiliki masyarakat tersebut tentu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu pangan.

**Tabel 2.66 Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Serang, 2019**

| | 2019 |
|---|---|
| Luas lahan kritis di luar kawasan hutan lindung (ha) | 23.819,95 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2019

Selain pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat, Kabupaten Serang memiliki beberapa jenis kawasan hutan yang datanya terpotret pada tahun 2019 seperti dalam Tabel 2.67. Terdapat jenis kawasan hutang lindung, hutan produksi, dan konservasi yang ada di Kabupaten Serang. Kawasan hutang lindung di Kabupaten Serang pada tahun 2019 seluas 726,64 hektar, sedangkan kawasan hutan produksi seluas 4.154,14 hektar dan kawasan konservasi seluas 6.310,35 hektar. Adapun kawasan hutan produksi terbagi menjadi hutan produksi terbatas (2.827,97 hektar) dan hutan produksi (1.326,17 hektar), sedangkan kawasan hutan konservasi terbagi menjadi hutan suaka alam (5.062,20 hektar) dan hutan taman wisata (1.248,15 hektar). Dengan demikian, maka luas kawasan hutan menurut fungsi yang ada di Kabupaten Serang pada tahun 2019 adalah seluas 11.191,13 hektar.

**Tabel 2.67 Kawasan Hutan yang Ada di Kabupaten Serang, 2019**

| | | | 2019 |
|---|---|---|---|
| Kawasan hutan lindung | | | **726,64** |
| | Hutan lindung | | 726,64 |
| Kawasan hutan produksi | | | **4.154,14** |
| | Hutan produksi terbatas | | 2.827,97 |
| | Hutan produksi | | 1.326,17 |
| Kawasan konservasi | | | **6.310,35** |
| | Hutan suaka alam | | 5.062,20 |
| | | Cagar alam rawa danau | 3.542,70 |
| | | Cagar alam Gunung Tukung Gede | 1.519,50 |
| | Hutan Taman Wisata | | 1.248,15 |
| | | Taman wisata alam Pulau Sangiang | 528,15 |
| | | Taman Wisata laut Pulau Sangiang | 720,00 |
| Luas kawasan hutan menurut fungsi (ha) | | | **11.191,13** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2019*

Dari kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Serang pada tahun 2019, terdapat luas lahan sebesar 24.194,59 hektar yang berstatus luas lahan kritis. Seluas 18.313,21 hektar lahan berstatus agak kritis pada tahun 2019. Adapun lahan kritis adalah seluas 4.031,83 hektar. Lahan yang berstatus sangat kritis di Kabupaten Serang pada tahun tersebut seluas 1.849,55 hektar.

**Tabel 2.68 Status Kritis Hutan yang Ada di Kabupaten Serang, 2019**

| | 2019 |
|---|---|
| Agak kritis (ha) | 18.313,21 |
| Kritis (ha) | 4.031,83 |
| Sangat kritis (ha) | 1.849,55 |
| **Luas lahan kritis (ha)** | **24.194,59** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2019*

#### *2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral*

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, energi dan sumber daya mineral harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini dikarenakan pemulihan keberadaan sumber daya tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Pemanfaatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan kehidupan manusia, seperti keberadaan listrik yang menjadi sumber energi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri dari sub urusan geologi, sub urusan mineral dan batubara, sub urusan energi baru dan terbarukan, dan sub urusan ketenagalistrikan.

Tabel 2.69 menunjukkan jumlah pelanggan listrik PLN yang ada di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2014-2017. Terlihat jika pelanggan rumah tangga merupakan pengguna pelanggan terbanyak listrik PLN yang jumlahnya meningkat setiap tahun, dari 249.052 pelanggan (2-14) menjadi 305.021 pelanggan (2017). Pelanggan yang lain berasal dari golongan tariff sosial, usaha, industry, pemerintah, dan jalan umum. Berdasarkan data, maka jumlah keseluruhan pelanggan PLN pada tahun 2017 adalah sebanyak 321.175 pelanggan, meningkat dari tahun 2014 yang berjumlah 260.443 pelanggan.

**Tabel 2.69 Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Serang, 2014-2017**

| Golongan tarif | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Sosial | 6.772 | 7.452 | 7.833 | 8.403 |
| Rumah tangga | 249.052 | 276.624 | 289.530 | 305.021 |
| Usaha | 3.736 | 4.156 | 5.162 | 6.821 |
| Industri | 263 | 176 | 182 | 191 |
| Pemerintah | 214 | 229 | 238 | 256 |
| Jalan umum | 406 | 442 | 457 | 483 |
| **Jumlah pelanggan listrik PLN** | **260.443** | **289.079** | **303.402** | **321.175** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2018*

Berdasarkan Tabel 2.69, jumlah daya listrik terpasang PLN di Kabupaten Serang didominasi oleh rumah tangga, sebesar 164.439.600 volt ampere (VA) pada tahun 2014. Jumlah tersebut naik menjadi 211.592.350 VA pada tahun 2017. Selain rumah tangga, terdapat juga golongan tariff sosial, usaha, industri, pemerintah, dan jalan umum yang memasang daya listrik PLN. Total daya listrik terpasang PLN adalah sebanyak 283.996.000 VA pada tahun 2017. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 311.718.300 VA. Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan daya listrik terpasang di industri, dari 95.152.000 VA (2014) menjadi 20.093.800 VA (2017). Adapun daya listrik terpasang PLN di sosial, usaha, pemerintah, dan jalan umum secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**Tabel 2.70 Jumlah Daya Listrik Terpasang PLN di Kabupaten Serang, 2014-2017**

| Golongan tarif | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Sosial | 6.237.500 | 7443550 | 8.251.250 | 9.149.000 |
| Rumah tangga | 164.439.600 | 132.348.400 | 195.835.500 | 211.592.350 |
| Usaha | 43.083.600 | 32.952.600 | 35.701.100 | 39.950.200 |
| Industri | 95.152.000 | 18.661.000 | 18779400 | 20.093.800 |
| Pemerintah | 821.400 | 814.700 | 861.000 | 863.450 |
| Jalan umum | 1.984.200 | 2.183.300 | 2.226.600 | 2.347.200 |
| Jumlah daya listrik terpasang | **311.718.300** | **186.960.000** | **261.654.850** | **283.996.000** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2018*

Adapun jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Serang pada tahun 2014-2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sedikit, dari 568.751.446 kilowatt jam (KwH) pada tahun 2014 menjadi 551.964.443 KwH pada tahun 2017. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2015 di mana jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Serang mencapai 510.514.360 KwH. Namun, pada tahun 2016, jumlah pemakaian listrik mengalami peningkatan menjadi 535.136.067 KwH dan kembali naik pada tahun 2017 meskipun tidak sama dengan tahun 2014. Dominasi pemakaian listrik di Kabupaten Serang berasal dari rumah tangga yang mencapai 442.193.679 KwH pada tahun 2017. Selanjutnya, diikuti oleh usaha (61.359.252 KwH), industri (25.105.885 KWH), sosial (15.553.038 KwH), jalan umum (6.414.308 KwH), dan pemerintah (1.338.281) pada tahun yang sama.

**Tabel 2.71 Jumlah Pemakaian Listrik di Kabupaten Serang, 2014-2017**

| Golongan tarif | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Sosial | 10.163.930 | 11.818.202 | 13.739.050 | 15.553.038 |
| Rumah tangga | 366.783.267 | 402.730.235 | 433.682.659 | 442.193.679 |
| Usaha | 69.859.189 | 57.649.860 | 56.274.026 | 61.359.252 |
| Industri | 116.007.488 | 42.765.618 | 23.938.301 | 25.105.885 |
| Pemerintah | 1.034.163 | 1.095.927 | 1.222.384 | 1.338.281 |
| Jalan umum | 4.903.409 | 6.272.720 | 6.279.647 | 6.414.308 |
| Jumlah pemakaian listrik | **568.751.446** | **510.514.360** | **535.136.067** | **551.964.443** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2018*

Di Kabupaten Serang, terdapat bahan galian yang ditambang oleh perusahaan. Bahan galian yang diproduksi antara lain pasir, andesit, tanah urug, dan pasir laut. Bahan galian tersebut ditambang oleh perusahaan pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bupati Kabupaten Serang. Berdasarkan Tabel 2.72, produksi pasir laut menjadi

produksi bahan galian terbanyak di Kabupaten Serang pada tahun 2014 yang volumenya mencapai 6.584.348 meter kubik. Selanjutnya, diikuti oleh produksi andesit (2.009.867 meter kubik), pasir (98.857 meter kubik), dan tanah urug (41.130 meter kubik). Berdasarkan data tersebut, maka jumlah produksi bahan galian pada perusahaan pemegang SIPD pada tahun 2014 adalah sebanyak 8.734.202 meter kubik.

**Tabel 2.72 Jumlah Produksi Bahan Galian pada Perusahaan di Kabupaten Serang, 2014**

| | 2014 |
|---|---|
| Pasir | 98.857 |
| Andesit | 2.009.867 |
| Tanah urug | 41.130 |
| Pasir laut | 6.584.348 |
| Jumlah produksi bahan galian pada perusahaan pemegang SIPD Bupati Serang ($m^3$) | **8.734.202** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015*

#### *2.3.3.6 Perdagangan*

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengertian perdagangan tersebut merupakan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun sub urusan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi, serta perlindungan konsumen.

Apabila suatu daerah memproduksi barang dan/atau jasa melebihi dari kebutuhan domestik, maka daerah tersebut dapat tertarik untuk memperluas pasar ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kabupaten Serang. Informasi yang terdapat pada Tabel 2.73 menunjukkan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Serang pada tahun 2014-2015 untuk barang non migas berdasarkan negara tujuannya. Adapun negara tujuan kegiatan ekspor tersebut tersebar di hampir

seluruh benua, seperti Asia, Timur Tengah, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Kabupaten Serang berhasil menembus 95 negara yang tersebar di benua tersebut. Sebanyak 262.998,90 ton barang non migas berhasil diekspor pada tahun 2014 dan 510.703,11 ton barang non migas berhasil diekspor pada tahun 2015.

**Tabel 2.73 Jumlah Ekspor Barang Non Migas menurut Negara Tujuan di Kabupaten Serang, 2014-2015**

| Negara Tujuan | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Eropa | | |
| Austria | 539,49 | |
| Belgia | 1.721,82 | 5.360,54 |
| Bulgaria | 666,41 | 599,75 |
| Republik Ceko | 65,21 | 43,00 |
| Jerman | 4.460,12 | 1.915,71 |
| Estonia | 17,42 | 21,97 |
| Spanyol | 1.808,43 | 2.507,74 |
| Finlandia | 61,05 | 41,90 |
| Perancis | 3.090,90 | 1.650,79 |
| Britania Raya | 2.774,63 | 4.227,66 |
| Yunani | 743,39 | 1.231,28 |
| Kroasia | 846,64 | 1.111,31 |
| Irlandia | 37,85 | 130,89 |
| Italia | 1.126,57 | 786,15 |
| Lituania | 877,18 | 269,78 |
| Latvia | 78,06 | 212,12 |
| Malta | 17,68 | |
| Belanda | 6.644,12 | 5.753,43 |
| Norwegia | 224,61 | |
| Polandia | 124,63 | 648,31 |
| Portugal | 460,52 | 367,08 |
| Rumania | 449,29 | 486,38 |
| Rusia | 6.440,76 | 38.989,51 |
| Swedia | 114,18 | 14,08 |
| Slovenia | 253,65 | 307,86 |
| Slovakia | 27,91 | 1,36 |
| Albania | 157,67 | 158,80 |
| Montenegro | 77,48 | |
| Serbia | 8,74 | 84,15 |
| Ukraina | 787,38 | 590,59 |

| Negara Tujuan | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Belarusia | | 12,11 |
| Denmark | | 58,41 |
| Hungaria | | 52,57 |
| Swiss | | 236,02 |
| Amerika | | |
| Kanada | 1.495,40 | 1.817,18 |
| Amerika Serikat | 26.906,38 | |
| Argentina | 1.045,11 | 3.187,08 |
| Bolivia | 43,20 | 54,72 |
| Brazil | 9.557,71 | 3.787,94 |
| Chili | 13.676,58 | 175,18 |
| Guyana | 22,68 | |
| Haiti | 27,36 | 13,20 |
| Meksiko | 75,64 | 56.767,96 |
| Panama | 21,34 | |
| Peru | 88,41 | 36,39 |
| Uruguay | 628,32 | 492,37 |
| Aruba | | 28,98 |
| Jamaika | | 2.479,52 |
| Timur Tengah | | |
| Siprus | 87,47 | 175,31 |
| Turki | 8.859,91 | 4.362,26 |
| Uni Emirat Arab | 2.371,26 | 12.686,31 |
| Mesir | 1.348,99 | 163,11 |
| Israel | 23,03 | 93,78 |
| Iraq | 116,94 | |
| Iran | 382,00 | 19,29 |
| Yordania | 1.167,62 | 918,00 |
| Kuwait | 1.554,37 | 1.815,84 |
| Oman | 22,84 | 309,98 |
| Qatar | 1.021,73 | 4.806,34 |
| Arab Saudi | 3.046,46 | |
| Syria | 70,34 | |
| Yaman | 1.933,10 | 181,27 |
| Bahrain | | 21,47 |
| Libanon | | 37,84 |
| Asia | | |
| Armenia | 16,42 | |
| Bangladesh | 1.809,53 | 2.533,53 |
| Georgia | 733,78 | 230,14 |
| Hong Kong | 1.286,07 | 771,36 |

| Negara Tujuan | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Sri Lanka | 139,78 | 101,16 |
| Taiwan | 2.543,43 | 15.085,36 |
| Brunei Darussalam | 9,52 | |
| Kamboja | 1.364,36 | 593,40 |
| Myanmar | 1.384,25 | 223,43 |
| Malaysia | 40.708,63 | 96.614,18 |
| Filipina | 8.630,33 | 10.103,40 |
| Singapura | 953,22 | 32.096,46 |
| Thailand | 23.868,98 | 27.860,68 |
| Korea Selatan | 7.781,45 | 33.600,41 |
| China | 8.829,57 | |
| Jepang | 8.553,18 | 26.121,99 |
| India | 39.314,70 | 28.721,44 |
| Pakistan | 1.695,39 | 2.320,52 |
| Laos | | 18,,13104 |
| Vietnam | | 44.751,53 |
| Afrika | | |
| Kongo | 137,50 | |
| Madagaskar | 14,48 | |
| Tunisia | 34,79 | 203,80 |
| Afrika Selatan | 765,49 | 11.343,40 |
| Aljazair | | 474,78 |
| Ethiopia | | 50,30 |
| Kenya | | 12,30 |
| Mauritius | | 1.490,59 |
| Maroko | | 11.121,00 |
| Australia | | |
| Australia | 1.892,62 | 1.577,51 |
| Selandia Baru | 233,43 | 397,87 |
| Jumlah (volume) ekspor barang non migas menurut negara tujuan (ton) | **262.998,90** | **510.703,11** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2016*

Selain menurut negara tujuan, kegiatan ekspor barang non migas yang dilakukan oleh Kabupaten Serang juga dicatat berdasarkan pelabuhan muat. Terdapat delapan pelabuhan muat yang digunakan Kabupaten Serang untuk mengekspor barang dan/atau jasa ke luar negeri, yaitu: Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Merak, Ciwandan, Anyer Kidul, Tanjung Leneng, Tanjung Sekong, dan Cigading. Pada tahun 2014, Kabupaten Serang berhasil mengekspor 268.652,70 ton melalui pelabuhan muat dan meningkat drastis

menjadi 2.438.769,72 ton pada tahun 2015. Dari kedelapan pelabuhan muat tersebut, terlihat pada Tabel 2.62.68 jika Tanjung Priok menjadi pelabuhan muat yang paling banyak melakukan ekspor dari Kabupaten Serang, yaitu sebanyak 216.635,54 ton pada tahun 2014 dan 2.229.072,51 ton pada tahun 2015.

**Tabel 2.74 Jumlah Ekspor Barang Non Migas menurut Pelabuhan Muat di Kabupaten Serang, 2014-2015**

| Pelabuhan Muat | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Tanjung Priok | 216.635,54 | 2.229.072,51 |
| Soekarno-Hatta | 338,52 | 16,75 |
| Merak | 26.096,52 | 47.246,97 |
| Ciwandan | | 71,49 |
| Anyer Kidul | 10.905,53 | 47.878,81 |
| Tanjung Leneng | 10.963,24 | 113.549,94 |
| Tanjung Sekong | 1.828,22 | 933,26 |
| Cigading | 1.885,12 | |
| Jumlah (volume) ekspor barang non migas menurut pelabuhan muat (ton) | **268.652,70** | **2.438.769,72** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2016*

Kinerja pemerintahan urusan perdagangan memiliki beberapa indikator, yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat, jumlah pasar rakyat yang dibangun, dan tingkat pembangunan resi gudang. Berdasarkan Tabel 2.75, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang cenderung stabil pada kurun waktu 2016-2020, meskipun turun cukup signifikan pada tahun 2017. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang adalah sebesar 9,28 persen pada tahun 2016, turun pada tahun 2017 menjadi 6,7 persen pada tahun 2017, kemudian meningkat tiga taahun berturut-turut hingga tahun 2020 mencapai 9,3 persen. Adapun rasio jumlah pasar rakyat (yang merupakan pasar tradisional milik pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat berturut-turut sebesar 67 persen selama tahun 2016-2017. Angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 75 persen pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi mencapai 87 persen. Artinya, jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi mengalami pertambahan. Jumlah pasar rakyat yang dibangun selama tahun 2016-2019 adalah masing-masing satu setiap tahun, kecuali tahun 2017 dan 2020 yang mana tidak ada

pasar rakyat yang dibangun pada tahun tersebut. Adapun tingkat pembangunan resi gudang yang diinformasikan dalam tabel tersebut berturut-turut adalah nol persen pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020. Hanya saja, di tahun 2017, tingkat pembangunan resi gudang mencapai 20 persen.

**Tabel 2.75 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pelayanan Pilihan Perdagangan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikat | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 9,28 | 6,7 | 8,98 | 9,10 | 9,3 |
| Rasio jumlah pasar rakyat (tradisional milik pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat (tradisional milik pemda) | % | 67,00 | 67,00 | 75,00 | 87,00 | 87,00 |
| Jumlah pasar rakyat (tradisional milik pemda) yang dibangun | Pasar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tingkat pembangunan resi gudang | % | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020*

### *2.3.3.7 Perindustrian*

Industri besar merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Serang, diikuti oleh industri kecil/rumah tangga dan industri sedang. Pada tahun 2018, tercatat ada 119 perusahaan besar dengan tenaga kerja terserap sebanyak 50.522 jiwa. Pada tahun yang sama, terdapat 124 industri sedang dengan 5.683 tenaga kerja. Adapun pada tahun 2016, terdapat 114.209 industri kecil/rumah tangga dengan 209.656 tenaga kerja. Informasi tersebut terangkum dalam Tabel 2.71 sebagai berikut.

**Tabel 2.76 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Serang, 2014-2018**

| Jumlah Perusahaan dan Tenaga | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri besar | | | | | | |
| | Perusahaan | 92 | 84 | | | 119 |
| | Tenaga kerja | 82.144 | 89.514 | | | 50.522 |
| Industri sedang | | | | | | |
| | Perusahaan | 86 | 74 | | | 124 |

| Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tenaga kerja | 4.053 | 4.964 | | | 5.683 |
| Industri kecil/rumah tangga | | | | | | |
| | Perusahaan | 7.579 | | 114.209 | | |
| | Tenaga kerja | 18.453 | | 209.656 | | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2019*

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pelayanan pilihan terkait perindustrian di Kabupaten Serang terdiri dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, tingkat pembangunan kawasan sentra industri kecil menengah (IKM), dan tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama. Berdasarkan informasi dari 2.76, terlihat jika kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Serang cenderung fluktuatif pada rentang waktu 2016-2020. Kontribusi sebesar 50,35 persen ditunjukkan pada tahun 2016, namun sayangnya, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 48,37 persen. Kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 49,47, namun turun menjadi 47,24 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi sektor perindustrian naik hingga mencapai 49,42 persen. Adapun tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru di Kabupaten Serang adalah sebesar 15 persen pada tahun 2016. Persentase tersebut naik 100 persen menjadi 30 persen pada tahun 2017. Namun, angka tersebut turun cukup tajam pada tahun 2018 menjadi 4,59 persen. Walaupun demikian, Kembali mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut hingga pada tahun 2020 mencapai 45 persen. Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama juga cenderung fluktuatif pada periode tersebut. Pada tahun 2016, tingkat pengembangan kawasan sentra IKM adalah sebesar 85 persen pada tahun 2016 dan bertahan hingga tahun 2017, namun turun sangat tajam hingga menjadi 4,76 persen pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019-2020 angka tersebut menjadi 100 persen.

**Tabel 2.77 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pelayanan Pilihan Perindustrian di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB | % | 50.35 | 48.37 | 49.47 | 47.24 | 49.42 |
| Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru | % | 15 | 30 | 4.59 | 15 | 45 |
| Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama | % | 85 | 85 | 4.76 | 100 | 100 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020*

### 2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan fungsi penunjang, menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, adalah urusan yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi maupun perangkat daerah lain. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah:

1. Fungsi penunjang administrasi pemerintahan,
2. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan,
3. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
4. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan,
5. Fungsi penunjang keuangan, dan
6. Fungsi penunjang pengawasan.

Setiap fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam satu satuan kerja perangkat daerah. Hal itu ditujukan agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

#### *2.3.4.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan*

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang memiliki beberapa indikator terkait untuk menunjang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Adapun indikator tersebut adalah indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah dan kualitas pelayanan informasi. Informasi mengenai indikator tersebut terangkum dalam Tabel 2.7 di bawah.

Adapun indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah terdiri dari tiga indikator: tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dan tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah. Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran di Kabupaten

Serang mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2016-2017, tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran mencapai 100 persen. Namun, angka tersebut turun menjadi 50 persen pada tahun 2018. Meski tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 66,67 persen, angka tersebut belum mencapai prestasi seperti pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2020, tingkat pemenuhan layanan perkantoran menjadi 100 persen. Sama seperti dengan tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur mencapai angka 100 persen pada tahun 2016-2017 yang kemudian turun menjadi 50 persen pada tahun 2018. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan menjadi 66,67 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur mencapai angka 100 persen. Fluktuasi angka kinerja juga ditunjukkan pada indikator tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah di mana pada tahun 2016-2017 berhasil mencapai 100 persen. Namun, penurunan juga terjadi pada tahun 2018 menjadi 50 persen. Meski begitu, pada tahun 2019, tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah berhasil kembali meraih angka 100 persen dan mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2020.

Indikator terkait kualitas pelayanan informasi terdiri dari dua indikator, yaitu terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah serta cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan. Seperti dilihat dalam Tabel 2.78, pemerintah Kabupaten Serang berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2016 untuk indikator terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah. Sayangnya, nilai tersebut turun menjadi 60 persen pada tahun 2017. Namun, angka tersebut kembali naik menjadi 100 persen pada tahun 2018 dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2020.

Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM menunjukkan data yang fluktuatif selama kurun waktu 2016-2019. Data menunjukkan jika pada tahun 2016, pencapaian indikator tersebut hanya sebesar 25 persen saja. Namun, angka tersebut naik pada tahun 2017 dan mencapai angka 50 persen. Perolehan tersebut dapat ditingkatkan hingga tahun 2018 yang mecapai angka 75 persen. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tersebut berhasil mencapai angka 100 persen.

**Tabel 2.78 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas kelembagaan daerah | | | | | | |
| **Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran** | % | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 66,67 | 100 |
| **Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | % | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 66,67 | 100 |
| **Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah** | %/th | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100 |
| Kualitas Pelayanan Informasi | | | | | | |
| **Terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah** | % | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan** | % | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2019, Lampiran Capaian Kinerja 2016-2020 LKPJ AMJ Final*

### *2.3.4.2 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan*

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang yang berperan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk menyinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif, yaitu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, beserta realisasinya. Untuk melihat kinerja pemerintah daerah, beberapa sasaran dan indikator perencanaan pembangunan disusun. Sasaran dari urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Serang yang terkait adalah kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD, kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang, pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.79 menunjukkan jika sasaran pemerintah daerah terhadap kualitas perencanaan, pengendaliann dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD yang menggunakan indikator tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan maupun tahunan, pelaporan kinerja, dan pelaporan keuangan SKPD berturut-turut mencapai 100% pada tahun 2016-2020.

Untuk mencapai sasaran peningkatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Serang perlu memastikan ketersediaan dokumen-dokumen yang mendukung sasasran tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang berhasil menyediakan data/informasi pembangunan daerah setiap tahunnya, terbukti dengan pencapaian 100 persen setiap tahun dalam kurun waktu 2016-2019 seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.73. Terlihat pula pada tabel yang sama jika pemerintah Kabupaten Serang setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020 mampu menghasilkan dokumen yang berisikan: PDRB Kabupaten Serang, IPM Kabupaten Serang, perencanaan pembangunan daerah, RPJMD, RKPD, RKPD perubahan, KUA PPAS, KUA PPAS perubahan, evaluasi pembangunan daerah serta LKPJ.

Sasaran peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami kenaikan. Terlihat jika nilai kerja pemerintah daerah berhasil mencapai peringkat B pada tahun 2016. Peringkat tersebut naik menjadi BB pada tahun 2017 dan bertahan hingga tahun 2018. Adapun data terakhir menunjukkan jika peringkat tersebut kembali naik menjadi A pada tahun 2019.

Untuk mendukung pencapaian sasaran keselarasan perencanaan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan indikator-indikator yang menunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan pembangunan terkait. Adapun Kabupaten Serang berhasil mencapai angka 100 persen pada tahun 2018 untuk kesesuaian program renstra dengan RPJMD. Pencapaian yang sama di tahun yang sama juga berhasil dicapai indikator kesesuaian kegiatan renja dengan RKPD. Tidak hanya itu, kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD juga berhasil mencapai angka 100 persen atau seluruhnya sangat sesuai pada tahun 2018.

**Tabel 2.79 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD** | | | | | | |
| **Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Tingkat ketersediaan dokumen rencana Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Persentase pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Persentase perangkat daerah (PD) yang target penilaian kinerjanya tercapai minimal 80%** | % | 100,00 | 89,00 | 70,00 | 93,00 | 64,00 |
| **Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah** | | | | | | |

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PDRB Kabupaten Serang** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **IPM Kabupaten Serang** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **RPJMD** | Dokumen | 1 | - | - | - | - |
| **RKPD** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RKPD Perubahan** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **KUA PPAS** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **KUA PPAS Perubahan** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **LKPj** | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Penyelenggaraan pemerintahan daerah** | | | | | | |
| **Nilai kinerja pemerintah daerah** | Peringkat (A, BB, B, CC, C, D) | B | BB | BB | A | BB |
| **Keselarasan perencanaan pembangunan daerah** | | | | | | |
| **Persentase program renstra yang sesuai dengan RPJMD** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Persentase kegiatan renja yang sesuai dengan RKPD** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: BAPPEDA Kabupaten Serang Tahun 2016-2019*

Selain dokumen-dokumen yang telah disebutkan pada tabel sebelumnya, terdapat pula dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Serang. Tabel 2.80 menunjukkan jika setiap tahun pada kurun waktu 2016-2020, pemerintah Kabupaten Serang sudah memiliki dokumen perencanaan RPJPD tahun 2006-2026 yang ditetapkan dengan Perda. Selain itu, tersedia pula dokumen perencanaan RPJMD tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Perda. Pada kurun waktu yang sama, tersedia pula dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada dan dokumen RTRW yang ditetapkan dengan perda.

**Tabel 2.80 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Perencanaan Pembangunan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda** | - | - | - | - | - |
| **Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada** | Ada | - | - | - | - |
| **Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada** | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| **Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda** | - | - | - | - | Ada |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2020*

### *2.3.4.3 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pembangunan*

Adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan tak lepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi tersebut berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan evaluasi atas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan sebelumnya. Terkait urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, data yang berhasil diperoleh adalah data LKPJ Bupati Serang pada tahun 2020. Tabel 2.81 menunjukkan jika pada tahun 2020 tersebut, sebanyak 100 persen hasil penelitian yang dimanfaatkan di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.81 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Serang, 2020**

| Indikator | Satuan | 2020 |
|---|---|---|
| **Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan** | % | 100 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Serang Tahun 2020

#### *2.3.4.4 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan*

Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Keberadaan SDM yang berkualitas pun juga pada akhirnya akan mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tabel 2.82 menunjukkan jika kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang memiliki beberapa sasaran, yakni peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin, dan pencapaian pejabat struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di Kabupaten Serang.

Tabel tersebut menginformasikan jika untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang mengikutsertakan (baik menyelenggarakan maupun mengikutkan) SDM (yang merupakan Aparatur Sipil Jabatan (ASN) yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM) tingkat II, III, dan IV, serta pelaksanaan kegiatan prajabatan bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun Diklat PIM II diikuti sebanyak dua orang pada tahun 2016, masing-masing lima orang pada tahun 2017, empat orang pada tahun 2018, dan dua orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada yang mengikuti Diklat PIM II. Diklat PIM III diikuti oleh masing-masing lima orang, 20 orang, dan 10 orang pada kurun waktu 2016-2018. Adapun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada anggota PNS yang mengikuti Diklat PIM III. Diklat PIM IV sendiri diikuti oleh sebanyak 80 orang pada tahun 2016, masing-masing 140 orang pada tahun 2017, sebanyak 55 orang tahun 2018, dan 40 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada yang mengikuti diklat PIM IV. Untuk kegiatan prajabatan bagi CPNS, terdapat 15 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut pada tahun 2016 dan 389 peserta pada tahun 2019. Tahun 2020 belum ada catatan mengenai prajabatan bagi

CPNS. Selama kurun waktu 2016-2020, ditemukan 16 kasus indisipliner PNS (2016), 18 kasus (2017-2018), dan 16 kasus (2019 dan 2020).

Pada tahun 2020, terdapat beberapa indikator terkait fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang. Indeks kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian mencapai angka 95,10 pada tahun tersebut. Adapun persentase ASN yang tidak terkena sanksi disiplin sedang berat mencapai 100 persen. Pada tahun yang sama, pejabat structural yang memenuhi SKJ sebesar 94,01.

**Tabel 2.82 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kualitas SDM aparatur** | | | | | | |
| Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS : | | 8.75 | 25.34 | 32.17 | 37.05 | 37.05 |
| Diklat PIM II | PNS | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Diklat PIM III | PNS | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Diklat PIM IV | PNS | 80 | 140 | 55 | 40 | 0 |
| Prajabatan | CPNS | 15 | 0 | 266 | 389 | 0 |
| Tingkat indispliner PNS | Kasus | 16 | 18 | 18 | 7 | 9 |
| **Kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian** | | | | | | |
| Index kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian | | | | 90,35 | 94,70 | 95,10 |
| **ASN yang tidak melanggar disiplin** | | | | | | |
| Persentase ASN yang tidak terkena sanksi displin sedang dan berat | % | | | 99,95 | 100 | 100 |
| **Pejabat struktural yang memenuhi SKJ** | | | | | | |
| Persentase pejabat struktural yang memenuhi SKJ | % | | | 80,25 | 88,11 | 94,01 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

#### 2.3.4.5 Fungsi Penunjang Keuangan

Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintahan daerah, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pemerintah Kabupaten Serang secara konsisten menerbitkan dokumen pelaksanaan keuangan daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib. Kegiatan pelaksanaan keuangan daerah pun juga diterbitkan dokumen pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit oleh BPK.

Tabel 2.83 menunjukkan jika jumlah pendapatan daerah yang diterima oleh Kabupaten Serang meningkat setiap tahunnya pada kurun waktu 2016-2019, namun menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2016, pemerintah daerah Kabupaten Serang mampu membekukan 2.468,08 miliar rupiah dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 2.810,70 miliar rupiah. Kenaikan tipis kembali terjadi pada tahun 2018 di mana pemerintah daerah Kabupaten Serang mencapai 2.918,63 miliar rupiah. Kenaikan drastis dialami oleh Kabupaten Serang di mana pada tahun 2019 pendapatan daerah yang dihasilkan mencapai 3.024,15 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan daerah mencapai angka 2.965,62 miliar, menurun dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan pendapatan daerah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang berhasil menyumbang sebesar 590,87 miliar rupiah (2016), 815,40 miliar rupiah (2017), 697,09 miliar rupiah (2018), 705,28 miliar rupiah (2019) dan 760,92 miliar rupiah (2020). Peningkatan drastis PAD yang diperoleh Kabupaten Serang pada tahun 2019 tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Serang pada tahun yang sama. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 untuk pendapatan daerah pendapatan asli daerah justru naik. Dari informasi tersebut, maka dapat dihitung jika rasio PAD terhadap pendapatan daerah adalah stabil pada angka sekitar 24 persen selama kurun waktu 2016-2020, kecuali pada tahun 2017 di mana rasio tersebut naik menjadi 29,01 persen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan, pemerintah wajib menerbitkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat kewajaran penggunaan anggaran di daerah. Selama empat tahun berturut-turut pada

2016-2019, Kabupaten Serang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dilakukan oleh BPK dan pada tahun 2020 masih dalam progres. Artinya, tidak ditemukan ketidakwajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.83 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah** | | | | | | |
| **Jumlah pendapatan daerah** | Rp milyar | 2.468,08 | 2.810,70 | 2.918,63 | 3,024.15 | 2,965.62 |
| **Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)** | Rp milyar | 590,87 | 815,40 | 697,09 | 705.28 | 760.92 |
| **Rasio PAD terhadap pendapatan daerah** | % | 23,94 | 29,01 | 23,88 | 23.32 | 25.66 |
| **Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah** | WTP/WDP/TMP | WTP | WTP | WTP | WTP | Progres |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

### *2.3.4.6 Fungsi Penunjang Pengawasan*

Pada urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, pemerintah Kabupaten Serang telah melaksanakan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan sepanjang tahun 2016-2020. Fungsi pengawasan juga berfokus pada pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Tabel 2.84 menunjukkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat dari level 2 pada tahun 2016 menjadi level 3 pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Serang berhasil mempertahankan kapabilitas APIP pada level 3 hingga tahun 2020.

Selanjutnya, tingkat maturitas Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Serang berada pada level 3,11 selama dua tahun, yaitu tahun 2016-2017. Level tersebut naik menjadi 3,51 pada tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 3,80. Pada tahun 2020, level tersebut genap pada angka 4,0. Adapun tingkat kuantitas APIP di Kabupaten Serang pada tahun 2016 mencapai 52,86 persen dan pada tahun 2017 mencapai 66,67 persen. Tingkat pencapaian tersebut terus meningkat menjadi 79,16 persen pada tahun 2018, menjadi 83,87 persen pada tahun 2019, dan terakhir meningkat menjadi 8548 pada tahun 2020. Tingkat temuan Inspektorat Kabupaten Serang yang ditindaklanjuti adalah sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 dan tingkat temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah sebesar 84,00 persen pada tahun yang sama.

**Tabel 2.84 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah** | | | | | | |
| **Tingkat kapabilitas APIP** | Level | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Tingkat maturitas SPIP** | Level | 3.11 | 3.11 | 3.51 | 3.8 | 4 |
| **Tingkat kuantitas APIP** | % | 52.86 | 66.67 | 79.16 | 83.87 | 85.48 |
| **Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti** | % | 78,57 | 87,61 | 80,41 | 88,25 | 90,21 |
| **Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti** | % | 100 | 69,45 | 83,61 | 82,52 | 84,00 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah masing-masing. Daya saing suatu daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun yang termasuk dalam aspek daya saing daerah adalah: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

#### *2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita*

Untuk melihat tingkat konsumsi rumah tangga, informasi tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita diperlukan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menunjukkan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Apabila angka/nilai konsumsi rumah tangga semakin tinggi, maka semakin atraktif pula peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk mendapatkan angka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, perlu dihitung rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebelumnya. Angka tersebut didasarkan pada pengeluaran penduduk, baik untuk makanan maupun untuk non-makanan, per jumlah penduduk.

Seperti disajikan dalam Tabel 2.85, diketahui jika rata-rata konsumsi per kapita per hari di Kabupaten Serang pada tahun 2015 sebesar 1.946,36 kilo kalori per hari. Angka rata-rata konsumsi per kapita per hari tersebut adalah sama sampai tahun 2017. Namun, terdapat kenaikan angka pada tahun 2018. Informasi dalam tabel menunjukkan jika rata-rata konsumsi per kapita sehari pada tahun 2018 mencapai angka 2.232,86 kilo kalori per hari di Kabupaten Serang. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata konsumsi per kapita di Kabupaten Serang menurun menjadi 2.189,11 kilo kalori. Rerata pertumbuhan konsumsi untuk Kabupaten Serang per hari dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 2,98 persen per tahun.

**Tabel 2.85 Rata-rata Konsumsi per Kapita Sehari di Kabupaten Serang, 2015-2019**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rata-rata konsumsi per kapita sehari (kkal/hari)** | 1.946,36 | 1.946,36 | 1.946,36 | 2.232,86 | 2.189,11 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2020*

Selain untuk melihat kemampuan ekonomi daerah, pola pengeluaran dapat juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Hubungan antara pengeluaran untuk makanan dan total pengeluaran adalah berbanding terbalik. Apabila persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran semakin rendah, maka akan semakin tinggi tingkat perekonomian penduduknya.

Tabel. 2.86 menunjukkan rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran yang ada di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2015-2017. Terlihat jika rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan paling banyak berasal dari penduduk dengan pengeluaran makanan sebulan sebesar Rp 1.500.000,00 dan lebih, di mana pada tahun 2015 mencapai pengeluaran Rp 936.159,00 dan sebesar Rp 997.287,00 pada tahun 2017. Total pengeluaran makanan per kapita sebulan adalah sebesar Rp 2.965.937,00 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 3.290.196,00 pada tahun 2017.

**Tabel 2.86 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Serang, 2015-2017**

| Pengeluaran Makanan Sebulan (Rupiah) | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **<150.000** | - | | - |
| **150.000-199.999** | 129.657 | | 120.673 |
| **200.000-299.999** | 164.959 | | 187.229 |
| **300.000-499.999** | 256.992 | | 280.592 |
| **500.000-749.999** | 388.017 | | 403.525 |
| **750.000-999.999** | 479.913 | | 563.603 |
| **1.000.000-1.499.999** | 610.240 | | 737.287 |
| **1.500.000 dan lebih** | 936.159 | | 997.287 |
| Total | **2.965.937** | | **3.290.196** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018*

Selain pengeluaran makanan per kapita, terdapat pula pengeluaran non-makanan per kapita. Menurut Tabel 2.87, pengeluaran non-makanan per kapita tertinggi di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2018 berasal dari penduduk golongan pengeluaran Rp.1.500.000,00 atau lebih dalam sebulan. Adapun pengeluaran non-makanan per kapita yang dikeluarkan oleh penduduk golongan tersebut adalah sebesar Rp 1.775.748,00 per bulan pada tahun 2015, Rp 1.068.447,00 per bulan pada tahun 2017, dan Rp 1.060.043,00 per bulan pada tahun 2018. Total pengeluaran non-makanan dalam sebulan pada penduduk Kabupaten Serang adalah sebesar Rp 3.266.058,00 pada tahun 2015, Rp.2.344.207,00 pada tahun 2017, dan Rp 2.329.891,00 pada tahun 2018. Melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan jika rata-rata pengeluaran non-makanan per kapita sebulan di Kabupaten Serang mengalami tren penurunan selama kurun waktu 2015-2018.

**Tabel 2.87 Rata-rata Pengeluaran Non-Makanan per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran**

| Pengeluaran Non-Makanan Sebulan (Rupiah) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **<150.000** | - | | - | - |
| **150.000-199.999** | 59.153 | | 66.667 | 34.991 |

| Pengeluaran Non-Makanan Sebulan (Rupiah) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **200.000-299.999** | 97.032 | | 80.494 | 97.479 |
| **300.000-499.999** | 143.583 | | 140.299 | 135.912 |
| **500.000-749.999** | 228.385 | | 220.535 | 205.461 |
| **750.000-999.999** | 384.253 | | 310.900 | 311.625 |
| **1.000.000-1.499.999** | 577.904 | | 456.865 | 484.380 |
| **1.500.000 dan lebih** | 1.775.748 | | 1.068.447 | 1.060.043 |
| Total | **3.266.058** | | **2.344.207** | **2.329.891** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2019*

Melihat Tabel 2.88, konsumsi kalori per kapita sehari oleh penduduk di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2018 cenderung mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Secara keseluruhan, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.926,23 sehari pada tahun 2015, Rp 2.104,24 pada tahun 2017, dan Rp 1.935,39 sehari pada tahun 2018. Konsumsi kalori per kapita tertinggi berasal dari golongan penduduk berpenghasilan Rp 1.500.000,00 dan lebih. Adapun pengeluaran konsumsi kalori per kapita sehari pada golongan penduduk tersebut adalah sebesar Rp 2.696,46 pada tahun 2015, Rp 2.841,13 pada tahun 2017, dan Rp 2.537,81 pada tahun 2018.

**Tabel 2.88 Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Golongan Pengeluaran**

| Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut Golongan Pengeluaran (kkal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **<150.000** | - | | - | - |
| **150.000-199.999** | 1.200,98 | | 1.620,38 | 1.023,93 |
| **200.000-299.999** | 1.423,38 | | 1.560,96 | 1.197,63 |
| **300.000-499.999** | 1.664,18 | | 1.833,52 | 1.677,74 |
| **500.000-749.999** | 1.974,99 | | 2.091,46 | 1.973,31 |
| **750.000-999.999** | 2.112,19 | | 2.273,30 | 2.347,99 |
| **1.000.000-1.499.999** | 2.411,42 | | 2.508,94 | 2.537,81 |
| **1.500.000 dan lebih** | 2.696,46 | | 2.841,13 | 2.789,29 |
| Rata-rata | **1.926,23** | | **2.104,24** | **1.935,39** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2019*

#### 2.4.1.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan

Rerata pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi rumah tangga adalah total biaya sebulan secara umum dari konsumsi setiap rumah tangga, dibagi banyaknya rumah tangga, dengan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran ini dapat dijadikan ukuran dalam menilai kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan terhadap pengeluaran perkapita juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang atau kepala rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan pergeseran sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Kemiskinan terpengaruh dengan perubahan persentase pengeluaran makananan dan non makanan. Berdasarkan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran non makanan maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Kesejateraan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat tingkat pendapatan masih dibawah garis kemiskinan, yang apabila kebutuhan pokok (makanan) belum terpenuhi maka pengeluaran non makanan tidak dapat terjadi atau tidak ada peningkatan. Berikut merupakan persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan.

**Tabel 2.89 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan**

| No | Ienis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan (% per tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makanan | | 53,58 | 57,66 | 52,34 | 57,65 | 2,47 |
| 2 | Non Makanan | | 46,42 | 42,34 | 47,66 | 42,35 | -3,01 |
| 3 | Jumlah (Rp) Pengeluaran Sebulan | | 1.682.976 | 1.093.900 | 1.154.442 | 1.064.620 | -14,16 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017-2021*

Tabel 2.89 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pengeluaran baik untuk jenis makanan dan non makanan di Kabupaten Serang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan pengeluaran, kemudian meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan untuk pengeluaran per kapita, hal ini tentu ada kaitan dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan setiap rumah tangga harus berhemat dalam menggunakkan uang bulanan. Jenis pengeluaran untuk makanan masih mendominasi daripada pengeluaran non makanan. Rerata persentase untuk jenis pengeluaran makanan adalah sebesar 55,31 persen sedangkan untuk non makanan adalah sebesar 44,69 persen. Rerata total pengeluaran sebulan per kapita adalah sebesar Rp. 1.248.985,00. Rerata pertumbuhan per tahun untuk pengeluaran makanan meningkat, sedangkan untuk pengeluaran non makanan dan pengeluaran total mengalami penurunan (lihat tabel 2.89).

#### *2.4.1.3 Nilai Tukar Petani*

Nilai tukar petani merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP diukur dari rasio harga yang diterima oleh petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Jika NTP lebih dari 100, petani mengalami surplus yang berarti harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Begitupun sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, petani mendapatkan harga produksi lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan petani lebih kecil daripada pengeluaran. Angka NTP berguna untuk menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain, sehingga spesialisasi maupun peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Berikut merupakan Nilai Tukar Petani Provinsi Banten periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.90 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Tahun 2016-2020**

| No | Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan (% per tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks yang diterima (It) | 123,95 | 131,67 | 137,70 | 143,96 | 108,31 | -3,32 |
| 2 | Indeks yang dibayar (Ib) | 123,58 | 129,99 | 136,62 | 140,39 | 107,43 | -3,44 |
| 3 | Indeks Konsumsi | 125,84 | 132,79 | 139,85 | 143,57 | 107,21 | -3,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rumah Tangga | | | | | | |
| **4** | Nilai Tukar Petani (NTP) | 100,30 | 101,29 | 100,79 | 102,54 | 100,82 | 0,13 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017-2021*

Indeks harga yang diterima petani (It) menggambarkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) terdiri dari konsumsi rumah tangga (KRT) serta biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Melalui indeks harga yang dibayar petani dilihat fluktuasi mengenai harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

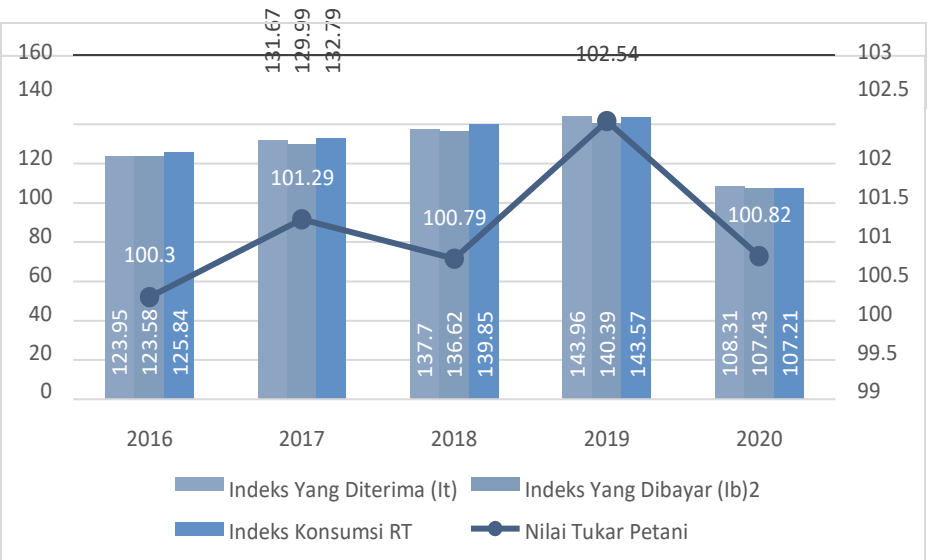


Gambar 2.62 Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Tahun 2016-2020

*Sumber: Hasil Olahan 2021*

Gambar 2.62 Menunjukkan bahwa adanya fluktuasi mengenai Nilai Tukar Petani dan juga indeks yang diterima (It) serta indeks yang dibayar (Ib). Rerata pertumbuhan untuk indeks yang diterima petani dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar -3,32 persen per tahun, yang artinya terjadi penurunan. Sama halnya dengan indeks yang dibayar petani, terjadi rerata penurunan pertumbuhan sebesar -3,44 persen per tahun. Meskipun terjadi penurunan pada indeks yang diterima dan dibayar petani, namun untuk nilai tukar mengalami pertumbuhan meskipun tidak signifikan,

yaitu sebesar 0,13 persen per tahun. Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) menunjukkan inflasi atau deflasi di perdesaan. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terjadi penurunan untuk rerata pertumbuhan indeks konsumsi rumah tangga yaitu sebesar -3,93 persen per tahun.

### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu indikator penting yang dibutuhkan untuk melihat pencapaian dan peningkatan daya saing suatu daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik tentu akan memiliki tingkat kemudahan akses dan konektivitas yang baik pula. Hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kemajuan ekonomi bergantung pada salah satunya adalah infrastruktur yang baik sebagai faktor penunjangnya.

#### *2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan*

Ketersediaan jalan sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan dapat mempermudah akses dan konektivitas antarwilayah maupun antardaerah. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan ekonomi, jalan sebagai salah satu indikator infrastruktur dapat pula mendorong kemajuan sosial suatu daerah.

Tabel 2.91 menunjukkan jenis-jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Serang, terdiri dari: aspal, kerikil, tanah, beton, dan tidak dirinci. Jenis dan panjang jalan yang dimiliki suatu daerah penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut. Berbekal logika itulah maka dapat dihitung panjang jalan yang ada di Kabupaten Serang yang mencapai 601,13 km pada tahun 2015. Panjang jalan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan sampai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 610,33 km. Sementara itu,

pada tahun 2018-2019 meskipun jumlah panjang jalan tidak berubah namun panjang jalan menurut jenis permukaan mengalami perubahan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi perubahan jenis permukaan jalan antara aspal yang turun dan beralih pada jenis perkerasan beton (lihat Tabel 2.91). Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa sebagian besar jalan diubah ke jenis permukaan beton dengan meningkatnya jumlah panjang jalan dengan permukaan beton menjadi 363,90 km dari sebelumnya sebanyak 220,40 km pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 466,41 km. Selanjutnya, terdapat perubahan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Serang. Terlihat jika jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada tahun 2015-2018 mengalami sedikit penurunan, dari sejumlah 9.482 unit pada tahun 2015 menjadi 8.169 unit pada 2018. Dengan demikian, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Serang pada kurun waktu 2015-2018 berkisar antara 0,06 hingga 0,07. Artinya, setiap kendaraan di Kabupaten Serang akan memakan ruang jalan sebesar 0,06-0,07 kilometer.

**Tabel 2.91 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Jenis Permukaan (km) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diaspal** | 406,58 | 353,88 | 360,63 | 219,38 | 94,57 |
| **Kerikil** | 51,82 | 49,81 | 17,60 | 14,15 | 47,19 |
| **Tanah** | 16,35 | 16,35 | 11,70 | 12,90 | 2,16 |
| **Beton** | n.a | 181,08 | 220,40 | 363,90 | 466,41 |
| **Tidak dirinci** | 126,38 | - | - | - | - |
| **Jumlah panjang jalan (km)** | 601,13 | 601,12 | 610,33 | 610,33 | 610,33 |
| **Jumlah kendaraan wajib uji (unit)** | 8.345 | 8.345 | 8.169 | n.a | n.a |
| **Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan** | 0,072 | 0,072 | 0,075 | n.a | n.a |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2017-2021*

Grafik 2.63 Menunjukkan bahwa terjadi penurunan mengenai jumlah kendaraan dan jumlah panjang jalan yang bertambah namun tidak cukup signifikan. Akibat dari jumlah panjang jalan yang terus bertambah dan penurunan jumlah kendaraan, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan. Berikut merupakan penjabaran mengenai data pada tabel 2.91 Di atas.

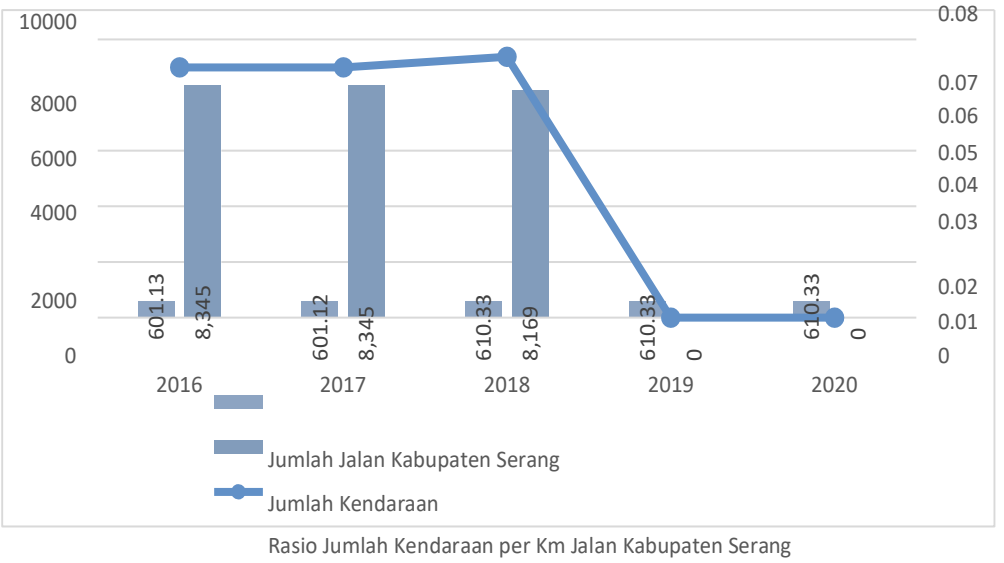


Gambar 2.63 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Serang 2016-2020

*Sumber: Hasil Olahan 2021*

Kabupaten Serang melalui dokumen LKPJ Bupati tahun 2016-2019 juga melaporkan hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah fokus infrastruktur yang terkait dengan rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan. Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten Serang antara lain adalah peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan dan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan. Informasi mengenai pencapaian pemerintah daerah terkait urusan tersebut disajikan dalam Tabel 2.92.

Di dalam tabel tersebut, ditunjukkan jika persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2016-2020. Persentase tersebut berturut-turut mencapai 74,13 persen (2016), 76,90 persen (2017), 83,00 persen (2018), 88,90 persen (2019), dan 92,05 persen (2020). Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun persentase yang berhasil dicapai berturut-turut adalah 60,00 persen (2016), 69,10 persen (2017), 78,06 persen (2018), 87,02 persen (2019), dan 95,97 persen (2020). Pencapaian tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang ditunjukkan dengan persentase yang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu 66,60 persen (2016), 68,75 persen (2017), 71,72 persen (2018), dan 74,50 persen (2019 dan 2020). Sama halnya dengan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya yang selalu mengalami

kenaikan, indikator tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan sebelumnya. Adapun persentase pencapaian indikator tersebut adalah 65,12 persen (2016), 66,86 persen (2017), 77,79 persen (2018), 92,12 persen (2019), dan 93,30 persen (2020).

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, terdapat beberapa indikator yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk dicapai. Pada tahun 2016-2017, terdapat tiga unit terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Jumlah angkutan penumpang tersebut bertambah satu unit pada tahun 2018 sehingga total terdapat empat unit. Adapun indikator ketersediaan pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran memiliki nilai persentase yang stabil dari tahun 2016-2020, yaitu sebesar 75 persen.

**Tabel 2.92 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan** | | | | | | |
| **Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan** | | | | | | |
| **Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang** | % | 74,13 | 76,90 | 83,00 | 88,90 | 92,05 |
| **Persentase kondisi jalan mantap (perkerasan beton)** | | | | 60,95 | | |
| **Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten** | % | 60,00 | 69,10 | 78,06 | 87,02 | 95,97 |
| **Presentase tingkat kondisi drainase** | % | 66,60 | 68,75 | 71,72 | 74,50 | 74,50 |

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **kabupaten dalam kondisi baik dan sedang** | | | | | | |
| **Presentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik** | % | 65,12 | 66,86 | 77,79 | 92,12 | 93,30 |
| **Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan** | | | | | | |
| **Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat** | % | 14.19 | 14.32 | 12.41 | 12.36 | 12.73 |
| **Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten** | % | 46.67 | 47.09 | 22.13 | 22.54 | 22.54 |
| **Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek** | Unit | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **Tersediany a pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran** | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

### 2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, mobilitas manusia dalam berkegiatan dapat didukung oleh ketersediaan angkutan umum. Tabel 2.93 menunjukkan jika rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat adalah sebesar 14,19 persen (2016), 14,32 persen (2017), 12,36 persen (2019), dan 12,73 persen (2020). Artinya, terdapat penurunan jumlah angkutan darat yang melayani penumpang atau terdapat kenaikan jumlah penumpang angkutan darat yang menggunakan angkutan darat dalam melakukan mobilitas. Adapun ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten mencapai 46,67 persen (2016), 47,09 persen (2017), dan 22,54 persen (2019 dan 2020).

**Tabel 2.93 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan** | | | | | | |
| **Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat** | % | 14.19 | 14.32 | 12.41 | 12.36 | 12.73 |
| **Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten** | % | 46.67 | 47.09 | 22.13 | 22.54 | 22.54 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

### 2.4.2.3 Luas Wilayah Bencana dan Kebanjiran

Salah satu permasalahan yang dihadapi daerah terkait infrastruktur adalah adanya bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Tabel 2.94 menunjukkan indikator yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran, penurunan daerah rawan bencana, dan peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Adapun pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui indikator cakupan pencegahan bencana, cakupan penanggulangan korban bencana, dan cakupan pelayanan bencana kebakaran yang menyasar pada peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran adalah masing-masing sebesar 100 persen

selama kurun waktu 2016-2020. Indikator cakupan penanganan daerah rawan bencana yang menyasar pada penurunan daerah rawan bencana juga mencapai 100 persen selama kurun waktu 2016-2020. Sasaran peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana menggunakan indikator cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana, di mana pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Serang sebesar 90 persen pada tahun 2017 dan meningkat 10 persen pada 2019 sehingga mencapai 100 persen. Pada tahun 2020, cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana mengalami penurunan menjadi sebesar 96,12 persen.

**Tabel 2.94 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran | | | | | | |
| **Cakupan pencegahan bencana** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Cakupan penanggulangan korban bencana** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Cakupan pelayanan bencana kebakaran** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penurunan daerah rawan bencana | | | | | | |
| **Cakupan penanganan daerah rawan bencana** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana | | | | | | |
| **Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana** | % | 0 | 90 | 100 | 100 | 96.12 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

### *2.4.2.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran*

Salah satu infrastruktur yang mendukung daya saing suatu daerah adalah keberadaan restoran. Melalui Tabel 2.95, terlihat jika pada tahun 2015 dan 2020 terdapat 44 buah dan 16 restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Serang. Tentu hal tersebut kurang bisa menggambarkan jenis, kelas, dan jumlah restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Serang saat ini sehingga masih memerlukan data pembanding.

**Tabel 2.95 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur terkait Jumlah Restoran di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| | 2015 | 2020 |
|---|---|---|
| **Jumlah restoran dan rumah makan (buah)** | 44 | 16 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang tahun 2020*

### *2.4.2.5 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel*

Selain keberadaan restoran dan rumah makan, daya saing suatu daerah juga ditunjang dengan keberadaan penginapan atau hotel. Tabel 2.96 menginformasikan jika jumlah hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Serang secara keseluruhan adalah sebanyak 89 buah pada tahun 2015, 99 buah pada tahun 2016, dan 69 buah pada tahun 2018. Dari keseluruhan hotel tersebut, jenis hotel yang paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Serang adalah jenis hotel melati. Jenis hotel melati tersebut berjumlah 67 buah (2015), 77 buah (2016), dan 48 buah (2018). Secara keseluruhan, jumlah hotel di Kabupaten Serang mengalami penurunan pada tahun 2018 meski sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2016.

**Tabel 2.96 Jumlah Perusahaan Akomodasi menurut Kelas Hotel di Kabupaten Serang, 2015-2018**

| Jumlah dan Kelas Hotel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Hotel melati** | 67 | 77 | | 48 |
| **Hotel bintang 1** | 7 | 5 | | 10 |
| **Hotel bintang 2** | 1 | 4 | | 0 |
| **Hotel bintang 3** | 9 | 8 | | 8 |
| **Hotel bintang 4** | 2 | 4 | | 1 |
| **Hotel bintang 5** | 3 | 1 | | 2 |
| Jumlah hotel | **89** | **99** | | **69** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2019*

### *2.4.2.6 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih*

Air bersih merupakan salah satu hal dasar dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menunjang berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Tingkat konsumsi air bersih di suatu daerah juga dapat menunjukkan seberapa

tinggi tingkat daya saing suatu daerah. Tabel 2.97 menunjukkan jumlah pelanggan PDAM berdasarkan kategori konsumen yang terdiri dari: sosial khusus, sosial umum, rumah tangga, pelanggan khusus, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar, dan kran umum.

Dari data yang disajikan dalam tabel tersebut, diketahui jika jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Serang adalah sebanyak 26.007 orang/instansi pada tahun 2015 yang meningkat menjadi 26.856 orang/instansi pada tahun 2016. Namun, jumlah tersebut menurun menjadi 25.681 orang/instansi pada tahun 2017. Informasi dalam tabel yang sama juga menunjukkan jika jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2015 adalah sebanyak 24.956 rumah (2015), 25.651 rumah (2016), dam 24.662 rumah (2017). Dengan demikian, maka persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat dihitung. Adapun persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2015-2017 stabil sebesar 96 persen.

**Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Serang, 2015-2017**

| Jumlah Pelanggan PDAM | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Sosial khusus** | 29 | - | 3 |
| **Sosial umum** | 304 | 427 | 323 |
| **Rumah tangga** | 24.956 | 25.651 | 24.662 |
| **Pelanggan khusus** | - | - | - |
| **Niaga kecil** | 581 | 655 | 683 |
| **Niaga besar** | 9 | - | - |
| **Industri kecil** | 12 | 17 | - |
| **Industri besar** | 4 | - | - |
| **Kran umum** | 112 | 106 | 10 |
| **Jumlah** | 26.007 | 26.856 | 25.681 |
| **Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih** | 96% | 96% | 96% |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018*

Dengan kategorisasi pelanggan yang sama dengan informasi pada tabel sebelumnya, dapat dilihat jumlah air yang disalurkan PDAM Serang ke masing-masing kategori pelanggan tersebut. PDAM Serang berhasil menyalurkan 5.411.894 meter kubik air pada tahun 2015. Angka tersebut menurun drastis pada tahun 2016 di mana PDAM Serang menyalurkan 482.217 meter kubik air dan sedikit meningkat pada tahun 2017 di

mana PDAM Serang menyalurkan 482.665 meter kubik air. Adapun pelanggan terbanyak yang mendapatkan saluran air dari PDAM Serang berasal dari kategori rumah tangga yang jumlahnya mencapai 4.934.697 meter kubik pada tahun 2015. Namun, jumlah air yang disalurkan ke kategori rumah tangga tersebut menurun signifikan pada tahun 2016 menjadi 442.167 meter kubik dan 447.206 meter kubik pada tahun 2017.

**Tabel 2.98 Jumlah Air yang Disalurkan PDAM Serang, 2015-2017**

| Jumlah Air yang Disalurkan ($m^3$) | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Sosial khusus** | 25.185 | - | - |
| **Sosial umum** | 83.812 | 9.605 | 10.982 |
| **Rumah tangga** | 4.934.697 | 442.167 | 447.206 |
| **Pelanggan khusus** | - | - | - |
| **Niaga kecil** | 300.846 | 25.723 | 20.663 |
| **Niaga besar** | 12.310 | 38 | - |
| **Industri kecil** | 9.596 | 918 | 1.592 |
| **Industri besar** | 9.769 | 200 | - |
| **Kran umum** | 35.679 | 3.566 | 2.222 |
| Jumlah | **5.411.894** | **482.217** | **482.665** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018*

### *2.4.2.7 Rasio Ketersediaan Daya Listrik*

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang keberadaannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut lantaran listrik menjadi hal yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, baik aktivitas konsumsi maupun aktivitas produksi. Ketersediaan listrik dianggap sebagai dorongan bagi kegiatan sehari-hari maupun kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan Tabel 2.99, jumlah daya listrik PLN terpasang di Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah sebanyak 243.207.250 volt ampere (VA). Jumlah tersebut naik menjadi 261.654.850 VA pada tahun 2016 dan kembali naik menjadi 284.050.000 VA pada tahun 2017. Adapun jumlah pemakaian listrik di Kabupaten Serang pada tahun 2015 sebesar 522.332.562 kilowatt jam (KwH). Jumlah pemakaian tersebut secara konsisten mengalami kenaikan hingga tahun 2017 yang mana pemakaian pada tahun 2016 mencapai 535.136.067 KwH dan pada tahun 2017 mencapai 551.964.443 KwH.

**Tabel 2.99 Jumlah Daya Listrik PLN Terpasang dan Jumlah Pemakaian Listrik Di Kabupaten Serang, 2015-2017**

| Jumlah Daya dan Pemakaian Listrik | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Jumlah daya listrik PLN terpasang (VA)** | 243.207.250 | 261.654.850 | 284.050.000 |
| **Jumlah pemakaian listrik (KwH)** | 522.332.562 | 535.136.067 | 551.964.443 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018*

#### *2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik*

Rumah tangga merupakan kategori pelanggan listrik yang jumlahnya paling besar di Kabupaten Serang. Tabel 2.100 menunjukkan jika jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik melalui sumber Anyer adalah sebanyak 75.933 buah. Jumlah tersebut turun menjadi 74.172 buah pada tahun 2016 namun kembali meningkat menjadi 76.528 buah pada tahun 2017. Dibandingkan dengan Anyer, jumlah rumah tangga yang dipasok listrik oleh Cikande jauh lebih besar. Data menunjukkan jika Cikande menyalurkan listrik bagi 213.146 buah rumah tangga pada tahun 2015. Jumlah rumah tangga pada tahun 2016 pun meningkat menjadi 215.358 buah. Data terakhir pada tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan menjadi 228.493 buah rumah tangga yang listriknya disuplai oleh Cikande.

**Tabel 2.100 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Serang, 2015-2017**

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Anyer** | **Cikande** | **Anyer** | **Cikande** | **Anyer** | **Cikande** |
| Rumah tangga | 75.933 | 213.146 | 74.172 | 215.358 | 76.528 | 228.493 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2016-2018*

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menanamkan modal, investor tertarik pada daerah yang memiliki iklim investasi yang baik. Modal yang masuk ke suatu daerah tersebut menjadi penting bagi daerah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat iklim berinvestasi adalah kriminalitas, demonstrasi, proses perizinan, pajak dan retribusi daerah, perda yang mendukung usaha, serta desa yang berstatus swasembada.

#### *2.4.3.1 Angka Kriminalitas*

Salah satu hal yang dapat mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang baik adalah keamanan suatu daerah. Keamanan tersebut dapat diukur oleh salah satunya adalah kriminalitas. Apabila angka kriminalitas suatu daerah semakin rendah, maka daerah tersebut dianggap semakin aman sehingga menyebabkan kepercayaan investor meningkat untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Tabel 2.101 menunjukkan jumlah tambahan narapidana yang dikelompokkan berdasarkan usia di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2014-2016. Secara keseluruhan, terdapat 318 orang tambahan narapidana pada tahun 2014. Jumlah tambahan tersebut meningkat drastis menjadi 798 orang pada tahun 2015, di mana 762 di antaranya adalah dewasa, 26 orang adalah pemuda, dan 10 orang anak-anak. Jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 1.108 orang tambahan narapidana. Tambahan tersebut berasal dari 1.057 orang dewasa dan 51 anak-anak.

**Tabel 2.101 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang menurut Kelompok Usia di Kabupaten Serang, 2014-2016**

| Tambahan narapidana berdasarkan putusan PN Serang menurut kelompok usia | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **Dewasa** | | 762 | 1.057 |
| **Pemuda** | | 26 | - |
| **Anak-anak** | | 10 | 51 |
| Total | **318** | **798** | **1.108** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2017*

Dengan jumlah tambahan narapidana yang sama, disajikan pula jumlah tambahan narapidana yang dikelompokkan menurut lama hukumannya. Tabel 2.102 menunjukkan jika pada tahun 2015, terdapat 565 orang narapidana yang dihukum selama 1-5 tahun, 192 orang yang dihukum selama kurang dari satu tahun, 35 orang yang dihukum pidana

kurungan pengganti denda, dan enam orang yang mendapatkan hukuman percobaan sehingga total narapidana pada tahun tersebut adalah 798 orang. Adapun total tambahan narapidana pada tahun 2016 sebanyak 1.108 orang, di mana terdapat 367 orang yang mendapatkan hukuman 1-5 tahun dan 741 orang yang mendapatkan hukuman kurang dari satu tahun.

**Tabel 2.102 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang menurut Lama Hukuman di Kabupaten Serang, 2014-2016**

| Tambahan narapidana berdasarkan putusan PN Serang menurut lama hukuman | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **Seumur hidup** | | - | - |
| **Lebih dari 5 tahun** | | - | - |
| **1-5 tahun** | | 565 | 367 |
| **Kurang dari 1 tahun** | | 192 | 741 |
| **Pidana kurungan pengganti denda** | | 35 | - |
| **Hukuman percobaan** | | 6 | - |
| **Belum putus** | | - | - |
| Total | **-** | **798** | **1.108** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2017*

Pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang baik telah menetapkan indikator yang terkait dengan angka kriminalitas. Tabel 2.103 merangkum indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang pada tahun 2016-2020. Adapun rasio jumlah kasus keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat (kantrantibmas) dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi mencapai 100 persen berturut-turut pada tahun 2016-2020. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah juga mencapai 100 persen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.103 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi terkait Angka Kriminalitas di Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020*

Selain angka kriminalitas, pendukung terciptanya iklim investasi yang baik juga dapat menggunakan indikator konflik SARA. Tabel 2.104 menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten Serang berhasil menyelesaikan seluruh konflik SARA selama tahun 2016-2019. Tabel tersebut menunjukkan pencapaian yang baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang karena selama empat tahun berturut-turut tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian konflik SARA yang mencapai 100 persen.

**Tabel 2.104 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi terkait Demonstrasi di Kabupaten Serang, 2016-2019**

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tingkat penyelesaian konflik SARA** | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2016-2019*

#### *2.4.3.2 Lama Proses Perizinan*

Kemudahan tata cara memperoleh perizinan dan prosedur untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Serang. Selanjutnya, jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan minat investor datang ke daerah. Indikator ini dugunakan untuk melihat berapa jumlah perda yang mendukung iklim usaha pada setiap tahun.

**Tabel 2.105 Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2020**

| | Satuan | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|
| **Persentase ijin yang dilaksanakan sesuai peruntukannya** | % | 100,00 | 100,00 |
| **Persentase ijin yang diselesaikan tepat waktu** | % | 100,00 | 100,00 |
| **Rata-rata waktu penyelesaian perijinan (berkas lengkap)** | Hari | 6,00 | 6,00 |
| **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** | Point | 84,42 | 84,43 |

*Sumber: Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Serang Periode 2020*

Berdasarkan tabel di atas capaian program peningkatan kualitas pelayanan perizinan tahun 2020 untuk indikator persentase ijin yang dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tepat waktu mencapai 100 persen. Sementara itu, rata-rata waktu penyelesaian perijinan realisasi pada tahun 2020 selama 6 hari, sementara target yang ingin dicapai selama 6 hari. Selanjutnya, nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 84,43 point. Dalam tahun-tahun berikutnya, pelayanan perizinan ini dapat terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi.

### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. Kualitas SDM dapat dilihat dari produktivitas

tenaga kerja yang usianya berada pada rentang 15-64 tahun yang dimiliki oleh suatu daerah dan dilihat pula dari tingkat pendidikannya. Apabila tingkat pendidikan SDM suatu daerah semakin tinggi, maka diharapkan jika SDM tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.

### *2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja*

Kualitas tenaga kerja mengacu pada seberapa tinggi kualitas SDM yang dimiliki suatu daerah.

**Tabel 2.106 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020**

| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja |
|---|---|---|---|---|
| ≤ SD | 266.144 | 11.721 | 277.865 | 95,782 |
| SMP | 141.785 | 29.077 | 170.862 | 82,982 |
| SMA | 173.546 | 41.671 | 215.217 | 80,638 |
| Perguruan Tinggi | 32.845 | 3.069 | 35.914 | 91,455 |

*Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Serang pada tahun 2020, sebanyak 266.144 jiwa merupakan pendududuk yang bekerja dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah sekolah dasar dan tidak lulus sekolah dasar atau sebesar 95,782 persen. Lulusan SMP sebanyak 141.785 jiwa atau sebanyak 82,982 persen dari total angkatan kerja. Lulusan SMA sebanyak 173.546 jiwa atau sebanyak 80.638 persen dari total angkatan kerja. Terakhir, lulusan perguruna tinggi sebanyak 32.845 jiwa atau sebanyak 91,455 persen dari total angkatan kerja.

### *2.4.4.2 Rasio Ketergantungan*

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia pada rentang 15-64 tahun sedangkan penduduk yang tidak produktif adalah penduduk

yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oleh karena itu, dapat dihitung seberapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja pada suatu daerah.

Bila dicermati, jumlah penduduk yang berusia tidak produktif di Kabupaten Serang pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan, dari 499.251 jiwa pada tahun 2014 menjadi 490.157 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan pada periode yang sama yaitu 963.843 jiwa pada tahun 2014 menjadi 981.563 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan, apabila dicermati, maka rasio ketergantungan di Kabupaten Serang pada 2014-2018 cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 51,80 persen pada tahun 2014 menjadi 49,94 persen pada tahun 2019 Artinya, Pada tahun 2019 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (usia produktif) memiliki tanggungan sebanyak 50 orang penduduk yang tidak produktif.

**Tabel 2.107 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Serang, 2014-2018**

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk usia <15 tahun (jiwa) | 448.459 | 448.550 | 448.347 | 447.839 | 429.887 |
| Jumlah penduduk usia >64 tahun (jiwa) | 50.792 | 52.825 | 55.053 | 57.516 | 60.270 |
| Jumlah penduduk usia tidak produktif (jiwa) | 499.251 | 501.375 | 503.400 | 505.355 | 490.157 |
| Jumlah penduduk usia 15-64 | 963.843 | 972.926 | 981.102 | 988.236 | 981.563 |
| **Rasio ketergantungan** | 51,80 | 51,53 | 51,31 | 51,14 | 49,94 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2015-2020 (diolah)*

### 2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Untuk meningkatkan pencapaian target pembangunan daerah dan dalam mempermudah serta mempercepat pelayanan Pemerintah daerah, Kabupaten Serang mulai Tahun 2018 melakukan kegiatan Laboratorium Inovasi. Laboratorium inovasi merupakan salah satu kegiatan untuk memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi. Laboratorium inovasi merupakan sebuah program fasilitasi inovasi yang mengawali inovasi mulai dari hulu, yakni mulai dari sebelum inovasi dipikirkan sampai dapat diimplementasikan dan

diperlihatkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Program dalam laboratorium inovasi ini lebih mengarah kepada menghasilkan ide atau gagasan inovasi yang diciptakan secara bersama (*co creating*) antara LAN dan Oganisasi Perangkat Daerah, dan unit kerja terkait. Ide atau gagasan inovasi tersebut kemudian diimplementasikan dan dimanfaatkan lebih lanjut sehingga lebih berkembang dan dapat dipergunakan sebagai model replikasi inovasi.

Beberapa inovasi telah lahir dari program laboratorium inovasi tersebut, inovasi yang telah lahir dan dipergunakan hingga saat ini adalah :

1. Sistem Informasi Pembinaan Peserta KB Aktif (SIPPKA), Melalui Sistem Informasi Pembinaan KB ini diharapkan Terjadi Peningkatan Kesertaan Ber KB melalui Peningkatan pengetahuan pasangan usia subur, Pemilihan metode kontrasepsi yang efektif dan efesien, Penurunan angka dropout
2. Sistem Survey Kepuasan Masyarakat (SI SUKMA), sistem yang dibuat untuk Pengisian Kuesioner Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dari Manual secara Otomatis atas pelayanan pajak daerah
3. Aplikasi Online e-Set DPRD Kabupaten Serang, aplikasi yang menyajikan rangkaian kegiatan layanan dan fasilitasi pada setiap kegiatan DPRD Kab Serang yang terintegrasi dalam satu sistem aplikasi, guna memudahkan pihak sekretariat dalam melaksanakan tugas pelayanan dan fasilitasi
4. Sistem Aplikasi WEB e-Services, sarana informasi,publikasi dan dokumentasi bagi masyarakat terkait kinerja dan kegiatan DPRD selama ini.Juga sebagai sarana bagi masyarakat yang akan mengadukan masalah ke DPRD melalui kolom aspirasi .Dan dalam aplikasi ini disajikan juga informasi profile DPRD Kab Serang secara up to date
5. Sistem Informasi Manajemen Peserta Pelatihan (SIMANJA PAPIH), Manajemen Administrasi peserta pelatihan yang akan memudahkan baik kepada peserta maupun panitia. Peserta dapat membuka kembali materi pelatihan, mempelajari nya kembali. Dimana pun kapanpun. Mengingat kan kembali Rencana Kerja Tindak Lanjut dari pelatihan tersebut sehingga output pelatihan lebih berkesinambungan
6. Kolom Elektronik Pengaduan Orang Desa & Informasi Khalayak (KEPO De IH), Aplikasi berbasis Android yang memudahkan Masyarakat untuk turut berpartisipasi memantau penggunaan Dana Desa. Sebagai bahan evaluasi baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten

7. Online Badan Usama Milik Desa (O-BUMDes), Pengelolaan Bumdes yang terintegrasi, berbasis Android Online Sistem yang mudah diakses dimanapun kapanpun. Berupa Profil Bumdes Online, Manajemen BUMDes Online, Unit Usaha Online, dan Jual Beli Online
8. Sistem Manajemen Anti Suap (SIMANTAP ), bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan penerapan ISO 37001:2016 dalam pencapaian hasil audit yang kredibel dan anti suap
9. Sistem Manajemen Mutu (SIMANTU), Dalam peningkatan pelayanan masyarakat perlu penerapan ISO 9001:2015 dalam pencapaian hasil audit yang kredibel
10. SIPUTRI (Sistem Pelayanan Uji Laboratorium), Sistem Uji Laboratorium dan Teknis Bidang Lingkungan Hidup
11. ALPUKAT KITE (Aplikasi Perlindungan Masyarakat Kompeten, Inovatif, Terpadu, Efektif), Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan Informasi, Dokumentasi dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di masing - masing desa se Kabupaten Serang antara lain database anggota satuan linmas, pembentukan struktur organisasi linmas, pembinaan terhadap anggota satuan linmas, Pelaporan rawan gangguan bencana dan gangguan trantibum dan turut serta dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum
12. BUPATIKU WANITA (Budidaya Padat Tebar Intensif untuk Udang sebagai Kawasan Wisata ), Budidaya Padat Tebar Intensif untuk Udang sebagai Kawasan Wisata (BUPATIKU WANITA)adalah budidaya udang dengan padat tebar tinggi pada lokasi yang terbatas di kawasan wisata
13. MANG TAGAR (Pengembangan Tambak Garam Rakyat), Pengembangan Tambak Garam Rakyat (MANG TAGAR) adalah upaya pemanfaatn lahan tambak “tidur” melalui pengembangan produksi garam dengan pengelolaan tertentu
14. MANG BUDI PUTRA RIA (Pengembangan Budidaya Rumput Laut Gracillaria), Pengembangan Budidaya Rumput Laut Gracillaria (MANG BUDI PUTRA RIA) adalah upaya penganekaragaman komoditas budidaya air payau berupa rumput laut gracillaria bersamaan dengan bandeng pada lahan yang sama
15. BUYA WALIKU (Budidaya Perikanan Air Payau Berwawasan Lingkungan ), Budidaya Perikanan Air Payau Berwawasan Lingkungan (BUYA WALIKU) merupakan rangkaian kegiatan terpadu antara budidaya ikan yang baik dengan

kegiatan pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian lingkungan budidaya melalui penanaman bibit bakau untuk memperbaiki lingkungan budidaya kawasan pesisir dan meningkatkan produktifitas kawasan budidaya air payau

16. MANG BUDI PUTRA TONI (Pengembangan Budidaya Rumput Laut cottoni), Pengembangan Budidaya Rumput Laut cottoni (MANG BUDI PUTRA TONI) adalah budidaya rumput laut jenis cottoni pada wilayah pantai system long line dengan menggunakan tiang pancang dan tali
17. Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM), Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit
18. HALO (Hospital Aplikasi Layanan Online), Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di Rumah Sakit
19. SEPARATED ZONE (Pengelompokan Pasien Berdasarkan Kegawatdaruratan /Triase), Sistem ini bertujuan untuk mempermudah penanganan pasien sesuai dengan tingkat dan jenis penyakitnya
20. Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, Sistem ini dibuat untuk memudahkan keluarga pasien untuk mengurus akta kelahiran
21. Penerbitan dan Surat Penolakan Penerbitan SP2D Online, Memberikan informasi secara elektronik bagi seluruh OPD terkait penerbitan dan surat penolakan penerbitan SP2D secara On Line
22. INLIS (Integrated Library System), Mempermudah pengunjung atau masyarakat dalam mencari informasi pengetahuan/umum/referensi buku. Efisiensi Waktu bagi pengunjung dalam pencarian buku
23. Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Serang secara Digital (SIKN), Meningkatkan pemahaman arsip dan lebih peduli terhadap arsip bagi penyelenggara kearsipan. Mengamankan,menyimpan arsip statis dan dinamis atau file file penting agar tidak rusak atau hilang
24. Integrasi aplikasi secara on line di Crisis Center, Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan terpadu diperlukan integrase aplikasi secara on line di Crisis Center BPBD Kab. Serang
25. Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan terpadu diperlukan mengoptimalkan relawan yang berada di Desa tangguh bencana

26. POSDAMKAR, Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana dan kebakaran yang cepat, tepat dan terpadu diperlukan pos-pos damkar sekaligus mengoptimalkan balakar di setiap kecamatan
27. Pembentukan TKTD (Tim Koordinasi Tanggap Darurat) zona industri, Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana dan kebakaran yang cepat, tepat dan terpadu di kawasan zona industry diperlukan pembentukan TKTD di zona industri
28. Sistem Informasi Penilaian Pegawai Negeri Sipil (SIPKerja), Aplikasi yang menyampaikan aktifitas ASN di Kabupaten Serang dan pencapaian kinerja berdasarkan SKP
29. SIMPROMIN (Sistem Informasi Promosi Investasi), Simpromin merupakan suatu aplikasi yang menyajikan informasi peluang usaha di kabupaten serang
30. Sistem Informasi Rumah Kumuh dan Miskin (SIKUMIS), Sebagai basis data terpadu, data sasaran , penanganan kmiskinan di daerah khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)
31. Aplikasi SIM PKB Android, Pengembangan SIM PKB yang terintegrasi antara Gedung Pemeriksaan Kendaraan dengan Kantor Pelayanan Administrasi (loket)
32. TRADE ZONE (Aplikasi Pemasaran Produk UM/IKM Secara E-commerce), Sistem ini untuk meningkatkan penjualan/pendapatan masyarakat UMKM/IKM
33. Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Android Melalui Medsos (SIMPARTA BANSOS), Aplikasi yang memberikan fasilitasi untuk penyampaian informasi oleh pemerintah daerah kepada stakeholder bidang pariwisata
34. Gerakan Sadar Wisata di Kabupaten serang (GERSANG), Mensinergikan antar semua stakeholder kepariwisataan untuk meningkatkan kepedualian masyarakat terhadap destinasi didaerahnya
35. Aplikasi Sistem pendaftaran calon transmigran secara online (ASTRA), Merupakan aplikasi yang membantu dalam pendaftaran calon peserta transmigrasi di kabupaten Serang
36. Akte kelahiran online dan jemput bola pelayanan adminduk (AKONJEBOL), Pelayanan dilakukan melalui WEB Online yang dapat diakses melalui perangkat Komputer/laptop/smartphone yang terhubung dengan internet dan pelayanan adminsitrasi kependudukan dengan jemput bola
37. Jejaring efektif dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi/teleconference (JENTIK), Aplikasi yang digunakan oleh dua belah

pihak atau lebih dilkoasi yang berbeda untuk berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan

38. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK), Informasi Kepegawaian tentang ususlan pemberkasandan dapat memberikan infromasi secara tertulis/report tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
39. SIRA BERJASA (Aplikasi Layanan Regristrasi dan Verifikasi Berkas Penyedia Barang/Jasa) secara online, Adalah Aplikasi Layanan Registrasi & Verifikasi Berkas Penyedia Barang/Jasa yang memudahkan penyedia dalam menyampaikan berkas persyaratan untuk pendaftaran secara online
40. SERANG KERJA, Merupakan suatu penggabungan seluruh applikasi yang bersifat Mempermudah pekerjaan ASN dalam melakukan administrasi birokrasi
41. SERANG GAWE, Merupakan suatu penggabungan seluruh applikasi yang bersifat pelayanan publik agar dapat diakses secara sekaligus oleh masyarakat
42. Youtube Channel Pemerintah Kabupaten Serang, Penggunaan media sosial untuk mempermudah menjangkau masyarakat luas melalui akun facebook, instagram dan channel youtube dengan nama serangkab
43. Sistim Applikasi Layanan Satu Pintu ( Sialip ), applikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat meminta informasi publik secara online melalui alamat website sialip.serangkab.go.id
44. Sistem Penetapan Angka Kredit Guru ( Si PAK Guru), Sebuah aplikasi sederhana yang memuat database guru. System ini mengelola data guru yang akan naik pangkat sehingga apabila dikemudian hari guru tersebut sudah terpenuhi angka kreditnya untuk mengajukan kenaikan pangkat ke golongan selanjutnya maka tidak banyak data yang perlu dientri ulang karena data yang bersangkutan sudah tersimpan dalam database untuk kemudian dicetak Sknya
45. Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan (SIKAYA), SIKAYA adalah aplikasi atraktif yang memuat data dan informasi potensi seni budaya di Kabupaten Serang
46. Aksi Jalan dan Irigasi/Got Jadi Aman Nyaman dan Bersih (SI JAGOAN), Aksi ini merupakan gerakan yang melibatkan para pegawai di lingkungan dinas PUPR khususnya dan para pegawai di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk turun langsung membantu masyarakat dan bergotong royong dengan masyarakat setempat dalam pemeliharaan jalan dengan mengoptimalkan tenaga yang ada dan dengan mengefisiensikan anggaran belanja perbaikan jalan

47. Sistem informasi manajemen kesehatan (SIMKES), SIMKES Online dibangun pada tahun 2016 dan mulai bridging dengan BPJS Kesehatan (P-Care) pada bulan Pebruari 2017. Bridging ini dilakukan karena adanya penginputan yang sama pada dua aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi simkes dan aplikasi Pcare, sehingga setelah koordinasi hampir setahun dalam membangun sistem, terlaksananya proses bridging
48. Sistem Informasi Terpadu Aplikasi Laboratorium (SINTAL), SINTAL merupakan pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi sederhana berbasis microsoft office exel untuk mengkoneksikan data pelanggan dari administrasi sampai ke masing masing laboratorium pengujian sampai bagian administrasi bisa melakukan pencetakan laporan pengujian untuk diserahkan kepada pelanggan. aplikasi ini memuat teknis penginputan data permintaan pengujian, pelaporan hasil uji laboratorium, verifikasi dan validasi data hasil uji serta terkain dengan penyimpanan rekaman dari sampel uji yang diterima laboratorium
49. Sistem Informasi Pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (SIAP AUTP), Aplikasi yang bertujuan dalam pengelolaan data dan informasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
50. Sistem Informasi Kelitbangan (SISKA), Database publikasi terpadu bagi berbagai unit kajian yang melaksanakan fungsi dan menghasilkan produk kajian
51. Sistem Informasi dan Manajemen Serang Sehat (SIM SEHAT), Sistem yang dibuat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan peningkatan IPM di Kabupaten Serang khususnya Indeks Kesehatan.

## 2.5 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai dengan Tahun 2020

Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020, yang ditampilkan ke dalam beberapa tabel berikut :

### 2.5.1. Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2020

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020. Hasil evaluasi ditunjukkan dengan Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Serang yang dibagi kedalam lima misi yang dapat dilihat dari tabel 2.108 dibawah ini :

## Tabel 2.108 Evaluasi RPJMD tahun 2020

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Point | 64.49 | 67.27 | 67.99 | 66.38 | 66.70 | 66.70 | 68.72 | akan tercapai |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 6.21 | 6.56 | 6.65 | 5.08 | -1.96 | -1.96 | 6.74 | belum tercapai |
| 3 | Nilai PDRB ADHK | Rp. Triliun | 45.62 | 58.53 | 62.42 | 54.40 | 53.29 | 53.29 | 66.62 | belum tercapai |
| 4 | Nilai PDRB ADHB | Rp. Triliun | 54.84 | 83.37 | 92.54 | 76.94 | 76.60 | 76.60 | 102.73 | belum tercapai |
| 5 | Nilai PDRB ADHB per Kapita | Rp. Juta per Jiwa | 37.20 | 55.27 | 61.13 | 51.01 | 47.22 | 47.22 | 67.65 | belum tercapai |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kategori (A/B/C/D) | B | B | B | B | B | B | A | tercapai |
| 7 | Tingkat Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk) | % | 20.75 | 17.33 | 16.42 | | | | 15.53 | Belum tersedia data |
| | Angka Kemiskinan Makro (BPS) | % | | | | 4.08 | 4.94 | 4.94 | | Data dari BPS |
| 8 | Indeks pendidikan | point | 57.33 | 63.04 | 64.55 | 58.96 | 59,92 | 59,92 | 66.09 | belum tercapai |
| 9 | Rata-rata lama sekolah (RLS) | tahun | 6.89 | 7.85 | 8.10 | 7.33 | 7.50 | 7.5 | 8.36 | akan tercapai |
| 10 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | tahun | 12.36 | 13.28 | 13.52 | 12.43 | 12.57 | 12.57 | 14.81 | akan tercapai |
| 11 | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | % | 66.9 | 88.97 | 94.48 | 81.27 | 85.28 | 85.28 | 100.00 | tercapai |
| 12 | Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat | % | 103.43 | 104.48 | 104.74 | 112.11 | 116.78 | 116.78 | 105.00 | tercapai |
| 13 | Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat | % | 99.97 | 99.99 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | tercapai |
| 14 | Angka partisipasi kasar (APK) SLTP/Sederajat | % | 104.73 | 104.91 | 104.96 | 112.69 | 116.96 | 116.96 | 105.00 | tercapai |
| 15 | Angka partisipasi murni (APM) SLTP/Sederajat | % | 90.14 | 96.71 | 98.36 | 98.24 | 99.45 | 99.45 | 100.00 | akan tercapai |
| 16 | Angka kelulusan (AL) SD/Sederajat | % | 100 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | tercapai |
| 17 | Angka kelulusan (AL) SLTP/Sederajat | % | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | tercapai |
| 18 | Angka putus sekolah (APS) SD/Sederajat | % | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | tercapai |
| 19 | Angka putus sekolah (APS) SLTP/Sederajat | % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 0.00 | 0 | 0.00 | tercapai |
| 20 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs | % | 99.55 | 99.85 | 99.93 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | tercapai |
| 21 | Angka Melanjutkan (AM) | % | 89.41 | 96.47 | 98.24 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| | SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | | | | | | | | | |
| 22 | Indeks kesehatan (IK) | Poin | 63.40 | 64.25 | 64.47 | 74.12 | 74.40 | 74.4 | 64.68 | tercapai |
| 23 | Umur harapan hidup (UHH) | Tahun | 66.77 | 68.08 | 68.41 | 64.47 | 64.64 | 64.64 | 68.74 | akan tercapai |
| 24 | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 Kelahiran Hidup | 221.00 | 217.00 | 216.00 | 221.00 | 204.00 | 204.00 | 215.00 | tercapai |
| 25 | Angka Kematian Bayi (AKB) Yang Dilaporkan | per 1.000 Kelahiran Hidup | 8.90 | 8.60 | 8.50 | 9.17 | 8.29 | 8.29 | 8.40 | tercapai |
| 26 | Optimalisasi kunjungan rumah sakit (BOR) | % | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 66.00 | 54.80 | 54.80 | 80.00 | tercapai |
| 27 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 14.80 | 13.45 | 13.10 | 10.65 | 12.22 | 12.22 | 12.74 | tercapai |
| 28 | Tingkat kesempatan kerja (TKK) | % | 91.05 | 93.05 | 93.55 | 89.35 | 89.35 | 89.35 | 94.05 | akan tercapai |
| 29 | Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | belum tercapai |
| 30 | Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan | % | 8.00 | 75.76 | 87.88 | 93.33 | 85.71 | 85.71 | 100.00 | belum tercapai |
| 31 | Cakupan Atlet berprestasi | % | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | belum tercapai |
| 32 | Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) | % | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | belum tercapai |
| | | | | | | | | | | |
| | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | | |
| 1 | Proporsi jumlah SD/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SD/Sederajat | % | 81.67 | 93.87 | 96.92 | 95.59 | 83.26 | 83.26 | 100.00 | belum tercapai |
| 2 | Proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/Sederajat | % | 83.24 | 94.40 | 97.19 | 82,61 | 84.82 | 84.82 | 100.00 | belum tercapai |
| 3 | Rasio jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik terhadap total jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada | % | 47.42 | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | belum tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| 4 | Tingkat daya tampung RSUD | % | 69.00 | 87.00 | 95.00 | 70.00 | 88.89 | 88.89 | 95.00 | belum tercapai |
| 5 | Tingkat kualitas sarana prasarana RSUD dalam kondisi baik | % | 92.01 | 93.50 | 93.80 | 93.50 | 100.00 | 100.00 | 94.00 | tercapai |
| 6 | Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi | % | 66.00 | 70.00 | 71.00 | 98.80 | 99.40 | 99.40 | 72.00 | tercapai |
| 7 | Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat | % | 66.83 | 69.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | akan tercapai |
| 8 | Cakupan pelayanan persampahan (Proporsi volume sampah yang tertangani (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah)) | % | 4.80 | 8.00 | 9.00 | 8.42 | 8.07 | 8.07 | 10.00 | akan tercapai |
| 9 | Tersedianya Akses Air Minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan, memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | % | 78.00 | 86.00 | 88.00 | 86.97 | 87.08 | 87.08 | 90.00 | akan tercapai |
| 10 | Cakupan pelayanan air limbah rumah tangga | % | 61.70 | 79.70 | 84.20 | 70.14 | 77.87 | 77.87 | 88.70 | belum tercapai |
| 11 | Cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) | % | 24.10 | 67.99 | 85.09 | 97.65 | 98.51 | 98.51 | 100.00 | akan tercapai |
| 12 | Cakupan pencegahan bencana | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 13 | Cakupan penanggulangan korban bencana | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 14 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 15 | Cakupan penanganan daerah rawan bencana | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 16 | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana | % | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 100 | 96.12 | 96.12 | 50.00 | tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| 17 | Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 18 | Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 19 | Cakupan pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 20 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | (%) | 55,808.00 | 25,893.00 | 25,893.00 | 96,944.00 | 93,338.00 | 93,338.00 | 155,397.00 | belum tercapai |
| 21 | Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada) | (%) | 70.00 | 16.00 | 16.00 | 61.87 | 98.24 | 98.24 | 96.00 | tercapai |
| 22 | Ketersediaan energi | kkal/kap / hari | 2,112.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,316.00 | - | 0.00 | 2,150.00 | Belum tersedia data |
| 23 | Ketersediaan protein | gr/kap/hari | 81.20 | 72.00 | 76.00 | 115.2 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | Belum tersedia data |
| 24 | Skor PPH | % | 84.30 | 89.40 | 90.50 | 88.6 | 88.90 | 88.90 | 90.50 | akan tercapai |
| 25 | Indeks kualitas lingkungan hidup | point | 54.00 | 62.00 | 64.00 | 67.17 | 67.44 | 67.44 | 66.00 | tercapai |
| 26 | Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R | % | 6.90 | 20.69 | 24.14 | 22.5 | 27.28 | 27.28 | 27.59 | akan tercapai |
| 27 | Tingkat pengelolaan RTH | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | akan tercapai |
| 28 | Cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 29 | Cakupan pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa | (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 30 | Cakupan pembinaan pemerintahan desa | (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 31 | Persentase jumlah peserta KB terhadap pasangan usia | (%) | 66.16 | 68.16 | 68.66 | 75.63 | 76,17 | 76,17 | 69.16 | tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| | subur (Prevalensi peserta KB aktif) | | | | | | | | | |
| 32 | Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat | % | 14.30 | 12.50 | 12.00 | 12.36 | 12.73 | 12.73 | 11.50 | tercapai |
| 33 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten | % | 41.00 | 55.00 | 60.00 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 65.00 | belum tercapai |
| 34 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan | % | 0.00 | 34.00 | 40.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | tercapai |
| 35 | Ratio ketersediaan hotspot internet di tingkat kecamatan | % | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 36 | Rasio Koperasi Aktif (Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada) | % | 25.29 | 71.16 | 80.19 | 73.75 | 74.72 | 74.72 | 89.22 | belum tercapai |
| 37 | Rasio usaha mikro dan kecil (Rasio jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah usaha kecil dan menengah) | % | 97.55 | 90.00 | 90.00 | 99.24 | 99.28 | 99.28 | 90.00 | tercapai |
| 38 | Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru | % | 0.00 | 70.00 | 90.00 | 15.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | belum tercapai |
| 39 | Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama | % | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 40 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) | (%) | 0.00 | 60.00 | 63.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 68.00 | tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| 41 | Rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah | (%) | 0.00 | 80.56 | 83.33 | 100.00 | 83.00 | 83.00 | 88.00 | akan tercapai |
| 42 | Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada | % | 61.00 | 51.00 | 60.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | tercapai |
| 43 | Tingkat Konsumsi Ikan | kg/kapita / tahun | 22.93 | 25.50 | 26.00 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 26.50 | tercapai |
| 44 | Jumlah Produksi Perikanan | Ton | 79,023.91 | 88,630.68 | 91,289.60 | 63,490.83 | 41,630.42 | 41,630.42 | 526,262.26 | belum tercapai |
| 45 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | orang | 2,107.00 | 2.56 | 2.69 | 8,671.00 | 4,969.00 | 4,969.00 | 15,048.00 | belum tercapai |
| 46 | Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | % | 4.97 | 5.00 | 5.00 | 489.86 | (43.00) | (43.00) | 5.00 | belum tercapai |
| 47 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | orang | 5,817,105 | 6,296,622 | 6,422,554 | 649,489 | 1,369,074 | 1,369,074 | 37,428,902 | belum tercapai |
| 48 | Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara | % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -92.26 | 111.00 | 111.00 | 2.00 | tercapai |
| 49 | Tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata | % | 29.00 | 75.81 | 88.71 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 100.00 | akan tercapai |
| 50 | Tingkat pembangunan kawasan pertanian | % | 0.00 | 70.00 | 90.00 | 87.05 | 151.00 | 151.00 | 100.00 | tercapai |
| 51 | Tingkat pembangunan kawasan perkebunan | % | 0.00 | 70.00 | 90.00 | 77.70 | 70.08 | 70.08 | 100.00 | belum tercapai |
| 52 | Tingkat pembangunan kawasan peternakan | % | 0.00 | 70.00 | 90.00 | 55.56 | 77.78 | 77.78 | 100.00 | belum tercapai |
| 53 | Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) | % | 58.33 | 83.00 | 83.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 92.00 | akan tercapai |
| 54 | Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun | pasar | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | Belum tersedia data |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| 55 | Tingkat pembangunan resi gudang | % | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Belum tersedia data |
| 56 | Kabupaten Serang Dalam Angka | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 57 | PDRB Kabupaten Serang | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 58 | IPM Kabupaten Serang | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 59 | RPJMD | Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | akan tercapai |
| 60 | RKPD | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 61 | RKPD Perubahan | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 62 | KUA PPAS | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 63 | KUA PPAS Perubahan | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 64 | LKPj | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 65 | LKPj AMJ | Dokumen | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | akan tercapai |
| 66 | LPPD | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 67 | LAKIP | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 68 | Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS : | % | 100.00 | 72.57 | 87.64 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 100.00 | belum tercapai |
| 69 | Diklat PIM II | PNS | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | belum tercapai |
| 70 | Diklat PIM III | PNS | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | belum tercapai |
| 71 | Diklat PIM IV | PNS | 20.00 | 125.00 | 110.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | belum tercapai |
| 72 | Prajabatan | CPNS | 687.00 | 50.00 | 50.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | belum tercapai |
| 73 | Tingkat indispliner PNS | Kasus | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 68.00 | belum tercapai |
| 74 | Tingkat Kapabilitas APIP | Level | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | tercapai |
| 75 | Tingkat Muturitas SPIP | Level | 2.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | tercapai |
| 76 | Tingkat Kuantitas APIP | % | 40.00 | 75.71 | 88.57 | 83.87 | 85.48 | 85.48 | 100.00 | belum tercapai |
| 77 | Nilai kinerja pemerintah daerah | Peringkat (A, BB, B, CC, C, D) | CC | CC | B | A | A | A | B | tercapai |
| 78 | Tingkat ketersediaan dokumen rencana | % | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| 79 | Tingkat ketersediaan lahan siap bangun | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | belum tercapai |
| 80 | Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung | % | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 30.00 | tercapai |
| 81 | Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran | % | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | belum tercapai |
| 82 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP/ WDP/ TMP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| | pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| 83 | Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |
| | | | | | | | | | | |
| | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Daya Beli | Point | 69.96 | 70.63 | 70.80 | 72.49 | 72.10 | 72.10 | 70.97 | tercapai |
| 2 | Nilai Produksi Perikanan | Rp.Milyar | 766.49 | 860.35 | 886.17 | 384.20 | 188.23 | 188.23 | 5,109.00 | belum tercapai |
| 3 | Jumlah pendapatan daerah | Rp. Milyar | 2,306.04 | 2,377.72 | 2,420.94 | 3,024.15 | 2,965.62 | 2,965.62 | 14,458.65 | belum tercapai |
| 4 | Jmlah pendapatan asli daerah (PAD) | Rp. Milyar | 580.81 | 624.10 | 652.64 | 705.28 | 760.92 | 760.92 | 3,697.11 | belum tercapai |
| 5 | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | % | 25.19 | 26.25 | 26.96 | 23.32 | 25.66 | 25.66 | 25.57 | tercapai |
| 6 | Presentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten) | % | 71.57 | 91.53 | 97.35 | 88.90 | 92.05 | 92.05 | 100.00 | akan tercapai |
| 7 | Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten | % | 51.19 | 87.02 | 95.97 | 87.02 | 95.97 | 95.97 | 100.00 | akan tercapai |
| 8 | Presentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang draniase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten) | % | 50.00 | 85.00 | 93.75 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 100.00 | belum tercapai |
| 9 | Presentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik | % | 70.99 | 91.21 | 96.29 | 92.12 | 93.30 | 93.30 | 100.00 | akan tercapai |

| No | Aspek | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD | Target Kinerja Tahunan | | Realisasi Tahunan | | Realisasi Capaian RPJMD sd 2020 Target Akhir RPJMD | | Status Ketercapaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target 2019 | Target 2020 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | | |
| | (Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten) | | | | | | | | | |
| 10 | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | Unit | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | akan tercapai |
| 11 | Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran | % | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | akan tercapai |
| 12 | Nilai investasi PMA | Rp.Triliun | 2.07 | 2.33 | 2.40 | 4.55 | 4.53 | 4.53 | 2.47 | tercapai |
| 13 | Nilai investasi PMDN | Rp.Triliun | 2.49 | 2.80 | 2.89 | 2.31 | 3.37 | 3.37 | 2.97 | tercapai |
| 14 | Laju pertumbuhan investasi PMA | % | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 22.04 | -0.39 | -0.39 | 3.00 | belum tercapai |
| 15 | Laju pertumbuhan investasi PMDN | % | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -30.93 | 46.28 | 46.28 | 3.00 | tercapai |
| 16 | Indeks pembangunan gender (IPG) | point | 91.78 | 91.94 | 91.98 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.02 | tercapai |
| 17 | Tingkat penyelesaian konflik SARA | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | tercapai |

### 2.5.2 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang. Dalam Perbup tersebut penerapan SPM untuk pelaksanaan pelayanan dasar yang terdiri dari SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang pekerjaan umum, SPM bidang perumahan rakyat, SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta SPM bidang sosial.

### 2.5.2.1 SPM Bidang Urusan Pendidikan

SPM bidang urusan pendidikan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan, sedangkan untuk realisasi target SPM bidang pendidikan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.109 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Capaian | Tercapai/Tdk Tercapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dasar | persentase jumlah anak usia 6-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD/sederajat terhadap jumlah anak usia 6-12 tahun pada wilayah Kabupaten | 89,81% | 100% | Tercapai |
| | | persentase jumlah anak usia 12-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP/sederajat terhadap jumlah anak usia 12-15 tahun pada wilayah Kabupaten | 89,52% | 99,45% | Tercapai |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Persentase jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan terhadap jumlah anak usia 7-18 tahun pada wilayah | 96,43% | 100% | Tercapai |
| 3 | Pendidikan anak usia dini | persentase jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini terhadap jumlah anak usia 5-6 tahun pada wilayah Kabupaten | 91,16% | 99,45% | Tercapai |

### 2.5.2.2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

**Tabel 2.110 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2017 sampai 2020**

| Jenis Pelayanan Dasar | Cakupan Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 83,8 | 92,02 | 96,32 | 100 |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 90,63 | 89,34 | 94,21 | 100 |
| Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 94,58 | 100 | 93,03 | 100 |
| Pelayanan Kesehatan Balita | 68,66 | 71,52 | 75,94 | 87,69 |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 98,53 | 97,10 | 99,80 | 43,91 |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | 35,44 | 75,48 | 86,63 | 100 |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 38,86 | 50,50 | 57,80 | 80,07 |
| Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 38,42 | 71,99 | 61,35 | 100 |
| Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | 72,58 | 80,51 | 95,71 | 100 |
| Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 72,9 | 87,83 | 99,23 | 83,44 |
| Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 91,12 | 66,21 | 61,57 | 91,69 |
| Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 40,95 | 100 | 77,39 | 100 |

*Sumber : Laporan SPM Bidang Kesehatan*

Berdasarkan 201endi 2.110 capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, dari 12 indikator ada 4 indikator yang mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan 7 indikator setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan da nada 1 indikator yaitu pelayanan 201endidika pada usia 201endidikan dasar dari tahun 2017 sampai 2019 capaiannya di atas 90 % dan pada tahun 2020 turun menjadi 43,91 %.

### 2.5.2.3 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

SPM bidang urusan Pekerjaan Umum terdiri dari penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sedangkan untuk realisasi target SPM bidang pekerjaan umum tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.111 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Serang Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Capaian | Tercapai / Tdk Tercapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 87.08% | 87,08% | Tercapai |
| | | persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan | 77.87 | 77,87% | Tercapai |
| | | persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik | 100% | 77,87% | Tidak Tercapai |
| | | kinerja penyediaan pelayanaan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-T) akses dasar | 100% | 100% | Tercapai |
| | | Kinerja penyediaan pelayanaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) akses aman | 100% | 100% | Tercapai |
| | | kinerja penyediaan unit pengolahan setempat | 100% | 100% | Tercapai |
| | | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | 100% | 100% | Tercapai |

### 2.5.2.4 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

SPM bidang urusan perumahan rakyat terdiri dari Penyediaan dan rehabilitasi rutilahu bagi korban bencana kabupaten dan Fasilitasi penyediaan rutilahu bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten, sedangkan untuk realisasi target SPM bidang pekerjaan umum tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.112 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Serang Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Capaian | Tercapai / Tdk Tercapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rutilahu bagi korban bencana kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rutilahu bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kebupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0 | 0 | Tercapai |

### 2.5.2.5 SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas

SPM bidang urusan Trantibum Linmas terdiri dari Pelayanan keterteraman dan ketertiban umum, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan keterteraman dan ketertiban umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, sedangkan untuk realisasi target SPM bidang urusan trantibum linmas tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.113 Capaian SPM Bidang trantibum linmas**

**di Kabupaten Serang Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Capaian | Tercapai / Tdk Tercapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan keterteraman dan ketertiban umum | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 100% | Tercapai |
| 3 | Pelayanan keterteraman dan ketertiban umum | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 100% | 100% | Tercapai |
| 4 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 100% | Tercapai |
| 5 | pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 100% | Tercapai |
| 6 | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 100% | Tercapai |
| 7 | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | 100% | Tercapai |

### 2.5.2.6 SPM Bidang Urusan Sosial

SPM bidang urusan Sosial terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten , sedangkan untuk realisasi target SPM bidang urusan trantibum linmas tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.114 Capaian SPM Bidang urusan sosial**

**di Kabupaten Serang Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Capaian | Tercapai / Tdk Tercapai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | 100% | Tercapai |
| 3 | rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memeproleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | 100% | Tercapai |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabiliatasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 100% | 100% | Tercapai |
| 5 | perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100% | 100% | Tercapai |

### 2.5.3 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDG‟s ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDG‟s Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Pilar Pembangunan Sosial;
2. Pilar Pembangunan Ekonomi;
3. Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Hasil evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020 disajikan dalam lampiraan Dokumen RPJMD 2021-2026.

# BAB III KONDISI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci dari* kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainabilty*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

## 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proposi komponen APBD berupa; pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kapasitas fiskal ruang fiskal dan *tax ratio*.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Serang meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Serang Tahun 2016-2020 (Rp Juta)**

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 4 | PENDAPATAN | 2.468.077 | 2.810.704 | 2.918.628 | 3.026.665 | 2.859.070 | 3,97% |
| 04.01 | Pendapatan Asli Daerah | 590.865 | 815.399 | 697.085 | 707.865 | 717.518 | 6,60% |
| 04.02 | Dana Perimbangan | 1.419.534 | 1.470.127 | 1.546.651 | 1.584.532 | 1.446.012 | 0,62% |
| 04.03 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 457.676 | 525.176 | 674.890 | 734.266 | 695.539 | 11,69% |
| | | | | | | | |
| 5 | BELANJA | 2.195.413 | 2.344.509 | 2.626.188 | 3.203.729 | 2.965.070 | 8,37% |
| 05.01 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.778.128 | 1.880.762 | 2.036.468 | 1.637.891 | 1.693.512 | -0,53% |
| 05.02 | BELANJA LANGSUNG | 417.285 | 463.747 | 589.719 | 1.565.838 | 1.271.558 | 46,26% |
| | Surplus (Defisit) | -75.539 | 68.707 | -79.475 | -177.064 | -106.000 | -80,99% |
| | | | | | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 06.01 | PENERIMAAN DAERAH | 445.811 | 360.871 | 422.079 | 376.820 | 219.050 | -13,67% |
| 06.02 | PENGELUARAN DAERAH | 9.400 | 7.500 | 18.884 | 37.700 | 59.150 | 72,03% |
| | | | | | | | |
| | SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN | 436.411 | 353.371 | 403.195 | 339.120 | 159.900 | -18,42% |
| | Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 360.871 | 422.079 | 323.720 | 162.055 | 53.900 | -30,76% |

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Serang, 2016– 2020 (diolah)*

Tabel diatas menunjukkan perkembangan APBD Kabupaten Serang pada periode tahun 2016 hingga 2020. Selama periode tersebut total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,97 persen per tahun, dari sebesar Rp. 2,47 trilyun pada tahun 2016, mengalami fluktuasi, hingga menjadi sebesar Rp.2,86 trilyun pada pada tahun 2020. Sedangkan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pendapatan daerah yang mencapai rata-rata sebesar 8,37 persen per tahun, dari sebesar Rp.2,19 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.2,96 trilyun pada tahun 2020. Dari segi pembiayaan, penerimaan daerah mengalami pertumbuhan negatif yaitu mencapai rata-rata sebesar -13,67 persen, dari sebesar Rp.445 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.219 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, dari segi pengeluaran terjadi peningkatan sepanjang tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 72,03 persen. Pada tahun 2016 pengeluaran daerah dari segi pembiayaan sebesar Rp.9,4 miliar meningkat menjadi Rp.59,15 miliar pada tahun 2020.

Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah terlihat hampir setiap tahun terjadi defisit pada APBD Kabupaten Serang, kecuali pada tahun 2017 yang mengalami surplus anggaran. Pada tahun 2016 terjadi defisit anggaran yang mencapai sebesar Rp.75,53 miliar, kemudian tahun 2017 mengalami surplus anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.68,70 miliar. Pada tahun 2018 kembali terjadi defisit anggaran dengan nilai defisit anggaran sebesar yang mencapai Rp.79,47 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan defisit yang cukup besar hingga mencapai nilai sebesar Rp.177,06 miliar. Pada tahun 2020 surplus anggaran mencapai Rp.106 miliar

#### *3.1.1.1 Pendapatan Daerah*

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keungan Daerah maka mulai tahun 2020, kategorisasi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)**

| No | Uraian | Tahun | | | | | r (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 4 | PENDAPATAN | 2.468.077 | 2.810.704 | 2.918.628 | 3.026.665 | 2.859.070 | 3,97% |
| 04.01 | Pendapatan Asli Daerah | 590.865 | 815.399 | 697.085 | 707.865 | 717.518 | 6,60% |
| 04.01.01 | Pendapatan Pajak Daerah | 282.667 | 337.253 | 379.045 | 381.724 | 378.843 | 7,91% |
| 04.01.02 | Hasil Retribusi Daerah | 36.633 | 32.720 | 36.151 | 35.262 | 39.970 | 2,67% |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.835 | 16.179 | 16.751 | 18.529 | 19.482 | 7,09% |
| 04.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 256.729 | 429.245 | 265.137 | 272.340 | 279.224 | 8,55% |
| 04.02 | Dana Perimbangan | 1.419.534 | 1.470.127 | 1.546.651 | 1.584.532 | 1.446.012 | 0,62% |
| 04.02.01 | Bagi Hasil Pajak | 76.470 | 87.801 | 78.571 | 63.199 | 82.457 | 3,80% |
| 04.02.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | 2.108 | 2.267 | 1.979 | 0 | 2.070 | -35,05% |
| 04.02.03 | Dana Alokasi Umum | 1.090.140 | 1.070.989 | 1.078.411 | 1.122.244 | 1.030.506 | -1,29% |
| 04.02.04 | Dana Alokasi Khusus | 250.815 | 309.068 | 387.690 | 399.088 | 330.979 | 8,63% |
| 04.03 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 457.676 | 525.176 | 674.890 | 734.266 | 695.539 | 11,69% |
| 04.03.01 | Pendapatan Hibah | 5.057 | 4.514 | 163.298 | 195.130 | 200.985 | 882,34% |
| 04.03.02 | Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya | 154.798 | 156.900 | 158.908 | 187.895 | 109.452 | -5,22% |
| 04.03.03 | Dana Penyesuaian & otonomi khusus | 206.403 | 263.762 | 261.684 | 291.240 | 305.103 | 10,76% |
| 04.03.04 | Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya | 91.418 | 100.000 | 91.000 | 60.000 | 80.000 | -0,09% |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang 2016-2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, total realisasi pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,97 persen pertahunnya, dari sebesar Rp.2,47 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.2,86 triliun pada pada tahun 2020. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan mencapai Rp.3,03 triliun, namun mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid. Secara keseluruhan, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Serang masih berasal dari dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum. Sehingga ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode tersebut tumbuh rata-rata sebesar 6,60 persen pertahun, kemudian dana perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 0,63 persen pertahun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sebesar 11,69 persen pertahun.

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Serang dapat dikatakan masih didominasi oleh besarnya kontribusi dana perimbangan yang mencapai angka lebih dari 50 persen, khususnya dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan 2 (dua) sumber pendapatan lainnya pada periode 2016-2019. Sedangkan di tahun 2020, kontribusi pendapatam asli daerah telah melebihi kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nilai kontribusi mencapai 25,01 persen. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

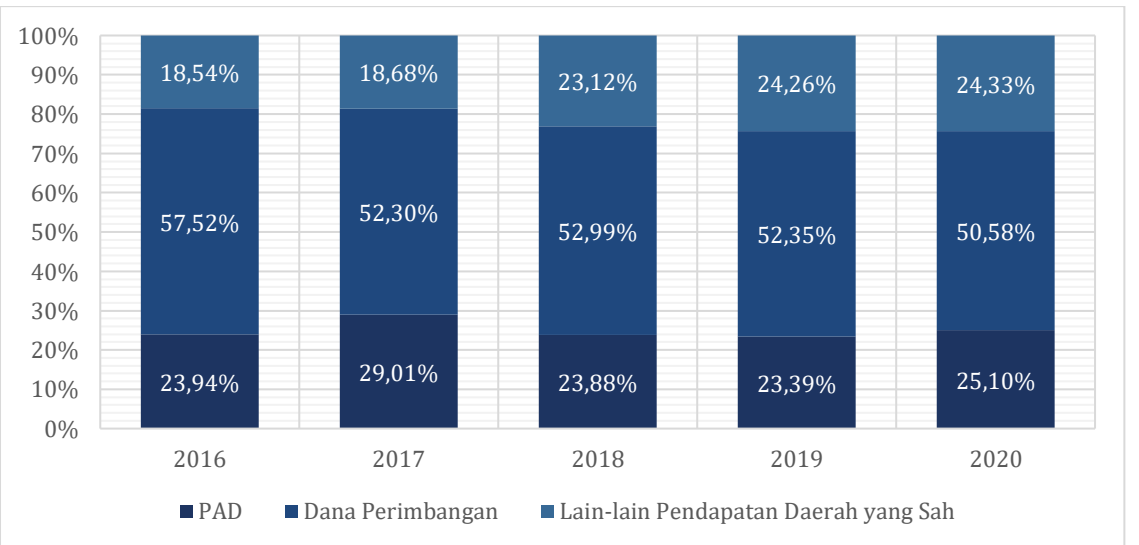


**Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang 2016-2020*

Gambar diatas menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Serang sepanjang tahun 2016-2019. Pada periode tersebut terlihat bahwa Dana Perimbangan memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah. Kontribusi Dana Perimbangan yakni sebesar 57,52 persen pada tahun 2016 dan mencapai 50,58 persen pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi kedua terhadap total pendapatan daerah, dari sebesar 23,94 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 29,01 persen pada tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 23,88 persen pada tahun 2018, mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi sebesar 23,39 persen pada tahun 2019, lalu naik menjadi 25,01 persen di tahun 2020. Sedangkan pendapatan daerah lainnya juga memberikan kontribusi dengan kisaran angka 18,54 persen sampai dengan 24,33 persen pertahun.

#### *3.1.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah*

Selama periode tahun 2016-2019, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD Kabupaten Serang sudah mencapai 100 persen kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Serang berhasil mencapai target dengan nilai persentase sebesar 100,31 persen. Pada tahun 2017 hingga 2018, pendapatan daerah Kabupaten Serang mencapai target 100 persen, dengan nilai persentase berkisar 100,82 persen. Pada tahun 2019 dan 2020, pendapatan daerah Kabupaten Serang tidak mencapai target 100 persen, dengan nilai persentase berkisar 97,37 persen dan 95,81 persen.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun | Target | Realisasi | % | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.460.511.870.822 | 2.468.077.495.354 | 100,31 | 7.565.624.532 |
| 2017 | 2.787.813.712.222 | 2.810.704.635.828 | 100,82 | 22.890.923.606 |
| 2018 | 2.894.750.933.169 | 2.918.628.102.041 | 100,82 | 23.877.168.872 |
| 2019 | 3.108.391.435.615 | 3.026.665.131.535 | 97,37 | -81.726.304.080 |
| 2020 | 2.984.146.994.299 | 2.859.070.816.824 | 95,81 | 125.076.177.475 |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang 2016-2020 (diolah)*

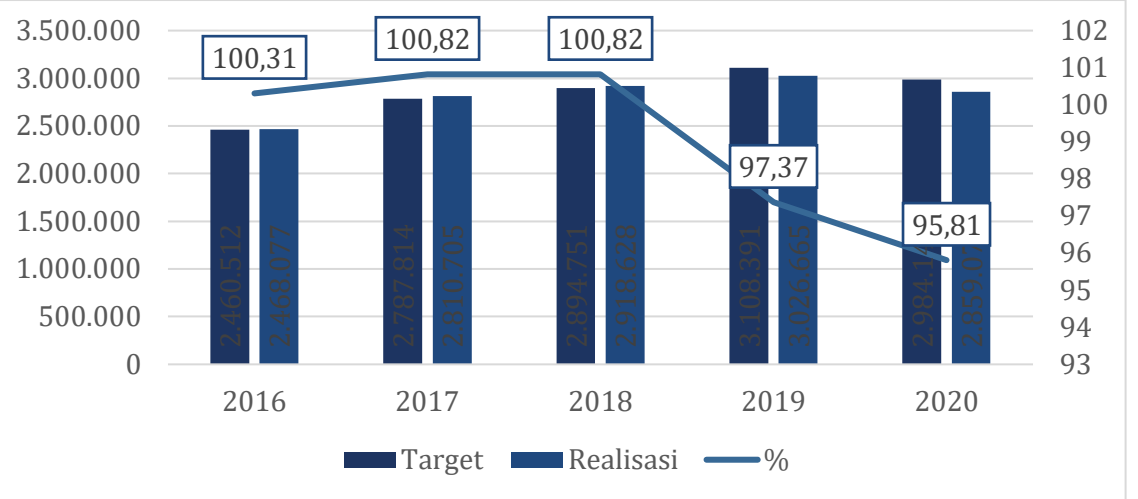


**Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

### *3.1.1.3 Belanja Daerah*

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total realisasi belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal realisasi belanja daerah Kabupaten Serang pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 2,19 trilyun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 2,97 trilyun pada tahun 2020, selama periode tersebut belanja

daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,85 persen pertahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah diketahui bahwa alokasi belanja operasi memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi terhadap belanja modal, belanja tak terduga, maupun transfer/bantuan keuangan pada periode 2016 hingga 2020. Belanja operasi rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,07 persen, sedangkan belanja modal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,59 persen per tahun.

Pos belanja operasi dalam periode tahun 2016-2019 memiliki pola yang menunjukkan tren yang meningkat, namun menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid 19. Pos belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,57 persen per tahun. Kemudian belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 1,96 persen pertahun, dan belanja hibah mengalami pertumbuhan sebesar 83,46 persen per tahun dengan peningkatan nominal belanja tersebut secara signifikan di tahun 2020. Pos transfer/bantuan keuangan ke desa mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,15 persen per tahun.

**Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah & Transfer/Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)**

| Uraian | Tahun | | | | | r (%) *2016-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| BELANJA | 2.194.409 | 2.344.506 | 2.626.203 | 3.203.729 | 2.965.071 | 7,85% |
| BELANJA OPERASI | 1.777.499 | 1.880.718 | 2.035.908 | 2.133.997 | 2.078.918 | 4,07% |
| Belanja Pegawai | 1.044.961 | 1.021.129 | 1.071.916 | 1.264.849 | 1.183.762 | 3,57% |
| Belanja Barang dan Jasa | 709.359 | 834.778 | 915.517 | 815.008 | 745.430 | 1,96% |
| Belanja Hibah | 21.664 | 24.811 | 37.922 | 34.785 | 130.358 | 83,46% |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.515 | - | 10.553 | 19.355 | 19.369 | 41,74% |
| BELANJA MODAL | 416.283 | -1,14% | 589.717 | 600.917 | 371.970 | 0,59% |
| Belanja Modal Tanah | 11.700 | 21.899 | 8.035 | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.856 | -1,14% | 53.138 | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 114.777 | 60.508 | 69.282 | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 185.849 | 271.087 | 416.842 | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 8.101 | 52.509 | 42.420 | | | |
| BELANJA TAK TERDUGA | 627 | 43 | 578 | 94 | 88.413 | 23755,92% |
| Belanja Tak Terduga | 627 | 43 | 578 | 94 | 88.413 | 23755,92% |
| TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN | | | | | | |
| TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA | 348.201 | 397.486 | 371.914 | 468.717 | 425.769 | 6,15% |
| Bagi Hasil Pajak ke Desa | 27.937 | 26.211 | 36.264 | 40.269 | 25.117 | -1,14% |
| Bagi Hasil Retribusi ke Desa | 3.391 | - | - | | | |
| Bantuan Keuangan ke Desa | 316.025 | 370.427 | 334.552 | 428.448 | 400.652 | 7,18% |
| Bantuan Keuangan Lainnya | 848 | 848 | 1.098 | | | |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja operasi. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja operasi mencapai kisaran angka sebesar 65,58 persen sampai dengan 70,12 persen, sedangkan proporsi modal mencapai kisaran angka 12,54 persen sampai dengan 19,67 persen. Proporsi belanja tak terduga di Kabupaten Serang cukup kecil yaitu sebesar 0,019 persen hingga 2,98 persen selama tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020 atau selama masa pandemi Covid 19, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari kontribusi belanja modal dan peningkatan signifikan dari belanja operasi dan belanja tak terduga.

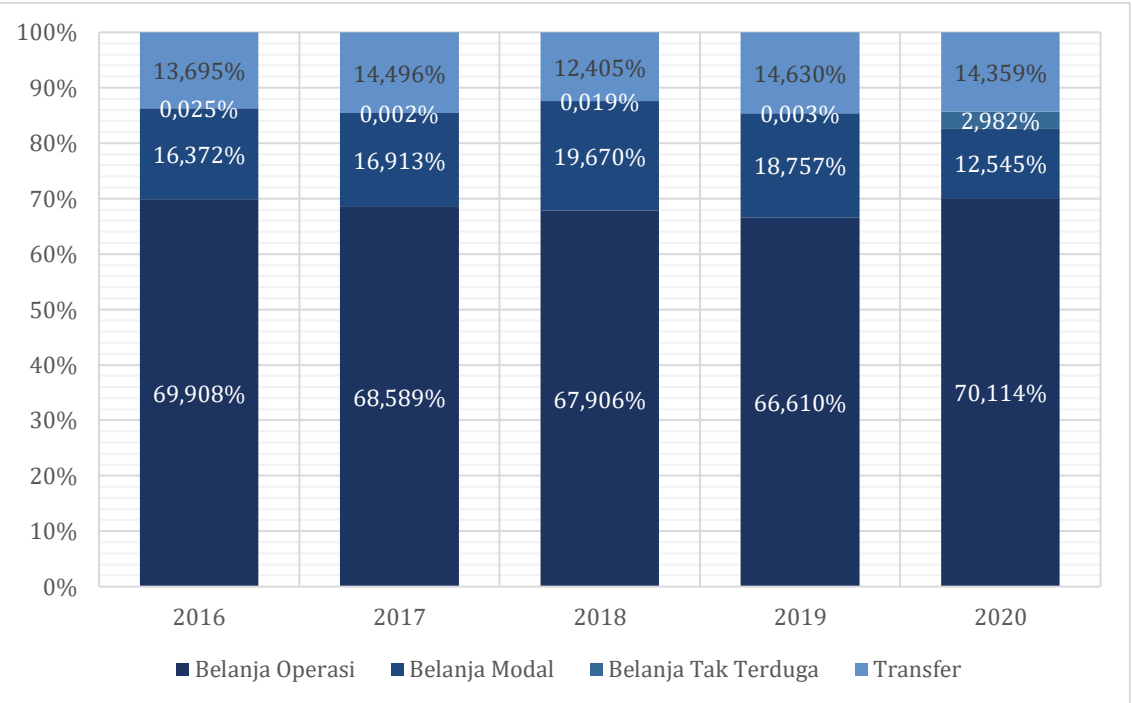


**Gambar 3.3 Komposisi Belanja Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

### *3.1.1.4 Target dan Realisasi Belanja*

Selama periode tahun 2016-2020, rencana belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka dibawah target 100 persen. Presentase realisasi belanja selama peridoe tersebut berkisar dari sebesar 85,72 persen sampai dengan 94,27 persen. Namun, selama periode tersebut, persentase realisasi belanja daerah Kabupaten Serang mengalami tren yang selalu meningkat.

**Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun Anggaran | Target | Realisasi | % | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.544.814.567.170 | 2.195.413.752.009 | 86,27 | -349.400.815.161 |
| 2017 | 2.735.067.639.873 | 2.344.509.428.480 | 85,72 | -390.558.211.393 |
| 2018 | 2.905.735.786.237 | 2.626.188.202.074 | 90,38 | -279.547.584.163 |
| 2019 | 3.429.111.553.700 | 3.203.729.850.459 | 93,43 | -225.381.703.241 |
| 2020 | 3.145.447.721.886 | 2.965.070.952.938 | 94,27 | 180.376.768.948 |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

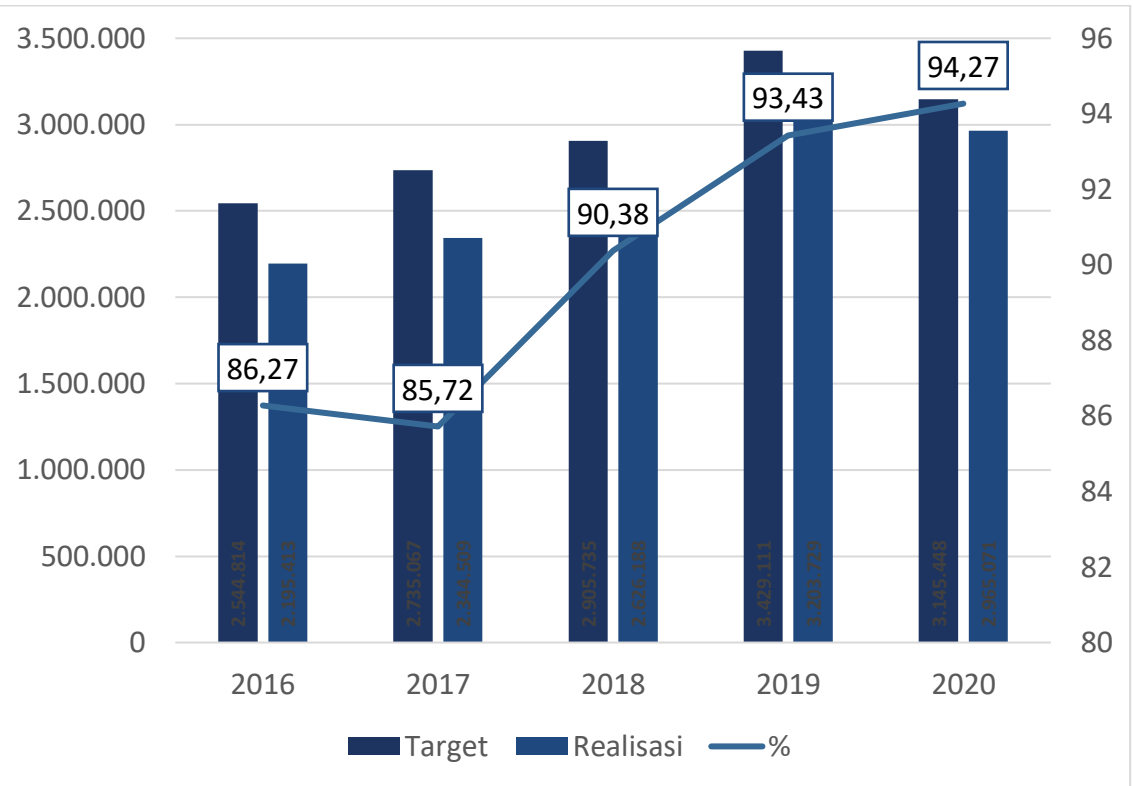


**Gambar 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

### *3.1.1.5 Pembiayaan Daerah*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedang ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Serang tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Serang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

**Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | 445.881 | 360.871 | 422.079 | 376.820 | 219.051 |
| Penggunaan SiLPA | 445.811 | 360.871 | 422.079 | 323.720 | 161.301 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penerimaan Kembali Dana Bergulir | 0 | 0 | 0 | 53.100 | 57.750 |
| | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 9.400 | 7.500 | 18.884 | 37.700 | 59.150 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 9.400 | 7.500 | 18.884 | 3.000 | 2.310 |
| Pembayaran Kepada Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 34.700 | 56.840 |
| | | | | | |
| Pembiayaan Netto | 436.411 | 353.371 | 403.195 | 339.120 | 159.901 |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

### 3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundangundangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Serang pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp3,71 triliun yang kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3,84 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp3,85 triliun dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp3,81 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, jumlah kewajiban daerah kabupaten Serang mencapai nilai sebesar Rp 21,79 miliar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai Rp 30,45 miliar. Pada tahun 2018, jumlah kewajiban daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hingga mencapai Rp 58,33 miliar. Pada tahun 2019, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Serang kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp 80,87 miliar. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Serang mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp 62,49 miliar.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2019, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai ekuitas daerah kabupaten Serang mencapai nilai sebesar Rp 3,69 triliun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai Rp 3,81 triliun. Pada tahun 2018, nilai ekuitas daerah mengalami penurunan yaitu hingga mencapai Rp 3,79 triliun. Pada tahun 2019, nilai ekuitas daerah Kabupaten Serang kembali mengalami penurunan hingga mencapai nilai sebesar Rp 3,73 triliun. Pada tahun 2020, nilai ekuitas daerah kabupaten Serang mencapai nilai sebesar Rp 3,77 triliun.

**Tabel 3.7 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020**

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | r (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASET | | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 331.926.991.901,00 | 396.977.961.126,00 | 321.069.089.710,00 | 145.310.451.727,00 | 46.038.592.654,00 | -30,65% |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.144.380,00 | - | - | | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | - | - | - | | | |
| Kas di BLUD | 18.841.717.379,00 | 21.320.879.458,00 | 532.189.147,00 | 7.296.666.129,00 | 6.537.221.694,00 | 294,08% |
| Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN | 10.103.169.005,00 | 3.780.885.034,00 | 2.015.469.559,00 | | - | -69,76% |
| Kas Lainnya (Dana BOS) | 2.486.301.309,00 | 63.702.670,00 | 729.601.623,27 | 9.340.220.476,00 | 1.324.777.125,00 | 510,56% |
| Kas Lainnya (Dana Bantuan Keuangan/Hibah) | 137.024.313,00 | - | - | | 94.355.000,00 | |
| Investasi Jangka Pendek | - | - | - | | | |
| Piutang Pajak Daerah | 230.320.052.466,95 | 248.652.929.669,37 | 269.306.115.656,97 | 273.427.704.725,97 | 285.662.776.647,00 | 5,57% |
| Piutang Retribusi Daerah | 33.924.248.611,00 | 272.563.280,00 | 272.563.280,00 | 272.563.280,00 | - | -33,07% |
| Piutang Pendapatan Lainnya | - | 31.300.002.058,00 | 42.117.618.831,00 | 54.497.240.243,00 | 28.598.891.529,00 | 5,48% |
| Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi | 905.492.061,00 | 905.492.061,00 | 450.906.775,00 | 471.200.142,00 | 450.089.222,00 | -12,55% |
| Piutang Lancar Lainnya | 1.719.309.112,56 | 14.211.965.417,56 | 16.859.764.291,04 | 16.780.580.869,24 | 84.196.883.066,00 | 286,63% |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | -145.107.194.276,61 | -172.370.263.650,30 | -173.161.740.644,30 | -206.820.779.909,79 | -222.799.248.497,14 | 11,60% |
| Beban Dibayar Dimuka | 861.265.208,33 | 977.655.108,34 | 217.679.117,33 | 156.160.861,37 | 128.324.944,01 | -27,58% |
| Persediaan | 155.319.997.260,41 | 194.924.677.529,78 | 202.270.714.733,34 | 36.699.898.193,30 | 61.566.084.910,46 | 3,79% |
| Jumlah Aset Lancar | 641.441.518.730,64 | 741.018.449.761,75 | 682.679.972.079,65 | 337.431.906.737,09 | 291.798.748.294,33 | -14,11% |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | r (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| Investasi Nonpermanen | - | - | - | - | - | |
| Investasi Permanen | . | 185.310.178.415,69 | 206.765.959.209,63 | 205.745.110.804,70 | 202.828.089.358,51 | 3,22% |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 182.340.851.116,69 | 185.310.178.415,69 | 206.765.959.209,63 | 205.745.110.804,70 | 202.828.089.358,51 | 2,82% |
| Investasi Permanen Lainnya | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | 182.340.851.116,69 | 185.310.178.415,69 | 206.765.959.209,63 | 205.745.110.804,70 | 405.656.178.717,02 | 27,47% |
| | | | | | | |
| ASET TETAP | | | | | | |
| Tanah | 567.751.925.448,00 | 627.102.021.449,76 | 520.420.873.316,89 | 533.276.743.342,89 | 576.199.082.147,89 | 0,99% |
| Peralatan dan Mesin | 780.615.285.894,43 | 820.714.891.300,39 | 867.123.452.499,27 | 956.729.970.649,28 | 1.035.975.573.821,26 | 7,35% |
| Gedung dan Bangunan | 1.527.027.890.222,00 | 1.433.691.665.964,89 | 1.429.822.524.244,14 | 1.509.328.761.026,21 | 1.541.787.408.185,28 | 0,33% |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.207.416.907.526,14 | 1.628.078.828.125,69 | 1.731.431.725.137,48 | 2.147.352.647.138,10 | 2.364.667.862.011,14 | 18,83% |
| Aset Tetap Lainnya | 32.299.866.653,00 | 32.020.861.460,00 | 34.517.378.227,00 | 34.674.935.214,00 | 34.252.979.973,10 | 1,54% |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 165.961.831.914,17 | 14.922.525.359,33 | 159.835.939.140,66 | 113.353.195.470,04 | 88.321.774.304,00 | 207,23% |
| Akumulasi Penyusutan | - 1.543.460.553.507,85 | - 1.812.748.982.100,96 | -1.919.851.255.111,43 | - 2.165.005.080.643,14 | - 2.427.268.665.786,94 | 12,06% |
| Jumlah Aset Tetap | 2.737.613.154.149,89 | 2.743.781.811.559,10 | 2.823.300.637.454,01 | 3.129.711.172.197,38 | 3.213.936.014.655,73 | 4,17% |
| | | | | | | |
| DANA CADANGAN | | | | | | |
| | - | - | - | - | | |
| Dana Cadangan | | | | | | |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | r (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Dana Cadangan | - | - | - | - | | |
| | | | | | | |
| ASET LAINNYA | | | | | | |
| Tagihan Jangka Pajang (TGR) | - | - | - | | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | - | 2.431.888.676,00 | 4.702.977.580,00 | 6.696.271.634,00 | 67,89% |
| Aset Tidak Berwujud | 18.531.307.078,00 | 33.454.877.988,00 | 35.356.258.563,00 | 36.431.854.463,00 | 39.344.181.228,00 | 24,31% |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | -32.917.957.906,75 | -33.921.726.800,50 | -38.296.892.709,25 | 7,97% |
| Aset Lain - Lain | 137.708.057.169,00 | 143.176.136.573,00 | 146.958.759.445,00 | 150.608.669.026,60 | 128.888.293.650,60 | 3,97% |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | | | -6.573.015.967,00 | -13.350.094.984,46 | -12.912.859.111,44 | 49,91% |
| Jumlah Aset Lainnya | 156.239.364.247,00 | 176.631.014.561,00 | 145.255.932.810,25 | 144.471.679.284,64 | 123.718.994.691,91 | -4,90% |
| | | | | | | |
| JUMLAH ASET | 3.717.634.888.244,22 | 3.846.741.454.297,54 | 3.858.002.501.553,54 | 3.817.359.869.023,82 | 3.832.281.847.000,48 | 0,78% |
| | | | | | | |
| KEWAJIBAN | | | | | | |
| | | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 3.078.414,00 | - | 626.231.954,27 | 646.610.745,00 | - | 3,25% |
| Utang Transfer ADD/DD/BHPRD | 3.107.467.600,00 | 8.630.479.250,00 | 24.554.769.471,00 | 8.598.376.295,00 | 525.809.000,00 | 50,84% |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | 122.889.097,00 | - | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 636.116.916,91 | 1.011.656.420,56 | 1.108.057.634,00 | 1.435.813.251,00 | 1.742.009.425,71 | 29,87% |

| URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | r (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja | 1.904.063.042,00 | 1.171.123.343,00 | 5.995.212.444,94 | 45.670.976.126,67 | 27.846.361.352,67 | 249,05% |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 16.140.973.144,00 | 19.639.870.773,00 | 26.054.333.971,75 | 24.395.495.334,00 | 32.376.309.928,80 | 20,17% |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 21.791.699.116,91 | 30.453.129.786,56 | 58.338.605.475,96 | 80.870.160.848,67 | 62.490.489.707,18 | 36,80% |
| | | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | |
| Utang Dalam Negeri | - | - | - | - | - | |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 21.791.699.116,91 | 30.453.129.786,56 | 58.338.605.475,96 | 80.870.160.848,67 | 62.490.489.707,18 | 36,80% |
| | | | | | | |
| EKUITAS | | | | | | |
| Ekuitas | 3.695.843.189.127,31 | 3.816.288.324.510,98 | 3.799.663.896.077,58 | 3.736.489.708.175,15 | 3.769.791.357.293,30 | 0,51% |
| | | | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 3.717.634.888.244,22 | 3.846.741.454.297,54 | 3.858.002.501.553,54 | 3.817.359.869.023,82 | 3.832.281.847.000,48 | 0,78% |

*Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Serang 2016-2020*

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Serang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek

**Tabel 3.8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020 (Rp juta)**

| Rasio | Rumus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio Likuiditas** | Aset Lancar | 641.441,52 | 741.018,45 | 682.679,97 | 337.431,91 | 291.798,75 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 21.791,70 | 30.453,13 | 58.338,61 | 80.870,16 | 62.490,49 |
| | **Rasio Lancar** | **29,44** | **24,33** | **11,70** | **4,17** | **4,67** |
| | Aset Lancar Persediaan | 155.319,99 | 194.925 | 202.270,71 | 36.699,90 | 61.566,08 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 21.791,70 | 30.453,13 | 58.338,61 | 80.870,16 | 62.490,49 |
| | **Quick Ratio** | **7,13** | **6,40** | **3,47** | **0,45** | **0,99** |
| **Rasio Solvabilitas** | Total Hutang | 21.791,70 | 30.453,13 | 58.338,61 | 80.870,16 | 62.490,49 |
| | Total Aset | 3.717.634,89 | 3.846.741 | 3.858.002,50 | 3.817.360 | 3.832.282 |
| | **Rasio Total Hutang (%)** | **0,59%** | **0,79%** | **1,51%** | **2,12%** | **1,63%** |
| | Total Hutang | 21.791,70 | 30.453,13 | 58.338,61 | 80.870,16 | 62.490,49 |
| | Total Ekuitas | 3.695.843,19 | 3.816.288,32 | 3.799.663,90 | 3.736.489,71 | 3.769.791 |
| | **Rasio Hutang/Modal (%)** | **0,59%** | **0,80%** | **1,54%** | **2,16%** | **1,66%** |

*Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Serang dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2019 mencapai 4,67 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Serang adalah 4,67 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

*Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar *(current ratio)* karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Serang yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2016-2018 rasio cepat di Kabupaten Serang menunjukkan nilai diatas 1, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 rasio cepat di Kabupaten Serang masih dibawah nilai 1.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan

rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2020 sebesar 1,63% artinya sebesar Rp1,69 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kabupaten Serang yang didanai oleh hutang adalah sebesar 1,69%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2016-2020, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Serang.

## 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2016 s/d 2020 ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Tabel 3. 9 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Serang, 2016-2020**

| Tahun | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp Juta) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp Juta) | Persentase |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (a)/(b) x 100% |
| 2016 | 1.044.961,00 | 2.203.809,00 | 47,42% |
| 2017 | 1.021.129,00 | 2.352.006,00 | 43,42% |
| 2018 | 1.071.916,00 | 2.645.087,00 | 40,52% |
| 2019 | 1.264.849,00 | 3.241.429,00 | 39,02% |
| 2020 | 1.183.762,00 | 3.024.221,00 | 39,14% |
| **Rata-rata** | 1.117.323,40 | 2.693.310,40 | 41,49% |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

Pada tahun 2016-2019, nominal total belanja untuk kebutuhan aparatur mengalami peningkatan, sedangkan proporsinya terhadap total pengeluaran mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, nominal realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan, sedangkan proporsinya terhadap total pengeluaran mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 1,04 triliun, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 1,26triliun di tahun 2019. Pada tahun 2020 nominal belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan menajdi Rp 1,18 triliun. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Serang juga berfluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2016 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah mencapai 47,42 persen, kemudian turun hingga 39,14 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020. proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 41,49 persen.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan

daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Serang selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Serang, 2016-2020 (Rp juta)**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.468.077 | 2.810.704 | 2.918.628 | 3.026.665 | 2.859.070 |
| Belanja Daerah | 2.195.413 | 2.344.509 | 2.626.188 | 3.203.729 | 2.965.071 |
| **Surplus/Defisit** | 273.668 | 466.198 | 292.425 | -177.064 | -106.001 |
| Pembiayaan daerah | | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 445.881 | 360.871 | 422.079 | 376.820 | 219.051 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 9.400 | 7.500 | 18.884 | 37.700 | 59.150 |
| **Pembiayaan Netto** | **436.411** | **353.371** | **403.195** | **339.120** | **159.901** |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan | 360.871 | 422.079 | 323.720 | 162.055 | 53.901 |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, terjadi pola fluktuasi pembiayaan netto pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pembiayaan netto Kabupaten Serang mencapai nilai sebesar Rp.436,41 miliyar, mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni mencapai Rp.353,37 miliyar. Pada tahun 2018, pembiayaan netto kembali mengalami peningkatan sehingga nilai pembiayaan netto mencapai Rp.403,19 miliyar. Pada tahun 2019, nilai pembiyaan netto Kabupaten Serang kembali mengalami penurunan sehingga mencapai nilai sebesar Rp.339,12 miliyar. Selanjutnya, pada tahun 2020 nilai pembiyaan netto Kabupaten Serang mengalami penurunan signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp.159,90 miliyar.

**Tabel 3.11 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Serang, 2016-2020 (Rp juta)**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi Pendapatan Daerah | 2.468.077 | 2.810.704 | 2.918.628 | 3.026.665 | 2.859.070 |
| Dikurangi | | | | | |
| Realisasi Belanja Daerah | 2.195.413 | 2.344.509 | 2.626.188 | 3.203.729 | 2.965.071 |
| Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 9.400 | 7.500 | 18.884 | 37.700 | 59.150 |
| **Surplus/Defisit Riil** | **263.264** | **458.695** | **273.556** | **-214.764** | **-165.151** |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, terjadi pola fluktuasi surplus/defisit riil APBD pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Surplus Riil APBD Kabupaten Serang mencapai nilai sebesar Rp.262,26 miliyar, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 yakni mencapai Rp.458,69 miliyar. Pada tahun 2018, Surplus Riil APBD Kabupaten Serang kembali mengalami penurunan sehingga mencapai Rp.273,55 miliyar. Pada tahun 2019, terjadi defisit dengan nilai defisit riil APBD Kabupaten Serang mencapai nilai sebesar -Rp.214,76 miliyar. Selanjutnya, pad atahun 2020 nilai defisit riil APBD Kabupaten Serang mencapai nilai sebesar -Rp.165,15 miliyar.

### 3.2.2.1 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja belanja yang besifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked;* ditentukan penggunaannya). Semakin besar Ruang Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini;

| | | |
|---|---|---|
| **Ruang Fiskal** | = | **(Total Pendapatan + silpa) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah** |
| **Pendapatan Mengikat** | = | **DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus** |
| **Belanja Wajib** | = | **Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Gaji dan Tunjangan + belanja wajib lainnya** |

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan Ruang Fiskal Kabupaten Serang tahun 2016-2020 ditemukan ruang fiskal yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Serang cukup memadai dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah meski mengalami penurunan. Tabel berikut menunjukkan hasil ruang fiskal daerah di Kabupaten Serang. Pada tahun 2016, ruang fiskal Kabupaten Serang mencapai sebesar Rp.804,5 miliar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.918,45 miliar pada tahun 2017 dan mengalami penurunan hingga mencapai nilai sebesar Rp.752,9 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2019 ruang fiskal kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.612,2 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020, ruang fiskal kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.439,21 miliar.

**Tabel 3.12 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)**

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN | 2.913.958 | 3.171.575 | 3.340.707 | 3.403.485 | 3.078.120 |
| PENDAPATAN MENGIKAT | 462.275 | 577.344 | 812.672 | 885.458 | 837.067 |
| DAK | 250.815 | 309.068 | 387.690 | 399.088 | 330.979 |
| Hibah | 5.057 | 4.514 | 163.298 | 195.130 | 200.985 |
| Dana Penyesuaian | 206.403 | 263.762 | 261.684 | 291.240 | 305.103 |
| BELANJA MENGIKAT | 1.071.174 | 1.057.394 | 1.098.128 | 1.155.207 | 1.208.879 |
| Belanja Pegawai | 1.044.962 | 1.021.129 | 1.071.916 | 1.114.937 | 1.183.762 |
| Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belanja Bagi Hasil | 26.212 | 36.265 | 26.212 | 40.270 | 25.117 |
| BELANJA WAJIB | 575.942 | 618.386 | 676.912 | 750.615 | 592.965 |
| Belanja Pendidikan 20% | 230.090 | 264.676 | 310.854 | 417.758 | 223.480 |
| Belanja Kesehatan 10% | 73.317 | 85.963 | 96.455 | 52.295 | 111.740 |
| Belanja Infrastruktur (25%*DAU) | 272.535 | 267.747 | 269.602 | 280.561 | 257.745 |
| TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB | 2.109.390 | 2.253.124 | 2.587.712 | 2.791.279 | 2.638.911 |
| **RUANG FISKAL** | **804.568** | **918.450** | **752.995** | **612.206** | **439.209** |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

### 3.2.2.2 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan kota yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementrian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 2 Peraturan Kementrian Keuangan PMK No. 37/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KF = \frac{(\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} + \text{OTSUS} + \text{TRANSFER PROV} + \text{LP}) - \text{BP}}{\text{JUMLAH PENDUDUK MISKIN}}$$

Keterangan

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD= Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- Transfer Prov = Transfer= Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
- LP= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BP= Belanja Pegawai

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementrian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Serang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, nilai IKF Kabupaten Serang menunjukan nilai sebesar 0,59 atau masuk dalam kategori sedang, Pada tahun 2017, nilai IKF Kabupaten Serang mengalami peningkatan yakni sebesar 1,95 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, nilai IKF Kabupaten Serang mengalami tren penurunan sehingga nilai IKF mencapai 1,796 pada tahun 2018 dan 1,705 pada tahun 2019 yang masuk ke dalam kategori tinggi. Selanjutnya, di tahun 2020 IKF Kabupaten Serang mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 2,442 dan termasuk dalam kategori tinggi.

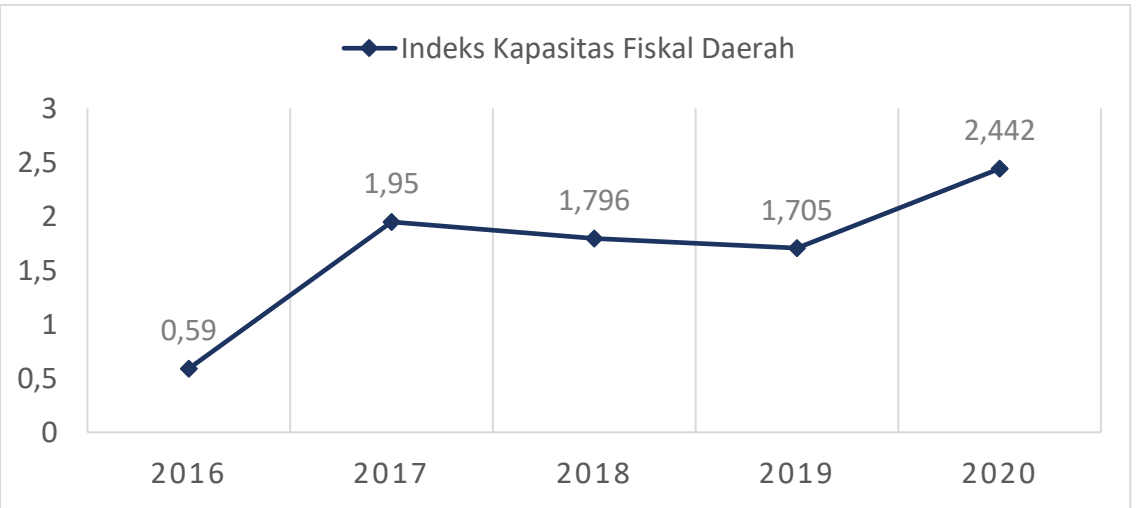


**Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Kemenkeu, 2016-2020*

### 3.2.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Serang mengalami tren penurunan selama periode tahun 2016-2020. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Serang pada tahun 2016 yakni sebesar 1,32. Mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni sebesar 1,35 dan mengalami penurunan hingga mencapai nilai 1,26 pada tahun 2018 dan 1,05 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Serang kembali turun menjadi 1,02. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan.

**Tabel 3.13 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020**

| Tahun | Total Pendapatan | Penerimaan Pembiayaan | Total Penerimaan | Total Belanja | Pengeluaran Pembiayaan | Total Pengeluaran | Kemampuan Mendanai Belanja Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.468.077 | 445.881 | 2.913.958 | 2.195.413 | 9.400 | 2.204.813 | 1,32 |
| 2017 | 2.810.704 | 360.871 | 3.171.575 | 2.344.509 | 7.500 | 2.352.009 | 1,35 |
| 2018 | 2.918.628 | 422.079 | 3.340.707 | 2.626.188 | 18.884 | 2.645.072 | 1,26 |
| 2019 | 3.026.665 | 376.820 | 3.403.485 | 3.203.729 | 37.700 | 3.241.429 | 1,05 |
| 2020 | 2.859.070 | 219.050 | 3.078.120 | 2.965.070 | 59.150 | 3.024.220 | 1,02 |

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2020 (diolah)*

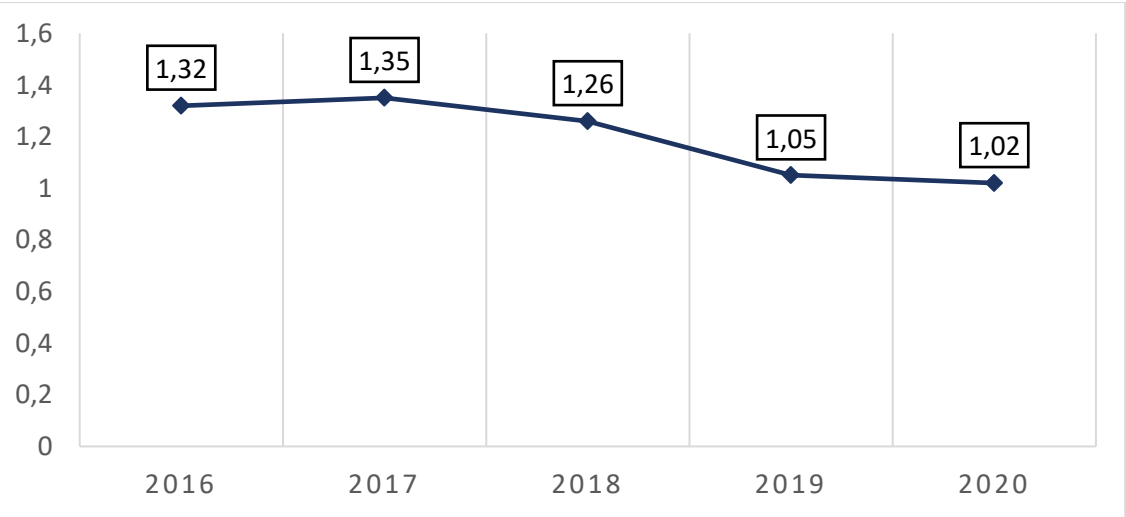


**Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Kabupaten Serang 2016-2020**

*Sumber: LRA Kabupaten Serang, 2016-2019 (diolah)*

## 3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2019, maka selanjutnya dapat digambarkan proyesi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2026 mendatang.

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Serang dilakukan berdasarkan analisis trend pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Serang tahun 2021. Disamping juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaannya. Pada tahun 2021 perekonomian diasumsikan masih lesu akibat Covid-19 namun menunjukkan sedikit perbaikan dengan mulai dilonggarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2022, perekonomian diasumsikan sudah mulai mengalami perbaikan daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2026 diasumsikan bahwa perekonomian telah kembali pada kondisi normal.

Tabel berikut menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2026. Pendapatan daerah Kabupaten Serang diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan kembali pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari Pandemi Covid-19. Sepanjang periode tersebut pendapatan daerah diperkirakan tumbuh secara rata-rata sebesar 2,9 persen pertahun, pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Serang diperkirakan mencapai sebesar Rp.2,99 triliun akibat masih adanya dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor ekonomi daerah. Kemudian pada tahun 2023, pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.3,07 triliun dan menjadi sebesar Rp.3,35 trilyun pada tahun 2026.

Selanjutnya dilihat dari kompoisi pendapatan daerah, Pos PAD diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 2,9 persen yang merupakan *agregasi* potensi pertumbuhan masing-masing objek pajak dan retribusi daerah ditengah dampak pandemi Covid-10. Kemudian dana transfer dari pemerintah pusat tumbuh rerata sebesar 2,7 persen dan pendapatan transfer antar daerah tumbuh rerata sebesar 5,0 persen yang dihitung berdasarkan pola teknikal trend dana transfer menggunakan data dana transfer ke Kabupaten Serang periode tahun 2016-2020.

## Tabel 3.14 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, 2021-2026 (Rupiah, juta)

| No | URAIAN | PROYEKSI APBD (Rp) | | | | | | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4** | **PENDAPATAN** | **2.901.230.182.348** | **2,860,312,745,079** | **2.927.324.114.378** | **2.975.208.285.956** | **3.022.468.121.091** | **3.071.963.672.198** | **2%** |
| **4.01.00** | **Pendapatan Asli Daerah** | **792.290.009.917** | **736,752,950,079** | **773.476.335.818** | **790.466.764.165** | **806.214.981.204** | **823.568.681.853** | **2%** |
| 4.01.01 | Hasil Pajak Daerah | 442.635.000.000 | 429,035,000,000 | 451.487.700.000 | 460.517.454.000 | 469.727.803.080 | 479.122.359.142 | 2% |
| 4.01.02 | Hasil Retribusi Daerah | 38.380.148.000 | 34,774,440,000 | 39.147.750.960 | 39.930.705.979 | 40.729.320.099 | 41.543.906.501 | 2% |
| 4.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.076.527.000 | 20,076,527,000 | 21.080.353.350 | 22.134.371.018 | 23.241.089.568 | 24.403.144.047 | 5% |
| 4.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 291.198.334.917 | 252,866,983,079 | 261.760.531.508 | 267.884.233.168 | 272.516.768.457 | 278.499.272.164 | Menyesuaikan |
| **4.02.00** | **Pendapatan Transfer** | **2.063.007.380.483** | **2.110.865.241.000** | **2.141.153.224.560** | **2.172.046.967.791** | **2.203.558.585.887** | **2.235.700.436.345** | **2%** |
| **4.02.01** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **1.827.965.409.000** | **1.825.865.241.000** | **1.856.153.224.560** | **1.887.046.967.791** | **1.918.558.585.887** | **1.950.700.436.345** | **2%** |
| | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 68.720.524.000 | 68.720.524.000 | 70.094.934.480 | 71.496.833.170 | 72.926.769.833 | 74.385.305.230 | **2%** |
| | Dana Alokasi Umum | 1.052.850.904.000 | 1.052.850.904.000 | 1.073.907.922.080 | 1.095.386.080.522 | 1.117.293.802.132 | 1.139.639.678.175 | **2%** |
| | Dana Alokasi Khusus | 392.827.750.000 | 392.827.750.000 | 400.684.305.000 | 408.697.991.100 | 416.871.950.922 | 425.209.389.940 | **2%** |
| | Dana Penyesuaian dan Otsus | 311.466.063.000 | 311.466.063.000 | 311.466.063.000 | 311.466.063.000 | 311.466.063.000 | 311.466.063.000 | **konstan** |
| **4.02.02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **235.041.971.483** | **285.000.000.000** | **285.000.000.000** | **285.000.000.000** | **285.000.000.000** | **285.000.000.000** | **2%** |
| | Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya | 180.041.971.483 | 215.000.000.000 | 215.000.000.000 | 215.000.000.000 | 215.000.000.000 | 215.000.000.000 | **2%** |
| | Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya | 55.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | **konstan** |
| **4.03.00** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **45.932.791.948** | **12.694.554.000** | **12.694.554.000** | **12.694.554.000** | **12.694.554.000** | **12.694.554.000** | **0%** |
| 4.03.01 | Pendapatan Hibah | 45.932.791.948 | 12.694.554.000 | 12.694.554.000 | 12.694.554.000 | 12.694.554.000 | 12.694.554.000 | 0% |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **3.058.285.487.661** | **2.984.026.122.913** | **3.049.281.720.198** | **3.127.235.395.815** | **3.135.084.423.303** | **3.184.737.456.134** | **2,2%** |
| **5.01.00** | **Belanja Operasi** | **2.176.830.414.450** | **2.120.533.406.290** | **2.150.963.681.046** | **2.227.936.085.762** | **2.225.899.127.048** | **2.265.468.453.954** | 2,2% |
| 5.01.01 | Belanja Pegawai | 1.257.177.542.484 | 1.257.177.542.484 | 1.288.606.981.046 | 1.294.936.085.762 | 1.327.555.127.048 | 1.347.468.453.954 | 1,5% |

| No | URAIAN | PROYEKSI APBD (Rp) | | | | | | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 813.355.863.806 | 830.355.863.806 | 829.356.700.000 | 800.000.000.000 | 865.344.000.000 | 885.000.000.000 | menyesuaikan |
| 5.01.05 | Belanja Hibah | 98.257.050.160 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 125.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | menyesuaikan |
| 5.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 8.039.958.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | konstan |
| **5.02.00** | **Belanja Modal** | **427.003.550.611** | **435.543.621.623** | **444.254.494.056** | **444.254.494.056** | **453.139.583.937** | **462.202.375.616** | **2%** |
| **5.03.00** | **Belanja Tidak Terduga** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** | **5.000.000.000** | **konstan** |
| **5.04.00** | **Belanja Transfer** | **449.451.522.600** | **422.949.095.000** | **449.063.545.096** | **450.044.815.998** | **451.045.712.318** | **452.066.626.564** | **1,8%** |
| 5.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 25.643.020.000 | 24.050.757.400 | 49.063.545.096 | 50.044.815.998 | 51.045.712.318 | 52.066.626.564 | menyesuaikan pajak & retribusi daerah |
| 5.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 423.808.502.600 | 398.898.337.600 | 400.000.000.000 | 400.000.000.000 | 400.000.000.000 | 400.000.000.000 | menyesuaikan DD & ADD |
| | | | | | | | | |
| | **Surplus (Defisit)** | **-157.055.305.313** | **-123,713,377,834** | **-121.957.605.820** | **-152.027.109.859** | **-112.616.302.212** | **-112.773.783.936** | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | | |
| **6.01.00** | **Penerimaan Pembiayaan** | **160.055.305.313** | **145,713,377,834** | **124.957.605.820** | **155.027.109.859** | **115.616.302.212** | **115.773.783.936** | |
| 6.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 160.055.305.313 | 145,713,377,834 | 124.957.605.820 | 155.027.109.859 | 115.616.302.212 | 115.773.783.936 | |
| 6.01.02 | Penerimaan Piutang Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **6.02.00** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **3.000.000.000** | **22.000.000.000** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | |
| 6.02.01 | Penyertaan Modal | 3.000.000.000 | 22.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
| 6.02.02 | Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo | | | | | | | |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN** | **157.055.305.313** | **123,713,377,834** | **121.957.605.820** | **152.027.109.859** | **112.616.302.212** | **112.773.783.936** | |

*Sumber: Diolah (2021)*

Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Penademi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 2 persen. Pada tahun 2022, belanja daerah diperkirakan masih sangat terpengaruh oleh dampak Pandemi Covid-19 dan hanya akan mencapai nilai nominal sebesar Rp.3,05 trilyun yang kemudian diperkirakan turun menjadi sebesar Rp.2,98 trilyun pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 belanja daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.3,04 trilyun dan menjadi sebesar Rp. 3,12 trilyun pada tahun 2024 yang mana pada tahun ini akan dilaksanakan PILKADA serempak dan selanjutnya belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.3.13 pada tahun 2025 lalu ditahun 2026 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.3.18. Dilihat dari masing masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 2 persen atau masih berada dibawah kisaran angka pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2 persen pertahun yaitu pada kisaran angka pertumbuhan yang dapat mempertahankan komposisi belanja modal terhadap total belanja daerah yang pada periode 2016-2022 berada pada kisaran angka 14 %.

### 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2021-2026

Perhitungan kerangka pendanaan diperlukan untuk mengukur sejauhmana fleksibelitas Pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam menggunakan pendapatan yang yang dimiliki untuk dialokasi pada berbagai program dan kegiatan pembangunan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam menghitungan ruang fiskal daerah adalah

- **Langkah pertama:** menghitung total penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,

- **Langkah kedua**: menghitung jumlah pengeluaran wajib dan mengikat daerah tahun 2021-2026. Pengeluaran ini terutama terdapat pada sumber pendapatan daerah berupa DAK yang memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat, kemudian dana transfer berupa dana desa yang memang hanya akan numpang lewat aja dalam APBD Kabupaten Serang serta kemudian belanja program non urusan dan gaji yang merupakan syarat minimal bagi berjalannya pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
- **Langkah Ketiga:** Menghitung Kapasitas Riil Keuangan Daerah dengan pengurangan antara total penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat selama periode tahun 2021-2026
- **Langkah Keempat**: Menghitung kebutuhan belanja prioritas I, yaitu belanja pendidikan dan Kesehatan.
- **Langkah Kelima**: menghitung kebutuhan belanja untuk prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah

- **Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp, Juta) | (Rp, Juta) | (Rp, Juta) | (Rp, Juta) | (Rp, Juta) | (Rp, Juta) |
| **PENERIMAAN DAERAH** | **3.061.285.487.661** | **3.006.026.122.913** | **3.052.281.720.198** | **3.130.235.395.815** | **3.138.084.423.303** | **3.187.737.456.134** |
| Pendapatan Daerah | 2.901.230.182.348 | **2,860,312,745,079** | 2.927.324.114.378 | 2.975.208.285.956 | 3.022.468.121.091 | 3.071.963.672.198 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 160.055.305.313 | 145,713,377,834 | 124.957.605.820 | 155.027.109.859 | 115.616.302.212 | 115.773.783.936 |
| | | | | | | |
| **Dikurangi :** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT DAERAH TAHUN 2021-2026** | **1.329.406.272.600** | **1.340.696.845.000** | **1.380.595.850.096** | **1.394.481.807.098** | **1.409.261.663.240** | **1.423.839.016.504** |
| DAK | 392.827.750.000 | 392.827.750.000 | 400.684.305.000 | 408.697.991.100 | 416.871.950.922 | 425.209.389.940 |
| Belanja Transfer | 449.451.522.600 | 422.949.095.000 | 449.063.545.096 | 450.044.815.998 | 451.045.712.318 | 452.066.626.564 |
| Belanja Program Penunjang urusan | 487.127.000.000 | 524.920.000.000 | 530.848.000.000 | 535.739.000.000 | 541.344.000.000 | 546.563.000.000 |
| | | | | | | |
| **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah** | **1.731.879.215.061** | **1.665.329.277.913** | **1.671.685.870.102** | **1.735.753.588.717** | **1.728.822.760.063** | **1.763.898.439.630** |

- *Sumber: Diolah (2021)*

Proyeksi kapasitas riil kemampua keuangan daerah Kabupaten Serang tahun 2021-2026 menunjukkan peningkatan yang konsisten seiring dengan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Pada tahun 2022 kapasitas riil keuangan daerah angka sebesar Rp1,66 trilyun yang kemudian meningkat menjadi Rp.1,67 trilyun pada tahun 2023 dan menjadi sebesar Rp.1,76 trilyun pada tahun 2026. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi peningkatan pendapatan daerah yang lebih cepat daripada peningkatan kebutuhan belanja mengikat dan belanja wajib. Selanjutnya kondisi tersebut akan terus terjaga dengan persyaratan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin OPD agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 nantinya maka dapat menggunakan hitungan ruang fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam dua kelompok prioritas:

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja mandatory mengikat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan nasional di bidang pendidikan dan kesehatan
b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan juga alokasi belanja sektor pendidikan dan kesehatan maka selama periode tahun 2021-2026 maka dapat dikemukakan bahwa jumlah alokasi belanja untuk prioritas I mencapai kisaran 75 s/d 79 persen terhadap total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, sedangkan jumlah alokasi prioritas II yang merupakan program prioritas kepala daerah di luar bidang pendidikan dan kesehatan mencapai kisaran 21 s/d 25 persen dari total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

**Tabel 3.16 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten serang pada bidang Pendidikan dan Kesehatan tahun 2021-2026**

| No | URAIAN | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp.Juta | % | Rp.Juta | % | Rp.Juta | % | Rp.Juta | % | Rp.Juta | % | Rp.Juta | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Prioritas 1** | **1.313.890** | **75,9** | **1.311.527** | **78,8** | **1.325.575** | **79,3** | **1.329.693** | **76,6** | **1.363.621** | **78,9** | **1.378.052** | **78,1** |
| | Belanja Bidang Pendidikan | 813.513 | | 816.525 | | 820.432 | | 823.679 | | 828.173 | | 831.536 | |
| | Belanja Bidang Kesehatan | 500.377 | | 495.002 | | 505.143 | | 506.014 | | 535.448 | | 546.516 | |
| **2** | **Prioritas 2** | **417.989** | **24,1** | **353.802** | **21,2** | **346.111** | **20,7** | **406.061** | **23,4** | **365.202** | **21,1** | **385.846** | **21,9** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah** | 1.731.879 | | 1.665.329 | | 1.671.686 | | 1.735.754 | | 1.728.823 | | 1.763.898 | |

# BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

## 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya *gap* ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan menajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Pada penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serang yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2022-2026, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2022-2026. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan Kabupaten Serang ditelaah berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara itu, perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dimana pemecahan masalah dilakukan melalui strategi pembangunan, sedangkan perumusan akar masalah dilakukan dengan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Berdasarkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Serang dikelompokkan menjadi 7 permasalahan pokok yaitu, (1) tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, (2) taraf kesehatan masyarakat masih rendah, (3) program perlindungan sosial bagi masyarakat belum optimal, (4) ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata, (5) pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat, (6) penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal, dan (7) kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama. Secara rinci, masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan daerah di Kabupaten Serang ditampilkan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang**

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah | Aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas belum merata, kualitas dan tata kelola penyelenggaraan belum optimal | ➢ Ketersediaan sekolah (PAUD, SD, SMP) yang berkualitas baik belum merata di setiap kecamatan.<br>➢ Kesadaran akan pentingnya pendidikan formal masih rendah.<br>➢ Pelaksanaan pendidikan kesetaraan belum menjangkau seluruh kawasan sehingga masih ada penduduk yang melek huruf pada usia lanjut.<br>➢ Kualitas bangunan sekolah yang baik belum menjangkau seluruh kecamatan.<br>➢ Kualifikasi tenaga pendidik yang memadai belum tersebar merata di setiap kecamatan dan cenderung terpusat pada ibukota kabupaten.<br>➢ Pengelolaan manajemen pendidikan dasar yang diiringi dengan ketersediaan data profil pendidikan daerah belum memadai. |
| 2. | Taraf kesehatan masyarakat masih rendah | Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal | ➢ Jumlah fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lanjutan belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk<br>➢ Kondisi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan baik RS |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | Pemerintah maupun Puskesmas belum sesuai standar<br>➢ Belum semua puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar baik jenis, jumlah maupun kompetensinya<br>➢ Indikator SPM belum mencapai target<br>➢ Tata kelola pelayanan kesehatan belum berjalan dengan optimal.<br>➢ Sistim informasi kesehatan belum terintegrasi<br>➢ Belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan |
| | | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan belum optimal | ➢ Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat belum optimal<br>➢ Kesadaran masyarakat untuk konsumsi gizi seimbang belum optimal.<br>➢ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal. |
| | | Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum optimal | ➢ Pelayanan kesehatan reproduksi yang disosialisasikan belum menjangkau seluruh wilayah.<br>➢ Pemahaman pentingnya keluarga berencana dalam keluarga masih belum memadai.<br>➢ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal.<br>➢ Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas.<br>➢ Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. |
| 3. | Program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat belum optimal | Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal | ➢ PMKS yang tertangani belum berjalan optimal<br>➢ Masih kurangnya jumlah Pekerja Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.<br>➢ Masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.<br>➢ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat.<br>➢ Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial di masyarakat.<br>➢ Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Koordinasi lintas bidang dalam penanganan masalah kesejahteraan masih belum optimal.<br>➢ Belum adanya rumah singgah sebagai shelter bagi PMKS yang terlantar (Tambahan)<br>➢ Belum Optimalnya peran dari lembaga lembaga sosial (PSKS), Stake Holder Terkait dan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (Tambahan) |
| | | Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak belum berjalan optimal | ➢ Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan.<br>➢ Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan.<br>➢ Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.<br>➢ Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal.<br>➢ Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak.<br>➢ Belum optimalnya OPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) |
| | | Pelestarian seni budaya daerah belum optimal | ➢ Sarana untuk penrtunjukan seni budaya daerah belum memadai.<br>➢ Penghargaan bagi insan seni budaya daerah masih rendah.<br>➢ Berkurangnya minat generasi muda untuk belajar seni budaya daerah.<br>➢ Pembinaan terhadap pegiat seni budaya belum dilakukan secara berkala.<br>➢ Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan festival seni berbasis kebudayaan lokal.<br>➢ Promosi seni budaya lokal belum efektif.<br>➢ Pemeliharaan pada situs cagar budaya daerah masih terbatas |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 4. | Ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata | Kuantitas dan dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, sumber daya air) belum memadai | ➢ Proses konstruksi atau perbaikan jalan membutukan waktu yang cukup lama.<br>➢ Masih banyak jalan, irigasi, SPAM, pengelolaan air limbah yang bermanfaat besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik.<br>➢ Partisipasi masyarakat (Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A) dalam pengelolaan jaringan Irigasi yang masih kurang optimal<br>➢ Pembangunan jalan yang memadai belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan sehingga mobilitas orang dan barang mengalami hambatan.<br>➢ Rencana pengembangan infrastruktur dasar belum komprehensif<br>➢ Manajemen infrastruktur dasar belum dikelola dengan baik. |
| | | Kualitas pelayanan kesehatan lingkungan permukiman, pengendalian pencematan, dan pengelolaan kebersihan belum optimal. | ➢ Rumah layak huni dan permukiman kumuh belum seluruhnya terdata pada database profil permukiman.<br>➢ Pembangunan rumah yang dilakukan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah belum memperhatikan pedoman yang telah ditentukan. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai.<br>➢ Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik.<br>➢ Fasilitasi penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas.<br>➢ Fasilitasi penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu.<br>➢ Belum tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Serang<br>➢ Masih kurangnya sarana dan Prasarana Pengangkutan sampah untuk peningkatan pelayanan.<br>➢ Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai.<br>➢ Pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum menyeluruh dan penegakan hukumnya cenderung berjalan lambat. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kebakaran belum optimal | ➢ Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.<br>➢ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam, bencana social dan kejadian kebakaran.<br>➢ Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kebakaran<br>➢ Kegiatan penanganan Resiko Banjir yang belum terpadu antar OPD |
| 5. | Pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat | Peranan sektor industri didominasi oleh satu industri besar dan pengembangan industri kecil berbasispotensi daerah masih belum optimal | ➢ Tidak adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah.<br>➢ Lemahanya akses permodalan untuk indutri kecil dan mikro.<br>➢ Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan baku yang tersedia cukup memadai.<br>➢ Kualitas SDM yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.<br>➢ Lemahnya informasi mengenai kluster industri mikro dan kecil di daerah. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Peran Industri di Wilayah Kabupaten Serang Belum Menjawab Pengurangan Angka Pengangguaran |
| | | Sektor perdagangan telah memberikan kotribusi yang signifikan bagi perekonomian, tetapi belum mendorong peningkatan kelas usaha pelaku di bidang perdagangan. | ➢ Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di beberapa kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya.<br>➢ Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah rertribusi tera ulang pedagang.<br>➢ Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen.<br>➢ Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik sehingga informasi ketersediaan barang tidak diketahui.<br>➢ Produk yang dihasilkan belum berorientasi ekspor. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | Sektor pariwisata yang sesungguhnya dapat menjadi akselerator pengembangan sektor-sektor lain kurang berkembang dikarenakan daya saing yang rendah | ➢ Daya tarik objek wisata di Kabupaten Serang perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas.<br>➢ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Serang.<br>➢ Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi.<br>➢ Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serang yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*suistainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*). |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata. |
| | | Ekonomi kerakyatan yang digerakkan melalui koperasi dan UKM perkembangannya cenderung lambat | ➢ Persentase koperasi aktif dan berkembang di Kabupaten Serang masih rendah.<br>➢ Sebagian besar koperasi di Kabupaten Serang masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam.<br>➢ Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas.<br>➢ Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha lain sebagai induk semang dan tingkat produktivitas UKM masih rendah.<br>➢ Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN.<br>➢ Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Serang.<br>➢ Kualitas produk UMKM di Kabupaten Serang belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | teknologi dan inovasi produk.<br>➢ Belum tersedianya regulasi daerah yang mendorong potensi berkembangnya |
| | | Produktivitas sektor perikanan masih rendah | ➢ Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan.<br>➢ Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal).<br>➢ Ketersediaan tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha di lapangan belum memadai. |
| | | Sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Serang, namun dari tingkat produktivitas belum optimal | ➢ Tingginya alih lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan permukiman penduduk.<br>➢ Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern.<br>➢ Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi.<br>➢ Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti irigasi yang dalam keadaan baik.<br>➢ Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan.<br>➢ Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian.<br>➢ Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani.<br>➢ Keterbatasan petani dalam mengkses pupuk bersubsidi.<br>➢ Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang peternakan.<br>➢ Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak, Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung).<br>➢ Munculnya penyakit hewan yang menular dan bersifat emergensi.<br>➢ Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Jumlah dokter hewan sangat terbatas dimana hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat.<br>➢ Kapasitas penyuluh pertanian dan peternakan belum memadai. |
| | | Daya saing investasi daerah rendah | ➢ Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi daya tarik investasi.<br>➢ Promosi investasi yang dilakukan kurang tepat sasaran.<br>➢ Pelaksanaan pemberian kemudahan dan insentif kepada investor mengalami banyak hambatan dan membutuhkan waktu lama.<br>➢ Potensi sektor potensial yang dapat dikembangkan daerah belum teridentifikasi dengan baik.<br>➢ Belum memadainya sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik. |
| | | Daya saing tenaga kerja daerah rendah | ➢ Sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah<br>➢ Produktivitas tenaga kerja daerah masih rendah.<br>➢ Ketersediaan sarana pelatihan kerja yang memadai untuk peningkatan kompetensi masih terbatas. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | Penggunaan dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan administrasi aparatur dan pembangunan infrastruktur desa | ➢ Belum teridentifikasinya potensi unggulan pada setiap desa.<br>➢ Perencanaan pembangunan belum integratif dengan perencanaan pembangunan daerah.<br>➢ Kapasitas perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa masih sebatas menghabiskan anggaran.<br>➢ Lemahnya pembinaan pada perangkat desa dari OPD teknis dan kecamatan<br>➢ Pengawasan penggunaan dana desa masih sebatas pada administrasi keuangan dan belum pada dampak yang ditimbulkan dari belanja. |
| 6. | Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal | Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal | ➢ Publikasi pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal.<br>➢ Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan.<br>➢ Diseminasi produk hukum daerah yang strategis belum terkominikasikan dengan baik ke masyarakat.<br>➢ Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah.<br>➢ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat.<br>➢ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpeng tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal.<br>➢ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah.<br>➢ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah. |
| | | Kualitas perencaanaan pembangunan daerah belum optimal | ➢ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah.<br>➢ Belum dimanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis perbaikan perencanaan pembangunan daerah.<br>➢ Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum baik. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.<br>➢ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.<br>➢ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. |
| | | Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Belum Optimal. | ➢ Belum tersedianya instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.<br>➢ Sistem Pengelola Keuangan Daerah belum sempurna mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.<br>➢ Sistem Pengelola Keuangan Daerah belum terintegrasi dengan SIRUP, ATISIBADA, Pelaporan Pertanggungjawaban dan Kinerja Pemerintah Daerah.<br>➢ Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna penyusun APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Tingkat keperdulian kepala OPD terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih kurang.<br>➢ Pelayanan penatausahaan daerah masih belum optimal.<br>➢ Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan penglolaan pemanfaatan BMD.<br>➢ Sebanyak 1.391 Bidang Tanah milik pemda belum bersertifikat.<br>➢ Implementasi analisis standar belanja dalam penganggaran masih belum optimal.<br>➢ Basis data tentang potensi pajak daerah masih belum akurat;<br>➢ Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pajak daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi<br>➢ Masih kurangnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak daerah;<br>➢ Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kelola perpajakan daerah;<br>➢ Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | pelayanan pajak daerah;<br>➢ Belum adanya pegawai yang menjabat fungsional pemeriksaan, penilai, jurusita, dan PPNS yang melakukan tugasnya secara teknis seihngga Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih belum memadai khususnya petugas yang melakukan pengelolaan pajak daerah; |
| | | Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal | ➢ Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah.<br>➢ Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan masih rendah.<br>➢ Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik.<br>➢ Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.<br>➢ Lemahnya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah. |
| | | Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal | ➢ Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas dan proses pelayanan belum dilakukan secara online.<br>➢ Ketersediaan sarana pelayanan cenderung terpusat di ibukota kabupaten dan belum dibagi berdasarkan kluster kawasan. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. |
| | | Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal | ➢ Kualitas perangkat desa dari kualifikasi pendidikan masih rendah.<br>➢ Perencanaan pembangunan desa belum berdasarkan potensi desa, dan cenderung berdasarkan kemudahan penyerapan anggaran.<br>➢ Pembangunan desa cenderung pada aspek infrastruktur, belum mengoptimalkan peningkatan kapasitas masayarakat desa.<br>➢ Pendampingan pengelolaan keuangan desa belum optimal.<br>➢ Pengawasan belum dilakukan secara optimal. |
| 7 | Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama | Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. | ➢ Masih belum maksimalnya perhatian semua pihak termasuk lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial |

## 4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan urusan ditelaah berdasarkan data target indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan setiap tahun. Gambaran analisis menunjukkan bahwa secara umum, terdapat ketidakkonsistenan antara indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah. Hal tersebut mengakibatkan banyak indikator kinerja yang tidak diketahui capaiannya. Selain itu, beberapa indikator kinerja urusan pada perangkat daerah kurang tepat dan harus dilakukan perbaikan pada perencanaan di periode mendatang. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD dan dokumen rencana strategis perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang harus memberikan asistensi secara intensif kepada perangkat daerah. Jika hal itu terjadi kembali, permasalahan yang sama akan muncul dan mengakibatkan banyak indikator kinerja di RPJMD yang tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja RPJMD yang kemungkinan tidak akan tercapai hingga tahun 2021 merujuk data capaian pada tahun 2019 terdapat pada urusan sebagai berikut:

a. Pendidikan

   Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan pendidikan adalah: indeks pendidikan, harapan lama sekolah, angka partisipasi kasar PAUD, angka partisipasi kasar SD/sederajat, angka partisipasi kasar SLTP/sederajat, angka putus sekolah SLTP/sederajat, proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/sederajat. Secara rinci, permasalahan pada urusan pendidikan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

b. Kesehatan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan kesehatan adalah: angka harapan hidup, angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup), optimalisasi kunjungan rumah sakit, dan tingkat daya tampung RSUD. Selain itu, indikator pada urusan kesehatan di perangkat daerah terkait sangat banyak dan tidak diketahui bagaimana capaian kinerjanya (Tabel 4.2). Secara rinci, permasalahan pada urusan kesehatan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah: persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten) dan persentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (proporsi panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten). Selain itu, indikator pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di perangkat daerah tidak diketahui bagaimana capaian kinerjanya (Tabel 4.2). Secara rinci, permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah: persentase rumah tangga yang terlayani air limbah rumah tangga, cakupan pelayanan air limbah rumah tangga, dan persentase rumah layak huni. Secara rinci, permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

e. Tenaga Kerja

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan tenaga kerja adalah tingkat kesempatan kerja. Secara rinci, permasalahan pada urusan tenaga

kerja dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

f. Lingkungan Hidup

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan lingkungan hidup adalah tingkat pengelolaan RTH. Secara rinci, permasalahan pada urusan lingkungan hidup dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

g. Perhubungan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perhubungan adalah: rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dan tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Secara rinci, permasalahan pada urusan perhubungan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

h. Penanaman Modal

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan penanaman modal adalah: laju pertumbuhan investasi PMDN dan nilai investasi PMDN. Secara rinci, permasalahan pada urusan penanaman modal dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

i. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah tingkat ketersediaan sarana olah raga masyarakat. Secara rinci, permasalahan pada urusan kepemudaan dan olah raga dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

j. Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan kelautan dan perikanan adalah: jumlah produksi perikanan dan nilai produksi perikanan. Secara rinci, permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

k. Pariwisata

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan pariwisata adalah: jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata. Secara rinci, permasalahan pada urusan pariwisata dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

l. Perdagangan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perdagangan adalah tingkat pembangunan resi gudang. Secara rinci, permasalahan pada urusan perdagangan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

m. Perindustrian

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan perindustrian adalah tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru. Secara rinci, permasalahan pada urusan perindustrian dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

n. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan adalah: tingkat ketersediaan lahan siap bangun di kawasan pusat pemerintahan kabupaten dan tingkat pembangunan gedung perkantoran di kawasan pusat pemerintahan kabupaten. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang administrasi pemerintahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

o. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan adalah: pelaksanaan Diklat PIM II, pelaksanaan Diklat PIM III, dan pelaksanaan Diklat PIM IV. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

p. Fungsi Penunjang Keuangan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang keuangan adalah rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang keuangan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

q. Fungsi Penunjang Pengawasan

Capaian indikator yang tidak mencapai target pada urusan fungsi penunjang pengawasan adalah tingkat makuantitas APIP. Secara rinci, permasalahan pada urusan fungsi penunjang pengawasan dan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian pada periode mendatang ditampilkan pada Tabel 4.2.

## Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Serang

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar** | | | | |
| **1.** | **Pendidikan** | | | |
| 1.1 | Indeks pendidikan | < | ➢ Pencapaian indeks pendidikan belum sesuai dengan target yang diharapkan, capaiannya pada tahun 2020 sebesar 59,92%.<br>➢ Masih terdapat gap antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penduduk di Kabupaten Serang memiliki harapan lama sekolah hingga perguruan tinggi, sedangkan sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar hingga kelas 7 SMP.<br>➢ Pelaksanaan pendidikan kesetaraan belum optimal. Masih terdapat penduduk di Kabupaten Serang belum melek huruf pada usia lanjut.<br>➢ Ketersediaan PAUD belum merata pada setiap kecamatan dan masih ada PAUD yang belum terakreditasi sehingga kualitas pembelajarannya belum optimal.<br>➢ Masih ada masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pendidikan formal ditandai dengan | ✓ Pembangunan unit sekolah SD dan SMP pada kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah rasio murid-sekolah rendah.<br>✓ Penambahan ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang telah melebihi kapasitas.<br>✓ Perbaikan/rehabilitasi pada sekolah dengan bangunan yang kurang memadai.<br>✓ Penyediaan alat praktik dan peraga siswa yang memadai.<br>✓ Pengembangan minat, bakat, dan kreativitas siswa.<br>✓ Peningkatan pemahaman tenaga pendidik untuk kelembagaan dan manajemen sekolah.<br>✓ Peningkatan kualitas sekolah SD dan SMP dengan mendorong |
| 1.2 | Rata-rata lama sekolah (RLS) | < | | |
| 1.3 | Harapan Lama Sekolah | < | | |
| 1.4 | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | < | | |
| 1.5 | Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat | > | | |
| 1.6 | Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat | > | | |
| 1.7 | Angka partisipasi kasar (APK) SLTP/Sederajat | > | | |
| 1.8 | Angka partisipasi murni (APM) SLTP/Sederajat | > | | |
| 1.9 | Angka kelulusan (AL) SD/Sederajat | = | | |
| 1.10 | Angka kelulusan (AL) SLTP/Sederajat | > | | |
| 1.11 | Angka putus sekolah (APS) SD/Sederajat | = | | |
| 1.12 | Angka putus sekolah (APS) SLTP/Sederajat | < | | |
| 1.13 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 1.14 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | > | masih ada 0,02% anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.<br>➢ Pemenuhan SPM pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten belum menjadi perhatian.<br>➢ Sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar belum memadai. Proporsi bangunan SD dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 96%, sedangkan bangunan SMP dalam keadaan baik sebesar 82%.<br>➢ Persentase guru yang memiliki sertifikat masih kurang.<br>➢ Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum berjalan optimal.<br>➢ Tenaga pendidik masih banyak berkutat pada urusan administrasi dibandingkan dengan peningkatan kualitas siswa.<br>➢ Manajemen pengelolaan sekolah masih belum maksimal.<br>➢ Pendidikan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas belum berjalan optimal | akreditasi sekolah menjadi A.<br>✓ Pembangunan PAUD di kecamatan yang belum memiliki PAUD yang memadai.<br>✓ Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan proses belajar PAUD.<br>✓ Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan.<br>✓ Pemerataan kuantitas dan peningkatan kualitas pendidik pada satuan pendidikan dasar. |
| 1.15 | Proporsi jumlah SD/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SD/Sederajat | > | | |
| 1.16 | Proporsi jumlah SLTP/Sederajat dalam kondisi baik terhadap total jumlah SLTP/Sederajat | < | | |
| **2.** | **Kesehatan** | | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Indeks kesehatan | > | ➢ Indikator kinerja terlalu banyak, OPD belum memahami perencanaan pembangunan daerah dengan baik.<br>➢ Sebagian besar indikator kinerja tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.<br>➢ Indikator kinerja hanya menjadi tempelan dan tidak diperhatikan pencapaiannya<br>➢ Jumlah angka kematian bayi pada tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan. Kasus kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus per 1.000 kelahiran hidup<br>➢ Jumlah angka kematian ibu pada tahun 2019 tidak mencapai taregt, kasus kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 221 kasus per 100.000 kelahiran hidup<br>➢ Adanya kasus stunting pada balita yang merupakan dampak dari gizi buruk<br>➢ Ketersediaan dan kualitas srana dan prasaranan fasilitas kesehatan belum memadai dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kesehatan<br>➢ Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Serang belum memadai untuk mengakomodasi pelayanan bagi penduduk.<br>➢ Penerapan SPM bidang kesehatan belum optimal. | ✓ Pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kabupaten.<br>✓ Pembangunan puskesmas di kecamatan-kecamatan yang rasio per satuan penduduknya masih rendah.<br>✓ Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas.<br>✓ Perbaikan fasilitas rumah sakit dan puskesmas yang kondisinya masih belum memadai.<br>✓ Penyediaan obat dan vaksin secara merata pada fasilitas kesehatan.<br>✓ Peningkatan tata kelola dan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.<br>✓ Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita.<br>✓ Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan<br>✓ Peningkatan pelayanan promosi kesehatan masyarakat.<br>✓ Peningkatan pelayanan kesehatan pada penyait menular dan tidak menular.<br>✓ Perbaikan data dan informasi kesehatan masyarakat.<br>✓ Perbaikan pada pendataan |
| 2.129 | Persentase rujukan sesuai standar | > | | |
| 2.130 | Cakupan penilaian kinerja puskesmas | = | | |
| 2.131 | Rasio jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik terhadap total jumlah puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada | = | | |
| 2.132 | Optimalisasi kunjungan rumah sakit | < | | |
| 2.133 | Tingkat daya tampung RSUD | < | | |
| 2.134 | Tingkat kualitas sarana prasarana RSUD dengan kondisi baik | = | | |
| 2.135 | Persentase Pasien yang Terlayani Sesuai Standar | | | |
| 2.136 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | |
| 2.137 | Penerimaan Pendapatan Rumah Sakit | | | |
| | | | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | ➢ Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk masih minim<br>➢ Rasio puskesmas masih minim pada beberapa kecamatan<br>➢ Pelayanan fasilitas kesehatan belum maksimal.<br>➢ Belum semua masyarakat yang berhak menerima bantuan pembayaran jaminan kesehatan terdata dengan baik.<br>➢ Pengetahuan masyarakat terhadap sumber makanan yang bergizi, sehat, dan aman masih rendah.<br>➢ Imunisasi dasar pada balita belum menjangkau seluruh masyarakat.<br>➢ Kesadaran masayarakat untuk menerapkan PHBS masih rendah.<br>➢ Ketersediaan tenaga kesehatan masih terpusat pada wilayah kecamatan yang termasuk perkotaaan seperti di ibukota kabupaten.<br>➢ Ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis masih rendah.<br>➢ Dengan adanya kebijakan pusat terkait rujukan berjenjang sehingga pasien tidak bisa langsung berkunjung ke RSDP mempengaruhi tingkat kunjungan pasien.<br>➢ Bed Occupancy Rate (BOR) terlihat bahwa pemanfaatan tempat tidur RS belum terisi optimal | masayarakat miskin yang belum mendapat pelayanan jaminan kesehatan.<br>✓ Kemudahan pemberian izin praktik tenaga kesehatan.<br>✓ Pengembangan mutu kualitas tenaga kesehatan melalui monitoring berkala dan pelaksanaan uji kompetensi.<br>✓ Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan, serta peningkatan peran serta masyarakat pada pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat.<br>✓ Kebijakan pusat terkait rujukan ke RS sangat mempengaruhi keberhasilan optimalisasi kunjungan pasien khususnya pasien BPJS ke RSUD.<br>✓ Trend BOR dapat dioptimalkan dengan peningkatan pelayanan yang prima dan mensosialisasikan melalui media online bahwa pelayanan kesehatan RS sudah sangat Safety.<br>✓ Perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan yang berkesinambungan dan |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | dikarenakan tingkat kunjungan RS dan adanya pamdemi covid-19<br>➢ Usia bangunan RS sudah lama dan perlu ada rehabilitasi secara periodik<br>➢ Masih adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap layanan rs diberikan dengan kenyataan yang dirasakan.<br>➢ Belum semua tergali potensi penerimaan RS baik dari pelayanan maupun penunjang medis dan yang lainnya | berkelanjutan<br>✓ Adanya peningkatan dan evaluasi etika dan mutu layanan RS secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan<br>✓ Selalu menggali potensi pendapatan RS baik dari penerimaan umu maupun lembaga Asuransi sehingga target dapat tercapai |
| **3.** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | |
| 3.1 | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten) | < | ➢ Beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak diketahui capaiannya.<br>➢ Kondisi jalan di Kabupaten Serang yang berkualitas baik belum tercapai pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 15,79%<br>➢ Drainase dalam kondisi baik belum sesuai dengan target RPJMD. Persentase pada tahun 2019 sebesar 74,50%<br>➢ Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal.<br>➢ Pembangunan jalan belum optimal menghubungkan kawasan strategis produksi dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.<br>➢ Masih terdapat jaringan irigasi yang menjadi | ✓ Perbaikan manajemen pengelolaan adminsitrasi proyek sehingga sehingga proses konstruksi dapat berjalan dengan baik dan kualitasnya optimal.<br>✓ Pembangunan jalan sesuai standar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan daerah.<br>✓ Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan pusat produksi di sektor pertanian.<br>✓ Pembangunan dan perluasan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan. |
| 3.2 | Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten | = | | |
| 3.3 | Persentase kondisi jalan mantap (perkerasan beton) | n.a | | |
| 3.4 | Persentase tingkat kondisi jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan kabupaten) | > | | |
| 3.5 | Persentase tingkat kondisi drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Proporsi | < | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang drainase kabupaten) | | kewenangan kabupaten dalam kondisi kurang baik.<br>➢ Partisipasi masyarakat dalam pemelihataan irigasi belum optimal.<br>➢ Pendangkalan beberapa sungai, keterbatasan sumber air baku.<br>➢ Terbatasnya penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga wilayah yang dilayani masih terbatas.<br>➢ Pengelolaan air limbah belum menjadi perhatian dan sarana yang ada belum memadai.<br>➢ Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi implementasi rencana penataan ruang belum optimal.<br>➢ Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengendalian penataan ruang<br>➢ Proses penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang daerah belum berjalan optimal dan koordinasi antar lembaga masih kurang.<br>➢ Ketersediaan dokumen Perda RDTR sesuai dengan amanat Perda RTRW masih belum ada | ✓ Pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah.<br>✓ Pembangunan dan rehabilitasi RTH yang memadai<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW.<br>✓ Penyusunan dokumen turunan dari Perda RTRW.<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.<br>✓ Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang.<br>✓ Pembuatan sistem informasi penataan ruang daerah. |
| 3.6 | Cakupan fungsi pelayanan jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap total areal irigasi | > | | |
| 3.7 | Capaian tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat | > | | |
| 3.8 | Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kab. Serang beserta rencana rinci (peta struktur dan pola ruang melalui peta analog dan peta digital) | n.a | | |
| 3.9 | Tingkat Ketersedian rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan rencana rinci tata ruang lainnya) | = | | |
| 3.10 | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang | n.a | | |
| **4.** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | |
| 4.1 | Persentase Rumah Tangga yang terlayani air bersih / air minum<br>Cakupan penanganan rumah tidak layak huni | > | ➢ Prasarana dasar permukiman bersih, jalan lingkungan, akses air bersih/air minum, SPAL, dan sanitasi belum memadai untuk terwujudnya | ✓ Pendataan status layak huni rumah masyarakat.<br>✓ Penerbitan izin pembangunan dan |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | (RTLH) | | lingkungan permukiman dan perumahan sehat.<br>➢ Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Serang.<br>➢ Pendataan rumah layak huni belum berjalan optimal sehingga target persentase rumah layak huni bagi masyaralat berpenghasilan rendah belum tercapai.<br>➢ Penanganan kawasan kumuh yang belum optimal sehingga masih terdapat permukiman kumuh di wilayah perkotaan.<br>➢ Pemahaman masyarakat akan kondisi rumah yang baik sesuai standar masih rendah.<br>➢ Belum terbangunnya gedung PUSPEMKAB (Pusat Pemerintahan Kabupaten). | pengembangan perumahan sesuai prosedur.<br>✓ Penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.<br>✓ Peningkatan penyadaran publik tentang pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.<br>✓ Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat prioritas.<br>✓ Perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan gedung PUSPEMKAB (Pusat Pemerintahan Kabupaten). |
| 4.2 | Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah rumah tangga | < | | |
| 4.3 | Cakupan pelayanan persampahan (Proporsi volume sampah yang tertangani (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah) | > | | |
| 4.4 | Tersedianya Akses Air Minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan, memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari | > | | |
| 4.5 | Cakupan pelayanan air limbah rumah tangga | < | | |
| 4.6 | Cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) | > | | |
| 4.7 | Persentase Rumah Layak Huni | < | | |
| **5.** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat** | | | |
| 5.1 | Cakupan pembinaan organisasi politik dan | = | ➢ Belum optimalnya pemberdayaan perlindungan | ✓ Peningkatan koordinasi |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | kemasyarakatan | | masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.<br>➢ Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah lebih dioptimalkan dengan keasadaran hukum masyarakat yang masih belum baik<br>➢ Belum tersedianya dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontijensi daerah.<br>➢ Belum optimalnya pelayanan mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.<br>➢ Masih kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku bencana dan anggota damkar.<br>➢ Peningkatan jumlah daerah rawan bencana karena kondisi alam yang menurun dan perubahan iklim.<br>➢ Masih kurang optimalnya pelayanan tanggap darurat bencana dan kebakaran.<br>➢ Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran.<br>➢ Masih kurang optimalnya pelayanan penanganan pasca bencana.<br>➢ Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM personil yang menangani pasca bencana.<br>➢ Peran serta organisasi masyarakat dalam menjaga | penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten.<br>✓ Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.<br>✓ Penyediaan sistem pencegahan dan kesiapsigaan serta penanggulangan bencana.<br>✓ Peningkatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.<br>✓ Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana.<br>✓ Pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.<br>✓ Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan pelatihan.<br>✓ Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. |
| 5.2 | Tingkat penyelesaian konflik SARA | = | | |
| 5.3 | Rasio jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang ditindaklanjuti terhadap total jumlah kasus kantrantibmas dan tindak kriminal yang terjadi | = | | |
| 5.4 | Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | = | | |
| 5.5 | Cakupan pencegahan bencana | = | | |
| 5.6 | Cakupan penanggulangan korban bencana | = | | |
| 5.7 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | = | | |
| 5.8 | Cakupan penanganan daerah rawan bencana | = | | |
| 5.9 | Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana | = | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.<br>➢ Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.<br>➢ Pemberdayaan organisasi politik dan organisasi masyarakat belum optimal. | |
| **6.** | **Sosial** | | | |
| 6.1 | Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatannya | n.a | ➢ Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan<br>➢ Masih banyaknya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang belum memiliki kemampuan berwirausaha<br>➢ Pemberian Alat Bantu, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penangangan Penyandang Cacat (Disabilitas) masih terbatas.<br>➢ Keterbatasan dalam pemberian bantuan social kepada Tunas Sosial dan factor kebutuhan hidup yang tinggi dari pada pendapatan ekonomi Tuna Sosial<br>➢ Belum terkoordinasinya penanganan Lanjut Usia Terlantar antar lembaga di daerah.<br>➢ Belum terkoordinasinya penanganan Anak Terlantar antar lembaga di daerah.<br>➢ Masih Kurangnya kepedulian Keluarga, lingkungan dalam membantu Korban Tindak Kekerasan dan | ✓ Peningkatan Kapasitas Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan<br>✓ Peningkatan Kapasitas Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) melalui pelatihan pelatihan .<br>✓ Pemberian Alat Bantu, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada Penyandang Cacat (Disabilitas) di tingkatkan<br>✓ Pemberian Bimbingan Sosial dan Keagamaan ditingkatkan<br>✓ Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan Lanjut Usia Terlantar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.<br>✓ Perbaikan database fakir miskin kabupaten. |
| 6.2 | Persentase PRSE yang meningkat penghasilan usaha ekonomi | n.a | | |
| 6.3 | Persentase Penyandang Cacat (Disabilitas) yang meningkat penghasilan usaha ekonomi | n.a | | |
| 6.4 | Persentase Tuna Sosial yang mengalami perubahan prilaku (yang tadinya Pekerja Seks Komersial/PSK tidak lagi jadi PSK) | n.a | | |
| 6.5 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan) sesuai standar/layak | n.a | | |
| 6.6 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan) sesuai standar/layak | n.a | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Persentase Korban Tindak Kekerasan dan Traficking yang pulih kondisi psikologisnya | n.a | Traficking dalam pemulihan kondisi psikologisnya<br>➢ Lembaga Sosial (PSKS) masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam membantu dalam penanganan Kesejahteraan Sosial | ✓ Peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan Anak Terlantar.<br>✓ Pemberian Bimbingan Sosial dan Keagamaan.<br>✓ Peningkatan Kapasitas PSKS melalui pelatihan pelatihan<br>✓ Kurang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kesejaheraan Sosial |
| 6.8 | Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS | n.a | | |
| 6.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | n.a | | |
| 6.10 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | n.a | | |
| 6.11 | Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada) | > | | |
| **Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** | | | | |
| **7.** | **Tenaga Kerja** | | | |
| 7.1 | Tingkat kesempatan kerja (TKK) | < | ➢ Target tingkat kesempatan kerja dalam RPJMD belum tercapai. TKK pada tahun 2019 adalah sebesar 40%.<br>➢ Tingkat pengangguran di daerah cukup tinggi, persentase pada tahun 2019 sebesar 10,65%<br>➢ Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar.<br>➢ Ketersediaan lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh angkatan kerja sehingga | ✓ Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan kompetensi.<br>✓ Pembuatan kerjasama dengan investor untuk menggunakan pekerja lokal.<br>✓ Penumbuhan minat wirausaha bagi calon tenaga kerja yang tidak memuhi kompetensi pencari kerja.<br>✓ Penyediaan bursa tenaga kerja |
| 7.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | > | | |
| 7.3 | Kualitas Tenaga Kerja | n.a | | |
| 7.4 | Produktivitas tenaga kerja | n.a | | |
| 7.5 | Perlindungan tenaga kerja | n.a | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | tingkat kesempatan kerja menjadi rendah.<br>➢ Penyediaan informasi lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh daerah.<br>➢ Kompetensi SDM calon tenaga kerja masih belum sesuai kebutuhan pencari kerja.<br>➢ Para calon tenaga kerja yang dibina kurang memiliki minat wirausaha dan bekerja di sektor informal.<br>➢ Penanganan pemasalahan hubungan industrial berlangsung lama.<br>➢ Belum seluruh instansi menggunakan UMK sebagai aspek penting dalam penggajian. | tingkat kabupaten.<br>✓ Pendataan masalah hubungan industrial tingkat kabupaten. |
| **8.** | **Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak** | | | |
| 8.1 | Indeks Pembangunan Gender ( IPG) | > | ➢ Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten masih lemah.<br>➢ Terbatasnya akses perempuan dalam peningkatan kapasitas karena kurangnya pengetahuan.<br>➢ Pemahaman kesetaraan gender belum teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.<br>➢ Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan waktu yang lama sehingga ada keengganan untuk pelaporan kasus kepada dinas terkait. | ✓ Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.<br>✓ Pemberdayaan perempuan pada bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di organisasi kemasyarakatan.<br>✓ Peningkatan pelayanan pencegahan kekerasan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
| 8.2 | Cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak yang tertangani sampai dengan selesai | n.a | | |
| 8.3 | Jumlah fasilitasi kecamatan menuju layak anak | n.a | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | ➢ Pemahaman kesadaran masyarakat atas hak-hak dasar anak masih rendah. | ✓ Peningkatan pendampingan pengembangan keluarga dalm mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. |
| **9.** | **Pangan** | | | |
| 9.1 | Ketersediaan energi | > | ➢ Angka ketergantungan terhadap makanan pokok berbasis beras masih tinggi.<br>➢ Belum adanya neraca kebutuhan pokok untuk mengetahui produksi, kebutuhan dan stok pangan daerah.<br>➢ Peta kerentanan dan ketahanan pangan belum tersedia.<br>➢ Produk pangan segar yang beredar belum diawasi secara optimal.<br>➢ Skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan selama ini berjalan lambat dan fluktuatif.<br>➢ Ketersediaan pangan dari sumber protein hewani masih rendah.<br>➢ Belum terjaganya stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun pada setiap periode.<br>➢ Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan ketersediaan pangan belum optimal. | ✓ Peningkatan kordinasi terkait penyediaan infrastruktur pokok dan pendukung kemandirian pangan.<br>✓ Penyediaan informasi harga pangan serta pemantauan stok pangan.<br>✓ Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.<br>✓ Penyediaan cadangan pangan kabupaten.<br>✓ Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah.<br>✓ Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat.<br>✓ Pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka peningkatan produktivitas lahan. |
| 9.2 | Ketersediaan protein | > | | |
| 9.3 | Skor PPH | > | | |
| **10.** | **Pertanahan** | | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Tingkat penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk infrastuktur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan | n.a | ➢ Penyediaan tanah untuk pelayanan publik banyak mengalami hambatan karena ketidakcocokan proses ganti rugi.<br>➢ Database pemanfataan tanah tingkat kabupaten belum tersedia.<br>➢ Belum semua tanah milik Pemerintah Daerah memiliki sertifikat.<br>➢ Belum semua masyarakat miskin yang memiliki tanah memiliki sertifikat dan terlayani pelayanan sertifikasi tanah gratis dari Pemerintah Pusat | ✓ Peningkatan fasilitasi sengketa tanah di masyarakat.<br>✓ Penyediaan database pemanfaatan tanah di daerah.<br>✓ Fasilitasi pelayanan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin.<br>✓ Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat. |
| 10.2 | Luas tanah yang dibebaskan untuk infrastruktur | n.a | | |
| **11.** | **Lingkungan Hidup** | | | |
| 11.1 | Cakupan pelayanan penanganan sampah (Proporsi volume sampah yang tertangni (rasio jumlah sampah yang tertangani terhadap jumlah produksi sampah | > | ➢ Peningkatan pencemaran lingkungan hidup dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat sehingga penanganannya belum optimal.<br>➢ Belum tersedianya dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.<br>➢ Pelayanan terhadap pengelolaan limbah B3 belum berjalan optimal.<br>➢ Belum adanya apresiasi yang layak bagi penggerak kelestarian lingkungan hidup.<br>➢ Belum adanya ketegasan daerah dalam penegakan terhadap pelanggar hukum lingkungan.<br>➢ Kapasitas TPSA belum memadai dan sarana | ✓ Pengendalian pelaksanaan RPPLH.<br>✓ Pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.<br>✓ Penanggulan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan prioritas.<br>✓ Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau daerah.<br>✓ Penyediaan tempat penyimpanan dan pengolahan limbah berbahaya.<br>✓ Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang izin lingkungannya |
| 11.2 | Indeks kualitas lingkungan hidup | n.a | | |
| 11.3 | Cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | pelayanan persampahan terbatas.<br>➢ Pelayanan persampahan masih berada pada kawasan tertentu dan belum menjangkau seluruh wilayah.<br>➢ Belum optimalnya penerapan 3R di masyarakat.<br>➢ Belum semua kegiatan usaha menerapkan pengelolaan limbah sesuai aturan yang berlaku.<br>➢ Kapasitas penilai AMDAL/UKL/UPL dalam penilaian belum memadai.<br>➢ Abrasi di wilayah pantai cukup tinggi.<br>➢ Tingkat pengelolaan RTH belum mencapai target yang ditetapkan, persentase RTH yang dikelola dengan baik sebesar 90% pada tahun 2019. | diterbitkan kabupaten.<br>✓ Pemberiaan apresiasi kepada pegiat pemerhati lingkungan hidup.<br>✓ Perluasan pelayanan persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana persampahan.<br>✓ Peningkatan sosialisasi 3R di masyarakat.<br>✓ Peningkatan kapasitas penilai AMDAL/UKL/UPL. |
| **12.** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | |
| 12.1 | Cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil | = | ➢ Data kependudukan cenderung statis dan update data berjalan kurang optimal.<br>➢ Pelayanan administrasi kependudukan lainnya belum optimal.<br>➢ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.<br>➢ Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil membutuhkan waktu sehingga | ✓ Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk menuju pelayanan prima.<br>✓ Peningkatan pelayanan pencatatan sipil menuju pelayanan prima.<br>✓ Penataan administrasi kependudukan untuk kepentingan pembangunan daerah.<br>✓ Penyusunan profil kependudukan |
| 12.2 | Cakupan pelayanan pendataan penduduk | < | | |
| 12.3 | Tingkat ketersediaan data mobilitas penduduk | = | | |
| 12.4 | Data administrasi kependudukan | = | | |
| 12.5 | Tingkat pencatatan kelahiran dan kematian | = | | |
| 12.6 | Tingkat penerbitan akta perkawinan, | = | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | perceraian, dan pengelolaan dokumen | | masyarakat terkadang enggan untuk mengurus.<br>➢ Masih Kurang nya Sumberdaya Manusia dalam pelayanan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil.<br>➢ Terganggunya jaringan administrasi kependudukan. | dan proyeksi penduduk daerah.<br>✓ Peningkatan jumlah operator pelayanan dan penambahan alat bantu yang memdai.<br>✓ Publikasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala setiap bulan. |
| 12.7 | Jumlah kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan dan perangkat desa | = | | |
| 12.8 | Jumlah perubahan KK dan KTP | > | | |
| 12.9 | Tingkat ketersediaan data pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak. | = | | |
| 12.10 | Jumlah operator | < | | |
| **13.** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | |
| 13.1 | Cakupan pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa | = | ➢ Data pencapaian kinerja banyak yang tidak diketahui.<br>➢ Dokumen perencanaan kurang baik dan tidak sesuai standar penyusunan.<br>➢ Pemanfaatan dana desa sebagian besar digunakan untuk infrastruktur desa dan belum menjangkau optimalisasi potensi sumber daya desa eksisting.<br>➢ Masih terdapat Desa tertinggal<br>➢ Kapasitas dan kualitas kelembagaan dan SDM perangkat desa tidak memadai,<br>➢ Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa belum berjalan baik.<br>➢ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa | ✓ Perbaikan dokumen perencanaan yang sesuai dengan standar penyusunan.<br>✓ Pencatatan kinerja perangkat daerah setiap periode waktu dan diketahui faktor penentu keberhasilan untuk masing-masing indikator.<br>✓ Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi pelayanan desa.<br>✓ Fasilitasi kerjasama antar desa<br>✓ Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.<br>✓ Fasilitasi pengelolaan keuangan desa. |
| 13.2 | Cakupan pembinaan pemerintahan desa | = | | |
| 13.3 | Jumlah karang taruna yang dibina | < | | |
| 13.4 | Jumlah posyandu yang dibina | < | | |
| 13.5 | Jumlah LPM yang dibina | < | | |
| 13.6 | Jumlah RT/RW yang dibina | < | | |
| 13.7 | Tersusunnya dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes | = | | |
| 13.8 | Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan berdasarkan potensi desa | < | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 13.9 | Tingkat masyarakat tentang tata cara pengelolaan BUMDes bersam | = | masih rendah.<br>➢ Potensi desa belum dipetakan dengan baik.<br>➢ Belum terbentuknya LINMAS di Desa | ✓ Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan badan usaha milik desa berbasis potensi unggulan desa.<br>✓ Fasilitasi penyusunan profil desa dan perkembangan desa setiap tahun.<br>✓ Fasilitasi pembentukan BUMDes yang mandiri berdasarkan potensi desa. |
| 13.10 | Tingkat kemampuan masyarakat di kawasan wisata dalam menggunakan bahasa asing | < | | |
| 13.11 | Jumlah ketersediaan sarana prasarana dan sosial desa sesuai standar pelayanan yang terbangun | < | | |
| 13.12 | Jumlah BUMDes yang terbentuk | < | | |
| 13.13 | Jumlah UPK yang matang | < | | |
| **14.** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | |
| 14.1 | Persentase jumlah peserta KB terhadap pasangan usia subur (Prevalensi peserta KB aktif) | > | ➢ Kurangnya keselarasan dan keterpaduan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten tentang pengendalian kuantitas penduduk.<br>➢ Pemahaman pentingnya keluarga berencana dalam keluarga masih belum memadai.<br>➢ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai dimana belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluh KB.<br>➢ Jumlah tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang memiliki kompetensi belum optimal.<br>➢ Sarana penunjang pelayanan KB belum memadai dimana belum semua kecamatan memiliki kantor | ✓ Advokasi pemanfatan kajian dampak kependudukan beserta modal model solusi sebagai peringatan dini dampakan kependudukan kepada pemangku kepentingan.<br>✓ Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk kabupaten.<br>✓ Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di semua kecamatan dan penyediaan obat dan alat kontrasepsi.<br>✓ Promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak |
| 14.2 | Penurunan perempuan yang menikah usia kurang dari 21 tahun | > | | |
| 14.3 | Jumlah sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB MKJP | > | | |
| 14.4 | Persentase poktan tribina, UPPKS dan PPKS yang aktif ber-KB | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | KB.<br>➢ Jumlah dan kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum optimal.<br>➢ Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.<br>➢ Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi masing kurang.<br>➢ Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi masih kurang | reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan.<br>✓ Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dna kesehatan reproduksi.<br>✓ Peningkatan kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.<br>✓ Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.<br>✓ Peningkatan kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga , Kependudukan dan keluarga Berencana ( Bangga Kencana ) |
| **15.** | **Perhubungan** | | | |
| 15.1 | Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat | < | ➢ Perencanaan indikator kinerja dalam rencana strategis perangkat daerah belum baik.<br>➢ Semua indikator kinerja tidak tercapai.<br>➢ Pemasangan rambu lalu lintas belum menjangkau seluruh kawasan prioritas yang wajib dipasangkan.<br>➢ Rendahnya disiplin pengemudi dan pengguna | ✓ Perbaikan dokumen perencanaan daerah dalam periode ke depan.<br>✓ Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang menjadi prioritas.<br>✓ Rehabilitasi dan pemeliharaan |
| 15.2 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten | < | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 15.3 | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | < | jalan.<br>➢ Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai.<br>➢ Berpindahnya pola mobilitas masyarakat dari kendaraan umum ke kendaraan pribadi yang mengakibatkan beberapa trayek angkutan tidak beroperasi.<br>➢ Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal.<br>➢ Perparkiran sebagai sumber PAD belum dikelola dengan optimal.<br>➢ Manajemen rekayasa lalu lintas kurang tertata. | prasarana jalan.<br>✓ Penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan.<br>✓ Pembinaan dan bimbingan keselamatan lalu lintas.<br>✓ Peningkatan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor.<br>✓ Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.<br>✓ Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan sistem manajemen keselamatan angkutan umum.<br>✓ Penyediaan trayek angkutan umum antar daerah yang belum layak secara komersial.<br>✓ Perbaikan pengelolaan perparkiran daerah yang menjadi sumber PAD.<br>✓ Perbaikan manajemen pengelolaann lalu lintas melalui kerjasama dengan pihak terkait. |
| 15.4 | Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran | < | | |
| **16.** | **Komunikasi dan Informatika** | | | |
| 16.1 | Terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah | = | ➢ Pemanfaatan sistem jaringan yang dimiliki perangkat daerah belum digunakan secara | ✓ Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 16.2 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan | = | optimal.<br>➢ Pengelolaan dan sinkronisasi informasi dan komunikasi pemerintah daerah belum berjalan dengan baik.<br>➢ Pengelolaan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah belum berjalan dengan baik.<br>➢ Belum terwujudnya Kabupaten Serang Smart City.<br>➢ Masih kurangnya sarana dan prasarana.<br>➢ Kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi publik belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<br>➢ Perencanaan indikator kinerja dalam rencana strategis perangkat daerah belum baik. | Daerah.<br>✓ Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi publik pemerintah daerah.<br>✓ Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik.<br>✓ Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas.<br>✓ Peningkatan integritas dan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.<br>✓ Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan.<br>✓ Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. |
| 16.3 | Ratio ketersediaan hotspot internet di tingkat kecamatan | > | | |
| 16.4 | Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik | n.a | | |
| 16.5 | Persentase Penyebaran Informasi | n.a | | |
| 16.6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi | n.a | | |
| 16.7 | Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi | n.a | | |
| 16.8 | Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi | n.a | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **17.** | **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | |
| 17.1 | Rasio Koperasi Aktif (Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada) | > | ➢ Keterbatasan sarana dan prasarana produksi UMKM.<br>➢ Daya saing produk UMKM belum memadai untuk meningkatkan daya saing produk daerah.<br>➢ Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi belum optimal.<br>➢ Sumber daya manusia pengelola koperasi belum memiliki kapasitas yang memadai terkait pengelolaan koperasi yang baik.<br>➢ Minat masyarakat untuk bergabung ke dalam koperasi rendah karena tidak transparannya pengelolaan koperasi.<br>➢ Usaha kecil menengah masih banyak yang berjalan di tempat dan belum menunjukkan pengembangan usaha yang signifikan.<br>➢ Keterbatasan akses permodalan ke lembaga perbankan dan pemasaran produk ke luar daerah.<br>➢ Banyak UKM belum memiliki kapasitas yang memadai terkait pengelolaan keuangan. | ✓ Pemeriksaan dan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi di daerah.<br>✓ Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi.<br>✓ Pendataan dan potensi pengembangan usaha mikro.<br>✓ Fasilitas kemudahan perizinan dan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.<br>✓ Fasilitasi pengembangan usaha melalui peningkatan kualitas produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi. |
| 17.2 | Rasio usaha mikro dan kecil (Rasio jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah usaha kecil dan menengah) | > | | |
| **18.** | **Penanaman Modal** | | | |
| 18.1 | Laju Pertumbuhan investasi PMA | > | ➢ Indikator terkait pelayanan terpadu satu lintu belum diperhatikan pencapaiannya.<br>➢ Laju pertumbuhan investasi yang berasal dari dalam negeri belum sesuai dengan target yang | ✓ Pembuatan peta potensi investasi daerah.<br>✓ Penambahan SDM yang mumpuni dalam fasilitasi pelayanan |
| 18.2 | Laju Pertumbuhan Investasi PMDN | < | | |
| 18.3 | Nilai Investasi PMA | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 18.4 | Nilai Investasi PMDN | < | ditetapkan.<br>➢ Investor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi.<br>➢ Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanan secara online masih mengalami kendala.<br>➢ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal.<br>➢ Pemberian kemudahan dan insentif yang diberikan belum menarik minat investor untuk menanamkan modal.<br>➢ Potensi unggulan daerah belum teridentifikasi dengan baik.<br>➢ Pelayanan perizinan belum baik sesuai standar pelayanan.<br>➢ Peralatan yang digunakan untuk pelayanan perizinan kurang memadai dan SDM yang ada masih terbatas. | perizinan.<br>✓ Penyusunan strategi promosi penanaman modal.<br>✓ Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem elektronik.<br>✓ Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian kemudahan dan insentif daerah. |
| 18.5 | Persentase ijin yang dilaksanakan sesuai peruntukannya | n.a | | |
| 18.6 | Persentase ijin yang diselesaikan tepat waktu | n.a | | |
| 18.7 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | n.a | | |
| 18.8 | Rata-rata waktu penyelesaian Perizinan (Berkas Lengkap) | n.a | | |
| **19.** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | |
| 19.1 | Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan | > | ➢ Target tingkat ketersediaan sarana olahraga masyarakat dalam RPJMD belum tercapai. Target pada tahun 2019 dalam RPJMD adalah sebesar 10%, sedangkan yang tercapai sebesar 4%. | ✓ Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor. |
| 19.2 | Tingkat pembinaan kepemudaan | n.a | | |
| 19.3 | Cakupan atlit yang berprestasi | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 19.4 | Tingkat Ketersediaan Sarana Olahraga Masyarakat | < | ➢ Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang kreatif dan produktif belum berjalan optimal.<br>➢ Kompetisi olahraga di tingkat kabupaten secara berkala berlum terselenggara dengan baik.<br>➢ Sistem embinaan cabang olahraga prestasi daerah belum berjalan optimal.<br>➢ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan olahraga prestasi belum memadai. | ✓ Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, serta pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi tingkat kabupaten.<br>✓ Penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berkala tingkat kabupaten.<br>✓ Peningkatan pengembangan olahraga prestasi dan organiasi olahraga.<br>✓ Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional di kabupaten. |
| 19.5 | Tingkat pengembangan olahraga | n.a | | |
| **20.** | **Statistik** | | | |
| 20.1 | Buku Kabupaten Dalam Angka | = | ➢ Data statistik yang ada masih belum menjadi satu data terpadu pemerintah daerah.<br>➢ Tidak tersedianya metadata statistik daerah.<br>➢ Kualitas SDM pengelola bidang statistik masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<br>➢ Ketersediaan dan kualitas data statistik yang lengkap dan terkini sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah belum | ✓ Penyediaan statistik satu data kabupaten yang aman dan handal..<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.<br>✓ Peningkatan kapasitas SDM dalam peningktan kualitas statistik daerah yang terintegrasi. |
| 20.2 | Buku PDRB Kabupaten | = | | |
| 20.3 | Buku IPM Kabupaten | = | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | memadai.<br>➢ Perangkat daerah yang memiliki kewenangan urusan statistik belum menjalankan pelaksanaan urusan karena tumpeng tindihnya kewenangan.<br>➢ Masih kurangnya sarana dan prasarana. | |
| **21.** | **Persandian** | | | |
| 21.1 | Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi | n.a | ➢ Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah belum optimal.<br>➢ Urusan persandian dianggap belum terlalu penting dalam komunikasi internal pemerintah daerah.<br>➢ Pemanfataan implementasi persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang.<br>➢ Masih kurangnya sarana dan prasarana. | ✓ Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah.<br>✓ Penyediaan SDM di bidang persandian.<br>✓ Implementasi persandian dalam penyebaran informasi penting penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| 21.2 | Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi | n.a | | |
| **22.** | **Kebudayaan** | | | |
| | Rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya | = | ➢ Sarana prasarana pertunjukan seni budaya daerah kondisinya belum memadai.<br>➢ Penyediaan alat kesenin untuk setiap seni dan budaya yang dibina belum memadai<br>➢ Pelaku pelestarian seni budaya daerah semakin lama semakin berkurang karena minat generasi muda yang rendah. | ✓ Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pertunjukan seni budaya daerah.<br>✓ Pembinaan generasi muda untuk mencintai dan melestarikan seni budaya daerah.<br>✓ Pemberian apresiasi kepada pegiat |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | ➢ Apresiasi kepada penggiat seni budaya daerah belum optimal.<br>➢ Kondisi cagar budaya daerah dalam kondisi yang belum memadai sehingga kurang menarik minat masyarakat. | seni budaya daerah.<br>✓ Peningkatan kerjasama dengan lembaga adat dalam pelestarian seni budaya daerah.<br>✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah daerah.<br>✓ Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan cagar budaya daerah. |
| **23.** | **Perpustakaan** | | | |
| 23.1 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) | > | ➢ Minat literasi masyarakat untuk membaca masih kurang.<br>➢ Koleksi yang ada di perpustakaan daerah cenderung stagnan sehingga masyarakat enggan berkunjung ke perpustakaan.<br>➢ Sarana prasarana perpustakaan daerah kurang memadai dengan layanan masih bersifat manual dan belum menggunakan teknologi informasi.<br>➢ Tenaga pustakawan di daerah semakin berkurang.<br>➢ Pengembangan minat budaya baca masyarakat belum berjalan secara optimal. | ✓ Pembudayaan gemar membaca untuk masyarakat.<br>✓ Penyediaan layanan perpustakaan keliling yang menjangkau seluruh wilayah.<br>✓ Peningkatan koleksi dan bahan pustaka di perpustakaan.<br>✓ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dengan teknologi informasi dan penyediaan wifi gratis di area perpustakaan.<br>✓ Penyediaan tenaga pustakawan di perpustakaan daerah. |
| 23.2 | Rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **24.** | **Kearsipan** | | | |
| 24.1 | Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada | > | ➢ Pengelolaan arsip pada masing-masing OPD belum mengikuti standar kearsipan.<br>➢ Pengelolaan arsip daerah belum terpadu pada dinas teknis.<br>➢ Sarana dan prasarana penyimpanan arsip daerah masih belum memadai.<br>➢ Database kearsipan daerah belum memadai.<br>➢ Pengumpulan data arsip masih menggunakan sistem secara manual<br>➢ Kualitas dan kuantitas tenaga teknis kearsipan belum memadai. | ✓ Pengelolaan arsip daerah baik statis maupun dinamis secara elektronik.<br>✓ Peningkatan sarana dan prasarana gudang arsip daerah.<br>✓ Penerapan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan pada masing-masing OPD.<br>✓ Penambahan tenaga arsiparis yang mengerti pengelolaan arsip sesuai standar |
| **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | |
| **1.** | **Kelautan dan Perikanan** | | | |
| 1.1 | Tingkat Konsumsi Ikan | > | ➢ Produksi ikan yang berasal dari perikanan tangkap laut cenderung stagnan. Pertumbuhan produksi cenderung melambat.<br>➢ Armada perikanan tangkap yang digunakan sebagai masih skala kecil sehingga produktivitasnya rendah.<br>➢ Produksi ikan yang berasal dari perikanan budidaya cenderung stagnan. Pertumbuhan produksi cenderung melambat. | ✓ Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap secara kelompok.<br>✓ Fasilitasi pembentukan dan pengembagan kelembagaan nelayan kecil.<br>✓ Fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha. |
| 1.2 | Jumlah Produksi Perikanan | < | | |
| 1.3 | Nilai Produksi Perikanan | < | | |
| 1.4 | Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | ➢ Cara budidaya yang digunakan masih skala tradisional dan belum menggunakan teknologi budidaya intensif.<br>➢ Belum optimalnya pengembangan koordinasi antar satuan kerja dalam menuntaskan program unggulan minapolitan.<br>➢ Program minapolitan tidak berjalan optimal.<br>➢ Rendahnya kesejahteraan pembudidaya dan nelayan.<br>➢ Rendahnya posisi tawar pembudidaya dan nelayan dalam memasarkan hasil perikanan sebagai akibat rendahnya kualitas produk perikanan dan lemahnya permodalan serta adanya ketergantungan terhadap pihak lain.<br>➢ Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan perikanan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan ekonomi masyarakat.<br>➢ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber daya kelautan perikanan yang akan menghambat pulihnya sumber daya kelautan dan perikanan.<br>➢ Terjadinya degradasi kualitas perairan sebagai akibat kegiatan aktivitas di darat baik rumah tangga maupun industri yang menyebabkan terganggunya ekosistem kelautan dan perikanan. | ✓ Introduksi teknologi budidaya secara intensif.<br>✓ Fasilitasi pembentukan dan pengembagan kelembagaan pembudidaya.<br>✓ Penyediaan benih ikan yang berkualitas baik.<br>✓ Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi pelaku usaha perikanan.<br>✓ Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan.<br>✓ Fasilitasi pemasaran pelaku usaha perikanan. |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Pariwisata** | | | |
| 2.1 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | > | ➢ Pengembangan kawasan strategis pariwsata belum berjalan optimal.<br>➢ Ketersediaan sumber daya dan fasilitas pariwisata serta infrastruktur pendukung pada kawasan strategis pariwisata belum memadai.<br>➢ Daya tarik objek wisata belum digali secara optimal.<br>➢ Pengelolaan objek wisata eksisting belum dilakukan secara professional.<br>➢ Pengembangan pariwisata belum optimal memanfaatkan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM pariwisata lokal belum memadai.<br>➢ Kesadaran masyarakat dalam mendukung Sapta Pesona Pariwisata masih rendah.<br>➢ Promosi pariwisata yang dilakukan belum tepat sasaran. | ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pada objek wisata eksisting yang dikelola pemerintah daerah.<br>✓ Penggalian potensi objek wisata pada kawasan-kawasan yang memiliki keunikan daya tarik.<br>✓ Monitoring evaluasi pengelolaan kawasan wisata yang dikelola pemerintah daerah.<br>✓ Promosi objek wisata yang kreatif melalui media internet (website pemerintah daerah, media sosial, dll).<br>✓ Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.<br>✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. |
| 2.2 | Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | > | | |
| 2.3 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | < | | |
| 2.4 | Laju pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara | > | | |
| 2.5 | Tingkat pengembangan kawasan strategis pariwisata | < | | |
| 2.6 | Tingkat pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata | n.a | | |
| 2.7 | Tingkat promosi pemasaran potensi wisata | n.a | | |
| 2.8 | Cakupan kemitraan pelaku usaha pariwisata | n.a | | |
| **3.** | **Pertanian** | | | |
| 3.1 | Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB | > | ➢ Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung, serta kualitas produk unggulan pertanian, perkebunan, dan peternakan belum memadai.<br>➢ Produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya | ✓ Peningkatan pendampingan penggunaan introduksi teknologi pertanian yang maju.<br>✓ Fasilitasi penyediaan benih dan |
| 3.2 | Tingkat pembangunan kawasan pertanian | > | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Tingkat pembangunan kawasan perkebunan | > | saing produk pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rendah.<br>➢ Tingkat kesejahteraan petani rendah karena usaha belum memenuhi skala ekonomi.<br>➢ Penyuluhan belum berjalan optimal karena persebarannya belum merata di setiap kecamatan.<br>➢ Introduksi teknologi produksi pertanian yang modern belum tersebar merata pada pelaku usaha di bidang pertanian.<br>➢ Pelaku usaha pertanian didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat.<br>➢ Sebagian besar tanaman perkebunan dalam kondisi tanaman tua sehingga produk yang dihasilkan tidak optimal.<br>➢ Perubahan iklim membuat pola tanam petani mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi.<br>➢ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik.<br>➢ Keterbatasan dalam pengelolaan usaha sehingga usaha cenderung stagnan.<br>➢ Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan tengkulak (*middlemen*). | bibit unggul bagi petani.<br>✓ Pembangunan prasarana pertanian.<br>✓ Rehabilitasi pemeliharaan sarana prasarana pendukung akselerasi produk pertanian.<br>✓ Pengawasan peredaran hewan dan produk asal hewan.<br>✓ Penanggulangan hama dan wabah yang mengganggu tanaman pertanian maupun hewan.<br>✓ Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.<br>✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan petani.<br>✓ Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha bagi petani.<br>✓ Pembentukan badan usaha milik petani yang menyalurkan produk pertanian secara langsung kepada konsumen.<br>✓ Fasilitasi pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan daerah. |
| 3.4 | Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB | > | | |
| 3.5 | Tingkat pembangunan kawasan peternakan | < | | |
| 3.6 | Produksi padi | n.a | | |
| 3.7 | Produksi jagung | n.a | | |
| 3.8 | Produksi kedelai | n.a | | |
| 3.9 | Produksi cabe merah | n.a | | |
| 3.10 | Produksi bawang merah | n.a | | |
| 3.11 | Produksi durian | n.a | | |
| 3.12 | Produksi sedap malam | n.a | | |
| 3.13 | Produksi kelapa | n.a | | |
| 3.14 | Produksi kakao | n.a | | |
| 3.15 | Produksi cengkeh | n.a | | |
| 3.16 | Produksi lada | n.a | | |
| 3.17 | Produksi daging itik | n.a | | |
| 3.18 | Produksi daging kerbau | n.a | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Kehutanan** | | | |
| **5.** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | |
| **6.** | **Perdagangan** | | | |
| 6.1 | Indeks Daya Beli | > | ➢ Sebagian besar pasar rakyat dalam kondisi kurang baik.<br>➢ Upaya pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional belum memadai.<br>➢ Persentase alat yang tertera belum diketahui sehingga dapat merugikan konsumen.<br>➢ Keberadaan pasar rakyat terancam dengan kehadiran pasar modern.<br>➢ Sistem perdagangan daerah belum berjalan efektif dan efisien. | ✓ Rehailitasi sarana dan prasarana pasar rakyat sehingga menarik pengunjung.<br>✓ Pembinaan kepada pedagang pasar untuk memerhatikan aspek kebersihan.<br>✓ Koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.<br>✓ Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang.<br>✓ Pengawasan dan penyuluhan metrologi legal. |
| 6.2 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | > | | |
| 6.3 | Rasio jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) | > | | |
| 6.4 | Jumlah Pasar Rakyat (Tradisional Milik Pemda) yang dibangun | > | | |
| 6.5 | Tingkat pembangunan resi gudang | < | | |
| **7.** | **Perindustrian** | | | |
| 7.1 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB | > | ➢ Kualitas SDM pelaku industri kecil belum memadai.<br>➢ Manajemen pengelolaan usaha belum berjalan | ✓ Pengembangan industri kecil berbasis potensi masing-masing |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru | < | efektif dan efisien.<br>➢ Akses permodalan pelaku industri kecil belum memadai.<br>➢ Penerapan teknologi pengolahan yang terkini belum sepenuhnya dijalankan sehingga kualitas produk belum baik.<br>➢ Sentra kawasan industri kecil belum direncanakan dengan baik sehingga belum tertata.<br>➢ Belum terintegrasinya pengembangan industri berbasis potensi sumber daya lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.<br>➢ Kualitas produk yang dihasilkan industri kecil belum mampu menembus pasar luar daerah.<br>➢ Terbatasnya akses pemasaran produk industri kecil. | kawasan.<br>✓ Fasilitasi peningkatan mutu produk industri kecil daerah.<br>✓ Fasilitasi pemasaran produk industri kecil daerah.<br>✓ Penyediaan informasi yang mencakup data industri daerah berbasis sektoral.<br>✓ Fasilitasi pembinaan pengelolaan usaha pelaku industri kecil. |
| 7.3 | Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama | > | | |
| **8.** | **Transmigrasi** | | | |
| 8.1 | Terlaksananya monitoring, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan motivasi kepada warga transmigran | n.a | ➢ Minat pelaksanaan transmigrasi mengalami penurunan.<br>➢ Perpindahan penduduk cenderung berlangsung berdasarkan inisiatif pribadi untuk perbaikan standar hidup.<br>➢ Promosi pelaksanaan transmigrasi mengalami kemunduran.<br>➢ Fasilitasi dan pembinaan kepada calon trasmigran belum optimal. | ✓ Peningkatan promosi program transmigrasi bagi masyarakat.<br>✓ Peningkatan kecepatan pelaksanaan program transmigrasi.<br>✓ Pemberian insentif bagi masyarakat yang melakukan program transmigrasi. |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang** | | | | |
| **1.** | **Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan** | | | |
| 1.1 | Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | = | ➢ Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah masih belum optimal.<br>➢ Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan).<br>➢ Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah.<br>➢ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat.<br>➢ Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpeng tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal.<br>➢ Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.<br>➢ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah.<br>➢ Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan | ✓ Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah secara elektronik.<br>✓ Evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis daerah untuk perbaikan pelaksanaan ke depan.<br>✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan strategis daerah.<br>✓ Peningkatan diseminasi produk hukum daerah strategis kepada masayarakat.<br>✓ Evaluasi penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat.<br>✓ Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.<br>➢ Peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengaadaan barang dan jasa dapat dilakukan |
| 1.2 | Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | = | | |
| 1.3 | Tingkat penataan kelembagaan pemerintahan daerah | > | | |
| 1.4 | Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah | > | | |
| 1.5 | LKPj | = | | |
| 1.6 | LKPj AMJ | = | | |
| 1.7 | LPPD | = | | |
| 1.8 | LAKIP | = | | |
| 1.9 | Nilai kinerja pemerintah daerah | > | | |
| 1.10 | Tingkat ketersediaan dokumen rencana kawasan pusat pemerintahan kabupaten | = | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Tingkat ketersediaan lahan siap bangun di kawasan pusat pemerintahan kabupaten | < | LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi.<br>➢ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi.<br>➢ Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *civil society.*<br>➢ Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.<br>➢ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah.<br>➢ Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah.<br>➢ Pembentukan peraturan daerah terkendala dengan terbatasnya kapasitas aparatur.<br>Penyusunan program kerja DPRD membutuhkan waktu yang lama karena pandangan yang berbeda dari anggota dewan.<br>➢ Penyerapan dan penghimpunan aspirasi | secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.<br>✓ Penyediaan data informasi untuk mendukung penetapan kebijakan strategis daerah.<br>✓ Penataan organisasi kelembagaan agar tepat fungsi dan tidak tumpeng tindih.<br>✓ Penyediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.<br>✓ Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung fungsi DPRD.<br>✓ Penyediaan tim ahli dalam mendukung tugas DPRD.<br>✓ Penyediaan sistem penyerapan aspirasi masyarakat dan diseminasi kinerja DPRD berbasis elektronik.<br>✓ Fasilitasi kerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi.<br>✓ Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.<br>✓ Percepatan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. |
| 1.12 | Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pendukung kawasan pusat pemerintahan kabupaten | > | | |
| 1.13 | Tingkat Pembangunan Gedung Perkantoran di kawasan pusat pemerintahan kabupaten | < | | |
| 1.14 | Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan) | = | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | masyarakat masih tradisional dan belum menjadi sebuah sistem.<br>➢ Informasi penyampaian kinerja DPRD belum optimal.<br>➢ Pendelegasian kewenangan ke kecamatan berjalan lambat.<br>➢ Fungsi kecamatan dalam pelayanan publik belum optimal karena sarana dan prasarana yang belum memadai.<br>➢ Fungsi kecamatan dalam pembinaan desa terkendala dengan keterbatasan kapasitas aparatur.<br>➢ Belum terealisasinya rencana pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab) . | ✓ Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.<br>✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di kecamatan dan kelurahan.<br>✓ Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.<br>✓ Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa.<br>✓ Fasilitasi sinkroniasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.<br>✓ Percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan kabupaten untuk kemudahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan |
| **2.** | **Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan** | | | |
| 2.1 | Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD | > | ➢ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah.<br>➢ Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD. | ✓ Identifikasi permasalahan pembangunan daerah.<br>✓ Pengitegrasian data untuk perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.<br>✓ Tindak lanjut dari pengendalian, evaluasi, dan pelaporan |
| 2.2 | Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah : | = | | |
| 2.3 | RPJMD | = | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | RKPD | = | ➢ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.<br>➢ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.<br>➢ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.<br>➢ Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah.<br>➢ Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.<br>➢ Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal. | pembangunan daerah.<br>✓ Monitoring capaian target pembangunan secara berkala.<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah.<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang.<br>✓ Peningkatan kualitas sumber daya perencana di daerah.<br>✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanan pembangunan tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang.<br>✓ Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah yang integratif. |
| 2.5 | RKPD Perubahan | = | | |
| 2.6 | KUA PPAS | = | | |
| 2.7 | KUA PPAS Perubahan | = | | |
| **3.** | **Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan** | | ➢ Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat.<br>➢ Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah.<br>➢ Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. | ✓ Pengelolaan data penelitian dan pengembangan.<br>✓ Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan kebijakan strategis daerah.<br>✓ Pengembangan inovasi dan teknologi pada aspek pelayanan publik. |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan** | | | |
| 4.1 | Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan PNS : | < | ➢ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.<br>➢ Masih rendahnya profesionalisme birokrasi.<br>➢ Belum berkembangnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<br>➢ Masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja.<br>➢ Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi.<br>➢ Data kepegawaian masih belum terintegrasi dengan baik.<br>➢ Pembinaan kepegawaian di perangkat daerah belum optimal.<br>➢ Spesialisasi kelahlian PNS belum optimal. | ✓ Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi aparatur.<br>✓ Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi aparatur.<br>✓ Pembinaan, pengordinasioan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur.<br>✓ Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan satu pintu yang dikelola oleh OPD terkait. |
| 4.2 | Diklat PIM II | < | | |
| 4.3 | Diklat PIM III | < | | |
| 4.4 | Diklat PIM IV | < | | |
| 4.5 | Prajabatan | > | | |
| 4.6 | Tingkat indispliner PNS | > | | |
| **5.** | **Fungsi Penunjang Keuangan** | | | |
| 5.1 | Jumlah pendapatan daerah | > | ➢ Belum optimalnya laporan mengenai keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran.<br>➢ Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna | ✓ Penyusunan APBD dan APBD perubahan tepat waktu.<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran pendapatan |
| 5.2 | Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) | > | | |
| 5.3 | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | < | | |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | = | penyusun APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik.<br>➢ Belum optimalnya implementasi Analisis Standar Belanja dalam perencaanaan pagu kegiatan.<br>➢ Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan penglolaan pemanfaatan BMD.<br>➢ Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.<br>➢ Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah.<br>➢ Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD.<br>➢ Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah.<br>➢ Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah<br>➢ Masih banyak wajib pajak daerah yang memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak.<br>➢ Koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD masih belum optimal. | dan belanja.<br>✓ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembiayaan.<br>✓ Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana trasfer lainnya.<br>✓ Optimalisasi sistem informasi data pengelolaan keuangan daerah.<br>✓ Peningkatan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.<br>✓ Peningkatan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.<br>✓ Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.<br>✓ Inventarisasi berkala barang milik daerah.<br>✓ Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang milik daerah.<br>✓ Inventarisasi potensi PAD yang |

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | berasal dari pajak dan retribusi daerah pada masing-masing OPD.<br>✓ Penyediaan sistem informasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.<br>✓ Penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. |
| **6.** | **Fungsi Penunjang Pengawasan** | | | |
| 6.1 | Tingkat Kapabilitas APIP | = | ➢ Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah.<br>➢ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah.<br>➢ Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.<br>➢ Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik.<br>➢ Kurangnya pemahaman objek pemeriksa terhadap ketentuan aturan yang berlaku dalam menindaklanjuti LHP> | ✓ Peningkatan pembinaan pada OPD yang belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).<br>✓ Peningkatan pemantauan kinerja dan keuangan OPD.<br>✓ Evaluasi kinerja dan keuangan OPD secara intensif.<br>✓ Peningkatan asistensi dan pendampingan kepada OPD secara intensif.<br>✓ Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.<br>✓ Penyediaan sistem pelayanan pengaduan masyarakat secara elektronik. |
| 6.2 | Tingkat Muturitas SPIP | = | | |
| 6.3 | Tingkat Kuantitas APIP | < | | |

## 4.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan arah prioritas pembangunan daerah yang menjadi tujuan dan sasaran yang dapat dioperasionalkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, isu-isu strategis juga merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Secara teknis Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam dalam berbagai bidang pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat memberi warna serta mempengaruhi pelaksanaan agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan, baik dalam lingkup regional, nasional dan global.

### 4.3.1 Isu Strategis Global/Internasional

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk agenda pembangunan global baru yang bernama Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs). Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingka kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta indikator-indikatornya untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Indikator TPB/SDGs yang dapat diukur menjadi bagian dari rencana kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serang baik dalam bentuk rumusan, program, kegiatan dan indikator. Selain itu, upaya pencapaian target TPB/SDGs juga menjadi prioritas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana Tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**
***(Sustainable Development Goals/SDGs)***

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin) | |
| | | Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | |
| | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Operasional Pelayanan JKN | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | | |
| | | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | | |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | Prevalensi Ketidakcukupan (underweight) pada anak balita. | | |
| | | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Proporsi Balita Gizi Buruk | Renstra |
| | | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | | |
| TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | Angka Kematian Ibu (AKI) | Angka Kematian Ibu | |
| | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. | Angka Kematian Bayi | |
| | | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. | Angka Kematian Bayi | |
| | | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. | Angka kematian bayi | |
| | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Cakupan Desa / Kelurahan UCI | Renstra |
| | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | Kejadian TB per 1000 orang. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit | Renstra |
| | | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit | Renstra |
| | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan | | |
| | | Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | | |
| | | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | |
| | | Median Kawin Pertama. | | |
| | | Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). | | |
| | | Total Fertility Rate (TFR). | | |
| | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | Unmet need pelayanan kesehatan. | *Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas* | |
| | | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk. | Rasio Puskesmas dan Rumah Sakit | |
| TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | |
| | mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | |
| | Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki- laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | | |
| | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | | |
| | | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | | |
| TUJUAN : 5 KESETARAAN GENDER | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | |
| | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | |
| | | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selai pasangan dalam 12 bulan terakhir. | |
| | | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | |
| | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | |
| | | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | |
| | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | |
| TUJUAN 6 : AIR BERSIH | Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua | 1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | | |
| | | 2. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | | |
| DAN SANITASI LAYAK | | 3. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal | | |
| | | 4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | | |
| | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global | 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumput tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | |
| | | 2. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja | | |
| | Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | | |
| | | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. | Cakupan pelayanan pengelolaan sampah dan tingkat pengelolaan RTH | |
| TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern | Rasio Elektrifikasi | | |
| | | Konsumsi listrik per kapita | Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHA N EKONOMI | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | Laju pertumbuhan PDB per kapita | Pertumbuhan Ekonomi | |
| | | PDB per kapita | PDRB Per Kapita | |
| | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan | Persentase tenaga kerja formal. | | |
| | | | | |
| | | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| | Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Kualitas Tenaga Kerja | |
| | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan | Jumlah wisatawan mancanegara. | Pariwisata | |
| | | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Pariwisata | |
| | lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | |
| TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. | Lingkungan Hidup | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata- rata nasional<br>Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | Koefisien Gini<br>Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Indeks Gini | |
| TUJUAN 13 : PERUBAHAN IKLIM | Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | | |
| TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN | Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan. | Lingkungan Hidup | |
| TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN | Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | | |

| GOALS/ TUJUAN | TARGET TPB/SDGS | SINKRONISASI | | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | INDIKATOR SDGS | INDIKATOR RPJMD | |
| KELEMBAGAAN YANG TANGGUH | Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | | |
| | | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | | |
| TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN | Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Persentase PAD terhadap Pendapatan | |
| | | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | | |
| | Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020 | Pertumbuhan ekspor produk non migas | Perdagangan | |
| | Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( Vital Statistics Register ) | | |

### 4.3.2 Isu Strategis Nasional

#### 4.3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua**

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

   Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
   5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu

sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

   1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
   2) Memajukan kebudayaan;
   3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
   4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
   5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan

   diarahkan melalui kebijakan:

   1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
   3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

#### 4.3.2.2 Penanganan Pandemi COVID-19

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kemudian diidentifikasi sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*). Pada awal tahun 2020 virus jenis ini mulai menjadi penyebab pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar China. WHO menetapkan

COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, serta pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: **pertama** adalah menguatkan sektor kesehatan, **kedua** melindungi masyarakat dan dunia usaha, **ketiga** mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan **keempat** adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi

COVID-19. Sedangkan beberapa program yang telah dan akan dijalankan oleh Pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 antara lain;

1. *Pertama*, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona.
2. *Kedua*, program Indonesia sehat. Pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas.
3. *Ketiga*, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik
4. *Keempat*, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro.
5. *Kelima*, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (*multiyears*) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona."

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan maka penanganan COVID-19 dapat dijadikan sebagai isu strategis di setiap urusan kewenangan Pemerintah daerah. Dalam merumuskan permasalahan pembangunan di setiap urusan kewenangan pemerintah daerah maka perlu dianalisa sejauhmana pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan urusan kewenangan. Selanjutnya juga harus dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam mengatasi kendala dan hambatan yang disebabkan oleh COVID-19. Identifikasi seberapa jauh pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah serta arahan kebijakan dan strategi yang ditempuh akan memandu daerah dalam menentukan pilihan prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan penanganan COVID-19 secara efisien, efektif dan tepat guna.

### 4.3.3 Isu Strategis Provinsi Banten

Analisis isu-isu strategis yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Bantem 2017-2022 yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infratruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Beberapa isu strategis yang dikemukakan dalam RPJMD Banten Tahun 2017-2022 tersebut juga sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengembangkan sinergisitas pembangunan yang produktif dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terutama dalam menangani berbagai isu straegis tersebut melalui program dan kegiatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Serang.
Penelaahan mengenai isu strategis yang ada di Provinsi Banten dan terkait dengan isu strategis di kabupaten/kota Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Perbandingan Isu Strategis di Provinsi Banten dan Kabupaten/kota**

| No | Isu Strategis | | |
|---|---|---|---|
| | Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kabupaten lain |
| 1. | a. Kesenjangan wilayah<br>Kesenjangan wilayah yang menjadi isu strategis adalah mengenai aksesibilitas 86endidikan dan Kesehatan, dimana rata-rata lama sekolah masih dibawah dan jangkauan ketersediaan rumah sakit minim. Selain itu mengenai kurangnya infrastruktur ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah | 1. Kualitas pelayanan 86endidikan bagi masyarakat belum merata<br>2. Masih adanya kasus-kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan 86endidika yang berkualitas<br>3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang | Kota Tangerang memiliki isu strategis mengenai :<br>1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;<br>2. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan;<br><br>Kabupaten Lebak untuk isu strategis meliputi : Aksesibilitas dan kualitas layanan 86endidikan dan 86endidika;<br><br>Kabupaten Pandeglang mengenai : Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini |

| No | Isu Strategis | | |
|---|---|---|---|
| | Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kabupaten lain |
| | | | terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana 87endid khususnya sarana dan prasarana 87endidikan, 87endidika, dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian;<br><br>Kota Tangerang Selatan adalah mengenai : Pengembangan dan penataan Transportasi di Kota Tangerang Selatan; |
| | b. Daya saing daerah Terjadinya ketimpangan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam disebabkan oleh adanya kurang daya dukung infrastruktur | 4. Masih tingginya angka ketergantungan 87endid daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan | Kabupaten Pandeglang : Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait dengan masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada 87endid unggulan, belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada 87endid unggulan dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya;<br><br>Kabupaten Lebak : Iklim investasi dan daya saing daerah;<br><br>Kota Serang : Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya 87endid 87endidik, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan |

| No | Isu Strategis | | |
|---|---|---|---|
| | Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kabupaten lain |
| | | | kerja;<br><br>Kota Tangerang Selatan : Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron; |
| | c. Kemiskinan dan Pengangguran<br>Masih tingginya desa tertinggal, migrasi yang masuk juga menjadikan salah satu alas an tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan Provinsi Banten | 5. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran<br>6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi 88endi. | Kota Tangerang: Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;dan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal;<br><br>Kota Serang:<br>1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya 88endid 88endidik, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja;<br>2. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda.<br>Kabupaten Lebak : Kemiskinan dan ketenagakerjaan;<br><br>Kabupaten Pandeglang : a.Kualias sumber daya manusia masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat 88endidikan masyarakat |

| No | Isu Strategis | | |
|---|---|---|---|
| | Provinsi Banten | Kabupaten Serang | Kabupaten lain |
| | | | dan kurang berdayanya masyarakat khususnya di perdesaan;<br>b. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan; |
| 2. | 1. Tata Kelola Pemerintahan<br>Perlunya perbaikan pada capaian kinerja mengingat hasil evaluasi akuntabilitas kerja masih dalam tahap CC | 1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitasnya | Kota Serang :<br>1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;<br>2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;<br>3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel<br>4. Pelayanan publik yang berkualitas;<br><br>Kabupaten Pandeglang :<br>Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah. |

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2017-2023

### 4.3.4 Penelaahan RPJPD Kabupaten Serang 2005-2025

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026. RPJMD ke-4 ditujukan untuk Mewujudkan Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan dan agamis melalui pembangunan yang merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan sosial-ekonomi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang didukung oleh masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Serang pada periode akhir RPJMD ini meliputi:

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara meyeluruh dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.
6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam.
7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal.
8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

### 4.3.5 Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026

KLHS RPJMD merupakan instrumen kebijakan yang telah melalui berbagai macam penelaahan secara terukur dan berjangka dalam hal analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Tujuan dari adanya KLHS adalah sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengintegrasikan hasil capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang sekarang telah memiliki cakupan focus pada tingkat makro akhirnya menjadi bagian dari tujuan penyelesaian permasalahan lingkungan yang

semakin kompleks. Indicator yang telah disusun untuk pencapaian TPB yaitu sebanyak 319 indikator, yang terdiri dari 241 indikator mengacu pada TPB yang ditetapkan PBB mencakup kondisi umum daerah, yaitu daya dukung, daya tamping, geografis, demografis dan keuangan daerah, capaian indicator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, karakteristik daerah, dan pembagian peran antara pemerintah daerah, maka berikut penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Serang.

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Serang yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :
   a. Kemiskinan, pengangguran dan penyerapan tenaga kerja
   b. Pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dan perbatasan, tenaga kesehatan, serta penanggulangan gizi buruk
   c. Jangkauan dan fasilitas pendidikan
   d. Jangkauan dan pelayanan terhadap perumahan yang layak dan terjangkau
   e. Pengembangan infrastruktur kabupaten berbasis lingkungan,
   f. Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pangan, pencemaran, dan revitalisasi sumber daya air
   g. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi
   h. Pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik menggunakkan system informasi
   i. Penanganan serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam
2. Kesimpulan bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang, meliputi:
   a. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
      - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
      - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
      - Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
      - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi
      - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- Percepatan cakupan administrasi kependudukan, yang mencakup: perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Kabupaten Serang, peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus
- Integrasi sistem administrasi kependudukan
- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan cara penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, penguatan kapabilitas kelembagaan kabupaten dalam bidang pengendalian penduduk; dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial seperti penguatan pelaksanaan jaminan sosial dalam pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata Kelola SJSn, peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan Kesehatan, serta penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata Kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait
- Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan social dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
- Perlindungan sosial adaptif dengan cara pengembangan perlindungan social yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan social terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan system kelembagaan perlindungan social yang responsive
- Peningkatan kesejahteraan social dengan penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang social untuk memenuhi kebutuhan

dasar penduduk, pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

- Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu seperti penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia terutama aspek kesejahteraan social, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, juga mengenai peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai Pendidikan anak, Kesehatan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga
- Peningkatan pelayanan terpadu Kesehatan melalui peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan.kesehatan reporduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan pengendalian penyakit,
- Penguatan system Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dna peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, serta pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
- Meningkatkan pemerataan layanan pendiidkan berkualitas melalui peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di selama jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, peningkatan tata Kelola pembangunan pendiidkan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan
- Pengentasan kemiskinan melalui akselarasi penguatan ekonomi keluarga, serta keperantaraan usaha dan dampak social

c. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
    - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
    - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
    - Infrastruktur ketahanan bencana, meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di Kawasan prioritas rawan bencana, penilaian dan peningkatan keamanan

infrastruktur vital terhadap bencana, penetapan standar bangunan Tangguh bencana, serta pengembangan infrastruktur hijau

d. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
   - Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
   - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim seperti pennaggulangan bencana ( data, informasi, dan literasi bencana, system, regulasi, dan tata Kelola, peningkatan sarana prasarana mitigasi, integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana, penguatan penanggulangan darurat bencana) dan peningkatan ketahanan iklim
   - Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

### 4.3.6 Penentuan Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan tata cara merumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis

   Dokumen RPJMD memiliki jangka menengah 5 (lima) tahun, maka akan dirumuskan isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan meliputi isu internasional, nasional, dan daerah. Isu internasional yang berpengaruh terhadap isu strategis daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya isu strategis nasional berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 dan penanganan pandemi COVID-19, sedangkan isu daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026, dan KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026. Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya, maka ringkasan menurut tingkatan isu ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Serang**

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| Internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;<br>2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;<br>3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;<br>4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;<br>5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;<br>6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;<br>7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;<br>8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;<br>9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;<br>10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara; |

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| | 11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;<br>12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;<br>13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;<br>14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;<br>15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;<br>16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;<br>17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. |
| Nasional (RPJMN 2020-2024) | 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.<br>Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:<br>a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan |

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| | b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.<br>2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.<br>Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:<br>a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;<br>b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;<br>c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;<br>d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan<br>e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.<br>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.<br>Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:<br>a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; |

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| | b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;<br>c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;<br>d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;<br>e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;<br>f) Pengentasan kemiskinan; dan<br>g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.<br>4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.<br>Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:<br>a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;<br>b) Memajukan kebudayaan;<br>c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;<br>d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan<br>e) Meningkatkan budaya literasi.<br>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.<br>Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: |

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| | a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;<br>b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;<br>c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;<br>d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan<br>e) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.<br>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.<br>Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:<br>a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;<br>b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan<br>c) Pembangunan Rendah Karbon.<br>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.<br>Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:<br>a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;<br>b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; |

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| | c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;<br>d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan<br>e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri. |
| Nasional (Penananganan COVID-19) | 1. *Pertama*, program rakyat aman dari virus corona. Pemerintah akan memperluas tes polymerase chain reaction (PCR), pelacakan, dan karantina terhadap masyarakat yang positif terkena virus corona.<br>2. *Kedua*, program Indonesia sehat. Di sini pemerintah mendorong kemandirian pelayanan kesehatan di rumah sakit dan penyediaan obat-obatan. Di dalamnya ada transformasi sistem kesehatan termasuk BPJS Kesehatan yang berkualitas.<br>3. *Ketiga*, program Indonesia berdaya. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) demi mendongkrak daya beli masyarakat domestik. "Kemudian program lainnya seperti program kartu prakerja, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi listrik<br>4. *Keempat*, pemerintah menyiapkan program Indonesia tumbuh. Beberapa poin yang masuk dalam program tersebut, antara lain peningkatan ekspor transformasi perpajakan, dan mendorong ekonomi di level mikro.<br>5. *Kelima*, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang (*multiyears*) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi corona." |
| Daerah (RPJMD Provinsi Banten 2017-2022) | 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.<br>2. Membangun dan meningkatkan kualitas infratruktur<br>3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas |

| Tingkat Isu | Isu Strategis Pembangunan Daerah |
|---|---|
| | 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan<br>5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi |
| Daerah (RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026 | 1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara meyeluruh dan berkesinambungan.<br>2. Meningkatkan prasarana dan sarana publik untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.<br>3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.<br>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<br>5. Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.<br>6. Menghayati dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam.<br>7. Meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal.<br>8. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. |
| Daerah (KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026) | 1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.<br>2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.<br>3. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.<br>4. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |

2. Pembobotan

Setiap isu strategis yang telah ditentukan, akan dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi. Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan

pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda. Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut: (1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin), (2) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot: 10 poin), (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot: 20 poin), (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot: 10 poin), (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot: 15 poin), dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot: 25 poin). Berdasarkan kriteria beserta bobotnya tersebut, didapatkan hasil pembobotan isu strategis Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria | | | | | | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 2. | Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 3. | Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 25 | 100 |
| 4. | Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 95 |
| 5. | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik | 20 | 10 | 20 | 7 | 10 | 25 | 92 |

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria | | | | | | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6. | Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 25 | 90 |
| 7. | Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 85 |
| 8. | Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan) | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 70 |
| 9. | Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah | 20 | 4 | 10 | 4 | 5 | 15 | 58 |
| 10. | Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 11. | Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 15 | 51 |
| 12 | Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |

**Tabel 4.7 Rata-rata Skor Isu Strategis**

| No | Isu Strategis | Jumlah | Rata-rata Skor |
|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat | 100 | 17 |
| 2. | Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas | 100 | 17 |
| 3. | Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang | 100 | 17 |
| 4. | Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran | 95 | 16 |
| 5. | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik | 92 | 15 |
| 6. | Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal | 90 | 15 |
| 7. | Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 85 | 14 |
| 8. | Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan) | 70 | 12 |
| 9. | Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah | 58 | 10 |
| 10 | Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan | 55 | 9 |
| 11. | Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan | 51 | 9 |
| 12 | Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai | 55 | 9 |

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Serang dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Serang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Serang sesuai dengan urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata
2. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas
3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang
4. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik
6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal.
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)

9. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.
11. Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

# BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

## 5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Serang, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis"**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Serang yaitu:

***MAJU***

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

***SEJAHTERA***

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

***BERKEADILAN***

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

***AGAMIS***

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

## 5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2016, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional

3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya Prioritas pembangunan Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang kemudian dituangkan ke dalam 12 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difocuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah

10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

## 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya dari sasaran dimaksud dijadikan indikator Visi dan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

### 5.3.1 Misi 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat

**Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 1**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal | 1. Rata-Rata Lama Sekolah<br>2. Harapan Lama Sekolah | Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan | Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan |
| | Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan | Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal | Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional |

**a. Tujuan :**

Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal, dengan indikator tujuan yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Tingkat warisan budaya yang dilestarikan

**b. Sasaran:**

1) Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan. Dengan indikator yaitu Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan.
2) Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal. Dengan indikator yaitu Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:




**Gambar 5.1 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-1**

Selanjutnya untuk mencapai target misi 1 yaitu "Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.




**Gambar 5.2 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–1**

### 5.3.2 Misi 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional.

**Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 2**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat | Angka kematian ibu |
| | | | Angka kematian bayi |
| | | | Angka Prevalensi stunting |
| | | | Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi |
| | | | Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit |

**a. Tujuan**

Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH).

**b. Sasaran**

1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat. Dengan indikator yaitu Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka prevalensi stunting, Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi dan Persentase Pemenuhan Standar Akreditas Rumah Sakit

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:




**Gambar 5.3 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-2**

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 2 yaitu "Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.




**Gambar 5.4 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–2**

### 5.3.3 Misi 3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.

**Tabel 5.3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 3**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan | Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah | Cakupan aksesibilitas antar wilayah |
| | | | Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum |
| | | | Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik |
| | | | Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik |
| | | | Persentase kawasan kumuh |
| | | | Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi |
| | | | Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik |
| | | | Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik |
| | | | Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan |
| | | | Indeks Kinerja Sistem Irigasi |
| | | | Cakupan ketersediaan air baku |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam | Indeks kualitas Air |
| | | | Indeks Kualitas udara |
| | | | Indeks tutupan Vegetasi |
| | | | Persentase Penanganan Sampah |
| | | | Persentase Rumah Layak Huni |

**a. Tujuan**

Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur.

**b. Sasaran**

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah, dengan indikator yaitu Cakupan aksesibilitas antar wilayah, Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum, Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik, Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik, Persentase kawasan kumuh, Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi, Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik, Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik, Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan, Indeks Kinerja Sistem Irigasi, Cakupan ketersediaan air baku
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam, dengan indikator: Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks tutupan Vegetasi, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Rumah Layak Huni

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:




**Gambar 5.5 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-3**

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 3 yaitu "Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

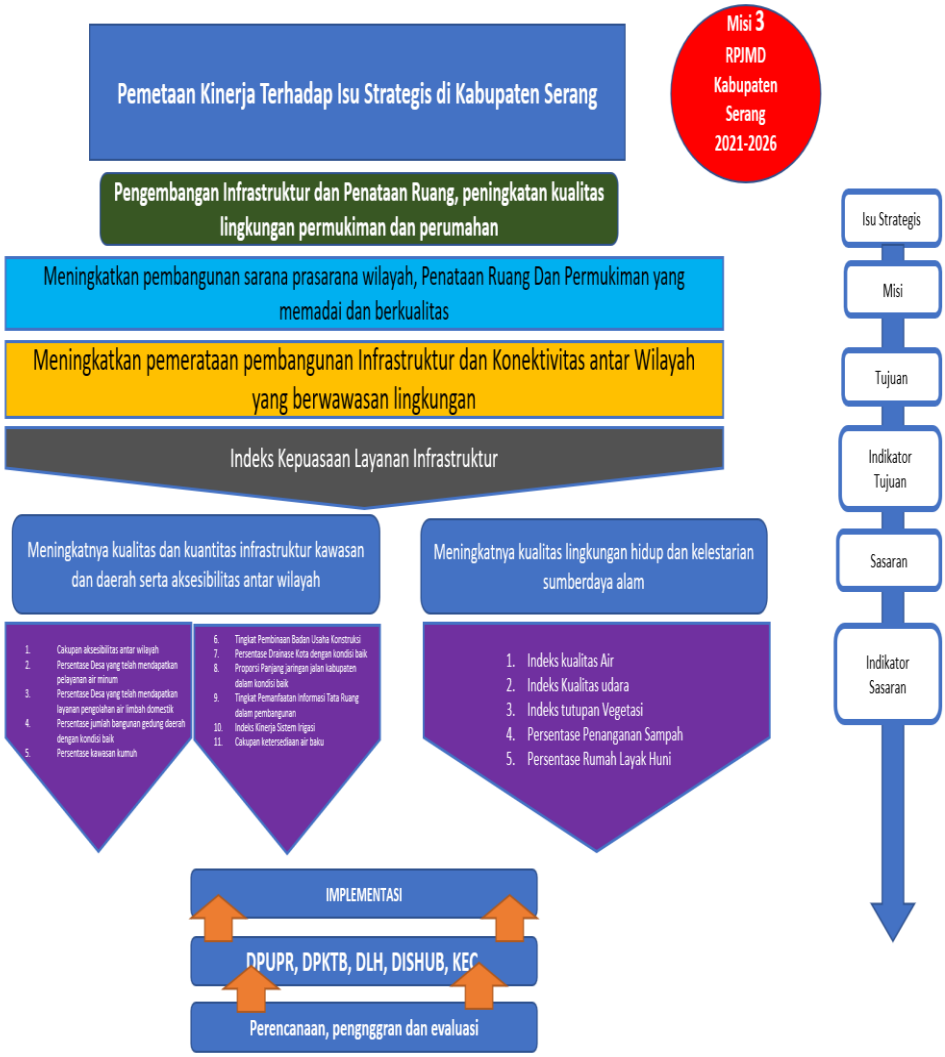


**Gambar 5.6 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–3**

### 5.3.4 Misi 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 5.4. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 4**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa | 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>2. Inflasi<br>3. Tingkat pengangguran terbuka | Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian |
| | | | Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan |
| | | Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri | Proporsi peningkatan SHU koperasi |
| | | | Pertumbuhan Wirausaha Baru |
| | | | Pertumbuhan PDRB sektor industri |
| | | | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan |
| | | Meningkatnya investasi daerah | Pertumbuhan Nilai Investasi daerah |
| | | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah | Kontribusi PAD Pariwisata |
| | | Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan |
| | | Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa | Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 1. Persentase Tingkat Kemiskinan<br>2. Indeks Gini Rasio | Meningkatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk | Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial |
| | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
| | | | Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking |
| | | | Total Fertility Rate |

**a. Tujuan**

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa, dengan indikator tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat pengangguran Terbuka.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Indikator tujuan yaitu Persentase Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini Rasio.

**b. Sasaran**

1) Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas. Dengan indikator yaitu Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan.
2) Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri. Dengan indikator yaitu Proporsi peningkatan SHU koperasi, Pertumbuhan Wirausaha Baru, Pertumbuhan PDRB sektor industri, Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.

3) Meningkatnya investasi daerah Dengan indikator Pertumbuhan Nilai Investasi daerah.
4) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah. Dengan indikator Kontribusi PAD Pariwisata.
5) Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Dengan indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
6) Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa. Dengan indikator Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM.
7) Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator yaitu Indeks ketahanan pangan.
8) Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk, dengan indikator: Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking, Total Fertility Rate.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:




**Gambar 5.7 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-4**

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 4 yaitu "Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

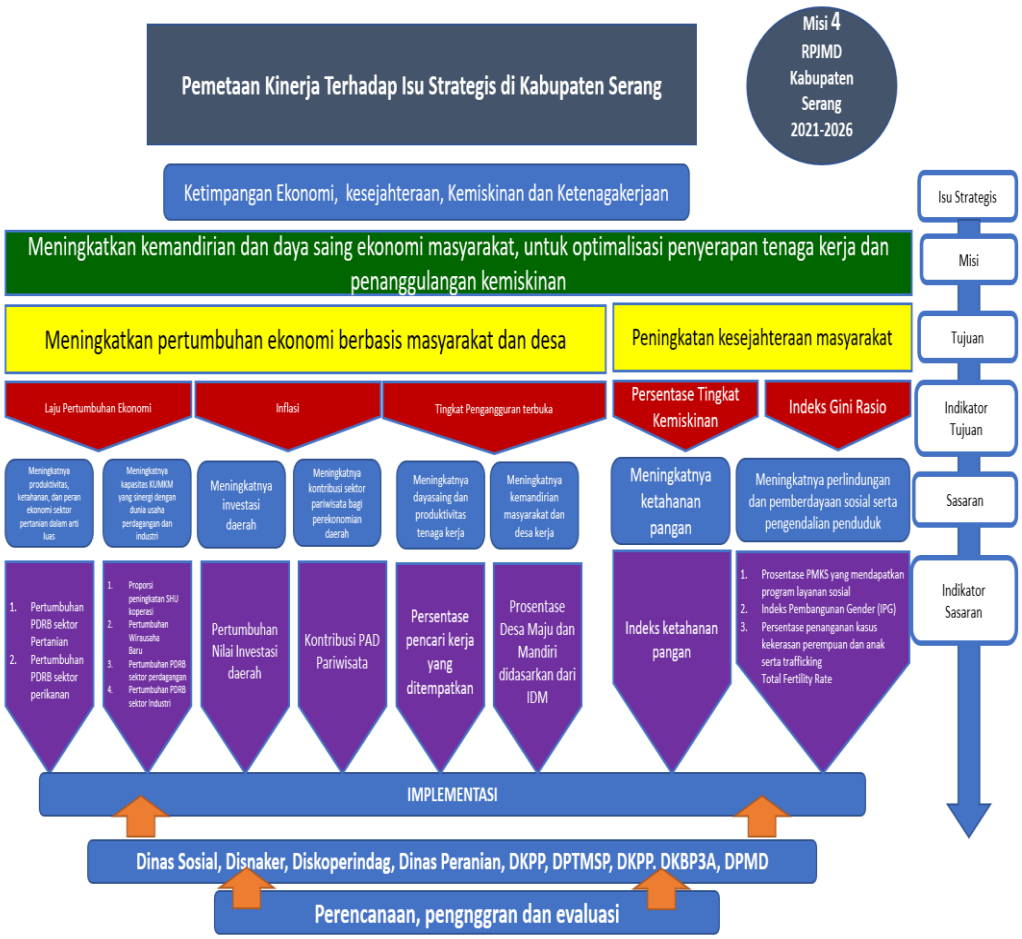


**Gambar 5.8 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–4**

### 5.3.5 Misi 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

**Tabel 5.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 5**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public | Indeks reformasi Birokrasi | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Opini BPK |
| | | | Nilai LPPD |
| | | | Nilai SAKIP |
| | | | Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Maturitas SPIP |
| | | Meningkatnya Pendapatan asli Daerah | Tingkat Pertumbuhan PAD |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi | Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah |
| | | | Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah |
| | | | Indek Inovasi Daerah |
| | | | Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan |
| | | Meningkatnya kualitas SDM aparatur | Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik |
| | | | Cakupan standar kompetensi pegawai |
| | | Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) |
| | | | Indeks Kematangan Penerapan SPBE |
| | | | Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI) |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan |
| | | | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital |
| | | | Cakupan kepemilikan dokumen adminduk |
| | | | Indeks Risiko Bencana |
| | | | Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda |

**a. Tujuan**

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan indikator tujuan yaitu Indeks reformasi birokrasi

**b. Sasaran**

1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator: Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona inteegritas (ZI) WBBM WBK.
2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP
3) Meningkatnya Pendapatan asli Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan PAD.
4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi, dengan indikator: nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Nilai capaian kinerja prioritas perangkat daerah, Indeks Inovasi Daerah, Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.
5) Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dengan indikator: Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik dan Cakupan standar kompetensi pegawai.
6) Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks keterbukaan informasi publik (PPID), Indeks Kematangan penerapan SPBE, Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI).
7) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan, Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital, Cakupan kepemilikan dokumen adminduk, Indeks Risiko Bencana, Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami malalui gambar sebagai berikut:




**Gambar 5.9 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-5**

Selanjutnya Untuk mencapai target misi 5 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.




**Gambar 5.10 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–5**

### 5.3.6 Misi 6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

**Tabel 5.6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 6**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat | Indeks Kerukunan Umat beragama | Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama | Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat |

**a. Tujuan**

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kerukunan Umat beragama

**b. Sasaran**

Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama, dengan indikator: Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui gambar sebagai berikut:




**Gambar 5.11 : Pemahaman Misi, Tujuan dan Sasaran Misi-6**

Selanjutnya Untuk mencapai target misi-6 yaitu "Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi mulai dari penentuan isu stragis, misi, tujuan indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dengan OPD yang menganpu implementasi dari misi dimaksud, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:




**Gambar 5.12 : Pemetaan Kinerja terhadap pencapaian Isue strategis dalam Misi–6**

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

## Tabel 5.7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat | Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah | Angka Rata Rata Lama Sekolah | | | 7,5 | 7,64 | 7,79 | 7,93 | 8,07 | 8,22 | 8,36 |
| | | Angka Rata Rata Harapan Bersekolah | | | 12,57 | 12,75 | 12,94 | 13,12 | 13,30 | 13,48 | 13,67 |
| | | | Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan | Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan | 47,52 | 48,10 | 48,72 | 49,31 | 49,91 | 50,51 | 51,11 |
| | | Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan | | | 0 | 41.38 % | 48.28 % | 58.62 % | 79.31 % | 93.10 % | 100% |
| | | | Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah | Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional | 0 | 41.38 % | 48.28 % | 58.62 % | 79.31 % | 93.10 % | 100% |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional | Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | | | 64,64 | 64,85 | 65,06 | 65,26 | 65,47 | 65,68 | 65,89 |
| | | | Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat | Angka kematian ibu | 204 | 202 | 200 | 194 | 183 | 182 | 180 |
| | | | | Angka kematian bayi | 8,29 | 8,27 | 8,25 | 8.23 | 8.21 | 8.19 | 8.17 |
| | | | | Angka Prevelensi Stunting | 18.40% | 21,1% | 18,4 % | 16% | 14% | 13,5% | 13% |
| | | | | Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi | 25% | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | | | Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas | Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan | Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur | | | 48% | 50% | 52,5 % | 55% | 57,5 % | 60% | 62,5 % |
| | | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah | Cakupan aksesibilitas antar wilayah | 96,10% | 96,1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum | 85,89 | 87,12 | 87,73 | 88,34 | 88,96 | 89,57 | 90,18 |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik | 70,25 | 71,47 | 72,09 | 72,70 | 73,31 | 73,93 | 74,54 |
| | | | | Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | | | Persentase kawasan kumuh | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| | | | | Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi | 35 | 35 | 41.66 | 48,33 | 55 | 61.66 | 68,33 |
| | | | | Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik | 50 | 51,85 % | 52,5 % | 55,56 % | 58,08 % | 60,96 % | 63,89 % |
| | | | | Proporsi Panjang jaringan jalan | 84 | 96 | 62.5 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 72.1 |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | kabupaten dalam kondisi baik | | | | | | | |
| | | | | Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 100 |
| | | | | Cakupan ketersediaan air baku | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam | Indeks kualitas Air | 49.25 | 49.75 | 50.25 | 50.75 | 51.25 | 51.75 | 52.25 |
| | | | | Indeks Kualitas udara | 82.25 | 82.50 | 82.75 | 83.00 | 83.25 | 83.50 | 83.75 |
| | | | | Indeks tutupan Vegetasi | 69,98 | 69.985 | 69.990 | 69.995 | 70.000 | 70.005 | 70.010 |
| | | | | Persentase Penanganan Sampah | 14,53 | 15.03 | 17.44 | 19.85 | 22.27 | 24.68 | 27.09 |
| | | | | Persentase Rumah Layak Huni | 89,26% | 89.26 % | 89.88 % | 90.49 % | 91.10 % | 91.72 % | 92.33 % |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | | | -1.96 | 3,41 | 2,97 | 2,42 | 1,78 | 2,72 | 2,56 |
| | | Inflasi | | | 1,23 | 1,5 | 1.23 | 1.5 | 1.59 | 1.65 | 1.93 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | 12.22 | 12 | 11.89 | 11.55 | 11.22 | 11 | 10.88 |
| | | | Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian | 4,02 | 3.07 | 2.82 | 2.84 | 3.19 | 2.98 | 2.96 |
| | | | | Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan | -2.16 | 2.80 | 1.99 | 1.48 | 1.61 | 1.97 | 1.76 |
| | | | Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri | Proporsi peningkatan SHU koperasi | 29% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| | | | | Pertumbuhan Wirausaha Baru | 9,64 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB | -1.56 | 2.06 | 1.43 | 0.70 | 0.06 | 1.03 | 0.77 |
| | | | | Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB | -4.28 | 3.99 | 3.58 | 3.22 | 2.28 | 3.27 | 3.09 |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | Meningkatnya investasi daerah | Pertumbuhan Nilai Investasi daerah<br>PMA<br>PMDN | -0,39%<br>46,28% | 3%<br>3% | 3%<br>3% | 3%<br>3% | 3%<br>3% | 3%<br>3% | 3%<br>3% |
| | | | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah | Kontribusi PAD Pariwisata | 16.059.553.821 | 17.000.000.000 | 20.000.000.000 | 22.000.000.000 | 24.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.500.000.000 |
| | | | Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa | Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM | 15.03 | 15.03 | 15.95 | 16.87 | 17.79 | 18.71 | 19.63 |
| | | | Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 13,38 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Persentase Tingkat Kemiskinan | | | 4.94 | 4.50 | 4.22 | 4.18 | 4.10 | 4.08 | 4.04 |
| | | Indeks Gini Rasio | | | 0.303 | 0.286 | 0.281 | 0.276 | 0.271 | 0.266 | 0.261 |
| | | | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan | 77.07% | 77.10 % | 77.15 % | 77.20 % | 77.30 % | 77.40 % | 77.50 % |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk | Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial | 17.38% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,14 | 92,02 | 92,06 | 92,10 | 92,14 | 92,18 | 92,22 |
| | | | | Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking | 56,17 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | | | Total Fertility Rate | 2.1 | 2,29 | 2,26 | 2,24 | 2,21 | 2,19 | 2,1 |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Biksierintegritas , Kompeten Dan Profesional | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi | | | CC | B | B | B | BB | BB | BB |
| | | | Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Nilai LPPD | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
| | | | | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | | | Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Maturitas SPIP | 3 | 3,11 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,00 |
| | | | Meningkatnya Pendapatan asli Daerah | Tingkat Pertumbuhan PAD | 1.36% | 4.07% | 1.12 % | 3.28 % | 3.33 % | 3.39% | 3.44 % |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan | Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi | Indek Inovasi Daerah | inovatif | inovatif | inovatif | inovatif | inovatif | inovatif | Inovatif |
| | | | | Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan | 50,00% | 50,00 % | 60,00 % | 70,00 % | 80,00 % | 90,00 % | 100,00% |
| | | | Meningkatnya kualitas SDM aparatur | Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik | 94% | 94% | 95% | 93% | 96% | 97% | 97% |
| | | | | Cakupan standar kompetensi pegawai | 90% | 94.10 % | 94.50 % | 95.00 % | 95.50 % | 96.00 % | 96.00 % |
| | | | Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | | Indeks Kematangan Penerapan SPBE | 2,98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.01 |
| | | | | Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI) | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 175 |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | B | B | B | B | B |
| | | | | Persentase Masyarakat yang Melakukan | 58.00% | 42.00 % | 60.00 % | 70.00 % | 80.00 % | 90.00 % | 100% |

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian awal perencanaan tahun 2020 | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | Kunjungan Perpustakaan | | | | | | | |
| | | | | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital | 35.71% | 44.64 % | 53.57 % | 62.50 % | 71.43 % | 80.36 % | 100% |
| | | | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | 79,12% | 83,23 | 84,8 | 87,4 | 89,8 | 92,2 | 94,6 |
| | | | | Indeks Risiko Bencana | 203,20 | 203,10 | 203,05 | 203,00 | 202,80 | 202,50 | 200,00 |
| | | | | Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda | 7.4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara | Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat | Indeks Kerukunan Umat Beragama | | | 86.45 | 86.90 | 87.40 | 87.95 | 88.50 | 89.00 | 89.50 |
| | | | Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama | Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

*"Bab ini akan menjelaskan tentang strategi yang akan diterapkan, serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) serta program pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah*."

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

| **VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS** | | | |
|---|---|---|---|
| Misi 1: Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal | Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan | Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan | Pengembangan layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang merata di seluruh unit Pendidikan |
| | | | Penyediaan sarana dan prasarana Pendikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat |
| | | | Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan |
| | | | Penguatan kapasitas sumberdaya dan manajemen Pendidikan |
| | | | Pemberian beasiswa dan bantuan Pendidikan |
| | | | Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal | Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal, seni budaya, dan nilai tradisi berbasis masyarakat | Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah |
| | | | Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah |
| | | | Faslitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa |
| | | | Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi local |
| | | | Pembangunan sarana event seni budaya di tiap kecamatan |
| | | | Penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional dan internasional |
| | | | Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat |

| Misi 2: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat | Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat | Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan serta pemeliharaan kesehatan lingkungan | Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat |
| | | | Memperbaiki status gizi masyarakat |
| | | | Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan |
| | | | Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan |
| | | | Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga |
| | | | Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi |
| | | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat | Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin |
| | | | Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat |
| | | | Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia |
| | | | Meningkatkan manajemen dan SDM kesehatan |
| | | | Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau |
| | | | Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan |
| | | | Penataan Manajemen RSUD |
| | | | Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi. |
| | | | Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa |
| | | | Penambahan layanan Jamkesda |

| **Misi 3: Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah | Memantapkan penyediaaan infrastuktur konektivitas antar wilayah guna menunjang produktivitas antar wilayah | Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran |
| | | | Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah wilayah sentra produksi pertanian |
| | | | Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat |
| | | | Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah |
| | | | Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman |
| | | | Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjuan wilayah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pengembangan peta digital ruang wilayah dalam mendukung kebijakan SATU DATA |
| | | | Penyusunan rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang |
| | | Meningkatkan Penataan perumahan dan kawasan Pemukiman yang sehat dan berkelanjutan | Pembangunan Rumah Layak Huni |
| | | | Penataan kawasan perumahan dan pemukiman |
| | | | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman |
| | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan peumahan dan pemukiman |
| | | | Penataan kawasan kumuh perkotaan |
| | | Memantapkan sistem transporasi antar wilayah guna peningkatan mobiitas orang dan barang antar wilayah | Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan |
| | | | Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto |
| | | | Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang |
| | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum |
| | | | Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam | Peningkatan tatakelola lingkungan hidup berbasis masyarakat | Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan kominfo) |
| | | | Pengawasan lingkungan sampai dengan tingkat kecamatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah |
| | | | Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan |
| | | | Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif |
| | | | Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Fasiltas Persampahan |
| | | | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan |
| | | | Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH |
| | | | Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup |
| | | | Meningkatkan penataan dan kulitas pemeliharaan ruang terbuka hijau |

| Misi 4: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa | Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas | Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian | Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan |
| | | | Pengembangan kawasan pertanian organic |
| | | | Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan |
| | | | Pengembangan komoditas unggulan pertanian |
| | | | Pengembangan komoditas unggulan peternakan |
| | | | Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran Organik |
| | | | Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian) |
| | | Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan | Peningkatan produksi perikanan tangkap |
| | | | Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya |
| | | | Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan |
| | | | Peingkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan) |
| | Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri | Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menegah dan Koperasi | Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi |
| | | | Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru |
| | | | Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial |
| | | | Fasilitasi Penerapan teknologi tepat guna |
| | | | Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya |
| | | Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa | Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata |
| | | | Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di di seluruh wilayah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | secara aman dan terkendali | Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar |
| | | | Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |
| | | | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
| | | | Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen |
| | | Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah | Roadmap pengembangan potensi sektor Industri |
| | | | Fasiltasi Kemitraan Usaha Industri Kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya |
| | | | Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat |
| | | | Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha IKM (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil UKM) |
| | Meningkatnya investasi daerah | Penciptaan iklim investasi yang kondusif | Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal |
| | | | Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal |
| | | | Pengembangan Peta Digital Potensi Investasi |
| | | | Penigkatan Promosi Potensi Penanaman Modal |
| | | | Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional |
| | | | Pengembangan sinergitas BUMD dengan mitra strategis dalam upaya peningkatan PAD |
| | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah | Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan | Identifikasi obyek wisata di kawasan pariwisata budaya/religi, kawasan pariwisata alam dan kawasan-kawasan lain yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang |
| | | | Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata |
| | | | Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonekvitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce |
| | | | Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata) |
| | Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja | Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai | Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul |
| | | | Fasilitasi pelatihan kerja sesuaidengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah |
| | | | Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja |
| | | | Perlindungan ketenagakerjaan |
| | | | Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja |
| | | | Penyediaan job training |
| | | | Standarisasi sarana prasarana balai latihan kerja |
| | | | Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan |
| | | | Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja |
| | | | Peningkatan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi |
| | Meningkatnya kemandirian | Penguatan peran dan partisipasi | Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | masyarakat dan desa | masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal | Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa |
| | | | Penguatan kapasitas pemerintahan desa |
| | | | Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa |
| | | | Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa |
| | | | Sinergitas program pemerintah dengan desa |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya ketahanan pangan | Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan | Pengembangan lumbung pangan desa |
| | | | Peningkatan distribusi pangan |
| | | | Peningkatan ketersediaan pangan |
| | | | Pengembangan olahan pangan berbasis sumberdaya lokal |
| | | | Peningkatan keamanan pangan |
| | Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk | Pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan | Mengembangkan keanekaragaman produk pangan |
| | | Melakukan Pemberdayaan dalam Rangka Produktifitas Kelompok Miskin dan Rentan | Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan |
| | | | Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil |
| | | Penanganan dan Penguatan serta Pemberdayaan | Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) | Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill |
| | | | Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga |
| | | | Penguatan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| | | | Penguatan Penanganan Korban Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana |
| | | Pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak | Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan |
| | | | Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan |
| | | | Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perembuan dan anak |
| | | Penguatan Program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk | Penguatan dan Penyebarluasan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana |
| | | | Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh KB di desa |
| | | | Faslitasi alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) |
| | | | Penyediaan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling |
| | | | Peningkatan pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB |

| Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi |
| | | | Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi |
| | | | Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislative |
| | | | Penguatan tugas-tugas kewilayahan |
| | | | Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | Penataan dan penguatan organisasi |
| | | | Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah |
| | | Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan | Penetapan IKU Pemerintah Daerah berdasarkan target-target RPJMD |
| | | | Penetapan IKU OPD berdasarkan target-target Renstra |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Indikator Kinerja Utama | Pelaksanaan program kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan |
| | | | Pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan |
| | | | Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan |
| | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Lingkup Pemerintah Daerah | Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan |
| | | | Menata kelembagaan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) |
| | | | peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah |
| | | | Penyusunan kebijakan operasional dan teknis pengawasan tahunan |
| | Meningkatnya Pendapatan asli daerah | Optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan | Peningkatan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pengelolaan keuangan daerah | |
| | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi | Penguatan system perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan penelitian pengembangan daerah | Penguatan system Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah |
| | | | Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah |
| | | | Peningkatan kreasi dan inovasi daerah |
| | Meningkatnya kualitas SDM aparatur | Penguatan manajemen pengelolaan kepegawaian | Pemberian reward and punishment di jajaran birokrasi |
| | | | Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur |
| | Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Digitalisasi Informasi Publik | Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi informasi public |
| | | | Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data |
| | | | Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah |
| | | | Penguatan intensitas komunikasi melalui media komunikasi publik yang efektif |
| | | | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI | Digitalisasi Pelayanan Publik | Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi layanan publik |
| | | | Pengembangan e-government |
| | | | Penrapan Tata Naskah Dinas Elektronik |
| | | | Pengembangan ekonomi digital (e-commerce) |
| | | | Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika |
| | | | Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Inovasi pelayanan publik jemput bola |
| | | | Penguatan jejaring komunikasi informasi dan persandian daerah |
| | | | Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Digital |
| | | | Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Perizinan |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Pelayanan Dasar bagi Pemerintah Daerah |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sistem dan Penataan Management Layanan Ketenagakerjaan |

| Misi 6: Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara | | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat | Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama | Penguatan dan kampanye nilai agama ditengah-tengah masyarakat | Penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut |
| | | | Penguatan peran serta tokoh agama dalam menjalankan kehidupan beragama di masyarakat |

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun Program Prioritas Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 sebagai jawaban terhadap isu permasalahan strategis, juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya. Adapun program prioritas dimaksud sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difocuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah

10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

Selanjutnya selain Program prioritas pembangunan daerah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat pula program - program yang menjadi kebutuhan dan penunjang dalam penyelenggaran pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari urusan – urusan yang menjadi kewenangan daerah dapat diampaikan sebagai berikut:

## Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | **Misi 1 :**<br>**Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Tujuan 1.1 :** | **Angka Rata-Rata Lama Sekolah** | **7,5** | **7,64** | | **7,79** | | **7,93** | | **8,07** | | **8,22** | | **8,36** | | **8,36** | | |
| | | | | **Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal** | **Angka Rata-Rata Harapan Sekolah** | **12,57** | **12,75** | | **12,94** | | **13,12** | | **13,30** | | **13,48** | | **13,67** | | **13,67** | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | **Sasaran 1.1.1 :**<br>**Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan** | **Angka Pendidikan Dasar yang Ditamatkan** | **47,52** | **48,10** | | **48,72** | | **49,31** | | **49,91** | | **50,51** | | **51,11** | | **51,11** | | DISDIKBUD |
| 1 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APM SD | 100,00 | 100,00 | 21.608.877.380 | 100 | 21.608.877.380 | 100 | 22.041.054.928 | 100 | 22.481.876.026 | 100 | 22.931.513.547 | 100 | 23.390.143.818 | 100 | 134.062.343.079 | DISDIKBUD |
| | | | | | APM SMP | 99,45 | 100,00 | 20.836.970.800 | 100 | 20.836.970.800 | 100 | 21.253.710.216 | 100 | 21.678.784.420 | 100 | 22.112.360.109 | 100 | 22.554.607.311 | 100 | 129.273.403.656 | DISDIKBUD |
| | | | | | APK PAUD | 85,28 | 100,00 | 22.282.090.000 | 87 | 22.282.090.000 | 88,5 | 22.727.731.800 | 90 | 23.182.286.436 | 91,5 | 23.645.932.165 | 93 | 24.118.850.808 | 93 | 138.238.981.209 | DISDIKBUD |
| | | | | | Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ esetaraan | 100 ,00 | 100,00 | 42.066.759.900 | 100 | 42.066.759.900 | 100 | 42.066.759.900 | 100 | 42.066.759.900 | 100 | 42.908.095.098 | 100 | 42.908.095.098 | 100 | 254.083.229.796 | DISDIKBUD |
| | | | | | **Capaian SPM Bidang Pendidikan** | 83,05 | 83,10 | | 83,15 | | 83,20 | | 83,25 | | 83,30 | | 83,35 | | 83,35 | - | DISDIKBUD |
| 1 | 01 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.850.000.000 | DISDIKBUD |
| 1 | 01 | 04 | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap rombel | 78,21 | 78,21 | 30.039.815.000 | 81,21 | 30.039.815.000 | 84,21 | 31.541.805.750 | 87,21 | 33.118.896.038 | 90,21 | 34.774.840.839 | 93,21 | 36.513.582.881 | 93,21 | 196.028.755.508 | DISDIKBUD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 1 | 01 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Prosentase izin pendidikan dasar. PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat | 100 | 100 | - | 100 | 112.000.000 | 100 | 112.000.000 | 100 | 112.000.000 | 100 | 112.000.000 | 100 | 112.000.000 | 100 | 560.000.000 | DISDIKBUD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan** | 0 | 41.38 % | | 48.28 % | | 68.62 % | | 79.31 % | | 93.10 % | | 100% | | 100% | | |
| | | | | **Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah** | **Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional** | 0 | 41.38 % | | 48.28 % | | 68.62 % | | 79.31 % | | 93.10 % | | 100% | | 100% | | DISDIKBUD |
| 2 | 22 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Cakupan kelompok budaya yang dibina | 30,00 | 30,00 | 671.415.950 | 35,00 | 1.000.000.000 | 42,50 | 1.530.000.000 | 57,50 | 1.680.000.000 | 67,50 | 1.680.000.000 | 72,50 | 1.680.000.000 | 72,50 | 8.241.415.950 | DISDIKBUD |
| 2 | 22 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Cakupan kelompok kesenian yangdibina | 30,00 | 30,00 | 157.574.000 | 35,00 | 1.000.000.000 | 42,50 | 1.530.000.000 | 57,50 | 1.680.000.000 | 67,50 | 1.680.000.000 | 72,50 | 1.680.000.000 | 72,50 | 7.727.574.000 | DISDIKBUD |
| 2 | 22 | 04 | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | | 9,36 | 150.000.000 | 12,49 | 150.000.000 | 18,73 | 150.000.000 | 28,09 | 150.000.000 | 31,32 | 150.000.000 | 31,32 | 750.000.000 | DISDIKBUD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 22 | 05 | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 25,64 | 25,64 | 171.010.000 | 38,46 | 300.000.000 | 51,28 | 350.000.000 | 64,10 | 400.000.000 | 84,62 | 450.000.000 | 100,00 | 500.000.000 | 100,00 | 2.171.010.000 | DISDIKBUD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Tujuan 2.1 : Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat** | **Angka Harapan Hidup** | **64,64** | **64,85** | | **65,06** | | **65,26** | | **65,47** | | **65,68** | | **65,89** | | **65,89** | | |
| | | | | **Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat** | **Angka kematian ibu** | **204 Per 100.000 KH** | **202** | | **200** | | **194** | | **183** | | **182** | | **180** | | **183** | | **Dinkes** |
| | | | | | **Angka kematian bayi** | **8,29 Per 1.000 KH** | **8,27** | | **8,25** | | **8,23** | | **8,21** | | **8,19** | | **8,17** | | **8** | | **Dinkes** |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | **Angka Prevalensi stunting** | **18,40%** | **21,2** | | **18,4** | | **16** | | **14** | | **13,5** | | **13** | | **14** | | **Dinkes** |
| | | | | | **Persentase fasyankes yang terstandar dan terakreditasi** | **25%** | **25%** | | **30%** | | **35%** | | **40%** | | **45%** | | **50%** | | **50%** | | Dinkes |
| 1 | 02 | 02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan | 100% | 100 | 69.031.599.895 | 100 | 41.662.838.500 | 100 | 44.967.444.000 | 100 | 38.791.953.200 | 100 | 59.104.507.325 | 100 | 62.518.847.155 | 100 | 316.077.190.075 | Dinkes |
| | | | | | Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan | 74% | 74 | 21.696.086.920 | 85 | 22.725.000.000 | 90 | 21.696.086.920 | 90 | 22.725.000.000 | 95 | 22.725.000.000 | 98 | 22.725.000.000 | 98 | 134.292.173.840 | Dinkes |
| | | | | | Prosentase Desa Stop BABS | 15 % | 15 | 13.020.000 | 20 | 400.000.000 | 25 | 500.000.000 | 35 | 500.000.000 | 40 | 661.000.000 | 50 | 760.000.000 | 50 | 2.834.020.000 | Dinkes |
| 1 | 02 | 04 | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes | 100% | 100% | 89.370.999 | 100 | 36.000.000 | 100 | 39.000.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 48.000.000 | 100 | 299.370.999 | Dinkes |
| 1 | 02 | 05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Prosentase Posyandu aktif | 55 % | 55 | 7.623.783.500 | 55 | 7.420.830.000 | 60 | 8.627.921.500 | 65 | 8.113.783.500 | 70 | 9.108.171.500 | 75 | 8.980.209.001 | 75 | 49.874.699.001 | Dinkes |
| | | | | | Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 0 % | 60 | 30.000.000 | 60 | 700.000.000 | 70 | 900.000.000 | 80 | 960.000.000 | 90 | 1.190.250.000 | 100 | 1.368.437.000 | 100 | 5.148.687.000 | Dinkes |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 1 | 02 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100 % | 100 | 1.054.350.000 | 100 | 1.213.370.000 | 100 | 1.344.009.000 | 100 | 1.489.571.000 | 100 | 1.585.618.800 | 100 | 1.834.510.000 | 100 | 8.521.428.800 | Dinkes |
| 1 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas | 100 | 100 | 64.166.201.482 | 100 | 65.770.356.519 | 100 | 67.374.511.556 | 100 | 68.978.666.593 | 100 | 70.582.821.630 | 100 | 72.186.976.667 | 10% | 409.059.534.447 | Dinkes |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit** | **80%** | **80%** | | **80%** | | **80%** | | **80%** | | **80%** | | **80%** | | | **-** | RS.DR DJATP RAWI RANE GRA |
| | 02 | 02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan | 80,07% | 90% | 19.995.000 | 90% | 150.000.000 | 90% | 150.000.000 | 90% | 150.000.000 | 90% | 150.000.000 | 90% | 150.000.000 | 90% | 769.995.000 | RS.DR DJATP RAWI RANE GRA |
| | | | | | Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik | 66% | 66% | 655.649.952 | 72% | 2.889.000.000 | 76% | 3.000.000.000 | 83% | 3.200.000.000 | 86% | 3.300.000.000 | 90% | 3.300.000.000 | 90% | 16.344.649.952 | RS.DR DJATP RAWI RANE GRA |
| 1 | 02 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi | 20% | 25% | - | 25% | 150.000.000 | 25% | 250.000.000 | 25% | 250.000.000 | 25% | 250.000.000 | 25% | 250.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | RS.DR DJATP RAWI RANE GRA |
| 1 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Tingkat Penerimaan Pendapatan RS | 100% | 100% | 172.010.571.597 | 100% | 176.372.551.137 | 100% | 180.781.864.915 | 100% | 185.301.411.538 | 100% | 189.933.946.827 | 100% | 194.682.295.497 | 100% | 1.099.082.641.511 | RS.DR DJATP RAWI |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | RANE GRA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Misi 3 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah. Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Tujuan 3.1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan** | **Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur** | **48%** | **50%** | | **52,5%** | | **55%** | | **57,5%** | | **60%** | | **62,5%** | | **62,5%** | | | |
| | | | | **Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah** | **Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah** | **96,10%** | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **DISHUB** |
| 2 | 15 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | 13% | 13% | 30.272.932.511 | 13% | 33.115.001.066 | 13% | 33.115.001.066 | 14% | 32.115.001.066 | 14% | 38.326.924.672 | 14% | 38.326.924.672 | 14% | 205.271.785.053 | **DISHUB** |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 15 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut | 0 | 0% | 1.181.018.750 | 25% | 2.156.525.000 | 25% | 2.156.525.000 | 25% | 3.000.000.000 | 25% | 3.100.000.000 | 25% | 3.200.000.000 | 0,25 | 14.794.068.750 | DISHUB |
| 2 | 15 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin | 0 | 0,00% | 0 | 20% | 100.000.000 | 20% | 100.000.000 | 20% | 110.000.000 | 20% | 110.000.000 | 20% | 100.000.000 | 0,2 | 520.000.000 | DISHUB |
| 2 | 15 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin | 0% | 0% | 0 | 50% | 600.000.000 | 50% | 600.000.000 | 50% | 600.000.000 | 50% | 600.000.000 | 50% | 600.000.000 | 50% | 3.000.000.000 | DISHUB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 17.124.999.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DPKPTB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum** | **85,89** | **87,12** | | **87,73** | | **88,34** | | **88,96** | | **89,57** | | **90,18** | | **90,18** | | DPKPTB |
| 1 | 03 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM | 88,58 | 89,01 | 19.140.782.661 | 89,53 | 22.000.000.000 | 89,95 | 22.000.000.000 | 90,35 | 22.000.000.000 | 90,73 | 22.000.000.000 | 91,08 | 30.840.000.000 | 91,08 | 137.980.782.661 | DPKPTB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | **Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik** | **70,25** | **71,47** | | **72,09** | | **72,7** | | **73,31** | **90,73** | **73,93** | | **74,54** | | **74,54** | | **DPKP TB** |
| 1 | 03 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik | 65,92 | 67,01 | 8.958.787.230 | 68,62 | 6.516.298.152 | 69,9 | 10.097.557.782 | 71,07 | 10.097.557.782 | 72,18 | 15.190.243.207 | 73,27 | 17.240.931.848 | 73,27 | 68.101.376.001 | **DPKP TB** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik** | **50** | **55** | | **60** | | **65** | | **70** | | **75** | | **80** | | **80** | | **DPKP TB** |
| **1** | **03** | **07** | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani | | | 7.194.045.900 | 20 | 2.000.000.000 | 30 | 2.000.000.000 | 40 | 2.000.000.000 | 50 | 2.000.000.000 | 60 | 2.000.000.000 | 60 | 10.000.000.000 | **DPKP TB** |
| 1 | 03 | 08 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB | 15 | 17 | 32.932.617.625 | 19 | 47.000.000.000 | 21 | 50.000.000.000 | 23 | 50.000.000.000 | 25 | 50.000.000.000 | 27 | 50.000.000.000 | 27 | 279.932.617.625 | **DPKP TB** |
| 1 | 03 | 09 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur | 15 | 17 | 12.035.387.475 | 19 | 25.790.000.000 | 21 | 25.790.000.000 | 23 | 20.790.000.000 | 25 | 30.950.868.750 | 27 | 34.164.412.188 | 27 | 149.520.668.413 | **DPKP TB** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | **Persentase kawasan kumuh** | **0,2** | **0,2** | | **0,18** | | **0,16** | | **0,14** | | **0,12** | | **0,1** | | **0,1** | | **DPKPTB** |
| 1 | 04 | 03 | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh | 10 | 10 | 408.392.200 | 10 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | 20 | 300.000.000 | 25 | 300.000.000 | 30 | 300.000.000 | 30 | 1.800.000.000 | **DPKPTB** |
| 1 | 04 | 04 | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh | 6,5 | 6,82 | 15.830.460.799 | 18,18 | 19.500.000.000 | 22,22 | 19.500.000.000 | 28,57 | 11.000.000.000 | 40 | 11.000.000.000 | 66,67 | 7.500.000.000 | 66,67 | 82.330.460.799 | **DPKPTB** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi** | **35** | **35** | | **41,66** | | **48,33** | | **55** | | **61,66** | | **68,33** | | **68,33** | | **DPUPR** |
| 1 | 03 | 11 | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang | 16,7 | 16,7 | 1.552.965.040 | 25 | 2.116.405.040 | 33,33 | 2.116.405.040 | 41,7 | 2.116.405.040 | 50 | 2.116.405.040 | 58,3 | 2.116.405.040 | 58,3 | 12.134.990.240 | **DPUPR** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik** | **50** | **51,85** | | **52,5** | | **55,56** | | **58,08** | | **60,96** | | **63,89** | | **63,89** | | **DPUPR** |
| 1 | 03 | 06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten | | 20,24 | 6.908.832.250 | 29,12 | 6.931.082.250 | 36,11 | 6.931.082.250 | 51,53 | 6.931.082.250 | 56,13 | 6.931.082.250 | 65,64 | 8.000.000.000 | 9,43 | 42.633.161.250 | DPUPR |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik** | **84** | **96** | | **62,5** | | **64,9** | | **67,3** | | **69,7** | | **72,1** | | **72,1** | | **DPUPR** |
| 1 | 03 | 10 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Cakupan infrastruktur jalan kabupaten | 100 | 100 | 336.486.752.315 | 100 | 156.274.492.650 | 100 | 163.487.299.697 | 100 | 158.339.822.493 | 100 | 165.940.641.557 | 100 | 168.471.612.648 | 100 | 1.149.000.621.360 | **DPUPR** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan** | **100** | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **DPUPR** |
| 1 | 03 | 12 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah | 83 | 85 | 3.662.779.770 | 87,5 | 7.666.620.469 | 90 | 7.666.620.469 | 92,5 | 8.166.620.469 | 93 | 13.716.620.469 | 94 | 7.266.620.469 | 94 | 48.145.882.115 | **DPUPR** |
| 2 | 10 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | DPUPR |
| 2 | 10 | 05 | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah | 100 | 100 | 0 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | DPUPR |
| 2 | 10 | 10 | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 1.596.620.469 | 100 | 1.596.620.469 | 100 | 2.096.620.469 | 100 | 2.096.620.469 | 100 | 2.296.620.469 | 100 | 9.783.102.345 | DPUPR |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)** | **5** | **5** | | **10** | | **20** | | **25** | | **40** | | **100** | | **100** | | **DPUPR** |
| | | | | | Persentase jaringan irigasi dalam keadaan baik | 99.99% | 99.99 % | 13.840.788.500 | 13.80 % | 20.624.867.350 | 18.18 % | 20.897.354.085 | 23.30 % | 23.472.089.494 | 28.43 % | 25.314.298.443 | 34.83 % | 27.340.728.287 | 100% | | **DPUPR** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Cakupan ketersediaan air baku** | **100%** | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **100%** | | **DPUPR** |
| 1 | 03 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik | 39 | 39 | 27.317.680.048 | 10,2 | 27.317.680.048 | 18,75 | 27.317.680.048 | 30,11 | 27.392.938.335 | 41,47 | 29.235.147.284 | 55 | 31.261.577.128 | 55 | 169.842.702.891 | **DPUPR** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam** | **Indeks Kualitas Air** | **49.25** | **49,75** | | **50,25** | | **50,75** | | **51,25** | | **51,75** | | **52,25** | | **52,25** | | **DLH** |
| | | | | | **Indeks Kualitas udara** | **82.25** | **82,5** | | **82,75** | | **83** | | **83,25** | | **83,5** | | **83,75** | | **83,75** | | **DLH** |
| 2 | 11 | 02 | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses | 3 Dok | 3 dok | 62.920.000 | 3 dok | 600.000.000 | 3 dok | 600.000.000 | 3 dok | 600.000.000 | 3 dok | 1.000.000.000 | 3 dok | 1.000.000.000 | | 3.862.920.000 | DLH |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 11 | 03 | | Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup | Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L | 250 Sampel | 250 Sampel | 719.988.300 | 300 Sampel | 1.750.800 | 300 Sampel | 1.750.800 | 300 Sampel | 1.750.800 | 300 Sampel | 2.000.000.000 | 300 Sampel | 2.000.000.000 | | 9.972.409.900 | DLH |
| 2 | 11 | 05 | | Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha | 100% | 100% | 89.878.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | | 2.339.878.000 | DLH |
| 2 | 11 | 06 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha | 100% | 100% | 252.396.100 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | | 4.002.396.100 | DLH |
| 2 | 11 | 08 | | Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungaan Hidup untuk masyarakat | Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 189.136.000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 300.000.000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 350.000.000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 375.000.000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 400.000.000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 500.000.000 | | 2.114.136.000 | DLH |
| 2 | 11 | 09 | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 39.545.000 | 5 Kelompok | 500.000.000 | 6 Kelompok | 500.000.000 | 7 Kelompok | 500.000.000 | 8 Kelompok | 500.000.000 | 9 Kelompok | 500.000.000 | | 2.537.625.000 | DLH |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 10 | | Program Penanganan pengaduan Lingkungsan Hidup | Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani | 100% | 100% | 189.009.800 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.659.009.800 | DLH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indeks tutupan Vegetasi** | **69,98** | **69,985** | | **69.99** | | **69.995** | | **70** | | **70.005** | | **70.01** | | **70.01** | | **DLH** |
| 2 | 11 | 04 | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L | 2 Ha | 2 Ha | 255.034.700 | 2 Ha | 600.000.000 | 2 Ha | 600.000.000 | 2 Ha | 600.000.000 | 2 Ha | 750.000.000 | 2 Ha | 1.000.000.000 | 10 ha | 3.805.034.700 | DLH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Penanganan Sampah** | **14,53** | **15,03** | | **17,44** | | **19,85** | | **22,27** | | **24,68** | | **27,09** | | **27,09** | | **DLH** |
| 2 | 11 | 11 | | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah terangkut | 11,53% | 11,99 % | 10.349.978.150 | 14,39 % | 15.820.000.000 | 16,78 % | 15.820.000.000 | 19,18 % | 10.820.000.000 | 21,58 % | 20.820.000.000 | 23,98 % | 20.820.000.000 | 23,98 % | 94.249.978.150 | DLH |
| | | | | | Persentase sampah terkurangi | 3% | 3,02% | | 3,04% | | 3,05% | | 3,07% | | 3,08% | | 3,10% | | 3,10% | | DLH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Rumah Layak Huni** | **89,26%** | **89,26 %** | | **89,88 %** | | **90,49 %** | | **91,10 %** | | **91,72 %** | | **92,33 %** | | **92,33 %** | | **DPKP TB** |
| 1 | 04 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase penyediaan dan rehabilitasi | 100 | 100 | | 100 | 10.200.000.000 | 100 | 10.200.000.000 | 100 | 9.200.000.000 | 100 | 10.200.000.000 | 100 | 12.613.670.000 | 0 | 59.607.715.900 | **DPKP TB** |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin | | 100 | | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 5.000.000.000 | DPKP TB |
| 1 | 04 | 05 | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan | 10 | 10 | 1.041.243.699 | 10 | 4.100.000.000 | 15 | 4.100.000.000 | 20 | 4.100.000.000 | 25 | 6.100.000.000 | 30 | 8.829.303.750 | 30 | 28.270.547.449 | DPKP TB |
| 1 | 04 | 06 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI. KUALIFIKASI. KLASIFIKASI. DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi | 10% | 10% | 0 | 10 | 300.000.000 | 15 | 450.000.000 | 20 | 600.000.000 | 25 | 750.000.000 | 30 | 900.000.000 | 30% | 3.000.000.000 | DPKP TB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Misi 4 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat. untuk optimalisasi penyerapan** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | **tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Tujuan 4.1 :** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **-1,96** | **3,41** | | **2,97** | | **2,42** | | **1,78** | | **2,72** | | **2,56** | | **2,56** | | |
| | | | | **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa** | **Inflasi** | **1,23** | **1,5** | | **1,23** | | **1,5** | | **1,59** | | **1,65** | | **1,93** | | **1,93** | | |
| | | | | | **Tingkat penganggur an Terbuka** | **12,22** | **12** | | **11,89** | | **11,55** | | **11,22** | | **11** | | **10,88** | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.1.1 :** **Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas** | **Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian** | **4,02** | **3,07** | | **2,82** | | **2,84** | | **3,19** | | **2,98** | | **2,96** | | **2,96** | | **DISPERTAN** |
| 3 | 27 | 02 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian | 50 | 55 | 562.324.500 | 60 | 1.000.000.000 | 65 | 1.000.000.000 | 70 | 1.000.000.000 | 75 | 1.000.000.000 | 80 | 1.000.000.000 | 80 | 5.562.324.500 | DISPERTAN |
| | | | | | Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG) | 0,08 | 0,13 | 0 | 0,16 | 500.000.000 | 0,18 | 500.000.000 | 0,19 | 500.000.000 | 0,21 | 500.000.000 | 0,23 | 500.000.000 | 0,23 | 2.500.000.000 | DISPERTAN |
| | | | | | Prosentase Benih / Bibit bersertifikat | 5 | 6 | 0 | 7 | 1.000.000.000 | 9 | 1.000.000.000 | 11 | 1.000.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | 14 | 1.000.000.000 | 14 | 5.000.000.000 | DISPERTAN |
| 3 | 27 | 03 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN | Prosentase Prasarana pertanian dengan | 50 | 55 | 16.282.374.000 | 60 | 10.000.000.000 | 65 | 7.500.000.000 | 67 | 7.500.000.000 | 70 | 10.000.000.000 | 75 | 11.000.000.000 | 75 | 62.282.374.000 | DISPERTAN |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | PRASARANA PERTANIAN | kondisi baik (JUT. embung. RPH. dll) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 10 | 13 | 124.732.504 | 15 | 500.000.000 | 17 | 500.000.000 | 20 | 500.000.000 | 23 | 750.000.000 | 25 | 750.000.000 | 25 | 3.124.732.504 | DISPERTAN |
| 3 | 27 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian | 35 | 40 | 193.030.700 | 45 | 1.000.000.000 | 47 | 1.000.000.000 | 50 | 1.000.000.000 | 55 | 1.000.000.000 | 60 | 1.000.000.000 | 60 | 5.193.030.700 | DISPERTAN |
| 3 | 27 | 06 | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Prosentase perizinan usaha pertanian | 14 | 15 | 0 | 17 | 200.000.000 | 20 | 300.000.000 | 23 | 300.000.000 | 25 | 300.000.000 | 27 | 350.000.000 | 27 | 1.450.000.000 | DISPERTAN |
| | | | | | Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan | 15 | 17 | 0 | 19 | 350.000.000 | 20 | 450.000.000 | 22 | 450.000.000 | 24 | 450.000.000 | 25 | 500.000.000 | 25 | 2.200.000.000 | DISPERTAN |
| 3 | 27 | 07 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan bina kelompok tani | 45 | 50 | 2.330.663.500 | 53 | 2.200.000.000 | 55 | 2.200.000.000 | 57 | 2.200.000.000 | 60 | 2.500.000.000 | 63 | 2.700.000.000 | 63 | 14.130.663.500 | DISPERTAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | **Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan** | **-2,16** | **2,80** | | **1,99** | | **1,48** | | **1,61** | | **1,97** | | **1,76** | | **1,76** | | **DKPP** |
| 3 | 25 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Capaian produksi perikanan tangkap | 79,15 | 81,02 | 22.395.400 | 82,4 | 130.000.000 | 83,6 | 136.500.000 | 84,1 | 136.500.000 | 84,7 | 150.492.000 | 85,8 | 158.000.000 | 85,8 | 733.887.400 | **DKPP** |
| | | | | | Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan | 7,51% | 7,51% | 562.720.000 | 7,51% | 540.800.000 | 7,51% | 567.840.000 | 7,51% | 567.840.000 | 7,51% | 626.044.000 | 7,51% | 657.346.000 | 7,51% | 3.522.590.000 | **DKPP** |
| | | | | | Cakupan bina kelompok nelayan | 3,95 | 3,95 | 27.780.000 | 15,81 | 1.715.000.000 | 17,79 | 1.715.000.000 | 19,76 | 1.715.000.000 | 21,74 | 1.985.330.000 | 23,72 | 208.500.000 | 23,72 | 7.366.610.000 | **DKPP** |
| | | | | | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional | 76,92 | 76,92 | 303.495.000 | 76,92 | 1.834.025.000 | 76,92 | 1.834.025.000 | 76,92 | 1.834.025.000 | 76,92 | 2.123.114.000 | 76,92 | 2.229.200.000 | 76,92 | 10.157.884.000 | **DKPP** |
| | | | | | Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT | 6,57 | 6,57 | 19.824.400 | 6,57 | 50.000.000 | 6,57 | 52.500.000 | 6,57 | 55.125.000 | 6,57 | 57.882.000 | 6,57 | 60.775.000 | 6,57 | 296.106.400 | **DKPP** |
| 3 | 25 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase izin usaha perikanan budidaya | 100% | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 63.000.000 | 100 | 66.150.000 | 100 | 69.458.000 | 100 | 72.930.000 | 100 | 331.538.000 | **DKPP** |
| | | | | | Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil | 5,71 | 5,71 | 13.380.000 | 7,14 | 598.300.000 | 7,14 | 628.215.000 | 7,14 | 628.215.000 | 7,14 | 692.607.000 | 7,14 | 727.238.000 | 7,14 | 3.287.955.000 | **DKPP** |
| | | | | | Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil | 9,46% | 18,91 | 12.300.000 | 28,37 | 125.000.000 | 37,83 | 131.250.000 | 47,28 | 137.813.000 | 56,74 | 144.704.000 | 66,19 | 151.940.000 | 56,74 | 703.007.000 | **DKPP** |
| | | | | | Cakupan bantuan sarana | 1,71% | 4,57 | 520.250.000 | 7,71 | 3.800.000.000 | 10,57 | 3.800.000.000 | 13,43 | 3.800.000.000 | 16,29 | 3.800.000.000 | 19,14 | 3.800.000.000 | 19,14 | 19.520.250.000 | **DKPP** |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | perikanan budidaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Capaian produksi perikanan budidaya | 56,35 | 75,22 | 44.320.000 | 80,2 | 747.000.000 | 85,7 | 747.000.000 | 88,1 | 747.000.000 | 90,2 | 864.745.000 | 91 | 907.984.000 | 91 | 4.058.049.000 | DKPP |
| | | | | | Capaian produksi garam | - | 8,20% | 0 | 22,2 | 900.000.000 | 36,2 | 900.000.000 | 50,2 | 900.000.000 | 64,2 | 900.000.000 | 78,2 | 1.093.950.000 | 78,2 | 4.693.950.000 | DKPP |
| | | | | | Capaian produksi benih ikan | 58,57 | 58,57 | 448.200.000 | 61,5 | 522.960.000 | 64,43 | 549.108.000 | 67,36 | 549.108.000 | 70,29 | 605.392.000 | 73,21 | 635.662.000 | 73,21 | 3.310.430.000 | DKPP |
| | | | | | Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan | 100% | 100% | 215.126.700 | 100% | 168.000.000 | 100% | 176.400.000 | 100% | 176.400.000 | 100% | 194.481.000 | 100% | 204.205.050 | 100% | 1.134.612.750 | DKPP |
| 3 | 25 | 05 | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan | - | 80% | 0 | 80% | 98.790.000 | 80% | 103.730.000 | 80% | 103.730.000 | 80% | 114.362.000 | 80% | 120.080.000 | 80% | 540.692.000 | DKPP |
| 3 | 25 | 06 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil | - | 16 | 0 | 16 | 50.000.000 | 16 | 52.500.000 | 16 | 55.125.000 | 16 | 57.882.000 | 16 | 60.776.000 | 16 | 276.283.000 | DKPP |
| | | | | | Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran | - | 20 | 0 | 20 | 100.526.000 | 20 | 105.553.000 | 20 | 105.553.000 | 20 | 116.372.000 | 20 | 122.190.000 | 20 | 550.194.000 | DKPP |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan | - | 94,59 | 0 | 94,59 | 25.635.000 | 94,59 | 26.917.000 | 94,59 | 26.917.000 | 94,59 | 29.676.000 | 94,59 | 31.160.000 | 94,59 | 140.305.000 | **DKPP** |
| | | | | | Capaian angka Konsumsi Ikan daerah | 37,21 kg/kapita/tahun | 37,46 | 0 | 37,71 | 67.035.000 | 37,96 | 70.387.000 | 38,21 | 70.387.000 | 38,46 | 77.600.000 | 38,71 | 81.482.000 | 38,71 | 366.891.000 | **DKPP** |
| | | | | | Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | - | 0 | 0 | 0 | 617.680.000 | 16 | 617.680.000 | 16 | 617.680.000 | 16 | 715.000.000 | 16 | 750.800.000 | 16 | 3.318.840.000 | **DKPP** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri** | **Proporsi peningkatan SHU koperasi** | **29,00%** | **2%** | | **2%** | | **2%** | | **2%** | | **2%** | | **2%** | | **41%** | | **DISKOPERINDAG** |
| 2 | 17 | 02 | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani | 100% | 100% | 40.000.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | 765.000.000 | DISKOPERINDAG |
| 2 | 17 | 03 | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Tingkat pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan | 0 | 0 | 0 | 6,11 | 47.930.000 | 6,11 | 47.930.000 | 6,11 | 47.930.000 | 6,11 | 47.930.000 | 6,11 | 47.930.000 | 30,55 | 239.650.000 | DISKOPERINDAG |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 04 | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat | 16,67% | 22,15 % | 45.000.000 | 25,68 % | 205.150.000 | 28,90 % | 227.745.000 | 31,86 % | 227.745.000 | 34,57 % | 242.110.000 | 37,08 % | 247.110.000 | 37,08 % | 1.194.860.000 | DISKOPERINDAG |
| 2 | 17 | 05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi terlatih | 100 | 100 | 234.182.400 | 100 | 610.414.800 | 100 | 610.414.800 | 100 | 610.414.800 | 100 | 610.414.800 | 100 | 610.414.800 | 100 | 3.286.256.400 | DISKOPERINDAG |
| 2 | 17 | 06 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Partisipasi Koperasi Aktif | 74,72% | 75,33 | 0 | 76,18 | 1.055.405.000 | 76,97 | 1.055.405.000 | 77,72 | 1.055.405.000 | 78,42 | 1.055.405.000 | 79,07 | 1.055.405.000 | 79,07 | 5.277.025.000 | DISKOPERINDAG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pertumbuhan Wirausaha Baru** | **9,64** | **5** | | **10** | | **10** | | **10** | | **10** | | **10** | | **55** | | DISKOPERINDAG |
| 2 | 17 | 07 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Partisipasi Usaha Mikro | 3,31% | 4 | 156.121.600 | 4 | 1.500.000.000 | 5 | 1.500.000.000 | 6 | 1.500.000.000 | 7 | 1.500.000.000 | 9 | 1.500.000.000 | 9 | 7.656.121.600 | DISKOPERINDAG |
| 2 | 17 | 08 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil | 15,16 | 0,01 | 530.000.000 | 0,01 | 3.150.000.000 | 0,01 | 3.150.000.000 | 0,01 | 3.150.000.000 | 0,01 | 3.150.000.000 | 0,01 | 3.150.000.000 | 0,05 | 16.280.000.000 | DISKOPERINDAG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pertumbuhan PDRB sektor industri** | **-4,28** | **3,99** | | **3,58** | | **3,22** | | **2,28** | | **3,27** | | **3,09** | | **3,09** | | DISKOPERINDAG |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 3 | 31 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan industri baru | 0,29% | 1 | 73.113.426 | 1 | 445.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 305.000.000 | 1 | 310.000.000 | 1 | 315.000.000 | 5 | 1.798.113.426 | DISKOPERINDAG |
| 3 | 31 | 03 | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA | Prosentase perizinan usaha industri | 100 | 100 | 21.750.000 | 100 | 43.500.000 | 100 | 56.000.000 | 100 | 56.000.000 | 100 | 56.000.000 | 100 | 56.000.000 | 100 | 289.250.000 | DISKOPERINDAG |
| 3 | 31 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Cakupan layanan sistem informasi industri nasional | 98,82 | 98,82 | 0 | 98,83 | 120.000.000 | 98,84 | 120.000.000 | 98,85 | 120.000.000 | 98,86 | 120.000.000 | 98,87 | 120.000.000 | 98,87 | 600.000.000 | DISKOPERINDAG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan** | **-1,56** | **2,06** | | **1,43** | | **0,70** | | **0,06** | | **1,03** | | **0,77** | | **0,77** | | DISKOPERINDAG |
| 3 | 30 | 02 | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan | 95,14% | 95 | 0 | 95 | 29.500.000 | 95 | 29.500.000 | 95 | 29.500.000 | 95 | 29.500.000 | 95 | 29.500.000 | 95 | 147.500.000 | DISKOPERINDAG |
| 3 | 30 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Peningkatan Omzet Pedagang | 2 | 2 | 968.136.730 | 2 | 1.739.000.000 | 2 | 1.739.000.000 | 2 | 1.754.000.000 | 2 | 2.000.000.000 | 2 | 2.100.000.000 | 10 | 10.300.136.730 | DISKOPERINDAG |
| 3 | 30 | 04 | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100 | 100 | 29.125.000 | 100 | 210.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 345.000.000 | 100 | 1.504.125.000 | DISKOPERINDAG |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 3 | 30 | 05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai ekspor (U$ dalam juta dollar) | 1000 | 500 | 60.000.000 | 600 | 1.000.000.000 | 700 | 850.000.000 | 800 | 850.000.000 | 900 | 850.000.000 | 1000 | 850.000.000 | 1000 | 4.460.000.000 | DISKOPERINDAG |
| 3 | 30 | 06 | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal | 0,9 | 0,9 | 190.000.000 | 1 | 800.000.000 | 1,5 | 850.000.000 | 2 | 400.000.000 | 2,5 | 450.000.000 | 3 | 450.000.000 | 3 | 3.140.000.000 | DISKOPERINDAG |
| 3 | 30 | 07 | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 4 | 600.000.000 | DISKOPERINDAG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.1.3 :** | **Pertumbuhan Nilai Investasi daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | | | | **Meningkatnya investasi daerah** | **PMA** | **-0,39%** | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | |
| | | | | | **PMDN** | **46,28%** | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | **3%** | | |
| 2 | 18 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | NIlai investasi | 7.90 Trilyun | 5.44 Trilyun | 12.000.000 | 5.60 Trilyun | 450.000.000 | 5.77 Trilyun | 550.000.000 | 5.95 Trilyun | 260.000.000 | 6.12 Trilyun | 400.000.000 | 6.30 Trilyun | 350.000.000 | 6.49 Trilyun | 2.022.000.000 | DPMPTSP |
| 2 | 18 | 03 | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun | 100% | 100% | 97.360.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.547.360.000 | DPMPTSP |
| 2 | 18 | 05 | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu | 100% | 100% | 76.050.000 | 100% | 325.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 375.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.926.050.000 | DPMPTSP |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 18 | 06 | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100% | 100% | 372.462.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.372.462.000 | DPMPTSP |
| 2 | 18 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi | 100% | 100% | 510.220.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 525.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.085.220.000 | DPMPTSP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah** | **Kontribusi PAD Pariwisata** | **16.059.553.821** | **17.000.000.000** | | **17.010.000.000** | | **17.020.000.000** | | **17.030.000.000** | | **17.040.000.000** | | **17.050.000.000** | | **17.050.000.000** | | **DISPORAPAR** |
| 3 | 26 | 02 | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten | 0% | 0% | 0 | 75,76 % | 50.000.000 | 81,82 % | 70.000.000 | 87,88 % | 150.000.000 | 93,94 % | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 720.000.000 | DISPORAPAR |
| | | | | | Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten | 0% | 0% | 0 | 20% | 200.000.000 | 40% | 350.000.000 | 60% | 120.000.000 | 80% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 1.770.000.000 | DISPORAPAR |
| | | | | | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten | 0% | 0% | 204.664.000 | 20% | 300.000.000 | 40% | 340.000.000 | 60% | 390.000.000 | 80% | 510.000.000 | 100% | 520.000.000 | 100% | 2.264.664.000 | DISPORAPAR |
| | | | | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha | 0% | 0% | 0 | 16,67 % | 150.000.000 | 33,33 % | 150.000.000 | 52,78 % | 120.000.000 | 75% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 720.000.000 | DISPORAPAR |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 03 | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten | 0% | 2,03% | 1.114.376.000 | 21,62% | 1.093.000.000 | 41,22% | 1.298.600.000 | 60,81% | 1.535.320.000 | 80,41% | 1.816.384.000 | 100% | 2.171.660.800 | 100% | 9.029.340.800 | DISPORAPAR |
| | | | | | Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten | 1.374.043 | 6.553.829 | 104.548.500 | 2.003.000 | 72.000.000 | 2.403.200 | 86.400.000 | 2.903.600 | 103.680.000 | 3.504.000 | 124.416.000 | 4.304.600 | 149.299.200 | 5.105.200 | 640.343.700 | DISPORAPAR |
| 3 | 26 | 04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI | 0% | 0% | 0 | 0% | 180.430.000 | 25% | 250.000.000 | 50% | 250.000.000 | 75% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 1.630.430.000 | DISPORAPAR |
| 3 | 26 | 05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar | 0% | 0% | 195.016.500 | 8,86% | 95.000.000 | 36,71% | 295.000.000 | 54,43% | 195.000.000 | 82,28% | 295.000.000 | 100% | 195.000.000 | 100% | 1.270.016.500 | DISPORAPAR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja** | **Persentase pencari kerja yang ditempatkan** | **13,38%** | **15%** | | **20%** | | **25%** | | **30%** | | **35%** | | **40%** | | **40%** | | **DISNAKERTRANS** |
| 2 | 07 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Cakupan perencanaan | n/a | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | DISNAKERTRANS |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 03 | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 100% | 100% | 544.300.000 | 100% | 3.078.228.191 | 100% | 3.175.800.000 | 100% | 3.175.800.000 | 100% | 4.375.800.000 | 100% | 4.375.800.000 | 100% | 18.725.728.191 | DISNAKERTRANS |
| 2 | 07 | 04 | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal | 13,38% | 15% | 373.963.600 | 20% | 938.370.000 | 25% | 1.210.000.000 | 30% | 1.210.000.000 | 35% | 1.510.000.000 | 40% | 1.510.000.000 | 40% | 6.752.333.600 | DISNAKERTRANS |
| 2 | 07 | 05 | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial | 71,56% | 72,56 | 447.200.000 | 74,56 | 1.024.400.000 | 75,56 | 1.241.600.000 | 76,56 | 1.416.600.000 | 78,56 | 1.862.300.000 | 79,56 | 2.324.800.000 | 80 | 8.316.900.000 | DISNAKERTRANS |
| 3 | 32 | 03 | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan | n/a | 10KK | 254.674.000 | 15KK | 320.000.000 | 18KK | 345.000.000 | 25KK | 345.000.000 | 30KK | 345.000.000 | 35KK | 345.000.000 | 133KK | 1.954.674.000 | DISNAKERTRANS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.1.6 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa** | **Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM** | **15.03** | **15,03** | | **15,95** | | **16,87** | | **17,79** | | **18,71** | | **19,63** | | **19,63** | | **DPMD** |
| 2 | 13 | 02 | | PROGRAM PENATAAN DESA | Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa | 90% | 100% | 26.020.000.000 | 100% | 13.120.000.000 | 100% | 13.120.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 53.260.000.000 | DPMD |
| 2 | 13 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi | 50% | 100% | 20.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.270.000.000 | DPMD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 13 | 04 | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa | 90,00% | 100,00 % | 427.284.067.600 | 100% | 410.396.022.600 | 100% | 436.995.008.752 | 100% | 435.264.285.367 | 100% | 438.598.947.514 | 100,00 % | 442.000.302.905 | 100,00 % | 2.590.538.634.738 | DPMD |
| 2 | 13 | 05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina | 90% | 100% | 1.199.811.000 | 100% | 1.599.811.000 | 100% | 2.500.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 13.299.622.000 | DPMD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Tujuan 4.2 :** | **Persentase Tingkat Kemiskinan** | **4,94** | **4,5** | | **4,22** | | **4,18** | | **4,1** | | **4,08** | | **4,04** | | **4,04** | | |
| | | | | **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat** | **Indeks Gini Rasio** | **0.303** | **0.286** | | **0.281** | | **0.276** | | **0.271** | | **0.266** | | **0.261** | | **0.261** | | |
| | | | | **Sasaran 4.2.1 :** **Meningkatnya Ketahanan Pangan** | **Indeks Ketahanan Pangan** | **77,07%** | **77,10 %** | | **77,15 %** | | **77,20 %** | | **77,30 %** | | **77,40 %** | | **77,50 %** | | **77,50 %** | | **DKPP** |
| 2 | 09 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 35,00 | 40,00 | 500.000.000 | 80,00 | 1.745.000.000 | 85,00 | 1.745.000.000 | 90,00 | 1.745.000.000 | 95,00 | 1.800.000.000 | 100,00 | 2.121.000.000 | 100 | 9.656.000.000 | **DKPP** |
| 2 | 09 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 95 | 95,25 | 100.070.104 | 95,35 | 1.000.000.000 | 95,4 | 1.000.000.000 | 95,45 | 1.000.000.000 | 95,5 | 1.500.000.000 | 95,55 | 3.609.465.000 | 100 | 8.209.535.104 | **DKPP** |
| | | | | | Capaian skor Pola Pangan Harapan | 88,9 | 77,5 | 609.999.900 | 78 | 864.000.000 | 78,5 | 864.000.000 | 79 | 864.000.000 | 79,5 | 1.500.000.000 | 80 | 2.000.000.000 | 80 | 6.701.999.900 | **DKPP** |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | (PPH) Konsumsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 04 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan | 5,52% | 3,68 | 20.000.000 | 3,07 | 415.750.000 | 2,45 | 436.538.000 | 1,84 | 458.365.000 | 1,23 | 481.290.000 | 0,61 | 505.347.000 | 0,61 | 2.317.290.000 | DKPP |
| 2 | 09 | 05 | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan | 85 | 90% | 70.000.000 | 92% | 326.650.000 | 94% | 342.983.000 | 95% | 360.132.000 | 95% | 378.140.000 | 95% | 397.046.000 | 95% | 1.874.951.000 | DKPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 4.2.2 : Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk** | **Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial** | **17.38** | **3** | | **3** | | **3** | | **3** | | **3** | | **3** | | **3** | | **DINSOS** |
| 1 | 06 | 02 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial | 80% | 80% | 3.356.582.630 | 80% | 1.369.694.900 | 80% | 1.383.648.122 | 80% | 1.424.020.150 | 80% | 1.626.820.160 | 80% | 1.626.820.160 | 80% | 10.673.386.122 | DINSOS |
| 1 | 06 | 03 | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 100% | 100% | 6.228.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 56.228.000 | DINSOS |
| 1 | 06 | 04 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Cakupan rehabilitasi sosial | 35,46% | 16% | 689.984.500 | 7,23% | 1.730.890.000 | 7,23% | 1.458.344.850 | 7,23% | 1.671.344.850 | 7,23% | 1.733.344.840 | 7,23% | 1.833.344.840 | 36,15% | 9.117.253.880 | DINSOS |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 1 | 06 | 05 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial | 5,57% | 5% | 1.623.135.620 | 0,08% | 1.842.343.028 | 0,08% | 1.742.343.028 | 0,08% | 1.683.997.000 | 0,08% | 1.589.197.000 | 0,08% | 1.589.197.000 | 0,40% | 10.070.212.676 | DINSOS |
| 1 | 06 | 06 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | 441.141.280 | 100% | 1.325.768.000 | 100% | 1.209.864.000 | 100% | 1.088.830.000 | 100% | 1.088.830.000 | 100% | 1.118.830.000 | 100% | 6.273.287.280 | DINSOS |
| 1 | 06 | 07 | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik | 100% | 100% | 46.385.80 | 100% | 217.998.972 | 100% | 220.600.000 | 100% | 220.600.000 | 100% | 220.600.000 | 100% | 220.600.000 | 100% | 1.146.784.852 | DINSOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** | **92,14** | **92,02** | | **92,06** | | **92,10** | | **92,14** | | **92,18** | | **92,22** | | **92,22** | | **DKBP3A** |
| 2 | 08 | 02 | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 100 | 100 | 166.499.850 | 100 | 850.000.000 | 100 | 947.800.000 | 100 | 980.080.000 | 100 | 1.130.588.000 | 100 | 1.095.146.800 | 100 | 5.360.114.650 | DKBP3A |
| 2 | 08 | 04 | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS | 44,59% | 45 | 48.439.700 | 46 | 248.000.000 | 46,5 | 278.300.000 | 47 | 306.130.000 | 47,5 | 336.743.000 | 48 | 370.417.300 | 48 | 1.588.030.000 | DKBP3A |
| 2 | 08 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.500.000 | 100 | 30.250.000 | 100 | 33.275.000 | 100 | 36.602.500 | 100 | 40.262.750 | 100 | 192.890.250 | DKBP3A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | **Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking** | **56,17%** | **50%** | | **55%** | | **60%** | | **65%** | | **70%** | | **75%** | | **75%** | | **DKBP 3A** |
| 2 | 08 | 03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai | 31.07 | 30 | 79.533.700 | 30 | 212.500.000 | 30 | 353.750.000 | 30 | 409.125.000 | 30 | 449.037.500 | 30 | 503.941.250 | 30 | 2.007.887.450 | DKBP 3A |
| 2 | 08 | 06 | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif | 0 | 0 | 48.093.000 | 10 | 300.000.000 | 20 | 350.000.000 | 30 | 400.000.000 | 40 | 400.000.000 | 50 | 500.000.000 | 50 | 1.998.093.000 | DKBP 3A |
| 2 | 08 | 07 | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai | 26.55 | 20 | 568.505.000 | 25 | 808.563.500 | 30 | 908.563.500 | 35 | 908.563.500 | 40 | 908.563.500 | 45 | 1.149.828.179 | 45 | 5.252.587.179 | DKBP 3A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Total Fertility Rate** | **2,1** | **2,29** | | **2,26** | | **2,24** | | **2,21** | | **2,19** | | **2,1** | | **2,1** | | **DKBP 3A** |
| 2 | 14 | 03 | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR) | 76,16 | 69,16 | 8.835.963.725 | 69,66 | 8.935.963.725 | 70,16 | 8.935.963.725 | 70,66 | 8.935.963.725 | 71,16 | 9.235.963.725 | 71,66 | 9.535.963.725 | 71,66 | 54.415.782.350 | DKBP 3A |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 14 | 02 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga | 100 | 100 | 1.011.506.000 | 100 | 531.506.000 | 100 | 430.706.000 | 100 | 372.626.000 | 100 | 308.738.000 | 100 | 238.461.200 | 100 | 2.703.543.200 | DKBP3A |
| 2 | 14 | 04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB | 80 | 80 | 1.532.056.000 | 80 | 1.604.559.400 | 80 | 1.650.153.400 | 80 | 1.700.153.400 | 80 | 1.802.218.561 | 80 | 1.852.440.418 | 80 | 10.141.305.059 | DKBP3A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas. Kompeten Dan Profesional** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik** | **Indeks reformasi Birokrasi** | **CC** | **B** | | **B** | | **B** | | **BB** | | **BB** | | **BB** | | **BB** | | |
| | | | | **Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** | **Opini BPK** | **WTP** | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 5 | 02 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 100% | 9.947.283.417 | 100% | 11.500.000.000 | 100% | 11.500.000.000 | 100% | 11.500.000.000 | 100% | 11.500.000.000 | 100% | 12.800.000.000 | 100% | 68.747.283.417 | BPKAD |
| 5 | 02 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. | Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah. | 8 | 8 | 1.057.908.000 | 8 | 1.800.000.000 | 8 | 2.000.000.000 | 8 | 2.000.000.000 | 8 | 2.000.000.000 | 8 | 2.000.000.000 | 40 | 10.857.908.000 | BPKAD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Nilai LPPD** | **3,80** | **4.00** | | **4.10** | | **4.20** | | **4.30 `** | | **4.40** | | **4.50** | | **4.50** | | **SETDA** |
| | | | | **Nilai SAKIP** | **BB** | **BB** | | **BB** | | **BB** | | **BB** | | **BB** | | **A** | | **A** | | |
| 4 | 02 | 02 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD | 100 | 100 | 47.357.695.400 | 100 | 47.357.695.400 | 100 | 47.357.695.400 | 100 | 47.357.695.400 | 100 | 47.357.695.400 | 100 | 47.357.695.400 | 100 | 284.146.172.400 | SETDPRD |
| 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SELURUH OPD |
| | | | | DISDIKBUD | | | 100 | 676.579.057.387 | 100 | 676.779.057.387 | 100 | 676.779.057.387 | 100 | 676.779.057.387 | 100 | 677.379.057.387 | 100 | 677.249.057.387 | 100 | 4.061.574.344.322 | DISDIKBUD |
| | | | | Dinkes | | | 100 | 101.804.969.296 | 100 | 104.171.170.778 | 100 | 104.171.170.778 | 100 | 104.171.170.778 | 100 | 105.171.170.778 | 100 | 105.571.170.778 | 100 | 625.060.823.186 | DINKES |
| | | | | Rumah Sakit dr.Dradjat Prawiranegara | | | 100 | 62.181.400.631 | 100 | 71.341.190.131 | 100 | 71.341.190.131 | 100 | 71.341.190.131 | 100 | 71.641.190.131 | 100 | 72.141.190.131 | 100 | 419.987.351.286 | RS.DRDJATPRAWIRANEGARA |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 100 | 31.934.364.061 | 100 | 34.134.364.061 | 100 | 35.334.364.061 | 100 | 35.534.364.061 | 100 | 35.734.364.061 | 100 | 35.934.364.061 | 100 | 208.606.184.366 | DPUPR |
| | | | | Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan | | | 100 | 11.929.309.590 | 100 | 14.129.309.590 | 100 | 14.329.309.590 | 100 | 14.529.309.590 | 100 | 14.729.309.590 | 100 | 14.929.309.590 | 100 | 84.575.857.540 | DPKPTB |
| | | | | Satuan Polisi Pamong Praja | | | 100 | 11.822.307.475 | 100 | 13.022.307.475 | 100 | 13.222.307.475 | 100 | 13.222.307.475 | 100 | 13.622.307.475 | 100 | 13.822.307.475 | 100 | 78.733.844.850 | SATPOL PP |
| | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 100 | 9.828.120.479 | 100 | 10.628.120.479 | 100 | 10.828.120.479 | 100 | 10.828.120.479 | 100 | 11.228.120.479 | 100 | 11.228.120.479 | 100 | 64.568.722.874 | BPBD |
| | | | | Dinas Sosial | | | 100 | 7.773.349.105 | 100 | 8.273.349.105 | 100 | 8.273.349.105 | 100 | 8.373.349.105 | 100 | 8.573.349.105 | 100 | 8.773.349.105 | 100 | 50.040.094.630 | DINAS SOSIAL |
| | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 100 | 8.264.951.355 | 100 | 9.807.552.364 | 100 | 9.221.150.555 | 100 | 9.056.150.555 | 100 | 9.735.581.555 | 100 | 9.716.781.915 | 100 | 55.802.168.299 | DISNAKERTRANS |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | | 100 | 9.445.589.360 | 100 | 9.845.589.360 | 100 | 9.845.589.360 | 100 | 10.045.589.360 | 100 | 10.245.589.360 | 100 | 10.445.589.360 | 100 | 59.873.536.160 | DKPP |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | 100% | 13.456.076.370 | 100% | 13.856.076.370 | 100% | 13.856.076.370 | 100 | 14.056.076.370 | 100% | 14.256.076.370 | 100% | 14.456.076.370 | 100% | 83.936.458.220 | DLH |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 100 | 19.478.696.212 | 100 | 19.678.696.212 | 100 | 19.878.696.212 | 100 | 20.078.696.212 | 100 | 20.278.696.212 | 100 | 20.478.696.212 | | 119.872.177.272 | DISDUKCAPIL |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 100 | 7.770.957.135 | 100 | 8.170.957.135 | 100 | 8.570.957.135 | 100 | 8.670.957.135 | 100 | 8.670.957.135 | 100 | 8.670.957.135 | | 50.525.742.810 | DPMD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 100 | 10.042.028.225 | 100 | 10.775.018.225 | 100 | 10.822.818.225 | 100 | 10.980.898.225 | 100 | 10.990.285.225 | 100 | 11.216.620.925 | | 64.827.709.050 | DKBP3A |
| | | | | Dinas Perhubungan | | | 100 | 18.042.550.451 | 100 | 18.242.550.451 | 100 | 18.442.550.451 | 100 | 18.642.550.451 | 100 | 18.842.550.451 | 100 | 19.042.550.451 | | 111.255.302.706 | DISHUB |
| | | | | Dinas Komunikasi. Informatika. persandian dan Statistik | | | 100% | 6.188.031.699 | 100% | 6.388.031.699 | 100% | 6.588.031.699 | 100% | 6.788.031.699 | 100% | 6.988.031.699 | 100% | 7.188.031.699 | 100% | 40.128.190.194 | DISKOMINFOSATIK |
| | | | | Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan | | | 100 | 10.423.524.408 | 100 | 10.623.524.408 | 10 | 10.823.524.408 | 100 | 11.023.524.408 | 100 | 11.223.524.408 | 100 | 11.423.524.408 | | 65.541.146.448 | DISKOPERINDAG |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | **100%** | 11.023.471.283 | **100%** | 12.968.471.283 | **100%** | 13.093.471.283 | **100%** | 13.518.471.283 | **100%** | 13.348.471.283 | **100%** | 13.573.471.283 | **100%** | 77.525.827.698 | DPMPTSP |
| | | | | Dinas Pemuda. Olahraga. dan Pariwisata | | | 100 | 6.043.654.995 | 100 | 6.971.714.995 | 100 | 7.286.054.995 | 100 | 7.894.934.995 | 100 | 8.255.190.995 | 100 | 8.707.498.195 | 100 | 45.159.052.670 | DISPORAPAR |
| | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | | | 100 | 5.372.149.307 | 100 | 5.572.149.307 | 100 | 5.772.149.307 | 100 | 5.972.149.307 | 100 | 6.172.149.307 | 100 | 6.372.149.307 | | 35.232.895.842 | DPKD |
| | | | | Dinas Pertanian | | | 100 | 19.641.615.570 | 100 | 19.841.615.570 | 100 | 20.041.615.570 | 100 | 20.241.615.570 | 100 | 20.441.615.570 | 100 | 20.641.615.570 | | 120.849.693.420 | DISPERTAN |
| | | | | Sekretariat Daerah | | | 100 | 29.559.414.233 | 100 | 34.371.718.761 | 100 | 43.392.320.018 | 100 | 43.786.652.197 | 100 | 44.262.335.056 | 100 | 44.516.123.738 | 100 | 239.888.564.003 | SETDA |
| | | | | Sekretariat DPRD | | | 100 | 58.806.467.575 | 100 | 59.006.467.575 | 100 | 59.206.467.575 | 100 | 59.406.467.575 | 100 | 59.606.467.575 | 100 | 59.806.467.575 | | 355.838.805.450 | SETDPRD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | Badan perencanaan Pembangunan Daerah | | | 100 | 9.940.331.477 | 100 | 12.140.331.477 | 100 | 12.383.138.107 | 100 | 12.630.800.869 | 100 | 12.883.416.886 | 100 | 13.141.085.224 | | 73.119.104.039 | BAPPEDA |
| | | | | Badan Pendapatan Daerah | | | 100 | 39.516.082.724 | 100 | 39.716.082.724 | 100 | 39.916.082.724 | 100 | 40.116.082.724 | 100 | 40.316.082.724 | 100 | 40.516.082.724 | | 240.096.496.344 | BAPENDA |
| | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | 100 | 11.874.420.589 | 100 | 12.074.420.589 | 100 | 12.274.420.589 | 100 | 12.474.420.589 | 100 | 12.674.420.589 | 100 | 12.874.420.589 | | 74.246.523.534 | BPKAD |
| | | | | Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | | | 100 | 19.405.283.067 | 100 | 19.605.283.067 | 100 | 19.805.283.067 | 100 | 20.005.283.067 | 100 | 20.205.283.067 | 100 | 20.405.283.067 | 100 | 119.431.698.402 | BKPSDM |
| | | | | Inspektorat daerah | | | 100 | 18.583.365.395 | 100 | 20.933.620.662 | 100 | 21.133.620.662 | 100 | 21.333.620.662 | 100 | 21.533.620.662 | 100 | 21.733.620.662 | 100 | 125.251.468.703 | INSPEKTORAT |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 100 | 799.339.900 | 100 | 7.700.000.000 | 100 | 7.700.000.000 | 100 | 8.100.000.000 | 100 | 8.300.000.000 | 100 | 8.500.000.000 | 100 | 40.300.000.000 | KESBANGPOL |
| | | | | 29 KECAMATAN | | | 100 | 83.072.745.685 | 100 | 84.056.196.052 | 100 | 84.056.196.052 | 100 | 84.056.196.052 | 100 | 84.056.196.052 | 100 | 84.056.196.052 | 100 | 536.607.554.945 | KECAMATAN |
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN | 100 | 100 | 7.000.000.000 | 100 | 18.300.000.000 | 100 | 18.300.000.000 | 100 | 18.300.000.000 | 100 | 18.300.000.000 | 100 | 18.300.000.000 | 100 | 170.010.803.000 | KECAMATAN |
| 7 | 01 | 03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan | 100 | 100 | 3.081.722.700 | 100 | 3.081.722.700 | 100 | 3.081.722.700 | 100 | 3.081.722.700 | 100 | 3.081.722.700 | 100 | 3.081.722.700 | 100 | 18.490.336.200 | KECAMATAN |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 7 | 01 | 05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | 100 | 100 | 16.993.811.500 | 100 | 23.844.577.300 | 100 | 23.844.577.300 | 100 | 23.844.577.300 | 100 | 23.844.577.300 | 100 | 23.844.577.300 | 100 | 31.452.066.000 | KECAMATAN |
| 7 | 01 | 04 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan | 100 | 100 | 2.473.700.000 | 100 | 2.473.700.000 | 100 | 2.473.700.000 | 100 | 2.473.700.000 | 100 | 2.473.700.000 | 100 | 2.473.700.000 | 100 | 14.842.200.000 | KECAMATAN |
| 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan desa dibina | 100 | 100 | 6.450.765.800 | 100 | 6.450.765.800 | 100 | 6.450.765.800 | 100 | 6.450.765.800 | 100 | 6.450.765.800 | 100 | 6.450.765.800 | 100 | 38.704.594.800 | KECAMATAN |
| 2 | 19 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 96,67% | 96,67 % | 375.000.000 | 97,50 % | 375.000.000 | 97,52 % | 375.000.000 | 98,35 % | 375.000.000 | 98,36 % | 375.000.000 | 99,18 % | 375.000.000 | 99,18 % | 2.250.000.000 | DISPORAPAR |
| | | | | | Persentase Wirausaha Muda | 31,38% | 32,71 % | 56.873.000 | 34,04 % | 70.350.000 | 35,37 % | 90.000.000 | 36,70 % | 175.000.000 | 38,03 % | 200.000.000 | 39,36 % | 225.000.000 | 39,36 % | 817.223.000 | DISPORAPAR |
| | | | | | Jumlah Pemuda yang Dibina | 137 Orang | 855 Orang | 1.184.313.000 | 1.730 Orang | 1.274.035.000 | 2.605 Orang | 1.375.000.000 | 3.480 Orang | 1.506.800.000 | 4355 Orang | 1.566.000.000 | 5.230 Orang | 1.630.000.000 | 5.230 Orang | 8.536.148.000 | DISPORAPAR |
| 2 | 19 | 04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka | 99,79% | 99,79 % | 375.000.000 | 99,83 % | 375.000.000 | 99,88 % | 375.000.000 | 99,92 % | 375.000.000 | 99,96 % | 375.000.000 | 100% | 375.000.000 | 100% | 2.250.000.000 | DISPORAPAR |
| 2 | 19 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah atlet muda yang dibina | 246 Atlet | 224 Atlet | 599.265.500 | 704 Atlet | 900.000.000 | 1.494 Atlet | 1.425.000.000 | 1.974 Atlet | 1.575.000.000 | 2.764 Atlet | 1.425.000.000 | 3.244 Atlet | 1.575.000.000 | 3.244 Atlet | 7.499.265.500 | DISPORAPAR |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | Cakupan pembinaan olahraga | 90,57% | 90,57 % | 3.262.370.000 | 92,45 % | 3.150.000.000 | 94,34 % | 3.405.000.000 | 96,23 % | 3.450.000.000 | 98,11 % | 3.475.000.000 | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 20.242.370.000 | DISPORAPAR |
| | | | | | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | 1,64% | - | 0 | 12,05 % | 100.000.000 | 16,88 % | 115.000.000 | 21,70 % | 200.000.000 | 26,52 % | 250.000.000 | 31,34 % | 300.000.000 | 31,34 % | 965.000.000 | DISPORAPAR |
| 8 | 01 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase partai politik yang difasilitasi | 100% | 100% | 2.263.572.500 | 100% | 4.620.000.000 | 100% | 4.515.000.000 | 100% | 72,612,442,218 | 100% | 4.330.000.000 | 100% | 4.720.000.000 | 100% | 125.158.572.500 | KESBANGPOL |
| 8 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100% | 100% | 199.520.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 700.000.000 | 100% | 700.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 3.749.520.000 | KESBANGPOL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK** | **0** | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | | **6** | | |
| 4 | 01 | 02 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program | 100 | 100 | 14.514.816.400 | 100 | 15.323.573.347 | 100 | 19.367.845.000 | 100 | 19.363.504.594 | 100 | 19.391.278.135 | 100 | 19.502.462.664 | 600 | 107.463.480.139 | SETDA |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | 100 | 100 | 42.339.454.446 | 100 | 41.949.594.278 | 100 | 29.064.560.000 | 100 | 29.211.522.121 | 100 | 29.253.411 | 100 | 29.421.152.395 | 600 | 201.239.704.151 | SETDA |
| 4 | 01 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | 100 | 100 | 4.482.054.996 | 100 | 4.147.870.562 | 100 | 4.852.850.854 | 100 | 4.860.590.598 | 100 | 4.867.031.500 | 100 | 4.894.937.789 | 600 | 28.104.806.299 | SETDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **Tingkat Maturitas SPIP** | **3** | **3,11** | | **3,5** | | **3,6** | | **3,7** | | **3,8** | | **4** | | **4** | | **INSPEKTORAT** |
| 6 | 01 | 03 | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. | Persentase perangkat daerah yang | 100 | 100 | 1.372.864 | 100 | 3.729.054 | 100 | 3.965.870 | 100 | 4.147.430 | 100 | 4.347.150 | 100 | 4.566.840 | 100 | 22.129.213.743 | INSPEKTORAT |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan | | | 6.600 | | 1.857 | | 1.346 | | 2.953 | | 0.722 | | 0.267 | | | |
| 6 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah | 100 | 100 | 1.866.304.000 | 100 | 5.296.504.867 | 100 | 5.618.442.307 | 100 | 5.865.261.011 | 100 | 6.150.255.267 | 100 | 6.350.255.267 | 100 | 31.147.022.717 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Pendapatan asli Daerah** | **Tingkat Pertumbuhan PAD** | **1,36%** | **4,07%** | | **1,12%** | | **3,28%** | | **3,33%** | | **3,39%** | | **3,44%** | | **3,44%** | | BAPENDA |
| 5 | 02 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah | 92,13% | 100% | 4.566.127.800 | 100% | 7.075.636.700 | 100% | 7.269.856.300 | 100% | 7.596.175.900 | 100% | 7.768.765.500 | 100% | 7.889.860.100 | 100% | 42.166.422.300 | BAPENDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi** | **Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah** | **100** | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **BAPPEDA** |
| | | | | | **Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah** | **100** | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | **100** | | |
| 5 | 01 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan | 100 | 100 | 2.720.485.367 | 100 | 2.597.178.000 | 100 | 2.750.000.000 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 3.200.000.000 | 100 | 3.140.949.000 | 100 | 17.508.612.367 | BAPPEDA |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada perangkat daerah | 100 | 100 | 3.860.462.150 | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 4.000.000.000 | 100 | 4.200.000.000 | 100 | 24.060.462.150 | BAPPEDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indek Inovasi Daerah** | **inovatif** | **inovatif** | | **inovatif** | | **inovatif** | | **inovatif** | | **inovatif** | | **inovatif** | | **inovatif** | | BAPPEDA |
| 5 | 05 | 02 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan | 100 | 100 | 821.347.000 | 100 | 903.481.700 | 100 | 993.829.870 | 100 | 1.093.212.857 | 100 | 1.202.534.143 | 100 | 1.322.787.557 | 100 | 6.337.193.127 | BAPPEDA |
| | | | | | Prosentase dukungan inovasi daerah | 100 | 100 | 425.946.000 | 100 | 530.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 850.000.000 | 100 | 850.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 4.155.946.000 | BAPPEDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Cakupan data statistic sektoral yang dipublikasikan** | **50,00%** | **50,00 %** | | **60,00 %** | | **70,00 %** | | **80,00 %** | | **90,00 %** | | **100,00 %** | | **100,00 %** | | **DISKOMINFOSATIK** |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 20 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah | 14% | 14% | 718.527.272 | 17% | 701.000.000 | 31% | 966.750.000 | 45% | 1.075.087.500 | 55% | 1.135.091.875 | 70% | 1.192.346.469 | 70% | 5.788.803.116 | DISKOMINFOSATIK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 5.1.5 : Meningkatnya kualitas SDM aparatur** | **Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik** | **94%** | **94%** | | **95%** | | **93%** | | **96%** | | **97%** | | **97%** | | **97%** | **0** | **BKPSDM** |
| 5 | 03 | 02 | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian | 94,90% | 95,00 % | 3.288.399.500 | 95,5% | 3.161.144.000 | 96,00 % | 3.743.984.000 | 96,50 % | 3.554.400.000 | 97,00 % | 3.850.952.000 | 97,50 % | 3.865.320.000 | 97,50 % | 21.464.199.500 | BKPSDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Cakupan standar kompetensi pegawai** | **90%** | **94,10 %** | | **94,50 %** | | **95,00 %** | | **95,50 %** | | **96,00 %** | | **96,00 %** | | **96,00 %** | | **BKPSDM** |
| 5 | 04 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar | 5% | 7% | 1.470.761.000 | 10% | 3.507.000.000 | 20% | 4.382.316.000 | 20% | 5.446.900.000 | 20% | 5.677.848.000 | 20% | 5.663.480.000 | 97% | 26.148.305.000 | **BKPSDM** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Sasaran 5.1.6 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI** | **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)** | **65,00%** | **65,00 %** | | **70,00 %** | | **75,00 %** | | **80,00 %** | | **85,00 %** | | **90,00 %** | | **90,00 %** | | **DISKOMINFOSATIK** |
| 2 | 16 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui | 100% | 100% | 3.575.218.015 | 100% | 3.600.000.000 | 100% | 3.600.000.000 | 100% | 3.759.000.000 | 100% | 3.869.000.000 | 100% | 3.900.000.000 | 100 | 22.303.218.015 | DISKOMINFOSATIK |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | | Media Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indeks Kematangan Penerapan SPBE** | **2.97 (Baik)** | **2.97 (Baik)** | | **2.97 (Baik)** | | **2.98 (Baik)** | | **2.99 (Baik)** | | **3.00 (Baik)** | | **3.01 (Baik)** | | **3.01 (Baik)** | | **DISKOMINFOSATIK** |
| 2 | 16 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah | 40% | 40% | 1.058.039.800 | 50% | 1.200.000.000 | 70% | 1.200.000.000 | 80% | 1.200.000.000 | 90% | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100% | 7.058.039.800 | DISKOMINFOSATIK |
| | | | | | Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah | 40% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | | 90% | | DISKOMINFOSATIK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)** | **100** | **100** | | **120** | | **140** | | **160** | | **170** | | **175** | | **175** | | **DISKOMINFOSATIK** |
| 2 | 21 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | 41% | 41% | 505.323.000 | 48% | 499.000.000 | 51% | 523.950.000 | 58% | 550.147.500 | 65% | 577.654.875 | 68% | 606.537.619 | 68% | 3.262.612.994 | DISKOMINFOSATIK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | **Sasaran 5.1.7 :**<br>**Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **B** | **B** | | **B** | | **B** | | **B** | | **B** | | **B** | | **B** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan** | **58%** | **42.00 %** | | **60.00 %** | | **70.00 %** | | **80.00 %** | | **90.00 %** | | **100%** | | **100%** | | |
| 2 | 23 | 02 | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan | 92,06% | 100 | 78.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 85.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 438.000.000 | DPKD |
| | | | | | Persentase pembinaan perpustakaan Desa | 100% | 54% | 30.000.000 | 65% | 20.000.000 | 77% | 30.000.000 | 88% | 30.000.000 | 88% | 25.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 175.000.000 | DPKD |
| | | | | | Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah | 58% | 67 | 652.524.000 | 67 | 185.000.000 | 100 | 137.000.000 | 100 | 217.000.000 | 100 | 242.800.000 | 100 | 257.800.000 | 100 | 1.692.124.000 | DPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital** | 35.71% | 44.64 % | | 53.57 % | | 62.50 % | | 71.43 % | | 80.36 % | | 100% | | 100% | | |
| 2 | 24 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah | 69,64% | 73% | 131.847.600 | 77% | 70.000.000 | 80% | 113.000.000 | 84% | 113.000.000 | 91% | 147.200.000 | 100% | 187.200.000 | 100% | 762.247.600 | DPKD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 2 | 24 | 03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri | 2,56% | 7,69% | 28.152.400 | 12,82 % | 10.000.000 | 17,95 % | 35.000.000 | 23,08 % | 20.000.000 | 28,21 % | 25.000.000 | 33,33 % | 25.000.000 | 33% | 143.152.400 | DPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Cakupan kepemilikan dokumen adminduk** | **79,12%** | **83,23** | | **84,8** | | **87,4** | | **89,8** | | **92,2** | | **94,6** | | **94,6** | | **DISDUKCAPIL** |
| 2 | 12 | 02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan | 100 | 100 | 119.591.500 | 100 | 985.240.000 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 1.200.000.000 | 100 | 5.604.831.500 | DISDUKCAPIL |
| 2 | 12 | 03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil | 100 | 100 | 11330000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.663.300.000 | DISDUKCAPIL |
| 2 | 12 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Prosentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 100 | 100 | 580.682.900 | 100 | 815.320.000 | 100 | 896.852.000 | 100 | 986.537.200 | 100 | 1.085.190.920 | 100 | 1.193.710.012 | 100 | 5.558.293.032 | **DISDUKCAPIL** |
| 2 | 12 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Terkelola dan tersajinya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang | 100 | 100 | 16.030.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 616.030.000 | **DISDUKCAPIL** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indeks Risiko Bencana** | **203,20** | **203,10** | | **203,05** | | **203,00** | | **202,80** | | **202,50** | | **200,00** | | **200,00** | | **BPBD** |
| 1 | 05 | 04 | | PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran | 100% | 100% | 1.731.810.000 | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | 100% | 15.831.810.000 | BPBD |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| 1 | 05 | 03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana | 100% | 100% | 2.532.880.000 | 100% | 2.750.000.000 | 100% | 2.750.000.000 | 100% | 2.750.000.000 | 100% | 2.750.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | 100% | 16.432.880.000 | **BPBD** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda** | **7,4%** | **5%** | | **5%** | | **5%** | | **5%** | | **5%** | | **5%** | | **5%** | | **SATPOL PP** |
| 7 | 01 | 04 | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani | 60% | 60% | 3.019.274.450 | 65% | 5.533.916.000 | 70% | 5.897.257.600 | 75% | 6.286.983.360 | 75% | 6.586.983.360 | 75% | 6.586.983.360 | 75% | 33.911.398.130 | SATPOL PP |
| | | | | | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | SATPOL PP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Misi 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu. Bermasyarakat Dan Bernegara** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC. | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | |
| | | | | **Tujuan 6.1 :** **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat** | **Indeks Kerukunan Umat Beragama** | **86,45** | **86,9** | | **87,4** | | **87,95** | | **88,5** | | **89** | | **89,5** | | **89,5** | | |
| | | | | **Sasaran 6.1.1 :** **Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama** | **Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **KESBANGPOL** |
| 8 | 01 | 04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan | 100% | 100% | 263.770.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 3.813.770.000 | KESBANGPOL |
| 8 | 01 | 06 | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase konflik sosial terselesaikan | 100% | 100% | 529.599.900 | 100% | 941.751.834 | 100% | 970.664.914 | 100% | 1.200.000.000 | 100% | 1.232.836.897 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 6.174.853.545 | KESBANGPOL |
| 8 | 01 | 05 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA | Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba. kerukunan umat beragama dan kepercayaan | 100% | 100% | 687.090.000 | 100% | 1.140.000.000 | 100% | 1.140.000.000 | 100% | 1.140.000.000 | 100% | 1.240.000.000 | 100% | 1.301.125.126 | 100% | 6.648.215.126 | KESBANGPOL |
| Jumlah | | | | | | | | 3.056.711.791.009 | | 2.992.773.509.182 | | 3.058.029.106.468 | | 3.136.482.782.084 | | 3.144.331.809.572 | | 3.194.184.842.403 | | 18.427.537.289.555 | |

# BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

*"Bab memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan."*

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dan Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

## Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rupiah | Rupiah | Rupiah | Rupiah | Rupiah | Rupiah |
| 1 | **KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH** | **3,061,285,487,661** | **3,006,026,122,913** | **3,052,281,720,198** | **3,130,235,395,815** | **3,138,084,423,303** | **3,187,737,456,134** |
| | Pendapatan Daerah | **2,901,230,182,348** | **2,872,518,453,079** | **2,927,324,114,378** | **2,975,208,285,956** | **3,022,468,121,091** | **3,071,963,672,198** |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 160,055,305,313 | 133,507,669,834 | 124,957,605,820 | 155,027,109,859 | 115,616,302,212 | 115,773,783,936 |
| | | | | | | | |
| 2 | **BELANJA DAERAH** | **3,058,285,487,661** | **2,984,026,122,913** | **3,049,281,720,198** | **3,127,235,395,815** | **3,135,084,423,303** | **3,184,737,456,134** |
| 2.01 | Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1,646,309,723,824 | 1,587,722,802,363 | 1,596,309,723,825 | 1,665,040,881,067 | 1,664,811,714,985 | 1,659,272,872,186 |
| | · Gaji dan Tunjangan | 633,458,796,151 | 646,127,972,074 | 659,050,531,516 | 662,231,542,146 | 685,676,172,989 | 699,389,696,449 |
| | · Belanja Modal dan Pos Belanja Operasi Lainnya | 1,012,850,927,673 | 941,594,830,289 | 937,259,192,309 | 1,002,809,338,921 | 979,135,541,996 | 959,883,175,737 |
| | | | | | | | |
| **2.02** | **Belanja Program Bidang Urusan Terkait dengan Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah** | **957,523,276,176** | **968,354,225,550** | **998,908,451,277** | **1,007,149,698,750** | **1,014,226,996,000** | **1,068,397,957,384** |
| | | | | | | | |
| 2.03 | Belanja Transfer | **449,451,522,600** | **422,949,095,000** | **449,063,545,096** | **450,044,815,998** | **451,045,712,318** | **452,066,626,564** |
| | | | | | | | |
| 2.04 | Belanja Tidak Terduga | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| | | | | | | | |
| | **Sisa Kapasitas Riil** | **3,000,000,000** | **22,000,000,000** | **3,000,000,000** | **3,000,000,000** | **3,000,000,000** | **3,000,000,000** |
| | | | | | | | |
| 3 | **Pengeluaran Pembiayaan** | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Daerah | 3,000,000,000 | 22,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |

## Tabel 7.2. Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Serang

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APM SD | 100,00 | 100,00 | 21,608,877,380 | 100 | 21,608,877,380 | 100 | 22,041,054,928 | 100 | 22,481,876,026 | 100 | 22,931,513,547 | 100 | 23,390,143,818 | 100 | 134,062,343,079 |
| | | | | | APM SMP | 99,45 | 100,00 | 20,836,970,800 | 100 | 20,836,970,800 | 100 | 21,253,710,216 | 100 | 21,678,784,420 | 100 | 22,112,360,109 | 100 | 22,554,607,311 | 100 | 129,273,403,656 |
| | | | | | APK PAUD | 85,28 | 100,00 | 22,282,090,000 | 87 | 22,282,090,000 | 88,5 | 22,727,731,800 | 90 | 23,182,286,436 | 91,5 | 23,645,932,165 | 93 | 24,118,850,808 | 93 | 138,238,981,209 |
| | | | | | Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/setaraan | 100 ,00 | 100,00 | 42,066,759,900 | 100 | 42,066,759,900 | 100 | 42,066,759,900 | 100 | 42,066,759,900 | 100 | 42,908,095,098 | 100 | 42,908,095,098 | 100 | 254,083,229,796 |
| | | | | | **Capaian SPM Bidang Pendidikan** | 83,05 | 83.10 | | 83.15 | | 83.20 | | 83.25 | | 83.30 | | 83.35 | | 83.35 | - |
| 1 | 01 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah | 100 | 100 | 100,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 1,850,000,000 |
| 1 | 01 | 04 | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap rombel | 78,21 | 78,21 | 30,039,815,000 | 81,21 | 30,039,815,000 | 84,21 | 31,541,805,750 | 87,21 | 33,118,896,038 | 90,21 | 34,774,840,839 | 93,21 | 36,513,582,881 | 93,21 | 196,028,755,508 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 01 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Prosentase izin pendidikan dasar. PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat | 100 | 100 | - | 100 | 112,000,000 | 100 | 112,000,000 | 100 | 112,000,000 | 100 | 112,000,000 | 100 | 112,000,000 | 100 | 560,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan | 100% | 100 | 69,031,599,895 | 100 | 41,662,838,500 | 100 | 44,967,444,000 | 100 | 38,791,953,200 | 100 | 59,104,507,325 | 100 | 62,518,847,155 | 100 | 316,077,190,075 |
| | | | | | Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan | 74% | 74 | 21,696,086,920 | 85 | 22,725,000,000 | 90 | 21,696,086,920 | 90 | 22,725,000,000 | 95 | 22,725,000,000 | 98 | 22,725,000,000 | 98 | 134,292,173,840 |
| | | | | | Prosentase Desa Stop BABS | 15 % | 15 | 13,020,000 | 20 | 400,000,000 | 25 | 500,000,000 | 35 | 500,000,000 | 40 | 661,000,000 | 50 | 760,000,000 | 50 | 2,834,020,000 |
| 1 | 02 | 04 | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes | 100% | 100% | 89,370,999 | 100 | 36,000,000 | 100 | 39,000,000 | 100 | 42,000,000 | 100 | 45,000,000 | 100 | 48,000,000 | 100 | 299,370,999 |
| 1 | 02 | 05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Prosentase Posyandu aktif | 55 % | 55 | 7,623,783,500 | 55 | 7,420,830,000 | 60 | 8,627,921,500 | 65 | 8,113,783,500 | 70 | 9,108,171,500 | 75 | 8,980,209,001 | 75 | 49,874,699,001 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 0 % | 60 | 30,000,000 | 60 | 700,000,000 | 70 | 900,000,000 | 80 | 960,000,000 | 90 | 1,190,250,000 | 100 | 1,368,437,000 | 100 | 5,148,687,000 |
| 1 | 02 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100 % | 100 | 1,054,350,000 | 100 | 1,213,370,000 | 100 | 1,344,009,000 | 100 | 1,489,571,000 | 100 | 1,585,618,800 | 100 | 1,834,510,000 | 100 | 8,521,428,800 |
| 1 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas | 100 | 100 | 64,166,201,482 | 100 | 65,770,356,519 | 100 | 67,374,511,556 | 100 | 68,978,666,593 | 100 | 70,582,821,630 | 100 | 72,186,976,667 | 10% | 409,059,534,447 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan | 80.07% | 90% | 19,995,000 | 90% | 150,000,000 | 90% | 150,000,000 | 90% | 150,000,000 | 90% | 150,000,000 | 90% | 150,000,000 | 90% | 769,995,000 |
| | | | | | Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik | 66% | 66% | 655,649,952 | 72% | 2,889,000,000 | 76% | 3,000,000,000 | 83% | 3,200,000,000 | 86% | 3,300,000,000 | 90% | 3,300,000,000 | 90% | 16,344,649,952 |
| 1 | 02 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi | 20% | 25% | - | 25% | 150,000,000 | 25% | 250,000,000 | 25% | 250,000,000 | 25% | 250,000,000 | 25% | 250,000,000 | 100% | 1,150,000,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Penerimaan Pendapatan RS | 100% | 100% | 172,010,571,597 | 100% | 176,372,551,137 | 100% | 180,781,864,915 | 100% | 185,301,411,538 | 100% | 189,933,946,827 | 100% | 194,682,295,497 | 100% | 1,099,082,641,511 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 11 | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang | 16.7 | 16.7 | 1,552,965,040 | 25 | 2,116,405,040 | 33.33 | 2,116,405,040 | 41.7 | 2,116,405,040 | 50 | 2,116,405,040 | 58.3 | 2,116,405,040 | 58.3 | 12,134,990,240 |
| 1 | 03 | 06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten | | 20.24 | 6,908,832,250 | 29.12 | 6,931,082,250 | 36.11 | 6,931,082,250 | 51.53 | 6,931,082,250 | 56.13 | 6,931,082,250 | 65.64 | 8,000,000,000 | 9.43 | 42,633,161,250 |
| 1 | 03 | 10 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Cakupan infrastruktur jalan kabupaten | 100 | 100 | 336,486,752,315 | 100 | 156,274,492,650 | 100 | 163,487,299,697 | 100 | 158,339,822,493 | 100 | 165,940,641,557 | 100 | 168,471,612,648 | 100 | 1,149,000,621,360 |
| 1 | 03 | 12 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah | 83 | 85 | 3,662,779,770 | 87.5 | 7,666,620,469 | 90 | 7,666,620,469 | 92.5 | 8,166,620,469 | 93 | 13,716,620,469 | 94 | 7,266,620,469 | 94 | 48,145,882,115 |
| | | | | | Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) | **5** | **5** | **13,840,788,500** | **10** | **20,624,867,350** | **20** | **20,897,354,085** | **25** | **23,472,089,494** | **40** | **25,314,298,443** | **100** | **27,340,728,287** | **100** | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 03 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik | 39 | 39 | 27,317,680,048 | 10.2 | 27,317,680,048 | 18.75 | 27,317,680,048 | 30.11 | 27,392,938,335 | 41.47 | 29,235,147,284 | 55 | 31,261,577,128 | 55 | 169,842,702,891 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 17,124,999,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 03 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM | 88.58 | 89.01 | 19,140,782,661 | 89.53 | 22,000,000,000 | 89.95 | 22,000,000,000 | 90.35 | 22,000,000,000 | 90.73 | 22,000,000,000 | 91.08 | 30,840,000,000 | 91.08 | 137,980,782,661 |
| 1 | 03 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik | 65.92 | 67.01 | 8,958,787,230 | 68.62 | 6,516,298,152 | 69.9 | 10,097,557,782 | 71.07 | 10,097,557,782 | 72.18 | 15,190,243,207 | 73.27 | 17,240,931,848 | 73.27 | 68,101,376,001 |
| **1** | **03** | **07** | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani | | | 7,194,045,900 | 20 | 2,000,000,000 | 30 | 2,000,000,000 | 40 | 2,000,000,000 | 50 | 2,000,000,000 | 60 | 2,000,000,000 | 60 | 10,000,000,000 |
| 1 | 03 | 08 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB | 15 | 17 | 32,932,617,625 | 19 | 47,000,000,000 | 21 | 50,000,000,000 | 23 | 50,000,000,000 | 25 | 50,000,000,000 | 27 | 50,000,000,000 | 27 | 279,932,617,625 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 03 | 09 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur | 15 | 17 | 12,035,387,475 | 19 | 25,790,000,000 | 21 | 25,790,000,000 | 23 | 20,790,000,000 | 25 | 30,950,868,750 | 27 | 34,164,412,188 | 27 | 149,520,668,413 |
| 1 | 04 | 03 | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh | 10 | 10 | 408,392,200 | 10 | 300,000,000 | 15 | 300,000,000 | 20 | 300,000,000 | 25 | 300,000,000 | 30 | 300,000,000 | 30 | 1,800,000,000 |
| 1 | 04 | 04 | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh | 6.5 | 6.82 | 15,830,460,799 | 18.18 | 19,500,000,000 | 22.22 | 19,500,000,000 | 28.57 | 11,000,000,000 | 40 | 11,000,000,000 | 66.67 | 7,500,000,000 | 66.67 | 82,330,460,799 |
| 1 | 04 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota | 100 | 100 | | 100 | 10,200,000,000 | 100 | 10,200,000,000 | 100 | 9,200,000,000 | 100 | 10,200,000,000 | 100 | 12,613,670,000 | 0 | 59,607,715,900 |
| | | | | | Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin | | 100 | | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 5,000,000,000 |
| 1 | 04 | 05 | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan | 10 | 10 | 1,041,243,699 | 10 | 4,100,000,000 | 15 | 4,100,000,000 | 20 | 4,100,000,000 | 25 | 6,100,000,000 | 30 | 8,829,303,750 | 30 | 28,270,547,449 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 04 | 06 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI. KUALIFIKASI. KLASIFIKASI. DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi | 10% | 10% | 0 | 10 | 300,000,000 | 15 | 450,000,000 | 20 | 600,000,000 | 25 | 750,000,000 | 30 | 900,000,000 | 30% | 3,000,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | 13% | 13% | 30,272,932,511 | 13% | 33,115,001,066 | 13% | 33,115,001,066 | 14% | 32,115,001,066 | 14% | 38,326,924,672 | 14% | 38,326,924,672 | 14% | 205,271,785,053 |
| 2 | 15 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut | 0 | 0% | 1,181,018,750 | 25% | 2,156,525,000 | 25% | 2,156,525,000 | 25% | 3,000,000,000 | 25% | 3,100,000,000 | 25% | 3,200,000,000 | 0.25 | 14,794,068,750 |
| 2 | 15 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin | 0 | 0.00 % | 0 | 20% | 100,000,000 | 20% | 100,000,000 | 20% | 110,000,000 | 20% | 110,000,000 | 20% | 100,000,000 | 0.2 | 520,000,000 |
| 2 | 15 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin | 0% | 0% | 0 | 50% | 600,000,000 | 50% | 600,000,000 | 50% | 600,000,000 | 50% | 600,000,000 | 50% | 600,000,000 | 50% | 3,000,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | **KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani | 60% | 60% | 3,019,274,450 | 65% | 5,533,916,000 | 70% | 5,897,257,600 | 75% | 6,286,983,360 | 75% | 6,586,983,360 | 75% | 6,586,983,360 | 75% | 33,911,398,130 |
| | | | | | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 1 | 05 | 04 | | PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran | 100% | 100% | 1,731,810,000 | 100% | 2,400,000,000 | 100% | 2,600,000,000 | 100% | 3,000,000,000 | 100% | 3,000,000,000 | 100% | 3,100,000,000 | 100% | 15,831,810,000 |
| 1 | 05 | 03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana | 100% | 100% | 2,532,880,000 | 100% | 2,750,000,000 | 100% | 2,750,000,000 | 100% | 2,750,000,000 | 100% | 2,750,000,000 | 100% | 2,900,000,000 | 100% | 16,432,880,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 8 | 01 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase partai politik yang difasilitasi | 100% | 100% | 2,263,572,500 | 100% | 4,620,000,000 | 100% | 4,515,000,000 | 100% | 72,612,442,218 | 100% | 4,330,000,000 | 100% | 4,720,000,000 | 100% | 125,158,572,500 |
| 8 | 01 | 04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan | 100% | 100% | 263,770,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 850,000,000 | 100% | 3,813,770,000 |
| 8 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100% | 100% | 199,520,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 700,000,000 | 100% | 700,000,000 | 100% | 850,000,000 | 100% | 3,749,520,000 |
| 8 | 01 | 06 | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase konflik sosial terselesaikan | 100% | 100% | 529,599,900 | 100% | 941,751,834 | 100% | 970,664,914 | 100% | 1,200,000,000 | 100% | 1,232,836,897 | 100% | 1,300,000,000 | 100% | 6,174,853,545 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 8 | 01 | 05 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA | Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba. kerukunan umat beragama dan kepercayaan | 100% | 100% | 687,090,000 | 100% | 1,140,000,000 | 100% | 1,140,000,000 | 100% | 1,140,000,000 | 100% | 1,240,000,000 | 100% | 1,301,125,126 | 100% | 6,648,215,126 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial | 80% | 80% | 3,356,582,630 | 80% | 1,369,694,900 | 80% | 1,383,648,122 | 80% | 1,424,020,150 | 80% | 1,626,820,160 | 80% | 1,626,820,160 | 80% | 10,673,386,122 |
| 1 | 06 | 03 | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 100% | 100% | 6,228,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 56,228,000 |
| 1 | 06 | 04 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Cakupan rehabilitasi sosial | 35,46% | 16% | 689,984,500 | 7.23% | 1,730,890,000 | 7.23% | 1,458,344,850 | 7.23% | 1,671,344,850 | 7.23% | 1,733,344,840 | 7.23% | 1,833,344,840 | 36.15% | 9,117,253,880 |
| 1 | 06 | 05 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial | 5,57% | 5% | 1,623,135,620 | 0.08% | 1,842,343,028 | 0.08% | 1,742,343,028 | 0.08% | 1,683,997,000 | 0.08% | 1,589,197,000 | 0.08% | 1,589,197,000 | 0.40% | 10,070,212,676 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 1 | 06 | 06 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | 441,141,280 | 100% | 1,325,768,000 | 100% | 1,209,864,000 | 100% | 1,088,838,000 | 100% | 1,088,838,000 | 100% | 1,118,838,000 | 100% | 6,273,287,280 |
| 1 | 06 | 07 | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik | 100% | 100% | 46,385,880 | 100% | 217,998,972 | 100% | 220,600,000 | 100% | 220,600,000 | 100% | 220,600,000 | 100% | 220,600,000 | 100% | 1,146,784,852 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KETENAGAKERJAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Cakupan perencanaan ketenagakerjaan | n/a | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 1,500,000,000 |
| 2 | 07 | 03 | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 100% | 100% | 544,300,000 | 100% | 3,078,228,191 | 100% | 3,175,800,000 | 100% | 3,175,800,000 | 100% | 4,375,800,000 | 100% | 4,375,800,000 | 100% | 18,725,728,191 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 07 | 04 | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal | 13.38% | 15% | 373,963,600 | 20% | 938,370,000 | 25% | 1,210,000,000 | 30% | 1,210,000,000 | 35% | 1,510,000,000 | 40% | 1,510,000,000 | 40% | 6,752,333,600 |
| 2 | 07 | 05 | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial | 71.56% | 72.56 | 447,200,000 | 74.56 | 1,024,400,000 | 75.56 | 1,241,600,000 | 76.56 | 1,416,600,000 | 78.56 | 1,862,300,000 | 79.56 | 2,324,800,000 | 80 | 8,316,900,000 |
| 3 | 32 | 03 | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan | n/a | 10KK | 254,674,000 | 15KK | 320,000,000 | 18KK | 345,000,000 | 25KK | 345,000,000 | 30KK | 345,000,000 | 35KK | 345,000,000 | 133KK | 1,954,674,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 100 | 100 | 166,499,850 | 100 | 850,000,000 | 100 | 947,800,000 | 100 | 980,080,000 | 100 | 1,130,588,000 | 100 | 1,095,146,800 | 100 | 5,360,114,650 |
| 2 | 08 | 04 | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS | 44.59% | 45 | 48,439,700 | 46 | 248,000,000 | 46.5 | 278,300,000 | 47 | 306,130,000 | 47.5 | 336,743,000 | 48 | 370,417,300 | 48 | 1,588,030,000 |
| 2 | 08 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak | 100 | 100 | 0 | 100 | 27,500,000 | 100 | 30,250,000 | 100 | 33,275,000 | 100 | 36,602,500 | 100 | 40,262,750 | 100 | 192,890,250 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 08 | 03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai | 31.07 | 30 | 79,533,700 | 30 | 212,500,000 | 30 | 353,750,000 | 30 | 409,125,000 | 30 | 449,037,500 | 30 | 503,941,250 | 30 | 2,007,887,450 |
| 2 | 08 | 06 | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif | 0 | 0 | 48,093,000 | 10 | 300,000,000 | 20 | 350,000,000 | 30 | 400,000,000 | 40 | 400,000,000 | 50 | 500,000,000 | 50 | 1,998,093,000 |
| 2 | 08 | 07 | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai | 26.55 | 20 | 568,505,000 | 25 | 808,563,500 | 30 | 908,563,500 | 35 | 908,563,500 | 40 | 908,563,500 | 45 | 1,149,828,179 | 45 | 5,252,587,179 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR ) | 76.16 | 69.16 | 8,835,963,725 | 69.66 | 8,935,963,725 | 70.16 | 8,935,963,725 | 70.66 | 8,935,963,725 | 71.16 | 9,235,963,725 | 71.66 | 9,535,963,725 | 71.66 | 54,415,782,350 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 14 | 02 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga | 100 | 100 | 1,011,506,000 | 100 | 531,506,000 | 100 | 430,706,000 | 100 | 372,626,000 | 100 | 308,738,000 | 100 | 238,461,200 | 100 | 2,703,543,200 |
| 2 | 14 | 04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB | 80 | 80 | 1,532,056,000 | 80 | 1,604,559,400 | 80 | 1,650,015,340 | 80 | 1,700,015,340 | 80 | 1,802,218,561 | 80 | 1,852,440,418 | 80 | 10,141,305,059 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 35.00 | 40.00 | 500,000,000 | 80.00 | 1,745,000,000 | 85.00 | 1,745,000,000 | 90.00 | 1,745,000,000 | 95.00 | 1,800,000,000 | 100.00 | 2,121,000,000 | 100 | 9,656,000,000 |
| 2 | 09 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 95 | 95.25 | 100,070,104 | 95.35 | 1,000,000,000 | 95.4 | 1,000,000,000 | 95.45 | 1,000,000,000 | 95.5 | 1,500,000,000 | 95.55 | 3,609,465,000 | 100 | 8,209,535,104 |
| | | | | | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 88.9 | 77.5 | 609,999,900 | 78 | 864,000,000 | 78.5 | 864,000,000 | 79 | 864,000,000 | 79.5 | 1,500,000,000 | 80 | 2,000,000,000 | 80 | 6,701,999,900 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 09 | 04 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan | 5.52% | 3.68 | 20,000,000 | 3.07 | 415,750,000 | 2.45 | 436,538,000 | 1.84 | 458,365,000 | 1.23 | 481,290,000 | 0.61 | 505,347,000 | 0.61 | 2,317,290,000 |
| 2 | 09 | 05 | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan | 85 | 90% | 70,000,000 | 92% | 326,650,000 | 94% | 342,983,000 | 95% | 360,132,000 | 95% | 378,140,000 | 95% | 397,046,000 | 95% | 1,874,951,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi | 100 | 100 | 0 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 1,000,000,000 |
| 2 | 10 | 05 | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah | 100 | 100 | 0 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 2,500,000,000 |
| 2 | 10 | 10 | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | 100 | 100 | 100,000,000 | 100 | 1,596,620,469 | 100 | 1,596,620,469 | 100 | 2,096,620,469 | 100 | 2,096,620,469 | 100 | 2,296,620,469 | 100 | 9,783,102,345 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 02 | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses | 3 Dok | 3 dok | 62,920,000 | 3 dok | 600,000,000 | 3 dok | 600,000,000 | 3 dok | 600,000,000 | 3 dok | 1,000,000,000 | 3 dok | 1,000,000,000 | | 3,862,920,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 11 | 03 | | Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup | Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L | 250 Sampel | 250 Sampel | 719,988,300 | 300 Sampel | 1,750,807,200 | 300 Sampel | 1,750,807,200 | 300 Sampel | 1,750,807,200 | 300 Sampel | 2,000,000,000 | 300 Sampel | 2,000,000,000 | | 9,972,409,900 |
| 2 | 11 | 05 | | Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/ usaha | 100% | 100% | 89,878,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 600,000,000 | | 2,339,878,000 |
| 2 | 11 | 06 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha | 100% | 100% | 252,396,100 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | | 4,002,396,100 |
| 2 | 11 | 08 | | Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungaan Hidup untuk masyarakat | Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 189,136,000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 300,000,000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 350,000,000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 375,000,000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 400,000,000 | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 500,000,000 | | 2,114,136,000 |
| 2 | 11 | 09 | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/ | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 39,545,000 | 5 Kelompok | 500,000,000 | 6 Kelompok | 500,000,000 | 7 Kelompok | 500,000,000 | 8 Kelompok | 500,000,000 | 9 Kelompok | 500,000,000 | | 2,537,625,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 10 | | Program Penanganan pengaduan Lingkungsan Hidup | Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani | 100% | 100% | 189,009,800 | 100% | 500,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 2,659,009,800 |
| 2 | 11 | 04 | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L | 2 Ha | 2 Ha | 255,034,700 | 2 Ha | 600,000,000 | 2 Ha | 600,000,000 | 2 Ha | 600,000,000 | 2 Ha | 750,000,000 | 2 Ha | 1,000,000,000 | 10 ha | 3,805,034,700 |
| 2 | 11 | 11 | | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase sampah terangkut | 11.53% | 11.99% | 10,349,978,150 | 14.39% | 15,820,000,000 | 16.78% | 15,820,000,000 | 19.18% | 10,820,000,000 | 21.58% | 20,820,000,000 | 23.98% | 20,820,000,000 | 23.98% | 94,249,978,150 |
| | | | | | Persentase sampah terkurangi | 3% | 3.02% | | 3.04% | | 3.05% | | 3.07% | | 3.08% | | 3.10% | | 3.10% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan | 100 | 100 | 119,591,500 | 100 | 985,240,000 | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 1,100,000,000 | 100 | 1,200,000,000 | 100 | 1,200,000,000 | 100 | 5,604,831,500 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 12 | 03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil | 100 | 100 | 113300000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 100 | 1,663,300,000 |
| 2 | 12 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Prosentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 100 | 100 | 580,682,900 | 100 | 815,320,000 | 100 | 896,852,000 | 100 | 986,537,200 | 100 | 1,085,190,920 | 100 | 1,193,710,012 | 100 | 5,558,293,032 |
| 2 | 12 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang | 100 | 100 | 16,030,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 100 | 616,030,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 02 | | PROGRAM PENATAAN DESA | Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa | 90% | 100% | 26,020,000,000 | 100% | 13,120,000,000 | 100% | 13,120,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 53,260,000,000 |
| 2 | 13 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi | 50% | 100% | 20,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 250,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 1,270,000,000 |
| 2 | 13 | 04 | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa | 90.00% | 100.00% | 427,284,067,600 | 100% | 410,396,022,600 | 100% | 436,995,008,752 | 100% | 435,264,285,367 | 100% | 438,598,947,514 | 100.00% | 442,000,302,905 | 100.00% | 2,590,538,634,738 |
| 2 | 13 | 05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina | 90% | 100% | 1,199,811,000 | 100% | 1,599,811,000 | 100% | 2,500,000,000 | 100% | 2,500,000,000 | 100% | 2,500,000,000 | 100% | 3,000,000,000 | 100% | 13,299,622,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)** | **65%** | **65%** | | **70%** | | **75%** | | **80%** | | **85%** | | **90%** | | **90%** | |
| 2 | 16 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi | 100% | 100% | 3,575,218,015 | 100% | 3,600,000,000 | 100% | 3,600,000,000 | 100% | 3,759,000,000 | 100% | 3,869,000,000 | 100% | 3,900,000,000 | 100 | 22,303,218,015 |
| 2 | 16 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah | 40% | 40% | 1,058,039,800 | 50% | 1,200,000,000 | 70% | 1,200,000,000 | 80% | 1,200,000,000 | 90% | 1,200,000,000 | 100 | 1,200,000,000 | 100% | 7,058,039,800 |
| | | | | | Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah | 40% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | | 90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 02 | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani | 100% | 100% | 40,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 145,000,000 | 100% | 765,000,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 2 | 17 | 03 | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Tingkat pengawasanKoperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 47,930,000 | 6.11 | 47,930,000 | 6.11 | 47,930,000 | 6.11 | 47,930,000 | 6.11 | 47,930,000 | 30.55 | 239,650,000 |
| 2 | 17 | 04 | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat | 16.67% | 22.15% | 45,000,000 | 25.68% | 205,150,000 | 28.90% | 227,745,000 | 31.86% | 227,745,000 | 34.57% | 242,110,000 | 37.08% | 247,110,000 | 37.08% | 1,194,860,000 |
| 2 | 17 | 05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi terlatih | 100 | 100 | 234,182,400 | 100 | 610,414,800 | 100 | 610,414,800 | 100 | 610,414,800 | 100 | 610,414,800 | 100 | 610,414,800 | 100 | 3,286,256,400 |
| 2 | 17 | 06 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Partisipasi Koperasi Aktif | 74.72% | 75.33 | 0 | 76.18 | 1,055,405,000 | 76.97 | 1,055,405,000 | 77.72 | 1,055,405,000 | 78.42 | 1,055,405,000 | 79.07 | 1,055,405,000 | 79.07 | 5,277,025,000 |
| 2 | 17 | 07 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Partisipasi Usaha Mikro | 3.31% | 4 | 156,121,600 | 4 | 1,500,000,000 | 5 | 1,500,000,000 | 6 | 1,500,000,000 | 7 | 1,500,000,000 | 9 | 1,500,000,000 | 9 | 7,656,121,600 |
| 2 | 17 | 08 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil | 15,16 | 0.01 | 530,000,000 | 0.01 | 3,150,000,000 | 0.01 | 3,150,000,000 | 0.01 | 3,150,000,000 | 0.01 | 3,150,000,000 | 0.01 | 3,150,000,000 | 0.05 | 16,280,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | NIlai investasi | 7.90 Trilyun | 5.44 Trilyun | 12,000,000 | 5.60 Trilyun | 450,000,000 | 5.77 Trilyun | 550,000,000 | 5.95 Trilyun | 260,000,000 | 6.12 Trilyun | 400,000,000 | 6.30 Trilyun | 350,000,000 | 6.49 Trilyun | 2,022,000,000 |
| 2 | 18 | 03 | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun | 100% | 100% | 97,360,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 1,547,360,000 |
| 2 | 18 | 05 | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu | 100% | 100% | 76,050,000 | 100% | 325,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 375,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 400,000,000 | 100% | 1,926,050,000 |
| 2 | 18 | 06 | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100% | 100% | 372,462,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 300,000,000 | 100% | 350,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 2,372,462,000 |
| 2 | 18 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi | 100% | 100% | 510,220,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 450,000,000 | 100% | 500,000,000 | 100% | 525,000,000 | 100% | 600,000,000 | 100% | 3,085,220,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 96.67% | 96.67% | 375,000,000 | 97.50% | 375,000,000 | 97.52% | 375,000,000 | 98.35% | 375,000,000 | 98.36% | 375,000,000 | 99.18% | 375,000,000 | 99.18% | 2,250,000,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | Persentase Wirausaha Muda | 31.38% | 32.71% | 56,873,000 | 34.04% | 70,350,000 | 35.37% | 90,000,000 | 36.70% | 175,000,000 | 38.03% | 200,000,000 | 39.36% | 225,000,000 | 39.36% | 817,223,000 |
| | | | | | Jumlah Pemuda yang Dibina | 137 Orang | 855 Orang | 1,184,313,000 | 1.730 Orang | 1,274,035,000 | 2.605 Orang | 1,375,000,000 | 3.480 Orang | 1,506,800,000 | 4355 Orang | 1,566,000,000 | 5.230 Orang | 1,630,000,000 | 5.230 Orang | 8,536,148,000 |
| 2 | 19 | 04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka | 99.79% | 99.79% | 375,000,000 | 99.83% | 375,000,000 | 99.88% | 375,000,000 | 99.92% | 375,000,000 | 99.96% | 375,000,000 | 100% | 375,000,000 | 100% | 2,250,000,000 |
| 2 | 19 | 03 | | PROGRAM PENG. KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah atlet muda yang dibina | 246 Atlet | 224 Atlet | 599,265,500 | 704 Atlet | 900,000,000 | 1.494 Atlet | 1,425,000,000 | 1.974 Atlet | 1,575,000,000 | 2.764 Atlet | 1,425,000,000 | 3.244 Atlet | 1,575,000,000 | 3.244 Atlet | 7,499,265,500 |
| | | | | | Cakupan pembinaan olahraga | 90.57% | 90.57% | 3,262,370,000 | 92.45% | 3,150,000,000 | 94.34% | 3,405,000,000 | 96.23% | 3,450,000,000 | 98.11% | 3,475,000,000 | 100% | 3,500,000,000 | 100% | 20,242,370,000 |
| | | | | | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | 1.64% | - | 0 | 12.05% | 100,000,000 | 16.88% | 115,000,000 | 21.70% | 200,000,000 | 26.52% | 250,000,000 | 31.34% | 300,000,000 | 31.34% | 965,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah | 14% | 14% | 718,527,272 | 17% | 701,000,000 | 31% | 966,750,000 | 45% | 1,075,087,500 | 55% | 1,135,091,875 | 70% | 1,192,346,469 | 70% | 5,788,803,116 |
| | | | | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | 41% | 41% | 505,323,000 | 48% | 499,000,000 | 51% | 523,950,000 | 58% | 550,147,500 | 65% | 577,654,875 | 68% | 606,537,619 | 68% | 3.262.612.994 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Cakupan kelompok budaya yang dibina | 30,00 | 30,00 | 671,415,950 | 35,00 | 1,000,000,000 | 42,50 | 1,530,000,000 | 57,50 | 1,680,000,000 | 67,50 | 1,680,000,000 | 72,50 | 1,680,000,000 | 72,50 | 8,241,415,950 |
| 2 | 22 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Cakupan kelompok kesenian yangdibina | 30,00 | 30,00 | 157,574,000 | 35,00 | 1,000,000,000 | 42,50 | 1,530,000,000 | 57,50 | 1,680,000,000 | 67,50 | 1,680,000,000 | 72,50 | 1,680,000,000 | 72,50 | 7,727,574,000 |
| 2 | 22 | 04 | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | | 9,36 | 150,000,000 | 12,49 | 150,000,000 | 18,73 | 150,000,000 | 28,09 | 150,000,000 | 31,32 | 150,000,000 | 31,32 | 750,000,000 |
| 2 | 22 | 05 | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 25,64 | 25,64 | 171,010,000 | 38,46 | 300,000,000 | 51,28 | 350,000,000 | 64,10 | 400,000,000 | 84,62 | 450,000,000 | 100,00 | 500,000,000 | 100,00 | 2,171,010,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 02 | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan | 92.06% | 100 | 78,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100 | 55,000,000 | 100 | 60,000,000 | 100 | 85,000,000 | 100 | 130,000,000 | 100 | 438,000,000 |
| | | | | | Persentase pembinaan perpustakaan Desa | 100% | 54% | 30,000,000 | 65% | 20,000,000 | 77% | 30,000,000 | 88% | 30,000,000 | 88% | 25,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 175,000,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah | 58% | 67 | 652,524,000 | 67 | 185,000,000 | 100 | 137,000,000 | 100 | 217,000,000 | 100 | 242,800,000 | 100 | 257,800,000 | 100 | 1,692,124,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah | 69.64% | 73% | 131,847,600 | 77% | 70,000,000 | 80% | 113,000,000 | 84% | 113,000,000 | 91% | 147,200,000 | 100% | 187,200,000 | 100% | 762,247,600 |
| 2 | 24 | 03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri | 2.56% | 7.69% | 28,152,400 | 12.82% | 10,000,000 | 17.95% | 35,000,000 | 23.08% | 20,000,000 | 28.21% | 25,000,000 | 33.33% | 25,000,000 | 33% | 143,152,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Capaian produksi perikanan tangkap | 79.15 | 81.02 | 22,395,400 | 82.4 | 130,000,000 | 83.6 | 136,500,000 | 84.1 | 136,500,000 | 84.7 | 150,492,000 | 85.8 | 158,000,000 | 85.8 | 733,887,400 |
| | | | | | Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan | 7.51% | 7.51% | 562,720,000 | 7.51% | 540,800,000 | 7.51% | 567,840,000 | 7.51% | 567,840,000 | 7.51% | 626,044,000 | 7.51% | 657,346,000 | 7.51% | 3,522,590,000 |
| | | | | | Cakupan bina kelompok nelayan | 3.95 | 3.95 | 27,780,000 | 15.81 | 1,715,000,000 | 17.79 | 1,715,000,000 | 19.76 | 1,715,000,000 | 21.74 | 1,985,330,000 | 23.72 | 208,500,000 | 23.72 | 7,366,610,000 |
| | | | | | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional | 76.92 | 76.92 | 303,495,000 | 76.92 | 1,834,025,000 | 76.92 | 1,834,025,000 | 76.92 | 1,834,025,000 | 76.92 | 2,123,114,000 | 76.92 | 2,229,200,000 | 76.92 | 10,157,884,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT | 6.57 | 6.57 | 19,824,400 | 6.57 | 50,000,000 | 6.57 | 52,500,000 | 6.57 | 55,125,000 | 6.57 | 57,882,000 | 6.57 | 60,775,000 | 6.57 | 296,106,400 |
| 3 | 25 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase izin usaha perikanan budidaya | 100% | 100 | 0 | 100 | 60,000,000 | 100 | 63,000,000 | 100 | 66,150,000 | 100 | 69,458,000 | 100 | 72,930,000 | 100 | 331,538,000 |
| | | | | | Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil | 5.71 | 5.71 | 13,380,000 | 7.14 | 598,300,000 | 7.14 | 628,215,000 | 7.14 | 628,215,000 | 7.14 | 692,607,000 | 7.14 | 727,238,000 | 7.14 | 3,287,955,000 |
| | | | | | Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil | 9.46% | 18.91 | 12,300,000 | 28.37 | 125,000,000 | 37.83 | 131,250,000 | 47.28 | 137,813,000 | 56.74 | 144,704,000 | 66.19 | 151,940,000 | 56.74 | 703,007,000 |
| | | | | | Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya | 1.71% | 4.57 | 520,250,000 | 7.71 | 3,800,000,000 | 10.57 | 3,800,000,000 | 13.43 | 3,800,000,000 | 16.29 | 3,800,000,000 | 19.14 | 3,800,000,000 | 19.14 | 19,520,250,000 |
| | | | | | Capaian produksi perikanan budidaya | 56.35 | 75.22 | 44,320,000 | 80.2 | 747,000,000 | 85.7 | 747,000,000 | 88.1 | 747,000,000 | 90.2 | 864,745,000 | 91 | 907,984,000 | 91 | 4,058,049,000 |
| | | | | | Capaian produksi garam | - | 8.20% | 0 | 22.2 | 900,000,000 | 36.2 | 900,000,000 | 50.2 | 900,000,000 | 64.2 | 900,000,000 | 78.2 | 1,093,950,000 | 78.2 | 4,693,950,000 |
| | | | | | Capaian produksi benih ikan | 58.57 | 58.57 | 448,200,000 | 61.5 | 522,960,000 | 64.43 | 549,108,000 | 67.36 | 549,108,000 | 70.29 | 605,392,000 | 73.21 | 635,662,000 | 73.21 | 3,310,430,000 |
| | | | | | Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan | 100% | 100% | 215,126,700 | 100% | 168,000,000 | 100% | 176,400,000 | 100% | 176,400,000 | 100% | 194,481,000 | 100% | 204,205,050 | 100% | 1,134,612,750 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 3 | 25 | 05 | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan | - | 80% | 0 | 80% | 98,790,000 | 80% | 103,730,000 | 80% | 103,730,000 | 80% | 114,362,000 | 80% | 120,080,000 | 80% | 540,692,000 |
| 3 | 25 | 06 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil | - | 16 | 0 | 16 | 50,000,000 | 16 | 52,500,000 | 16 | 55,125,000 | 16 | 57,882,000 | 16 | 60,776,000 | 16 | 276,283,000 |
| | | | | | Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil | - | 20 | 0 | 20 | 100,526,000 | 20 | 105,553,000 | 20 | 105,553,000 | 20 | 116,372,000 | 20 | 122,190,000 | 20 | 550,194,000 |
| | | | | | Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan | - | 94.59 | 0 | 94.59 | 25,635,000 | 94.59 | 26,917,000 | 94.59 | 26,917,000 | 94.59 | 29,676,000 | 94.59 | 31,160,000 | 94.59 | 140,305,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | Capaian angka Konsumsi Ikan daerah | 37,21 kg/kapita/ tahun | 37.46 | 0 | 37.71 | 67,035,000 | 37.96 | 70,387,000 | 38.21 | 70,387,000 | 38.46 | 77,600,000 | 38.71 | 81,482,000 | 38.71 | 366,891,000 |
| | | | | | Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | - | 0 | 0 | 0 | 617,680,000 | 16 | 617,680,000 | 16 | 617,680,000 | 16 | 715,000,000 | 16 | 750,800,000 | 16 | 3,318,840,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian | 50 | 55 | 562,324,500 | 60 | 1,000,000,000 | 65 | 1,000,000,000 | 70 | 1,000,000,000 | 75 | 1,000,000,000 | 80 | 1,000,000,000 | 80 | 5,562,324,500 |
| | | | | | Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG) | 0.08 | 0.13 | 0 | 0.16 | 500,000,000 | 0.18 | 500,000,000 | 0.19 | 500,000,000 | 0.21 | 500,000,000 | 0.23 | 500,000,000 | 0.23 | 2,500,000,000 |
| | | | | | Prosentase Benih / Bibit bersertifikat | 5 | 6 | 0 | 7 | 1,000,000,000 | 9 | 1,000,000,000 | 11 | 1,000,000,000 | 12 | 1,000,000,000 | 14 | 1,000,000,000 | 14 | 5,000,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung. RPH. dll) | 50 | 55 | 16,282,374,000 | 60 | 10,000,000,000 | 65 | 7,500,000,000 | 67 | 7,500,000,000 | 70 | 10,000,000,000 | 75 | 11,000,000,000 | 75 | 62,282,374,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 3 | 27 | 04 | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 10 | 13 | 124,732,504 | 15 | 500,000,000 | 17 | 500,000,000 | 20 | 500,000,000 | 23 | 750,000,000 | 25 | 750,000,000 | 25 | 3,124,732,504 |
| 3 | 27 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian | 35 | 40 | 193,030,700 | 45 | 1,000,000,000 | 47 | 1,000,000,000 | 50 | 1,000,000,000 | 55 | 1,000,000,000 | 60 | 1,000,000,000 | 60 | 5,193,030,700 |
| 3 | 27 | 06 | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Prosentase perizinan usaha pertanian | 14 | 15 | 0 | 17 | 200,000,000 | 20 | 300,000,000 | 23 | 300,000,000 | 25 | 300,000,000 | 27 | 350,000,000 | 27 | 1,450,000,000 |
| | | | | | Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan | 15 | 17 | 0 | 19 | 350,000,000 | 20 | 450,000,000 | 22 | 450,000,000 | 24 | 450,000,000 | 25 | 500,000,000 | 25 | 2,200,000,000 |
| 3 | 27 | 07 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan bina kelompok tani | 45 | 50 | 2,330,663,500 | 53 | 2,200,000,000 | 55 | 2,200,000,000 | 57 | 2,200,000,000 | 60 | 2,500,000,000 | 63 | 2,700,000,000 | 63 | 14,130,663,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | **PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 02 | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten | 0% | 0% | 0 | 75.76% | 50,000,000 | 81.82% | 70,000,000 | 87.88% | 150,000,000 | 93.94% | 200,000,000 | 100% | 250,000,000 | 100% | 720,000,000 |
| | | | | | Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten | 0% | 0% | 0 | 20% | 200,000,000 | 40% | 350,000,000 | 60% | 120,000,000 | 80% | 500,000,000 | 100% | 600,000,000 | 100% | 1,770,000,000 |
| | | | | | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten | 0% | 0% | 204,664,000 | 20% | 300,000,000 | 40% | 340,000,000 | 60% | 390,000,000 | 80% | 510,000,000 | 100% | 520,000,000 | 100% | 2,264,664,000 |
| | | | | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 0% | 0% | 0 | 16.67% | 150,000,000 | 33.33% | 150,000,000 | 52.78% | 120,000,000 | 75% | 150,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 720,000,000 |
| 3 | 26 | 03 | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten | 0% | 2.03% | 1,114,376,000 | 21.62% | 1,093,000,000 | 41.22% | 1,298,600,000 | 60.81% | 1,535,320,000 | 80.41% | 1,816,384,000 | 100% | 2,171,660,800 | 100% | 9,029,340,800 |
| | | | | | Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten | 1,374,043 | 6,553,829 | 104,548,500 | 2,003,000 | 72,000,000 | 2,403,200 | 86,400,000 | 2,903,600 | 103,680,000 | 3,504,000 | 124,416,000 | 4,304,600 | 149,299,200 | 5,105,200 | 640,343,700 |
| 3 | 26 | 04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI | Persentase Produk dan atau Karya Ekraf | 0% | 0% | 0 | 0% | 180,430,000 | 25% | 250,000,000 | 50% | 250,000,000 | 75% | 500,000,000 | 100% | 450,000,000 | 100% | 1,630,430,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | terdaftar HAKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar | 0% | 0% | 195,016,500 | 8.86% | 95,000,000 | 36.71% | 295,000,000 | 54.43% | 195,000,000 | 82.28% | 295,000,000 | 100% | 195,000,000 | 100% | 1,270,016,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 02 | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan | 95.14% | 95 | 0 | 95 | 29,500,000 | 95 | 29,500,000 | 95 | 29,500,000 | 95 | 29,500,000 | 95 | 29,500,000 | 95 | 147,500,000 |
| 3 | 30 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Peningkatan Omzet Pedagang | 2 | 2 | 968,136,730 | 2 | 1,739,000,000 | 2 | 1,739,000,000 | 2 | 1,754,000,000 | 2 | 2,000,000,000 | 2 | 2,100,000,000 | 10 | 10,300,136,730 |
| 3 | 30 | 04 | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 100 | 100 | 29,125,000 | 100 | 210,000,000 | 100 | 320,000,000 | 100 | 320,000,000 | 100 | 280,000,000 | 100 | 345,000,000 | 100 | 1,504,125,000 |
| 3 | 30 | 05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai ekspor (U$ dalam juta dollar) | 1000 | 500 | 60,000,000 | 600 | 1,000,000,000 | 700 | 850,000,000 | 800 | 850,000,000 | 900 | 850,000,000 | 1000 | 850,000,000 | 1000 | 4,460,000,000 |
| 3 | 30 | 06 | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal | 0.9 | 0.9 | 190,000,000 | 1 | 800,000,000 | 1.5 | 850,000,000 | 2 | 400,000,000 | 2.5 | 450,000,000 | 3 | 450,000,000 | 3 | 3,140,000,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 3 | 30 | 07 | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 4 | 600,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan industri baru | 0.29% | 1 | 73,113,426 | 1 | 445,000,000 | 1 | 350,000,000 | 1 | 305,000,000 | 1 | 310,000,000 | 1 | 315,000,000 | 5 | 1,798,113,426 |
| 3 | 31 | 03 | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA | Prosentase perizinan usaha industri | 100 | 100 | 21,750,000 | 100 | 43,500,000 | 100 | 56,000,000 | 100 | 56,000,000 | 100 | 56,000,000 | 100 | 56,000,000 | 100 | 289,250,000 |
| 3 | 31 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Cakupan layanan sistem informasi industri nasional | 98.82 | 98.82 | 0 | 98.83 | 120,000,000 | 98.84 | 120,000,000 | 98.85 | 120,000,000 | 98.86 | 120,000,000 | 98.87 | 120,000,000 | 98.87 | 600,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program | 100 | 100 | 14,514,816,400 | 100 | 15,323,573,347 | 100 | 19,367,845,000 | 100 | 19,363,504,594 | 100 | 19,391,278,135 | 100 | 19,502,462,664 | 600 | 107,463,480,139 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | | pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | 100 | 100 | 42,339,454,446 | 100 | 41,949,594,278 | 100 | 29,064,560,000 | 100 | 29,211,522,121 | 100 | 29,253,420,911 | 100 | 29,421,152,395 | 600 | 201,239,704,151 |
| 4 | 01 | 03 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | 100 | 100 | 4,482,054,996 | 100 | 4,147,870,562 | 100 | 4,852,850,854 | 100 | 4,860,060,598 | 100 | 4,867,031,500 | 100 | 4,894,937,789 | 600 | 28,104,806,299 |
| | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 02 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD | 100 | 100 | 47,357,695,400 | 100 | 47,357,695,400 | 100 | 47,357,695,400 | 100 | 47,357,695,400 | 100 | 47,357,695,400 | 100 | 47,357,695,400 | 100 | 284,146,172,400 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu | 100 | 100 | 2,720,485,367 | 100 | 2,597,178,000 | 100 | 2,750,000,000 | 100 | 3,000,000,000 | 100 | 3,200,000,000 | 100 | 3,140,949,000 | 100 | 17,508,612,367 |
| 5 | 01 | 03 | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan Pelaksanaan Kegiatan pada perangkat daerah | 100 | 100 | 3,860,462,150 | 100 | 4,000,000,000 | 100 | 4,000,000,000 | 100 | 4,000,000,000 | 100 | 4,000,000,000 | 100 | 4,200,000,000 | 100 | 24,060,462,150 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 100% | 9,947,283,417 | 100% | 11,500,000,000 | 100% | 11,500,000,000 | 100% | 11,500,000,000 | 100% | 11,500,000,000 | 100% | 12,800,000,000 | 100% | 68,747,283,417 |
| 5 | 02 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. | Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah. | 8 | 8 | 1,057,908,000 | 8 | 1,800,000,000 | 8 | 2,000,000,000 | 8 | 2,000,000,000 | 8 | 2,000,000,000 | 8 | 2,000,000,000 | 40 | 10,857,908,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 5 | 02 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah | 92.13% | 100% | 4,566,127,800 | 100% | 7,075,636,700 | 100% | 7,269,856,300 | 100% | 7,596,175,900 | 100% | 7,768,765,500 | 100% | 7,889,860,100 | 100% | 42,166,422,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar | 5% | 7% | 1,470,761,000 | 10% | 3,507,000,000 | 20% | 4,382,316,000 | 20% | 5,446,900,000 | 20% | 5,677,848,000 | 20% | 5,663,480,000 | 97% | 26,148,305,000 |
| 5 | 03 | 02 | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian | 94,90% | 95,00 % | 3,288,399,500 | 95,5% | 3,161,144,000 | 96,00% | 3,743,984,000 | 96,50% | 3,554,400,000 | 97.00% | 3,850,952,000 | 97.50% | 3,865,320,000 | 97,50% | 21,464,199,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan | 100 | 100 | 821,347,000 | 100 | 903,481,700 | 100 | 993,829,870 | 100 | 1,093,212,857 | 100 | 1,202,534,143 | 100 | 1,322,787,557 | 100 | 6,337,193,127 |
| | | | | | Prosentase dukungan inovasi daerah | 100 | 100 | 425,946,000 | 100 | 530,000,000 | 100 | 600,000,000 | 100 | 850,000,000 | 100 | 850,000,000 | 100 | 900,000,000 | 100 | 4,155,946,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| | | | | **UNSUR PENGAWASAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan | 100 | 100 | 1,372,866,600 | 100 | 3,729,051,857 | 100 | 3,965,871,346 | 100 | 4,147,432,953 | 100 | 4,347,150,722 | 100 | 4,566,840,267 | 100 | 22,129,213,743 |
| 6 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah | 100 | 100 | 1,866,304,000 | 100 | 5,296,504,867 | 100 | 5,618,442,307 | 100 | 5,865,261,011 | 100 | 6,150,255,267 | 100 | 6,350,255,267 | 100 | 31,147,022,717 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan | 100 | 100 | 7,000,000,000 | 100 | 18,300,000,000 | 100 | 18,300,000,000 | 100 | 18,300,000,000 | 100 | 18,300,000,000 | 100 | 18,300,000,000 | 100 | 170,010,803,000 |
| 7 | 01 | 03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan | 100 | 100 | 3,081,722,700 | 100 | 3,081,722,700 | 100 | 3,081,722,700 | 100 | 3,081,722,700 | 100 | 3,081,722,700 | 100 | 3,081,722,700 | 100 | 18,490,336,200 |
| 7 | 01 | 05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | 100 | 100 | 16,993,811,500 | 100 | 23,844,577,300 | 100 | 23,844,577,300 | 100 | 23,844,577,300 | 100 | 23,844,577,300 | 100 | 23,844,577,300 | 100 | 31,452,066,000 |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI AKHIR PERENCANAAN | |
| | | | | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. |
| 7 | 01 | 04 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan | 100 | 100 | 2,473,700,000 | 100 | 2,473,700,000 | 100 | 2,473,700,000 | 100 | 2,473,700,000 | 100 | 2,473,700,000 | 100 | 2,473,700,000 | 100 | 14,842,200,000 |
| 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan desa dibina | 100 | 100 | 6,450,765,800 | 100 | 6,450,765,800 | 100 | 6,450,765,800 | 100 | 6,450,765,800 | 100 | 6,450,765,800 | 100 | 6,450,765,800 | 100 | 38,704,594,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah | | 100 | 1,330,603,625,039 | 100 | 1,381,475,706,592 | 100 | 1,395,039,849,169 | 100 | 1,400,308,804,111 | 100 | 1,408,016,176,987 | 100 | 1,413,782,477,267 | 100 | 8,328,457,339,263 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **3,056,711,791,009** | | **2,999,424,274,982** | | **3,064,679,872,268** | | **3,143,133,547,884** | | **3,150,982,575,372** | | **3,200,835,608,203** | | **18,427,537,289,555** |

# BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

*"Bab memuat indikator kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan."*

Kerangka Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Serang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Serang**

| No | Indikator Kinarja | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | **Indikator Makro** | | | | | | |
| **1** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **3,41** | **2,97** | **2,42** | **1,78** | **2,72** | **2,56** |
| **2** | **Laju Inflasi** | **1,5** | **1,59** | **1,65** | **1,93** | **1,32** | **2,46** |
| **3** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **67,00** | **67,29** | **67,57** | **67,83** | **68,08** | **68,31** |
| **4** | **Persentase tingkat Kemiskinan** | **4,50** | **4,22** | **4,18** | **4,10** | **4,08** | **4,04** |
| **5** | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **12,00** | **11,89** | **11,55** | **11,22** | **11,00** | **10,88** |
| | | | | | | | |
| | **Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah** | | | | | | |
| **1** | **Angka Rata Rata Lama Sekolah** | 7,64 | 7,79 | 7,93 | 8,07 | 8,22 | 8,36 |
| **2** | **Angka Rata Rata Harapan Bersekolah** | 12,75 | 12,94 | 13,12 | 13,30 | 13,48 | 13,67 |
| | Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan | 48,10 | 48,72 | 49,31 | 49,91 | 50,51 | 51,11 |
| **2.** | **Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan** | 41.38% | 48.28% | 58.62% | 79.31% | 93.10% | 100% |
| | Cakupan seni budaya dan kearifan lokal skala kabupaten dan nasional | 41.38% | 48.28% | 58.62% | 79.31% | 93.10% | 100% |
| **3.** | **Angka Harapan Hidup (AHH)** | 64,85 | 65,06 | 65,26 | 65,47 | 65,68 | 65,89 |
| | Angka kematian ibu | 202 | 200 | 194 | 183 | 182 | 180 |
| | Angka kematian bayi | 8,27 | 8,25 | 8.23 | 8.21 | 8.19 | 8.17 |
| | Angka Prevelensi Stunting | 21,1% | 18,4% | 16% | 14% | 13,5% | 13% |
| | Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |

| No | Indikator Kinarja | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **4.** | **Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur** | 50% | 52,5% | 55% | 57,5% | 60% | 62,5% |
| | Cakupan aksesibilitas antar wilayah | 96,1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum | 87,12 | 87,73 | 88,34 | 88,96 | 89,57 | 90,18 |
| | Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestic | 71,47 | 72,09 | 72,70 | 73,31 | 73,93 | 74,54 |
| | Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | Persentase kawasan kumuh | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| | Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi | 35 | 41.66 | 48,33 | 55 | 61.66 | 68,33 |
| | Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik | 51,85% | 52,5% | 55,56% | 58,08% | 60,96% | 63,89% |
| | Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik | 96 | 62.5 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 72.1 |
| | Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 100 |
| | Cakupan ketersediaan air baku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Indeks kualitas Air | 49.75 | 50.25 | 50.75 | 51.25 | 51.75 | 52.25 |
| | Indeks Kualitas udara | 82.5 | 82.75 | 83 | 83.25 | 83.5 | 83.75 |
| | Indeks tutupan Vegetasi | 69.985 | 69.99 | 69.995 | 70 | 70.005 | 70.01 |
| | Persentase Penanganan Sampah | 15.03 | 17.44 | 19.85 | 22.27 | 24.68 | 27.09 |
| | Persentase Rumah Layak Huni | 89.26% | 89.88% | 90.49% | 91.10% | 91.72% | 92.33% |
| **5** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** | 3,41 | 2,97 | 2,42 | 1,78 | 2,72 | 2,56 |
| **6.** | **Inflasi** | 1,5 | 1.23 | 1.5 | 1.59 | 1.65 | 1.93 |
| **7** | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | 12 | 11.89 | 11.55 | 11.22 | 11 | 10.88 |

| No | Indikator Kinarja | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian | 3.07 | 2.82 | 2.84 | 3.19 | 2.98 | 2.96 |
| | Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan | 2.8 | 1.99 | 1.48 | 1.61 | 1.97 | 1.76 |
| | Proporsi peningkatan SHU koperasi | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| | Pertumbuhan Wirausaha | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB | 2.06 | 1.43 | 0.70 | 0.06 | 1.03 | 0.77 |
| | Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB | 3.99 | 3.58 | 3.22 | 2.28 | 3.27 | 3.09 |
| | Pertumbuhan Nilai Investasi daerah<br>PMA<br>PMDN | <br>3%<br>3% | <br>3%<br>3% | <br>3%<br>3% | <br>3%<br>3% | <br>3%<br>3% | <br>3%<br>3% |
| | Kontribusi PAD Pariwisata | 17.000.000.000 | 17.010.000.000 | 17.020.000.000 | 17.030.000.000 | 17.040.000.000 | 17.050.000.000 |
| | Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM | 15.03 | 15.95 | 16.87 | 17.79 | 18.71 | 19.63 |
| | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| **8** | **Persentase Tingkat Kemiskinan** | 4.5 | 4.22 | 4.18 | 4.1 | 4.08 | 4.04 |
| **9** | **Indeks Gini Rasio** | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Pangan | 77.10% | 77.15% | 77.20% | 77.30% | 77.40% | 77.50% |
| | Prosentase PMKS yang tertangani | 17.38% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,02 | 92,06 | 92,10 | 92,14 | 92,18 | 92,22 |
| | Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | Total Fertility Rate | 2,29 | 2,26 | 2,24 | 2,21 | 2,19 | 2,1 |
| **10** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | B | B | B | BB | BB | BB |
| | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Nilai LPPD | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| | Nilai SAKIP | BB | BB | BB | BB | BB | A |
| | Jmlh opd pelayanan melaksanakan Zona inteegritas (ZI) WBBM WBK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Indikator Kinarja | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Tingkat Maturitas SPIP | 3,11 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,00 |
| | Tingkat Pertumbuhan PAD | 4.07% | 1.12% | 3.28% | 3.33% | 3.39% | 3.44% |
| | Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daera | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indek Inovasi Daerah | inovatif | inovatif | inovatif | inovatif | inovatif | inovatif |
| | Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan | 50,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% |
| | Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik | 94% | 95% | 93% | 96% | 97% | 97% |
| | Cakupan standar kompetensi pegawai | 94.10% | 94.50% | 95.00% | 95.50% | 96.00% | 96.00% |
| | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Indeks Kematangan Penerapan SPBE | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 3 | 3.01 |
| | Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI) | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 175 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | B | B | B | B | B | B |
| | Cakupan kepemilikan dokumen adminduk | 83.23 | 84.8 | 87.4 | 89.8 | 92.2 | 94.6 |
| | Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan | 42.00% | 60.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100% |
| | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital | 44.64% | 53.57% | 62.50% | 71.43% | 80.36% | 100% |
| | Cakupan kepemilikan dokumen adminduk | 83,23 | 84,8 | 87,4 | 89,8 | 92,2 | 94,6 |
| | Indeks Risiko Bencana | 203,10 | 203,05 | 203,00 | 202,80 | 202,50 | 200,00 |
| | Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| **11** | **Indeks Kerukunan Umat Beragama** | 86.9 | 87.4 | 87.95 | 88.5 | 89 | 89.5 |
| | Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **A.** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| | **Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | | | | | |
| **1** | **KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | % | 35.00 | 40.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 100 |
| 1.2 | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | % | 95 | 95.25 | 95.35 | 95.4 | 95.45 | 95.5 | 95.55 | 100 |
| 1.3 | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | % | 88.9 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 |
| 1.4 | Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan | % | 5.52% | 3.68 | 3.07 | 2.45 | 1.84 | 1.23 | 0.61 | 0.61 |
| 1.5 | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan | % | 85 | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **B.** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| | **Pelayanan Urusan Wajib** | | | | | | | | | |
| | Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **1.** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | APM SD | % | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | APM SMP | % | 99,45 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | APK PAUD | % | 85,28 | 100,00 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 93 |
| 1.4 | Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/esetaraan | % | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Capaian SPM Bidang Pendidikan | % | 83,05 | 83.10 | 83.15 | 83.20 | 83.25 | 83.30 | 83.35 | 83.35 |
| 1.6 | Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap rombel | % | 78,21 | 78,21 | 81,21 | 84,21 | 87,21 | 90,21 | 93,21 | 93,21 |
| 1.8 | Prosentase izin pendidikan dasar. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **2.** | **KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan | % | 74% | 74 | 85 | 90 | 90 | 95 | 98 | 98 |
| 2.3 | Prosentase Desa Stop BABS | % | 15 % | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| 2.4 | Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes | % | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Prosentase Posyandu aktif | % | 55 % | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 2.6 | Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | % | 0 % | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.7 | Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8 | Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan | % | 80.07% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 2.10 | Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik | % | 66% | 66% | 72% | 76% | 83% | 86% | 90% | 90% |
| 2.11 | Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi | % | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| 2.12 | Tingkat Penerimaan Pendapatan RS | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di Kabupaten Serang | % | 16.7 | 16.7 | 25 | 33.33 | 41.7 | 50 | 58.3 | 58.3 |
| 3.2 | Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten | % | | 20.24 | 29.12 | 36.11 | 51.53 | 56.13 | 65.64 | 9.43 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3 | Cakupan infrastruktur jalan kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah | % | 83 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 93 | 94 | 94 |
| 3.5 | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | % | **99.99** | **99.99** | **13.80** | **18.18** | **23.30** | **28.43** | **34.83** | **100** |
| 3.6 | Persentase Infrastruktur Air Baku dalam Kondisi Baik | % | 39 | 39 | 10.2 | 18.75 | 30.11 | 41.47 | 55 | 55 |
| | | | | | | | | | | |
| **4.** | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM | % | 88.58 | 89.01 | 89.53 | 89.95 | 90.35 | 90.73 | 91.08 | 91.08 |
| 4.2 | Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik | % | 65.92 | 67.01 | 68.62 | 69.9 | 71.07 | 72.18 | 73.27 | 73.27 |
| 4.3 | Persentase Prasarana Permukiman pada kawasan strategis yang tertangani | % | | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4 | Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB | % | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 4.5 | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur | % | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 4.6 | Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh | % | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 4.7 | Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh | | 6.5 | 6.82 | 18.18 | 22.22 | 28.57 | 40 | 66.67 | 66.67 |
| 4.8 | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.9 | Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.10 | Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan | % | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.11 | Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi | % | 10% | 10% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30% |
| | | | | | | | | | | |
| **5.** | **KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani | % | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 5.2 | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.3 | Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.4 | Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| **6.** | **SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial | % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 6.2 | Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.3 | Cakupan rehabilitasi sosial | % | 35,46% | 16% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 36.15% |
| 6.4 | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial | % | 5,57% | 5% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.40% |
| 6.5 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.6 | Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **1.** | **KETENAGAKERJAAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cakupan perencanaan ketenagakerjaan | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3 | Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal | % | 13.38% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% |
| 1.4 | Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial | % | 71.56% | 72.56 | 74.56 | 75.56 | 76.56 | 78.56 | 79.56 | 80 |
| 1.5 | Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan | KK | n/a | 10KK | 15KK | 18KK | 25KK | 30KK | 35KK | 133KK |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **2.** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | |
| 2.1 | presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS | % | 44.59% | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48 |
| 2.3 | cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai | % | 31.07 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.5 | Prosentase kecamatan dan desa layak anak yang aktif | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 2.6 | cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai | % | 26.55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **3.** | **PANGAN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | % | 35.00 | 40.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 100 |
| 3.2 | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | % | 95 | 95.25 | 95.35 | 95.4 | 95.45 | 95.5 | 95.55 | 100 |
| 3.3 | Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | % | 88.9 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80 |
| 3.4 | Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan | % | 5.52% | 3.68 | 3.07 | 2.45 | 1.84 | 1.23 | 0.61 | 0.61 |
| 3.5 | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan | % | 85 | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | | | | | | | | |
| **4.** | **PERTANAHAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3 | Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| **5.** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses | Dok | 3 Dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 18 dok |
| 5.2 | Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L | Sampel | 250 Sampel | 250 Sampel | 300 Sampel | 300 Sampel | 300 Sampel | 300 Sampel | 300 Sampel | 1.750 sampel |
| 5.3 | Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.4 | Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.5 | Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup | Lembaga Kemasyarakatan/ Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan | 100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.6 | tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup | Kelompok | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 5 Kelompok | 6 Kelompok | 7 Kelompok | 8 Kelompok | 9 Kelompok | 9 Kelompok |
| 5.7 | Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.8 | Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L | Ha | 2 Ha | 2 Ha | 2 Ha | 2 Ha | 2 Ha | 2 Ha | 2 Ha | 10 Ha |
| 5.9 | Persentase sampah terangkut | % | 11.53% | 11.99% | 14.39% | 16.78% | 19.18% | 21.58% | 23.98% | 23.98% |
| | Persentase sampah terkurangi | % | 3% | 3.02% | 3.04% | 3.05% | 3.07% | 3.08% | 3.10% | 3.10% |
| | | | | | | | | | | |
| **6.** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.2 | Prosentase meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.3 | Prosentase meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.4 | Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **7.** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa | % | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.2 | Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi | % | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.3 | Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa | % | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.4 | Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina | % | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| **8.** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraseptive Prevalensi Rate/m CPR ) | | 76.16 | 69,16 | 69,66 | 70,16 | 70,66 | 71,16 | 71,66 | 71,66 |
| 8.2 | prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | Prosentase anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKS aktif ber KB | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | |
| **9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase layanan angkutan darat | % | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 9.2 | Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut | % | 0 | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.25 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.3 | Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin | % | 0 | 0.00% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0.2 |
| 9.4 | Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin | % | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | | | | | | | | | | |
| **10.** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) | % | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 10.2 | Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 10.3 | Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah | % | 40% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100 | 100% |
| 10.4 | Persentase Penerapan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah | % | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **11.** | **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.2 | Tingkat pengawasanKoperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi | | 0 | 0 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | #REF! |
| 11.3 | Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat | % | 16.67% | 22.15% | 25.68% | 28.90% | 31.86% | 34.57% | 37.08% | 34.57% |
| 11.4 | Persentase SDM Koperasi terlatih | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.5 | Persentase Partisipasi Koperasi Aktif | % | 74.72% | 75.33 | 76.18 | 76.97 | 77.72 | 78.42 | 79.07 | 78.42 |
| 11.6 | Persentase Partisipasi Usaha Mikro | % | 3.31% | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 11.7 | Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil | % | 15,16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **12.** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |
| 12.1 | NIlai investasi | Trilyun | 7.90 Trilyun | 5.44 Trilyun | 5.60 Trilyun | 5.77 Trilyun | 5.95 Trilyun | 6.12 Trilyun | 6.30 Trilyun | 6.49 Trilyun |
| 12.2 | Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12.3 | Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12.4 | Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12.5 | Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| **13.** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | % | 96.67% | 96.67% | 97.50% | 97.52% | 98.35% | 98.36% | 99.18% | 99.18% |
| 13.2 | Persentase Wirausaha Muda | % | 31.38% | 32.71% | 34.04% | 35.37% | 36.70% | 38.03% | 39.36% | 39.36% |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.3 | Jumlah Pemuda yang Dibina | Orang | 137 Orang | 855 Orang | 1.730 Orang | 2.605 Orang | 3.480 Orang | 4355 Orang | 5.230 Orang | 5.230 Orang |
| 13.4 | Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka | % | 99.79% | 99.79% | 99.83% | 99.88% | 99.92% | 99.96% | 100% | 100% |
| 13.5 | Jumlah atlet muda yang dibina | Atlet | 246 Atlet | 224 Atlet | 704 Atlet | 1.494 Atlet | 1.974 Atlet | 2.764 Atlet | 3.244 Atlet | 3.244 Atlet |
| 13.6 | Cakupan pembinaan olahraga | % | 90.57% | 90.57% | 92.45% | 94.34% | 96.23% | 98.11% | 100% | 100% |
| 13.7 | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | % | 1.64% | - | 12.05% | 16.88% | 21.70% | 26.52% | 31.34% | 31.34% |
| | | | | | | | | | | |
| **14.** | **STATISTIK** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Tingkat ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah | % | 14% | 14% | 17% | 31% | 45% | 55% | 70% | 70% |
| | | | | | | | | | | |
| **15.** | **PERSANDIAN** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | % | 41% | 41% | 48% | 51% | 58% | 65% | 68% | 68% |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **16.** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Cakupan kelompok budaya yang dibina | | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 42,50 | 57,50 | 67,50 | 72,50 | 72,50 |
| 16.2 | Cakupan kelompok kesenian yangdibina | | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 42,50 | 57,50 | 67,50 | 72,50 | 72,50 |
| 16.3 | Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan | | 0,00 | 0 | 9,36 | 12,49 | 18,73 | 28,09 | 31,32 | 31,32 |
| 16.4 | Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 25,64 | 25,65 | 38,46 | 51,28 | 64,10 | 84,62 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **17.** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan | % | 92.06% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17.2 | Persentase pembinaan perpustakaan Desa | % | 100% | 54% | 65% | 77% | 88% | 88% | 100% | 100% |
| 17.3 | Persentase pelayanan Perpustakaan Daerah | % | 58% | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **18.** | **KEARSIPAN** | | | | | | | | | |
| 18.1 | Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah | % | 69.64% | 73% | 77% | 80% | 84% | 91% | 100% | 100% |
| 18.2 | Prosentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri | % | 2.56% | 7.69% | 12.82% | 17.95% | 23.08% | 28.21% | 33.33% | 33.33% |
| | | | | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| **1.** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Capaian produksi perikanan tangkap | | 79.15 | 81.02 | 82.4 | 83.6 | 84.1 | 84.7 | 85.8 | 85.8 |
| 1.2 | Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan | % | 7.51% | 7.51% | 7.51% | 7.51% | 7.51% | 7.51% | 7.51% | 7.51% |
| 1.3 | Cakupan bina kelompok nelayan | | 3.95 | 3.95 | 15.81 | 17.79 | 19.76 | 21.74 | 23.72 | 23.72 |
| 1.4 | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional | % | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |
| 1.5 | Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT | % | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
| 1.6 | Persentase izin usaha perikanan budidaya | % | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7 | Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil | | 5.71 | 5.71 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
| 1.8 | Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil | % | 9.46% | 18.91 | 28.37 | 37.83 | 47.28 | 56.74 | 66.19 | 56.74 |
| 1.9 | Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya | % | 1.71% | 4.57 | 7.71 | 10.57 | 13.43 | 16.29 | 19.14 | 19.14 |
| 1.10 | Capaian produksi perikanan budidaya | | 56.35 | 75.22 | 80.2 | 85.7 | 88.1 | 90.2 | 91 | 91 |
| 1.11 | Capaian produksi garam | | - | 8.20% | 22.2 | 36.2 | 50.2 | 64.2 | 78.2 | 78.2 |
| 1.12 | Capaian produksi benih ikan | | 58.57 | 58.57 | 61.5 | 64.43 | 67.36 | 70.29 | 73.21 | 73.21 |
| 1.13 | Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.14 | Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan | | - | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 1.15 | Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil | | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.16 | Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil | | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.17 | Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan | | - | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |
| 1.18 | Capaian angka Konsumsi Ikan daerah | kg/kapita/tahun | 37,21 kg/kapita/tahun | 37.46 | 37.71 | 37.96 | 38.21 | 38.46 | 38.71 | 38.71 |
| 1.19 | Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | | - | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | |
| **2.** | **PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 2.2 | Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG) | | 0.08 | 0.13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| 2.3 | Prosentase Benih / Bibit bersertifikat | % | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4 | Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung. RPH. dll) | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 75 |
| 2.5 | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 |
| 2.6 | Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian | | 35 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 2.7 | Prosentase perizinan usaha pertanian | % | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 2.8 | Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan | % | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| 2.9 | Cakupan bina kelompok tani | | 45 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 63 |
| | | | | | | | | | | |
| **3.** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan | % | 95.14% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Persentase Peningkatan Omzet Pedagang | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3.3 | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Nilai ekspor (U$ dalam juta dollar) | Dalam Juta Dollar | 1000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| 3.5 | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal | % | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 3.6 | Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| **4.** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pertumbuhan industri baru | % | 0.29% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4.2 | Prosentase perizinan usaha industri | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Cakupan layanan sistem informasi industri nasional | | 98.82 | 98,82 | 98,83 | 98,84 | 98,85 | 98,86 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5** | **PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten | % | 0% | 0% | 75.76% | 81.82% | 87.88% | 93.94% | 100% | 100% |
| 5.2 | Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten | % | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% |
| 5.3 | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten | % | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% |
| 5.4 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | % | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 52.78% | 75% | 100% | 100% |
| 5.5 | Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten | % | 0% | 2.03% | 21.62% | 41.22% | 60.81% | 80.41% | 100% | 100% |
| 5.6 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten | Orang | 1,374,043 | 6,553,829 | 2,003,000 | 2,403,200 | 2,903,600 | 3,504,000 | 4,304,600 | 5,105,200 |
| 5.7 | Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI | % | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 5.8 | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar | % | 0% | 0% | 8.86% | 36.71% | 54.43% | 82.28% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| **1.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| **1.** | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prosentase terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Prosentase tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.** | **KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2 | Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah. | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 2.3 | Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah | % | 92.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| **3.** | **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar | % | 5.00% | 7.00% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 97% |
| 3.2 | Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian | % | 94,90% | 95,00% | 95,50% | 96,00% | 96,50% | 97,00% | 97,50% | 97,50% |
| | | | | | | | | | | |
| **3.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Prosentase dukungan inovasi daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| **4.** | **UNSUR PENGAWASAN** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| **5.** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| 5.1 | CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.3 | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Persentase pemerintahan desa dibina | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |
| **6.** | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |

# BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 merupakan dokumen penerjemahan janji kampanye pasangan Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. dan Drs. H. Pandji Tirtayasa, M.Si. Keduanya secara resmi telah ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang terpilih sesuai hasil Pilkada serentak tahun 2020. Di dalam RPJMD ini berisi penjabaran visi "Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis", dan enam poin misi, serta program keduanya sebagai pemimpin sah Kabupaten Serang selama periode 2021-2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 akan menjadi panduan bagi berbagai stakeholders dalam proses pembangunan Kabupaten Serang selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026, RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026.

RPJMD ini merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi berbagai stakeholders dalam proses pembangunan Kabupaten Serang selama periode lima tahun (2021–2026) mendatang. Dokumen sembilan bab ini juga merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Kabupaten Serang 2006–2026 yang pada periode terakhir ini diharapkan mencapai cita-cita 'Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis'.

Pada akhirnya, implementasi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini diharapkan didukung oleh semua komponen mulai dari lingkup pemerintah, anggota legislatif, dunia usaha, akademisi, dan terutama masyarakat Serang yang menjadi subjek sekaligus penerima kebijakan. Berbagai dukungan dari seluruh pihak berlandaskan semboyan 'Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe' menjadi daya dorong untuk merealisasikan program dan target yang telah tertuang dalam RPJMD ini, dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Serang yang telah dirumuskan.